



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran antara rencana Sektoral dan Daerah, maka dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009;
 - b. bahwa target kinerja Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat hanya dilakukan melalui Investasi Pemerintah Provinsi, namun harus dilakukan pula oleh investasi Pemerintah Kabupaten/Kota, Pusat maupun Investasi Swasta.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4710);
 7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4096);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009 ;
 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004, Seri D, Nomor 1);
 23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004, Seri D, Nomor 2);
 24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004, Seri D, Nomor 3);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005, Seri E, Nomor 3);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007, Nomor 4);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007, Nomor 7);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008, Nomor 4);
 29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah, Musrenbang Tahunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006, Nomor 18, Seri E);
 30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006, Nomor 29);

31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
32. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2008;
33. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tatakerja Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009.
6. RKP adalah Rencana Kerja Pemerintah.

Pasal 2

RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam jangka waktu satu tahun yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI DAERAH

BAB III : RANCANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

BAB IV : PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

BAB V : ARAH, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

BAB VI : TEMA, PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN KEWILAYAHAN

BAB VII : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB VIII : RINGKASAN PENDANAAN

BAB IX : PENUTUP

Pasal 3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Provinsi maupun dukungan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Uraian secara rinci RKPD dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan RKPD.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Juli 2008**

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

ttd

**TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 110 023 446**

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

**DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001**

LAMPIRAN

**PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2008
TANGGAL 25 JULI 2008**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (RKPD Provinsi DIY) Tahun 2009 adalah dokumen resmi tahunan yang mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, dihasilkan melalui tahapan arahan gubernur, forum SKPD, dan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang tingkat provinsi sebagai bagian tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, merupakan forum koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan untuk mengharmoniskan dan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan di daerah.

RKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 juga merupakan bahan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009 (RKP Tahun 2009) yang dihasilkan melalui forum Rapat Koordinasi Pusat dan Musrenbang Nasional. Untuk mendapatkan keselarasan antara RKPD dan RKP, maka penyusunan RKP memerlukan masukan dari daerah, khususnya yang akan mempengaruhi kegiatan pembangunan di daerah yang terkait dengan pendanaan program dan kegiatan APBN, baik dekonsentrasi, tugas pembantuan, maupun sumber-sumber lain yang syah termasuk pinjaman luar negeri.

Dengan adanya Musrenbang diharapkan berbagai keinginan dan kebutuhan terhadap kegiatan pembangunan yang dirasakan mendesak oleh SKPD dapat disampaikan untuk dapat dibiayai baik dari APBN, APBD, maupun dari sumber dana lainnya.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah RKPD Provinsi DIY Tahun 2009 memuat Rencana kerja SKPD yang akan dilaksanakan pada tahun 2009, Prioritas Pembangunan Daerah, Indikator Hasil program, Penanggung Jawab Program, serta Rincian Pembiayaan untuk mencapai sasaran program. Dengan demikian RKPD mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah.
3. Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD.
4. Sebagai dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD, dan APBD.
5. Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah.
6. Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur capaian target Standar Pelayanan Minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD.

7. Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur Capaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mengukur kinerja pelayanan SKPD.
8. Instrumen bagi Pemerintah Daerah sebagai acuan penyusunan LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD, dan ILPPD kepada masyarakat.
9. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan RKPD Provinsi DIY Tahun 2009 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 - 2009;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
24. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
27. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2008;
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah, Musrenbang Tahunan Daerah;
29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9/KEP/2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
32. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tatakerja Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKPD

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mensinergikan program-program regional dan sektoral, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah,

rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun tujuannya adalah untuk acuan bagi seluruh Instansi/Kanwil/ Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/ Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2009.

D. DASAR PEMIKIRAN

Sehubungan dengan berakhirnya dokumen Rencana Strategis Daerah Propinsi DIY Tahun 2004-2008, seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur DIY, maka dibutuhkan dokumen perencanaan lanjutan ("antara") sebagai bahan acuan untuk perencanaan pada tahun 2009, sehingga roda pemerintahan di Propinsi DIY tetap berlangsung.

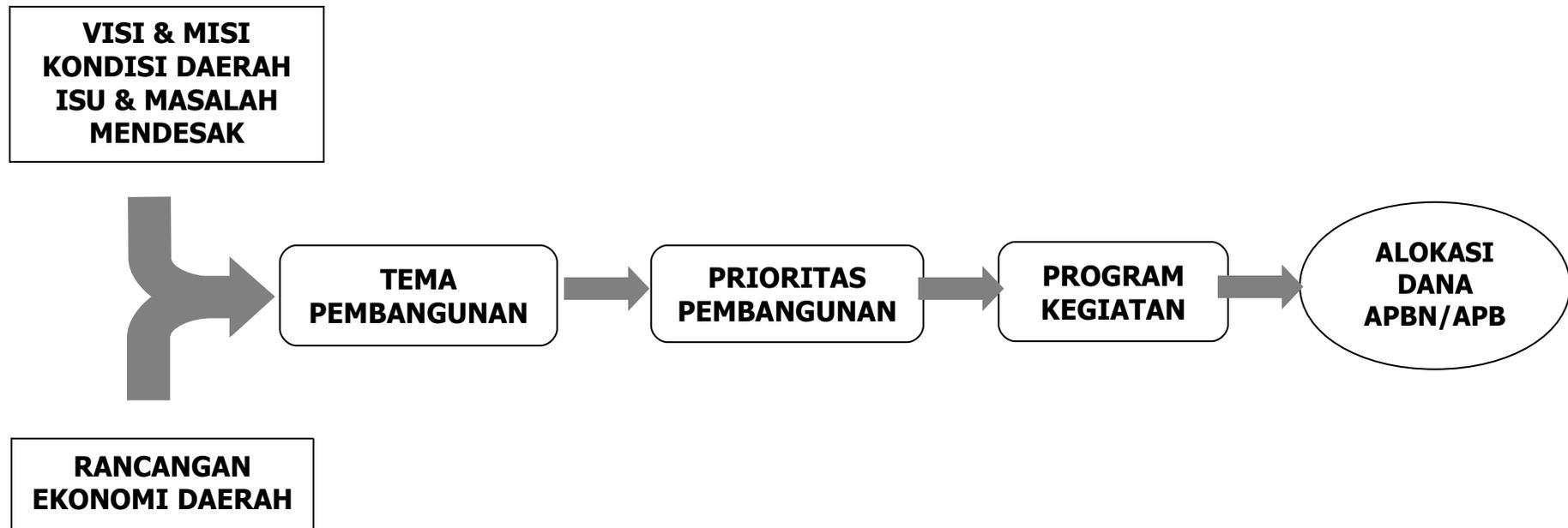
Pemerintah Propinsi DIY sebagai daerah otonom, mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Berdasarkan hal tersebut, Propinsi DIY perlu memiliki konsepsi perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan di daerah.

Kevakuman dokumen perencanaan sebagai landasan untuk menyusun kebijakan pembangunan pada tahun 2009, dapat diantisipasi dengan memperhatikan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi DIY Tahun 2001-2005, yang memuat Visi dan Misi Pembangunan yang berlaku sampai dengan tahun 2020.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mengingat bahwa RPJM Daerah belum disusun maka dalam penyusunan RKPD ini mengacu pada hasil evaluasi Renstrada Provinsi DIY Tahun 2004-2008, hasil pembangunan Provinsi DIY Tahun 2007 dan perkiraan hasil pembangunan Provinsi DIY Tahun 2008, Rencana Kerja Pemerintah RI Tahun 2009 dan hasil Forum SKPD Provinsi DIY Tahun 2008, serta hasil Musrenbang Provinsi DIY Tahun 2008, baik pada tahap Pemutakhiran maupun pada tahap Penyelarasan.

Alur penyusunan RKPD adalah sebagai berikut:

ALUR PENYUSUNAN RKPD



RKPD Provinsi DIY Tahun 2009 disusun melalui proses sebagai berikut:

1. Kepala Bapeda menyiapkan rancangan awal RKPD.
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-SKPD.
3. Kepala Bapeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD.
4. Rancangan RKPD menjadi bahan bagi Musrenbang.
5. Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan.
6. Kepala Bapeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD.
7. Kepala Bapeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang.
8. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD

RKPD Provinsi DIY Tahun 2009 dibagi menjadi 5 (lima) bab dan beberapa subbab sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, dasar pemikiran, alur penyusunan RKPD, dan sistematika penyusunan RKPD Provinsi DIY Tahun 2009.
- Bab II : Kondisi Daerah menguraikan tentang kondisi geografis, kependudukan, tenaga kerja, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan, ketentraman dan ketertiban, sarana dan prasarana wilayah, tata ruang, lingkungan hidup, pertanian, industri, perdagangan, koperasi dan ukm, pertambangan dan energi, kapasitas daerah, investasi
- Bab III : Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2009, menguraikan kondisi ekonomi makro daerah dan perkiraan tahun 2009, arah kebijakan perekonomian daerah, sumber pembiayaan daerah, arah kebijakan keuangan daerah
- Bab IV : Menguraikan Permasalahan dan Tantangan yang akan dihadapi pada Tahun 2009
- Bab V : Menguraikan Arah, Sasaran dan Kebijakan pembangunan yang akan ditempuh pada Tahun 2009
- Bab VI : Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah, yang menguraikan tentang tema pembangunan tahun 2009, prioritas pembangunan, sasaran dan kebijakan masing-masing prioritas, pendekatan kewilayahan.
- Bab VI : Rencana Kerja dan Pendanaan, menguraikan rencana program dan kegiatan yang diuraikan dalam Rencana Tindak RAPBN dan RAPBD, serta Pagu Indikatif RAPBN dan RAPBD Provinsi DIY Tahun 2009.
- Bab VIII : Ringkasan Pendanaan, menguraikan sumber-sumber pendanaan, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- Bab IX : Penutup yang berisi harapan-harapan dalam mengimplementasikan RKPD Tahun 2009.

BAB II

KONDISI DAERAH

A. GEOGRAFIS

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di bagian tengah selatan Pulau Jawa, secara astronomis terletak pada 7°33' LS-8°12'LS dan 110°00' BT-110°50' BT, dengan luas 3.185,80 km².

Provinsi DIY terletak di bagian tengah-selatan Pulau Jawa, secara astronomis terletak pada 7°33'-8°12' Lintang Selatan dan 110°00'-110°50' Bujur Timur, dengan luas 3.185,80 km². Secara administratif terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten, 78 kecamatan dan 438 kelurahan/desa, yaitu:

1. Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,02%), terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan).
2. Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km² (15,91%), terdiri dari 17 kecamatan dan 75 desa).
3. Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,27 km² (18,40%), terdiri dari 12 kecamatan dan 88 desa).
4. Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.485,36 km² (46,63%), terdiri dari 18 kecamatan dan 144 desa).
5. Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,04%), terdiri dari 17 kecamatan dan 86 desa).

B. KEPENDUDUKAN

Berdasarkan hasil Susenas Tahun 2005, jumlah penduduk DIY tercatat 3.281.800 jiwa, dengan jumlah penduduk perempuan 1.666.498 jiwa (50,78%) lebih besar dibanding penduduk laki-laki 1.615.302 jiwa (49,22%), dengan pertumbuhan sebesar 1,88%.

Jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Sleman sebanyak 955.124 jiwa dengan pertumbuhan 1,18%, disusul Kabupaten Bantul sebanyak 823.734 jiwa dengan pertumbuhan 0,91%, kemudian Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah penduduk sebanyak 695.748 jiwa dengan pertumbuhan 1,30%, selanjutnya Kota Yogyakarta sebanyak 420.508 jiwa dengan pertumbuhan 5,50%, dan Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah penduduk 386.686 jiwa dengan pertumbuhan 2,83%.

Salah satu faktor meningkatnya pertumbuhan penduduk ini adalah berkaitan dengan kondisi DIY sebagai salah satu daerah yang relatif aman dan tenteram, sehingga migrasi masuk lebih besar dari pada migrasi keluar.

Kepadatan penduduk 1.030 jiwa per km². Kepadatan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta, yaitu 12,938,71/km², diikuti Kabupaten Sleman sebesar 1.661,61/km², Kabupaten Bantul sebesar 1.625,20/km², Kabupaten Kulon Progo sebesar 659,57/km², dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 468,40/km².

Persebaran penduduk desa-kota, menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk kota jauh lebih cepat dari pada pertumbuhan penduduk desa. Tingginya pertumbuhan penduduk kota ini antara lain karena faktor berubahnya status desa menjadi kota dan atau arus urbanisasi penduduk desa ke kota yang cukup tinggi.

Di bidang kependudukan, perwujudan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas insani serta sumber daya manusia. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan indeks komposit dari komponen indeks angka harapan hidup, indeks angka melek huruf, indeks rerata lama sekolah dan indeks pengeluaran riil perkapita, dari seluruh provinsi di Indonesia, pada tahun 2005 IPM DIY sebesar 73,5 dan menempati urutan ke 4, setelah Provinsi Riau, Sulawesi Utara dan DKI Jakarta IPM.

Berdasarkan proyeksi penduduk yang diolah oleh BPS DIY, proyeksi penduduk DIY Tahun 2008 sebanyak 3.375.600 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 1.691.100 (50,10%), dan penduduk perempuan 1.684.500 (49,90%). Hal yang menarik dari proyeksi ini adalah telah terjadi pergeseran jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Kalau selama ini penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki, maka pada tahun 2008 jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan.

C. TENAGA KERJA

Di bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran di DIY dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan sebagai akibat kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan. Penduduk yang bekerja menurut lapangan masih tetap didominasi oleh sektor pertanian, kemudian disusul oleh sektor jasa, sektor perdagangan, sektor industri pengolahan, sektor angkutan, dan sektor lainnya (pertambangan, listrik, gas dan air, bangunan, kerajinan). Kualitas angkatan kerja apabila diukur dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan masih relatif rendah, karena masih didominasi oleh penduduk yang tidak berpendidikan ataupun berpendidikan sekolah dasar.

Persentase penganggur di DIY pada tahun 2007 sebesar 8,22% (penganggur terbuka terhadap angkatan kerja). Jumlah penduduk usia kerja sebanyak 2.780.423 orang yang terdiri dari angkatan kerja sebanyak 1.808.143 orang, bekerja 1.659.447 orang, penganggur terbuka sebanyak 148.696 orang dan setengah penganggur sebanyak 454.245 orang. Adapun pencari kerja pada tahun 2007, berdasarkan "kartu kuning" sebanyak 87.324 orang. Penganggur terbanyak di Kabupaten Sleman 46.448 (31,24%), disusul Kota Yogyakarta 34.521 (23,22%), Kabupaten Bantul 34.162 (22,97%), Kabupaten Gunungkidul 19.721 (13,26%), dan terendah Kabupaten Kulon Progo 13.844 (9,31%).

Dilihat dari pendidikannya, pengangguran yang tidak tamat SD 12.610 orang (8,48%), tamat SD 19.754 orang (13,28%), sedangkan yang berpendidikan SLTP 33.331 orang (22,42%), SLTA 63.231 orang (42,52%), Akademi 9.841 orang (6,62%), serta PT 9.929 orang (6,68%). Penganggur yang berusia produktif 15-35 tahun berjumlah 113.228 orang (76,15%). Adapun Penganggur terbuka laki-laki lebih besar (52,21%), dibandingkan dengan perempuan (47,79 %).

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi DIY menurut (sumber: BPS, SAKERNAS dan BPS Prov. DIY, Berita Resmi Statistik, 2008, diolah), dari segi penyerapan tenaga kerja pada tahun 2009 diperkirakan akan meningkat antara 1,20-1,29%, atau bertambah 22,44-24,01 ribu tenaga kerja dibandingkan tahun 2008.

Dengan asumsi pada tahun 2009 terjadi penyerapan tenaga kerja sebesar 22.440 orang, sedangkan jumlah penganggur diperkirakan sebesar 124.106, sehingga pada tahun 2009 terjadi pengurangan jumlah penganggur menjadi 101.666 orang (berkurang 22.440 orang).

Sementara hasil penghitungan trend pengangguran terbuka, pada tahun 2009 naik 3,61% atau bertambah 4,3 ribu orang. Kondisi ini seiring dengan selalu meningkatnya jumlah lulusan sekolah dan perguruan tinggi.

Fluktuasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DIY dari tahun ke tahun berada dalam kisaran 5–8%. TPT tertinggi pada nopember 2005 yang mencapai 7,59% dan pada Februari 2007 mencapai 6,08%. Kenaikan harga BBM dan Kemarau panjang pada saat itu kemungkinan dapat menjadi penjelas situasi. Atas dasar perhitungan di atas maka pada tahun 2009, TPT diupayakan pada angka 6,10%.

D. PENDIDIKAN

Pemerataan dan aksesibilitas pendidikan di Provinsi DIY selama beberapa tahun terakhir ini telah berhasil dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan indikator tingkat partisipasi pendidikan sebagai berikut:

1. Anak Usia Dini yang telah terlayani pendidikan mencapai 45,14 %;
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI mencapai 109,86 %, SMP/MTs: 100,92 %; Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI : 95,17 %, SMP/MTs : 77,14 %; dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI : 105,37 %, SMP/MTs: 103,23 %;
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah (SMA/MA/SMK) mencapai 79,02 %, Angka Partisipasi Murni (APM) : 57,22 %, dan Angka Partisipasi Sekolah (APS): 61,97 %;
4. Anak Berkebutuhan Khusus yang telah terlayani pendidikan sebesar 75,52 %;
5. Penduduk buta huruf usia 15 tahun ke atas berjumlah 89.398 orang dan yang berusia 15 – 44 tahun sebanyak 25.664 orang;
6. Animo masuk mahasiswa baru dari luar DIY tahun 2006 mencapai 49.939 orang mengalami kenaikan sedikit (5,3 %) dari tahun 2005 sebesar 47.421 orang. Namun demikian hal tersebut belum bisa mengembalikan seperti kondisi pada sekitar sepuluh tahun yang lalu.

Daya saing pendidikan DIY di tingkat nasional pada tahun 2007 ditunjukkan dengan peringkat sebagai berikut: Lomba Olahraga Usia Dini peringkat 5, Jambore Nasional UKS peringkat 4, OSN SD peringkat 4, OSN SMP peringkat 5, OSN SMA peringkat 5, LKS SMK peringkat 7. Di tingkat internasional ditunjukkan dengan: Juara I Sepak Bola dan Catur dalam *ASEAN Primary School Sport Olympiad (APSSO)*, meraih medali perunggu dalam *4th International Junior Science Olympiad*.

Dari sisi pelayanan perpustakaan, minat masyarakat terhadap layanan perpustakaan setiap tahun rata-rata mengalami peningkatan 7,17%, dengan kondisi tahun 2007 sebesar 165.800 orang yang mengunjungi perpustakaan. Dari sisi fasilitas, ketersediaan ruang publik penunjang pendidikan yang representatif masih terbatas, sedangkan kondisi lingkungan yang kondusif terhadap pendidikan belum terwujud secara penuh.

Dalam urusan pendidikan, Pemerintahan Provinsi DIY terus berupaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan. Upaya ini ditempuh dengan penambahan jumlah anggaran pendidikan dari tahun ke tahun.

E. KEBUDAYAAN

Kebudayaan Yogyakarta dapat didefinisikan sebagai kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di DIY yang berakarakan kebudayaan lama dan asli serta sebagai hasil interaksi dari kebudayaan lain sebagai pelengkap, pemer kaya, dan penyempurna.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi budaya fisik "*Tangible Culture*" terdiri dari Kawasan Cagar Budaya, Benda Cagar Budaya bergerak dan tidak bergerak, museum dan pusaka budaya lain (Saujana).

Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan dengan SK Gubernur 326/KPYS/1995 baru mencakup 7 Kawasan Cagar budaya (Kraton, Puro Pakualaman, Prambanan, Ambar Binangun, Ambar Ketawang dan Parangtritis serta Kotagede) sedangkan pada saat ini telah mencapai 13 Kawasan Cagar Budaya yang tersebar di 4 Kabupaten dan Kota terdiri dari 6 KCB di wilayah urban kota (Kraton, Tamansari, Puro Pakualaman, Kotabaru, Malioboro, Kotagede), 3 KCB di wilayah suburban (Prambanan, Ambar Ketawang, Ambar Binangun) dan 4 KCB di wilayah Rural (Parangtritis, Sukoliman, Plered, Imogiri).

DIY memiliki BCB sebanyak kurang lebih 3119 buah dengan perincian 1886 BCB bergerak dan 1233 BCB tidak bergerak. Kondisi BCB tidak bergerak terdiri dari 1132 BCB (91,8%) dalam kondisi baik dan 101 BCB (8,2%) dalam kondisi rusak. Akibat gempa bumi 27 Mei 2006 jumlah BCB yang mengalami kerusakan bertambah menjadi 317 BCB (25,70%).

Program penanganan heritage DIY pasca gempa 27 Mei 2006 dilakukan pada Candi Prambanan, Kraton, Makam Imogiri dan sekitarnya, Puro Pakualaman, Tamansari, Rumah Tradisional Jawa (ndalem Pangeran dan rakyat), Rumah Penerima (Warbud), Panggung Krapyak, Masjid Makam Kotagede. Kebutuhan dana untuk renovasi BCB-BCB tersebut sebesar Rp 394.354.000.000, sedangkan yang tertangani baru sekitar Rp 13.116.000.000. Masih banyak BCB lagi yang belum bisa tertangani oleh Pemda DIY dikarenakan kebutuhan dana yang lebih besar daripada ketersediaan dana yang ada.

DIY mempunyai sekitar 27 museum, yang kondisinya berbeda-beda. Koleksi dari keseluruhan museum tercatat ada sekitar 68.217 koleksi. Museum Sonobudoyo merupakan museum yang memiliki koleksi terlengkap, walaupun hampir seluruh museum belum mempunyai prasarana dan sarana yang lengkap secara teknis serta belum didukung dengan manajemen dan fasilitas yang memadai. Setelah gempa 21 museum mengalami kerusakan, yaitu 6 museum rusak berat, 7 museum rusak sedang dan 8 museum rusak ringan.

Berbagai macam kesenian yang hidup dan berkembang di wilayah DIY, yakni di kalangan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat maupun di luar kraton, tersebar di kabupaten dan kota, yang meliputi seni pertunjukan dan non pertunjukan. Seni pertunjukan, seperti seni tari, seni teater di seluruh wilayah DIY dikelola oleh sekitar 2.856 kelompok yang tersebar di 78 kecamatan.

Kesenian non pertunjukan, seperti seni rupa, seni kerajinan, tak terhitung banyaknya yang tersebar di wilayah DIY, baik yang dikelola perorangan maupun oleh kelompok, dalam bentuk sanggar-sanggar atau kelompok usaha/ industri. Dari sekian banyak kelompok dan jenis kesenian tersebut kondisinya tidak merata. Ada yang dikelola dengan serius dan berkembang dengan baik, namun sebagian besar masih merupakan kelompok penggemar dan sekedar melestarikan, belum dikelola secara profesional.

Pengembangan budaya yang berbasis pada pelestarian yang berkelanjutan belum dapat memberikan nuansa dan warna dalam sistem pendidikan yang dikembangkan. Kecenderungan kearah mendidik generasi penerus dalam bingkai tata nilai dan budayai

pekerti luhur masih dalam tataran “wacana” yang tidak kunjung terimplementasi. Pengembangan budaya yang berbasis pada local genius untuk memperkuat ketahanan budaya belum menyentuh keseluruhan lapisan masyarakat, demikian juga terhadap sebagian penyelenggara pemerintahan, hal ini akan menimbulkan ketidakakuratan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan berbasis budaya, sebagai bingkai laku hidup masyarakat

Keberadaan Infrastruktur budaya yang meliputi panggung terbuka, pendopo, gedung pertunjukan, ruang pameran, studio musik, auditorium, laboratorium dan sanggar belum semuanya memenuhi standar minimal internasional.

Untuk mengembangkan potensi tersebut di atas tidak bisa lepas dari peran lembaga-lembaga budaya yang cukup banyak di DIY yang berjumlah 174 lembaga terdiri dari yayasan, organisasi, lembaga pendidikan, instansi pemerintah (Kota Yogyakarta 90 lembaga, Kabupaten Sleman 40 lembaga, Kabupaten Gunung Kidul 4 lembaga, dan Kabupaten Kulon progo 1 lembaga) serta organisasi penghayat kepercayaan yang melestarikan nilai budaya daerah sebanyak 67 organisasi yang tersebar di 4 Kabupaten / Kota. Potensi Kesenian terdiri dari 46 jenis. Sentra industri kerajinan: 46 buah.

Berdasarkan SK Gubernur Nomor 325/KPTS/1995, Desa Budaya yang ada sebanyak 32. Berdasarkan hasil evaluasi, saat ini ada 41 Desa Budaya, sehingga SK Gubernur tersebut perlu direvisi kembali.

F. PARIWISATA

Pariwisata merupakan sektor yang dapat diandalkan, karena selain dapat memberikan efek pengganda kepada masyarakat di daerah, pada akhirnya juga dapat meningkatkan devisa negara. Peranan sektor pariwisata dalam pembangunan perekonomian daerah ditunjukkan dengan meningkatnya kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor jasa-jasa.

Potensi pariwisata DIY sangat beraneka ragam dari potensi alam, peninggalan budaya, panorama pantai dan sebagainya, sangat menguntungkan apabila dikembangkan secara terpadu, baik sistem maupun cara pengelolaannya.

Dibandingkan tahun 2005, pada tahun 2006 jumlah kunjungan wisatawan di DIY mengalami penurunan sebesar 38,3%, dari 1.850.683 wisatawan menjadi 914.827 wisatawan (wisman turun 24,49%, dari 103.488 menjadi 78.145 dan wisnus turun 52,11% dari 1.747.195 wisatawan menjadi 836.682 wisatawan). Penurunan ini sangat terkait dengan kondisi terjadinya gempa bumi pada bulan Mei 2006 dan erupsi Gunung Merapi. Khusus untuk wisman, terkait juga dengan adanya isu terorisme dan *travel warning* dari negara lain, seperti Australia, Amerika dan negara lainnya.

Dengan adanya kondisi yang berangsur-angsur menunjukkan iklim kondusif, pada tahun 2007 jumlah wisatawan yang mengunjungi DIY mengalami peningkatan, yaitu naik sebesar 32,09% dari 914.827 wisatawan (2006) menjadi 1.249.421 wisatawan (wisman naik 36,99% dari 78.145 wisatawan menjadi 103.224 wisatawan dan wisnus naik 36,57% dari 836.682 wisatawan menjadi 1.146.197 wisatawan). Sepuluh besar wisman yang berkunjung ke DY adalah Belanda, Jepang, Perancis, Amerika Serikat, Malaysia, Jerman, Australia, Inggris, Belgia dan Korea Selatan.

Dengan terus membaiknya kondisi dalam negeri dan dicabutnya *travel warning* dari negara lain, diproyeksikan kondisi pariwisata DIY pada tahun 2008 dan 2009 akan meningkat. Pada tahun 2008 dan 2009 diperkirakan jumlah wisnus sebanyak 1.490.056 orang dan 1.937.073 orang, sedangkan jumlah wisman sebanyak 118.708 orang dan 136.514 orang. Secara

keseluruhan dari tahun 2007–2008 naik sebesar 28,76% dan dari tahun 2008-2009 naik sebesar 28,89%.

G. KESEHATAN

1. Mortalitas

Kondisi mortalitas di DIY ditunjukkan dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Angka Kematian Bayi (AKB) di DIY tahun 2007 berhasil mencapai angka 17/1.000 kelahiran hidup (KH). Angka tersebut jauh lebih baik jika dibandingkan dengan target nasional pada tahun 2010 yaitu 40/1.000 KH namun lebih rendah jika dibandingkan rata-rata AKB negara-negara Asia Tenggara seperti yang dicapai oleh Malaysia yaitu 8/1000 KH.
- b. Angka Kematian Balita (AKABA) DIY tahun 2007 mencapai 19/1.000 KH, angka ini juga lebih baik jika dibandingkan target nasional tahun 2010 yaitu 58/1.000 KH namun tetap lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN.
- c. Angka Kematian Ibu (AKI) DIY tahun 2007 mencapai 105/100.000 (2007), lebih baik dibandingkan target nasional tahun 2010 adalah 150/100.000. Angka tersebut masih jauh dibawah rata-rata kematian ibu di negara-negara ASEAN
- d. Umur Harapan Hidup (UHH) DIY pada tahun 2007 telah mencapai 74 tahun dan diprediksikan akhir tahun 2008 akan mencapai 74,1 yang akan terus ditingkatkan sehingga pada tahun 2013 diharapkan mencapai 74,8 tahun. Angka UHH di DIY ini lebih baik dibandingkan Thailand (69,9 pada tahun 2004) namun lebih rendah dari Singapura (77,4 pada tahun 2004).

2. Morbiditas

Kondisi morbiditas di DIY ditunjukkan dengan indikator sebagai berikut:

a. Penyakit Menular

1) DBD

Kejadian penularan DBD di DIY masih cukup tinggi yang ditunjukkan oleh angka incident rate (IR) 74,38 / 100 ribu penduduk. Tingkat kematian penderita DBD (*Case Fatality Rate/CFR*) juga masih tinggi yang ditunjukkan dari CFR tahun 2007 sebesar 1,01% dari jumlah penderita (target nasional <1%). Sementara risiko penularan masih tetap mengkhawatirkan yang diperlihatkan dari rendahnya angka bebas jentik (<95%).

2) TB Paru

Indonesia menempati urutan ketiga di dunia dalam hal jumlah penderita TBC, namun penemuan penderitanya ternyata masih rendah. Kondisi di DIY menunjukkan bahwa penemuan kasus baru mencapai 51,54% (2007) sedangkan target minimal nasional adalah 70%. Sementara tingkat kesembuhan penderita yang menjalani pengobatan juga belum optimal yaitu baru mencapai 79% (2007) sedangkan target nasional 85%.

3) HIV/AIDS

DIY telah ditetapkan sebagai salah satu daerah dengan tingkat perkembangan kasus HIV/AIDS yang tinggi, namun demikian penemuan penderita HIV/AIDS masih mengalami banyak kendala yang ditunjukkan masih rendahnya tingkat penemuan yaitu pada tahun 2007 sebanyak 501 dari target sebesar 2000 penemuan. Pemberian VCT (*Voluntary Counseling and Treatment*) bagi penderita

yang ditemukan juga masih rendah yaitu hanya 62,4% dari 80%. Sementara penularan HIV/AIDS melalui IDU's (*Injection drugs user's*/narkoba suntik) meningkat dengan tajam. DIY menempati urutan ke 11 dalam penularan melalui jalur IDU's tersebut dan terbanyak (63%) mengenai kelompok usia 20-29 tahun.

4) Malaria

Jumlah kasus penyakit malaria telah menurun namun demikian ternyata penularan kasus malaria indigenus (penularan setempat) masih ada dan masih dijumpai daerah-daerah dengan epidentrum (berpotensi) KLB.

b. Penyakit Tidak Menular

Penyakit tidak menular telah menggeser kedudukan penyakit menular sebagai penyakit pembunuh terbesar di DIY. Dalam beberapa tahun terakhir penyakit stroke, jantung, hipertensi, diabetes selalu menempati urutan tertinggi sebagai penyakit penyebab kematian di rumah sakit- rumah sakit di DIY.

Kematian akibat cedera kepala sebagai akibat kecelakaan lalu lintas juga masuk dalam 10 penyebab kematian terbanyak di DIY yang kecenderungan dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat bahkan dalam laporan tahun 2007 menempati urutan kedua setelah penyakit kardiovaskuler (jantung dan pembuluh darah). Sebanyak 88% korban meninggal akibat kecelakaan disebabkan oleh cedera kepala.

Meningkatnya kematian dan prevalensi penderita penyakit tidak menular dan kecelakaan ini tidak dapat terlepas dari kondisi perilaku sehat di masyarakat DIY. Salah satu hasil riset menemukan bahwa faktor risiko tumbuhnya penyakit tidak menular di DIY cukup mengkhawatirkan misalnya ditunjukkan dari 18,7% remaja di DIY telah menjadi perokok rutin, 52% penduduk tidak aktif berolahraga, 80,8% penduduk tidak mengkonsumsi serat yang mencukupi dan meningkatnya angka obesitas di kalangan anak usia sekolah dasar (meningkat 7% dalam 3 tahun).

Pemakai Napza meningkat dengan tajam namun yang terdeteksi baru mencapai 323 orang (tertangkap oleh Kepolisian). Berbagai penyakit yang mengiringi pengguna Napza juga terus berkembang mulai dari HIV/AIDS, hepatitis, TBC dan lain sebagainya.

c. Status Gizi di DIY

Kondisi gizi masyarakat DIY dapat diketahui dengan melihat status gizinya. Persentase status gizi buruk di DIY beberapa tahun terakhir ini terus mengalami penurunan. Tahun 2003 status gizi buruk sebesar 1,31% pada tahun 2007 turun menjadi 0,94% (melampaui target nasional 1,5%). Demikian pula dengan jumlah kecamatan bebas rawan gizi, pada tahun 2004 sebesar 74%, turun menjadi 70% pada tahun 2007.

H. SOSIAL

Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi/permasalahan yang dialami baik oleh individu, keluarga maupun masyarakat karena terhambatnya peranan dan fungsi sosialnya. Penyebab utama dari permasalahan sosial adalah adanya kemiskinan. Karena kemiskinan maka seseorang, mengalami keterlantaran, kecacatan dan ketunaan sosial. Meskipun demikian juga ada faktor penyebab seseorang mengalami masalah sosial, misalnya karena menjadi korban baik bencana alam maupun musibah lainnya.

Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan dalam rangka mencegah dan mengurangi timbulnya dampak negative dari persoalan kesenjangan sosial, desintegrasi social dan penyakit sosial yang dapat mengakibatkan tindak kekerasan, kerawanan social ekonomi, lemahnya ketahanan sosial dan potensi konflik sosial budaya dalam masyarakat.

Permasalahan sosial kemasyarakatan sangat rumit dan saling tumpang tindih antara kemiskinan, kerentanan, cacat, penyakit kronis, dan penyakit menular, serta korban narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA). Masalah-masalah tersebut mengharuskan adanya fasilitasi penanganan secara terpadu, terintegrasi, berkelanjutan dan profesional.

Permasalahan kesejahteraan sosial kedepan masih didominasi oleh permasalahan konvensional seperti tersebut diatas. Namun demikian masalah-masalah kontemporer seperti trafficking, HIV/AIDS dan Napza juga sangat memerlukan perhatian dan penanganan yang serius mengingat fenomena gunung es yang melingkupi permasalahan ini.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang berpenduduk 3.257.000 orang ternyata memiliki angka kemiskinan sebesar 275.110 RTM (data BPS). Permasalahan ini sulit ditangani karena sebagian besar termasuk kemiskinan kronis, sementara letak geografis DIY yang dikelilingi oleh daerah-daerah rawan bencana sangat rentan terhadap kemiskinan yang sifatnya sementara. Oleh karena itu apabila hal ini tidak ditangani akan menjadi kemiskinan kronis.

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial khususnya Peka, Tuna Sosial, Korban Trafficking, anak Terlantar, LU Terlantar, anjal, HIV dilaksanakan melalui program-program pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial yang selanjutnya diarahkan pada kemandirian melalui pemberdayaan sosial. Sementara itu pemberdayaan sosial bagi fakir miskin diarahkan pada penguatan keluarga dan pengembangan potensi melalui usaha-usaha yang bersifat produktif.

Sehubungan permasalahan diatas, perlu adanya penanganan yang terencana dan terarah melalui program-program yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan dengan pendekatan humanistik atau pemberdayaan. Sementara bagi penyandang masalah yang tidak potensial perlu adanya program perlindungan sosial melalui Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP) seperti cacat ganda/berat, LU terlantar, eks psikotik, peka pekas penderita penyakit kronis maupun program BLM. Disamping itu bagi mereka yang bekerja di sektor informal terhadap resiko penurunan pendapatan baik karena musibah atau faktor lain telah dirintis program perlindungan sosial melalui Askesos.

I. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Ditinjau dari Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowering Measure (GEM), keberadaan perempuan di DIY cukup menggembirakan. Angka GDI Provinsi DIY pada tahun 2005 sebesar 70,2 masuk dalam peringkat pertama dari seluruh provinsi di Indonesia. Pada tahun 2006 naik menjadi 70,3 tetapi turun menjadi peringkat kedua. Angka GEM DIY sebesar 62,4 (2005) menduduki peringkat kedua, sedangkan tahun 2006 tetap sebesar 62,4 tetapi turun menjadi peringkat keenam. Untuk lingkup Provinsi DIY, GDI tertinggi di Kota Yogyakarta (68,8) dan terendah Kabupaten Gunungkidul (59,8).

Permasalahan yang menyangkut ketidakberdayaan perempuan adalah kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, kekerasan terhadap perempuan dan ketidakberdayaan anak dan remaja. Sementara itu kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya mengintegrasikan perspektif gender ke dalamnya.

Dalam urusan pendidikan, angka melek huruf perempuan di DIY lebih rendah dibandingkan laki-laki. Rata-rata lama tahun sekolah juga lebih rendah dari pada laki-laki lebih.

Dalam urusan kesehatan terjadi kesenjangan antara kaum perempuan dan laki-laki, misalnya dalam jumlah peserta KB aktif, masih banyak didominasi oleh kaum perempuan.

Terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, data yang tercatat pada tahun 2006 di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak "Rekso Dyah Utami" Provinsi DIY sebanyak 116 kasus, meningkat 12 kasus apabila dibandingkan pada tahun 2005. Kasus tersebut meliputi kekerasan terhadap isteri, kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual, kehamilan tidak dikehendaki dan kekerasan dalam pacaran

Implementasi pengarusutamaan gender merupakan permasalahan yang harus dipecahkan secara terpadu. Faktor penghambatnya antara lain masih terbatasnya data pilah gender guna mendukung perencanaan program. Hal ini menyulitkan bagi para pengambil keputusan untuk menetapkan program yang mampu mendorong pemberdayaan perempuan.

J. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Pembangunan di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat diwujudkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Keberhasilan pembangunan dalam bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Rasa aman yang dirasakan masyarakat selama ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan pemerintah beserta masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan.

Dalam rangka mengantisipasi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, saat ini telah tersedia 285 orang anggota SAR LINMAS yang tersebar di 7 wilayah operasi dan di Unit SAR LINMAS Provinsi DIY. Di samping itu juga tersedia sebanyak 186 Polisi Pamong Praja yang terbagi dalam 16 regu. Dalam rangka untuk mengamankan pelaksanaan peraturan daerah saat ini telah tersedia 258 orang penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tersebar di 17 instansi.

Selama tahun 2007 angka gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban di Provinsi DIY tercatat 2.113 kasus yang tersebar di kabupaten kota. Gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban paling banyak terjadi di Sleman dengan jumlah 852 kasus dan yang paling rendah di Gunungkidul sebanyak 159 kasus.

Untuk memudahkan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat saat ini telah tersedia sarana dan prasarana pendukung yang meliputi kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, HT, pesawat rig, repiter, motor tempel, perahu karet, perahu fiber glass, alat selam, tenda peleton dan generator/disel.

Sebagai antisipasi terhadap bencana alam, perlu dilakukan fasilitasi untuk meningkatkan kemampuan SDM aparat dan masyarakat dalam rangka deteksi dini atau mitigasi dan

pengecahan serta penanggulangan bencana alam. Saat ini telah dipetakan daerah rawan bencana di Provinsi DIY:

1. Kota Yogyakarta: mempunyai daerah rawan bencana 11 Kecamatan 15 Kalurahan dengan jenis rawan bencana banjir, tanah longsor dan kebakaran
2. Kabupaten Bantul: mempunyai daerah rawan bencana 5 kecamatan 18 desa dengan jenis rawan bencana banjir, tanah longsor dan tsunami
3. Kabupaten Kulonprogo: mempunyai daerah rawan bencana 9 Kecamatan 28 Desa dengan jenis rawan bencana banjir, tanah longsor, angin ribut dan tsunami
4. Kabupaten Gunungkidul: mempunyai daerah rawan bencana 12 Kecamatan 56 desa dengan jenis rawan bencana tanah longsor, banjir dan kekeringan
5. Kabupaten Sleman: mempunyai daerah rawan bencana 5 Kecamatan 19 Desa dengan jenis rawan bencana banjir, erupsi Gunung Merapi dan kekeringan

K. SARANA DAN PRASARANA WILAYAH

1. Prasarana Jalan

Jalan dan jembatan merupakan salah satu prasarana penting dalam melayani pergerakan orang dan barang serta prasarana perhubungan antar wilayah. Pesatnya perkembangan DIY sebagai pusat tujuan wisata, pendidikan, industri serta munculnya pusat-pusat kegiatan baru perlu didukung keberadaan infrastruktur yang memadai agar dapat memberikan pelayanan sesuai standar.

Pembangunan prasarana jalan diarahkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur akibat adanya bencana alam, mendukung kebijakan pemerintah untuk mengatasi kemacetan di daerah perkotaan, merangsang pertumbuhan pusat-pusat kegiatan baru di luar perkotaan dan mendukung kebijakan pembangunan di Wilayah Jawa bagian selatan merupakan kondisi yang harus ditindaklanjuti dan didukung. Selain itu juga untuk menjaga kondisi permukaan ruas jalan dan kondisi jembatan mendekati kondisi pada saat pembangunan selesai dilaksanakan, sangat menjadi prioritas untuk dilakukan agar kondisi awal bangunan dapat tetap dipertahankan sesuai umur desain yang direncanakan.

Total panjang jalan di DIY pada tahun 2007 adalah 859,06 km terdiri dari jalan nasional 168,81 km dan jalan provinsi 690,25 km. Kondisi jalan provinsi adalah 16,76% (115,72 km) baik, 64,07% (442,25 km) sedang, 11,80% (81,45 km) rusak ringan dan 7,36% (50,83) rusak berat.

Total panjang jembatan di DIY pada tahun 2007 adalah 4.991,30 m dengan jumlah 216 jembatan, tersebar di kabupaten/kota. Kondisi jembatan tersebut adalah 73,74% (3.680,70 m) baik, 13,53% (675,40 m) sedang dan 12,73% (635,20 m) rusak.

2. Sumber Daya Air

Ketersediaan air dalam pengertian sumberdaya air berasal dari air hujan, air permukaan, dan air tanah. Potensi paling besar untuk dimanfaatkan adalah sumber air permukaan dalam bentuk air di sungai, saluran, dan waduk/ embung. Potensi air di Provinsi DIY adalah curah hujan rata-rata 1.700 mm-4.000 mm per tahun, air permukaan meliputi S. Progo Debit rerata 58.5m³/det. (St. Kalibawang), S. Opak debit rerata 12.35 m³/det. (St. Karangsemut), S. Oyo debit rerata 9.31 m³/det. (St. Bunder), S. Serang debit rerata 10.8

m³/det. (St. Durungan), sungai bawah tanah meliputi SBT Bribin debit rerata 956 lt/det, SBT Ngobaran debit rerata 700 lt/det, SBT Seropan debit rerata 800 lt/det, SBT Baron debit rerata 100 ltr/det. Total ketersediaan air di Provinsi DIY adalah 6.342.455.367 m³, sedangkan pemanfaatannya untuk keperluan domestic, industri, dan pertanian sebanyak 1.670.750.084 m³ (Neraca SDA Provinsi DIY, 2007).

Pemanfaatan air meliputi irigasi (sesuai UU No 7 Tahun 2004 dan PP No 20 Tahun 2006, kewenangan provinsi adalah daerah irigasi dengan luasan 1.000-3.000 ha dan daerah irigasi lintas kabupaten/kota), rumah tangga, Perkotaan, dan Industri (RKI) serta pemanfaatan lain untuk tenaga listrik, pengelontoran, dan lain-lain.

Meski dari segi ketersediaan air di Provinsi DIY dikatakan cukup namun ada beberapa persoalan yang berkaitan dengan ketersediaan air di masa-masa akan datang, yakni:

- a. Kekeringan meteorologist, yaitu kekeringan pada musim kemarau di beberapa tempat dikarenakan ketidakseimbangan antara curah hujan dengan infiltrasi tanah.
- b. Pengendalian banjir masih belum optimal yang berakibat pada berkurangnya daya tampung sungai untuk mengalirkan air. Penyediaan air baku sering mendapat gangguan secara kuantitas dan kualitas yang tidak memenuhi standar.
- c. Kondisi di wilayah hulu sebagai daerah tangkapan hujan dan recharge air tanah apabila tidak diperhatikan pengelolaannya termasuk alih fungsi lahan, akan terjadi degradasi lahan yang berakibat pada kelangsungan kuantitas dan kualitas air di wilayah Provinsi DIY.
- d. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air khususnya air permukaan masih belum maksimal sehingga banyak volume air permukaan yang hilang dan tidak dapat dimanfaatkan. Hal ini disebabkan oleh pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan jaringan irigasi yang belum memenuhi standar minimal dan pengelolaan pembagian air irigasi baik di level pemerintah maupun masyarakat masih belum optimal.

3. Transportasi

Di wilayah Provinsi DIY, sistem transportasi darat yang ada mengindikasikan bahwa transportasi yang memanfaatkan moda darat, khususnya angkutan bermotor (pribadi) mencapai 65%. Nilai sebesar ini komposisinya sangat didominasi oleh sepeda motor. Angkutan umum hanya 20 % dan selebihnya kendaraan barang (15 %). Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor rata-rata 13 % pertahun, dan untuk kendaraan pribadi mencapai 28 % pertahun.

Lalu Lintas Angkutan Jalan telah memiliki 2 terminal tipe A yang terletak di Kota Yogyakarta (Giwangan) dan di Kabupaten Gunungkidul (Wonosari). Untuk waktu yang akan datang, direncanakan akan dibangun terminal tipe A di Kabupaten Kulonprogo.

Angkutan perkotaan DIY dikelola oleh Pemerintah Provinsi karena daerah operasionalnya melayani tiga wilayah administrasi (Yogyakarta, Bantul dan Sleman)

Mulai tahun 2008 telah dioperasikan **Trans Jogja** sebagai salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan sebagai alternatif penyediaan angkutan umum massal dengan berbasis pada "membeli layanan" (bukan sistem setoran) dengan pelayanan yang lebih baik dan menggunakan kendaraan baru. Dengan Trans Jogja diharapkan dapat memindahkan pengguna angkutan pribadi ke [angkutan umum](#) serta mengurangi jumlah angkutan umum yang rata-rata sudah tua (>10 tahun).

Pengembangan **Trans Jogja** selanjutnya adalah melakukan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta untuk penambahan halte dan bus.

Dalam rangka penyediaan terminal barang telah dilakukan studi tentang lokasi terminal barang/*dry port* sebagai area bongkar muat kendaraan berdaya muat besar untuk mengurangi beban lalu lintas dalam kota.

Terkait dengan pengendalian lalu lintas angkutan barang, DIY telah memiliki 2 Jembatan Timbang yang terletak di Kulowaru Kulonprogo dan di Depok Sleman yang berfungsi sebagai filter/pengendali [kelebihan muatan](#).

Dalam bidang angkutan kereta api telah diselesaikannya pembangunan jalur ganda Solo-Yogyakarta-Kutoarjo, saat ini telah dioperasikan jalur baru pelayanan KA Prameks untuk Jogja- Kutoarjo. Dalam rangka mengetahui kebutuhan jalur lain untuk KA jarak pendek saat ini sedang dilaksanakan Studi [K.A Komuter](#).

Dalam bidang transportasi udara, saat ini telah dibuka jalur penerbangan internasional (Yogyakarta-Kuala Lumpur) dengan operator yang melayani Malaysia Airlines dan Air Asia. Animo maskapai penerbangan/airlines untuk membuka jalur penerbangan dari/ke Yogyakarta saat ini sangat tinggi. Kondisi kegiatan operasi penerbangan di Bandara Adisutjipto sudah sedemikian tinggi bahkan mencapai 47 pnb/hari belum termasuk adanya kegiatan *sorty* (naik turun) pesawat latih AAU. Dengan hanya satu runway dan satu taxiway (30x102 m) yang dimiliki, kondisi ini jelas akan sangat mengganggu dan menghambat proses *take off-landing* pesawat. Letak bandara Adisutjipto memungkinkan untuk dibangun terminal terpadu antar moda (moda jalan, moda kereta api dan moda udara) sehingga akan lebih memudahkan pergantian antar moda untuk peningkatan kualitas pelayanan transportasi. Termasuk dalam bagian sistem transportasi udara di Yogyakarta adalah adanya pembangunan lapangan terbang Gading. Saat ini telah ada kesepakatan dengan TNI-AU untuk memindahkan latihan penerbangan di Lapangan Terbang Gading Gunung Kidul sehingga Adisutjipto dapat digunakan sepenuhnya untuk penerbangan sipil. Tahun 2009 landas pacu Lapangan Terbang Gading siap digunakan setelah pekerjaan leveling selesai)

Dalam bidang transportasi laut, saat ini DIY memiliki satu dermaga perikanan di Sadeng dan memiliki 19 titik tempat pendaratan kapal ([TPK](#)). Dalam rangka keselamatan pelayaran telah dibangun empat Pos Pengawasan Keselamatan Pelayaran (Sadeng, Baron, Pandansimo, Glagah) dan sarana bantu navigasi, seperti Menara Suar (40 m) sebanyak 3 buah (Sadeng, Ngrenehan, Samas), lampu pelabuhan (8 m) sebanyak 9 buah, rambu batas alur sebanyak 3 buah (Sadeng) dan rambu tengah alur sebanyak 2 buah (Sadeng). Selama ini belum semua lokasi pendaratan kapal/TPK dilengkapi dengan [Sarana Bantu Navigasi Pelayaran](#) terutama untuk rambu alur.

4. Keciaptakarya

a. Air Bersih

Penyediaan air bersih dilaksanakan dengan sistem perpipaan (30%) dan non perpipaan (70%). Sebagian besar penduduk di perdesaan masih mengandalkan sumur (non-perpipaan). Penyediaan air bersih dengan sistem perpipaan dikelola oleh PDAM pada masing-masing Pemerintah Kabupaten. Ketersediaan air bersih belum dapat mencukupi kebutuhan masyarakat terutama di sebagian wilayah Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo.

b. Persampahan

Pengelolaan sampah di Provinsi DIY dibedakan pelayanannya antara perkotaan dan perdesaan. Tingkat pelayanan pengelolaan sampah sistem terpusat di wilayah Kota Yogyakarta sekitar 62%. Total produksi sampah diperkirakan sekitar 1.563 m³/hari. Jangkauan pelayanan diprioritaskan pada sumber sampah di perkotaan, seperti: Jalan utama, perkantoran, kawasan perdagangan, pemukiman padat, pasar, terminal dan rumah sakit. Pelayanan sampah terbatas pada wilayah perkotaan, daerah lain sampah masih dikelola secara setempat oleh masyarakat. Pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih menyisakan beberapa persoalan dengan lingkungan sekitar yang perlu diselesaikan, seperti polusi bau, dan banyak lalat.

c. Air Limbah

Hampir semua kecamatan yang ada di perkotaan Yogyakarta memiliki jaringan air limbah. Kurang lebih 20% dari masyarakat perkotaan telah dilayani dengan sistem air limbah terpusat. Sistem ini terdiri atas jaringan lateral dan sistem penggelontor yang dibangun pada tahun 1930, dan jaringan induk serta Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang dibangun tahun 1995. Kurang-lebih 60% dari kebutuhan sanitasi masyarakat telah dilayani lewat fasilitas sanitasi setempat. Sisanya menggunakan MCK atau langsung dibuang ke sungai. Limbah cair industri (dari industri besar maupun kecil) masih sering dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan. Pelayanan pengurusan tanki septik atau cubluk biasanya dilakukan oleh swasta dengan truk tinja atau secara manual. Lumpur limbah ini dapat diolah di IPAL, tetapi masih sering langsung dibuang ke lingkungan. Pelayanan sanitasi sistem setempat (individual) untuk limbah tinja berupa pembuangan lumpur tinja dari septick tank ke pengolahan akhir (IPLT). Pelayanan penyedotan tinja sebagian besar penduduk menggunakan jasa penyedotan yang dimiliki oleh swasta. Pihak swasta dalam pembuangan limbah tinja hasil penyedotan dari penduduk selama ini tidak terkontrol. Cenderung tinja hasil penyedotan dibuang di tempat-tempat yang seharusnya tidak diperbolehkan, seperti sungai, TPA, dan saluran-saluran/riol kota melalui manhole secara ilegal.

Di beberapa kawasan perdesaan sarana sanitasi air wilayah secara kuantitas dan kualitas belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Masih banyak sarana air limbah kurang memenuhi ditinjau dari aspek kesehatan lingkungan seperti masih menggunakan closet cemplung (cubluk). Pada umumnya masyarakat merasa puas dengan fasilitas sanitasi tersebut kecuali jamban cemplungan cubluk terbuka, yang sering menimbulkan bau tidak enak serta lalat dan nyamuk. Sementara itu ada sebagian yang membuang limbah air mandi, cuci dan dapur langsung ke saluran drainase masih sering dijumpai.

d. Drainase

Pada kawasan-kawasan tertentu di perkotaan Yogyakarta ketika hujan tiba masih tergenang. Di beberapa kawasan terbangun sudah dilayani oleh saluran drainase, baik kawasan permukiman, perkantoran atau perdagangan, maupun pada tepi jalan-jalan yang menghubungkan antar kawasan. Sebagian besar saluran drainase yang ada, baik saluran terbuka maupun tertutup memiliki sedimentasi berupa sampah/kotoran/tanah yang cukup tinggi. Banyak saluran drainase yang kurang terpelihara, sehingga kapasitas saluran menurun. Inlet saluran kurang berfungsi secara efektif (posisi inlet lebih tinggi dibanding dengan badan jalan atau karena tertutup pasir/tanah), sehingga air hujan tidak dapat dengan segera masuk ke dalam saluran.

Sumur resapan yang sudah dibangun, banyak yang kurang berfungsi dengan baik karena konstruksi inlet sumur mudah sekali tertimbun oleh kotoran/tanah. Hal ini terjadi pada sumur resapan yang dibangun di halaman maupun yang berada di bawah saluran drainase.

Secara umum permasalahan drainase di perdesaan adalah akibat sistem yang kurang memadai dan kurang menjangkau daerah-daerah yang rawan genangan. Selain itu sistem drainase yang ada kurang terpelihara, sehingga pada waktu musim penghujan drainase yang ada macet karena terhalang kotoran atau sampah yang ada di dalam saluran yang mengakibatkan genangan di lingkungan pemukiman. Berbeda dengan dan kawasan lain di DIY yang ingin membuang limpasan air hujan secepatnya, untuk kawasan Gunung Kidul justru berusaha mempertahankan limpasan air hujan dengan memperbanyak tampungan-tampungan atau tandon. Dimana air ini akan dapat dimanfaatkan pada musim kemarau.

e. Tata Bangunan dan Lingkungan

Bangunan-bangunan di wilayah perkotaan Yogyakarta secara umum saat ini diarahkan kepada penataan sesuai dengan fungsi kawasan yang telah direncanakan yaitu perdagangan dan jasa, pemukiman, perkantoran dan pendidikan.

Tata bangunan dan lingkungan di wilayah kabupaten secara umum saat ini diarahkan kepada penataan sesuai dengan fungsi kawasan yang telah direncanakan yaitu kawasan lindung, kawasan penyangga, kawasan budidaya pertanian, dan budidaya non pertanian.

5. Perumahan

Pertumbuhan Kebutuhan perumahan rata-rata mencapai 800 ribu unit/ tahun, jumlah ini belum termasuk kesenjangan rumah yang belum terpenuhi (*backlog*) sebelumnya pada akhir tahun 2003 mencapai sekitar 5,93 juta unit (9,43%). Apabila pemenuhan *backlog* tersebut difasilitasi selama 17 tahun sampai dengan tahun 2020, maka rata-rata setiap tahun terdapat 1,150 juta unit yang perlu difasilitasi, sedangkan pada saat ini pertumbuhan pemenuhan kebutuhan perumahan baru masih sangat terbatas, yaitu rata-rata sekitar 300.000 unit per-tahun, baik melalui pasar perumahan, subsidi pemerintah, maupun swadaya masyarakat sendiri.

Sebaran *backlog* kebutuhan rumah s.d 2003 di DIY sekitar 140.000 unit, kebutuhan rumah adalah 746.747 unit, sedangkan rumah yang tersedia 622.212 unit (83,32%), sehingga kekurangan rumah adalah 124.532 unit, pertumbuhan kebutuhan rumah 6.378 unit, maka jika akan dicapai s.d tahun 2020 maka kebutuhan rumah adalah 13.703 unit per-tahun.

L. TATA RUANG

RTRW Provinsi DIY yang disusun pada tahun 1992 dan telah ditinjau kembali pada tahun 1997 dan 2002, telah berakhir pada tahun 2007 ini. Disisi lain, dinamika perkembangan wilayah tetap berlangsung secara pesat dan cenderung menjadikan rencana tata ruang yang berlaku saat ini tidak mampu lagi mengakomodir kebutuhan pembangunan tersebut dan belum mampu melindungi masyarakat terhadap terjadinya bencana (belum berbasis bencana geologi). Atas dasar tersebut dan dengan memperhatikan UU.no 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang, RTRW Provinsi DIY disusun kembali dan saat ini masih dalam proses penyusunan.

RTRW Propinsi DIY berfungsi sebagai acuan bagi instansi pemerintah daerah serta masyarakat dalam mengarahkan lokasi pemanfaatan ruang dan sebagai acuan dalam menyusun dan mengendalikan program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah.

RTRW disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Untuk DIY, struktur dan pola ruang wilayah secara internal dipengaruhi oleh kondisi topografi, geografis dan sosial ekonomi, dan secara eksternal dipengaruhi oleh perkembangan wilayah provinsi yang berdekatan dan kebijakan nasional. Kawasan-kawasan yang mempengaruhi struktur dan pola ruang dan perkembangan pembangunan DIY, meliputi kawasan fungsional (hutan lindung dan hutan konservasi), wilayah daerah aliran sungai (DAS), kawasan tertentu nasional yang merupakan kawasan lindung dan cagar budaya, kawasan cepat tumbuh, kawasan potensial untuk berkembang, kawasan kritis lingkungan, kawasan pesisir dan kawasan yang sangat tertinggal (desa/kecamatan yang masih tertinggal dari aspek ekonomi dan pendidikan serta sosial).

Selain itu juga dipengaruhi berkembangnya peran dan fungsi dari wilayah lain, seperti: DIY dengan kota-kota besar di P. Jawa-Bali, DIY dengan ibukota provinsi sekitarnya (Jawa Tengah), Kota Yogyakarta dan kabupaten-kabupaten di wilayah DIY berinteraksi dengan kota besar/kecil di sekitar DIY seperti Kabupaten Magelang, Klaten, Purworejo, Surakarta, Wonogiri, kebijakan pengembangan terpadu wilayah Joglosemar, Pawonsari Bakulrejo, dan Gelangmanten. Karakteristik pola ruang DIY ditandai dengan persoalan tingginya kebutuhan ruang untuk kegiatan budidaya namun di lain pihak menghadapi keterbatasan daya dukung maupun daya tampung lingkungan. Dari RTRW Provinsi DIY 1992-2007 disebutkan luas wilayah provinsi DIY hanya sebesar 318.580 hektar dan 150.332 hektar atau 47,188 persen merupakan kawasan lindung (belum termasuk kawasan rawan gempa).

Kondisi penggunaan lahan di Provinsi DIY dari tahun 2002 – 2007 banyak mengalami perubahan (alih fungsi lahan) khususnya alih fungsi lahan dari persawahan ke permukiman. Tercatat penggunaan lahan yang tidak melalui perijinan seluas +200 Ha/thn dan penggunaan lahan yang melalui perijinan hanya +75 Ha/thn.

Alih fungsi lahan tersebut lebih mengarah pada kawasan utara (di dalam RTRW Provinsi DIY) diperuntukan sebagai kawasan resapan air. Perkembangan permukiman di wilayah bagian utara ini tidak sesuai dengan RTRW Provinsi DIY, karena perkembangan permukiman direncanakan pada kawasan selatan dan sepanjang koridor jalan Jogja-Wates dan Jogja-Magelang.

M. LINGKUNGAN HIDUP

1. Kondisi Kualitas Air

Secara umum kondisi kualitas air di Provinsi DIY masih ditandai dengan adanya zat-zat pencemar yang masuk ke dalam air sehingga kondisi BOD, COD, PO4 dan Total Coli di beberapa lokasi sudah melampaui Baku Mutu Kelas Air.

Kondisi kualitas air sungai yang melintas di kawasan perkotaan yaitu Code, Winongo dan Gajahwong cenderung menurun kualitasnya. Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa

parameter-parameter minyak, lemak, BOD, COD dan PO^4 , Coli dan Total Coli sudah melebihi Baku Mutu Kelas Air sesuai air kelas II. Trend dari tahun 2005 s/d tahun 2007 menunjukkan konsentrasi yang semakin tinggi dari tahun ke tahun, walaupun hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama debit air di musim hujan dan kemarau yang tidak sama.

Kondisi kualitas air laut (*sampling* di pantai Depok, pantai Glagah dan pantai Sundak) memperlihatkan bahwa kandungan Cadmium, Pb, Ni, Cr rata-rata sudah melebihi batas yang dipersyaratkan sesuai Baku Mutu Air Laut.

Kondisi kualitas air tanah di daerah perkotaan khususnya disekitar sumber-sumber pencemar yaitu disekitar kegiatan industri dan sekitar sungai Code, Gajahwong dan Winongo sudah tercemar oleh bakteri E Coli, rata-rata konsentrasi E coli sudah melebihi Baku Mutu yang dipersyaratkan untuk air bersih. Dari 100 sumur yang diambil sampelnya hampir seluruhnya sudah banyak mengandung bakteri E Coli yang melebihi batas yang disyaratkan.

Kondisi air buangan atau limbah cair secara garis besar berasal dari kegiatan-kegiatan industri, pelayanan kesehatan, pelayanan jasa dan pariwisata, pelayanan bengkel dan otomotif, dan dari rumah tangga. Hasil Survei dan pemetaan sumber pencemar air di 1.594 lokasi sumber pada tahun 2007 memperlihatkan bahwa kurang lebih 15% atau 234 sumber merupakan kegiatan yang potensi menimbulkan pencemaran, dan hanya 7-8 % atau 105 sumber yang memiliki kemampuan untuk melakukan swapantau terhadap kualitas dan kuantitas limbah cairnya.

2. Kondisi Kualitas Udara Ambien

Kualitas Udara Ambien di wilayah perkotaan Yogyakarta dan sekitarnya menunjukkan keadaan yang fluktuatif hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain suhu, cuaca, arah angin serta kecepatan angin pada saat pengambilan sampel. Dari beberapa kali pengamatan di 25 lokasi *sampling* ada sebagian lokasi untuk kadar polutan/parameter tertentu sudah melebihi batas yang dipersyaratkan, sedangkan untuk parameter yang lain masih dibawah batas yang dipersyaratkan. Sebagai contoh untuk parameter Pb, dari hasil analisis data Tahun 2007 rata-rata konsentrasi Pb di 25 lokasi pengamatan berkisar antara 3,72 – 0,27 ug /m³ sedangkan Baku Mutu yang dipersyaratkan sebesar 2 ug /m³.

Berdasarkan hasil analisis trend dari tahun 2002 s/d 2006 konsentrasi Pb di kota Yogyakarta dan sekitarnya cenderung naik dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,64 ug / m³ pertahun.

Untuk parameter CO dari hasil analisis data Tahun 2007 rata-rata konsentrasi CO di 25 lokasi pengamatan berkisar antara 1-18 ppm dengan batas yang dipersyaratkan 35 ppm dan dari hasil analisis Trend 2002 s/d 2006, dapat diketahui konsentrasi CO di kota Yogyakarta dan sekitarnya cenderung naik dari tahun ke tahun dengan rata-rata kenaikan sebesar 1,986 ug /m³ pertahun.

3. Kondisi Lahan

Pada beberapa lokasi terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian. Tahun 2002 luas lahan pertanian sebesar 85.444,70 ha dan pada tahun 2007 mengalami

penurunan menjadi 83.526,17 ha. Alih fungsi lahan tersebut sebagian besar berada pada kawasan utara yang merupakan kawasan resapan air.

Disamping itu, kondisi lahan di Provinsi DIY juga ditandai dengan masih adanya kerusakan lahan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan bahan galian golongan C baik berupa batu, pasir, tanah urug, kapur dan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat baik yang berijin maupun tidak.

4. **Kondisi Pentaatan/Penegakan Hukum Lingkungan**

Berbagai kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan selalu muncul setiap saat. Hal ini sebagai dampak dari kegiatan/aktivitas manusia termasuk di dalamnya kegiatan industri, pelayanan kesehatan dan jasa pariwisata serta kegiatan lainnya merupakan sumber pencemar yang perlu dikendalikan sejak awal, karena tanpa ada langkah-langkah pencegahan akan menimbulkan masalah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Di sisi lain sekarang masyarakat sangat sensitif terhadap berbagai permasalahan hukum dan berkecenderungan berbuat menurut caranya sendiri dengan mengerahkan masa mendatang kegiatan usaha yang mereka anggap sebagai penyebab pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan lingkungan. Partisipasi lain dari masyarakat adalah munculnya kelompok-kelompok warga masyarakat yang peduli dalam hal penanganan sampah rumah tangga, pembuatan sumur resapan, penghijauan dan konservasi sumberdaya alam pada umumnya.

Bertolak dari itu dirasakan betapa pentingnya peran pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator, mediator untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan berbagai kasus permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Untuk itu Pemerintah Propinsi DIY dalam hal ini Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa bersama-sama dengan Kepolisian Daerah Provinsi DIY dan Kejaksaan Tinggi Provinsi DIY melakukan koordinasi penyelesaian kasus lingkungan hidup melalui suatu wadah yaitu Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu. Pada tahun 2007, telah ditangani 7 kasus pencemaran yang dilakukan oleh kegiatan usaha.

N. PERTANIAN

Pada tahun 2006 produksi padi mencapai 559.890 ton atau setara dengan 293.089 ton beras. Berdasarkan Angka Tetap Tahun 2007, produksi padi sebesar 570.991 ton GKG setara dengan 298.901 ton beras. Berdasarkan ARAM II pada tahun 2008 produksi padi diperkirakan mencapai 609.075 ton GKG setara dengan 318.837 ton beras. Sedangkan padi ladang pada tahun 2006 mencapai 148.273 ton, tahun 2007 berdasarkan ATAP sebesar 138.303 ton dan berdasarkan ARAM II Tahun 2008 diperkirakan mencapai 169.901 ton.

Untuk Produksi jagung Pada tahun 2006 mencapai 223.620 ton berupa pipilan kering dan berdasarkan ATAP pada tahun 2007 sebesar 258.187 ton atau naik sebesar 15,463% dan berdasarkan ARAM II tahun 2008 diperkirakan mencapai 264,304 ton. Sedangkan produksi kedelai tahun 2006 mencapai 39.545 ton, tahun 2007 berdasarkan ATAP sebesar 29.692 ton atau mengalami penurunan sebesar -24,92% dan berdasarkan ARAM II Tahun 2008 sebesar 32.876 ton.

Lahan pertanian di wilayah DIY yang diusahakan untuk pertanian tanaman pangan tahun 2006 seluas 318.580 ha, terdiri atas lahan sawah seluas 57.661 ha (18,10%) dan lahan bukan sawah (lahan kering) seluas 260.919 ha. Jika dibandingkan dengan tahun 2005, luas lahan tersebut tidak mengalami perubahan tetapi terjadi pergeseran fungsi lahan yaitu penggunaan lahan sawah menurun dari 57.762 ha pada tahun 2005 menjadi 57.661 ha pada tahun 2006 (turun 0,17%), sedangkan lahan bukan sawah (lahan kering) 260.818 ha pada tahun 2005 meningkat menjadi 260.919 ha pada tahun 2006 (naik 0,04%). Lahan perkebunan seluas 623.418,47 ha, sebagian besar (91,11%). Lahan kering terdiri dari lahan pekarangan, tegal/kebun, ladang, rawa, tambak, kolam, hutan rakyat, hutan negara, perkebunan, lahan tidak diusahakan, dan lain lain.

Ketersediaan daging dan telur pada tahun 2006 masing-masing mencapai 34.272.622 kg dan 394.627.131 butir, sedangkan produksi susu 11.061.486 liter belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam provinsi.

Standar ketersediaan pangan dicerminkan oleh ketersediaan energi sebesar 2.200 kkal/kap/hari; ketersediaan protein 57 g/kap/hari; normal kecukupan gizi berdasarkan standar PPH > 1.907,6/kkal/kap/mari, konsumsi energi minimum 1.500 kkal/kap/hari, dan konsumsi protein sebesar 62,4 g/kap/hari, dan kualitas konsumsi pangan mendekati skor PPH 85,7%.

Angka konsumsi energi di DIY tahun 2005 sudah dapat mencapai standar, yaitu sebesar 1.835,93 kkal/kap/hari sedangkan angka konsumsi protein, masih belum memenuhi standar karena baru mencapai angka 51,04g/kap/hari.

Tingkat kesejahteraan petani dapat diukur dan Nilai Tukar Petani (NTP). Pada tahun 2006 indek NTP DIY mencapai 126,84%, dan Tahun 2007 sebesar 127,51%, sedangkan NTP Tahun 2008 pada Bulan Maret mencapai 137,6% dan bulan April mencapai 135,16%

Potensi areal yang dapat dikembangkan dengan tanaman perkebunan mencapai 176.000 Ha, prioritasnya untuk tanaman semusim perkebunan pada lahan sawah melalui pergiliran tanaman dan atau pola tanam.

Luas Tanaman perkebunan tahun 2006 seluas 84.768,50 Ha terdiri atas: kelapa 43.374,87 Ha, jambu mete 21.808,52 Ha, kakao 3.867,62 ha, kopi 1.663,78 Ha, jarak pagar 1.395,0 ha, tebu 6.335,75 ha, tembakau 3.015,00 ha, kapas 162,0 ha, lain-lain 7.285,96, sedangkan tahun 2007 luas tanaman perkebunan menjadi 86.169,99 ha meningkat (kelapa 43.223,74 ha, jambu mete 21.124,47 ha, Kakao 4.289,04 ha, Kopi 1.575,43 ha, Jarak pagar 2.536,22 ha, Tebu 6.430,15 ha, Tembakau 1.640,87 ha, Kapas 123,80 ha, Lain-lain 5.226,27 ha), dan perkiraan tahun 2008 seluas 89.850 ha (Kelapa 44.000 ha, Jambumete ha, 21.200 ha, Kakao 4.700 ha, Kopi 1.600 ha, Jarak pagar 3.000 ha, Tebu 6.900 ha, Tembakau 2.000 ha, Kapas 750 ha, Lain-lain 5.700 ha).

Hutan merupakan sumberdaya alam yang memiliki multifungsi bagi kehidupan manusia, namun demikian masih sering diabaikan oleh berbagai kepentingan. Pertama, fungsi hutan sebagai penjaga iklim dan tata air bagi ekosistem dipersyaratkan minimal 30 % dari total hamparan daratan (Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan), sedangkan luas hutan keseluruhan di DIY baru mencapai 23,54 % dibanding luas wilayah DIY.

Potensi Kehutanan di DIY meliputi Hutan Negara seluas 18.044,967 Ha (Hutan produksi 13.851,28 Ha, Hutan lindung 2.291,90 Ha (TNGM=1.728,906 Ha, Tahura Bunder +617,00 Ha), Hutan konservasi (Cagar alam 175,08 Ha, Taman wisata alam 119,66 Ha, Suaka

Margasatwa 615,6 Ha) dan hutan AB 991,447 Ha dan Hutan rakyat seluas 56.466,25 ha atau 17,72 %, serta Lahan kritis 126.776 Ha (Data BP DAS SOP DIY).

Perkembangan hutan rakyat DIY tahun 2006 seluas 56.466 ha, tahun 2007 menjadi 58.486,5 ha atau meningkat 3,58 %, sedangkan perkiraan tahun 2008 seluas 60.150 ha.

Produksi perikanan tahun 2006 mencapai 12.470,4 ton (perikanan budidaya 9.703,8 ton dan perikanan tangkap 2.766,6 ton), sedangkan tahun 2007 mencapai 14.614,5 (perikanan budidaya 11.276,3 ton dan perikanan tangkap 3.338,2 ton) meningkat 722,9 ton atau 17,19% (perikanan budidaya 16,20% dan tangkap 20,66%), sedangkan perkiraan tahun 2008 produksi perikanan akan mencapai 17.628,92 ton (budidaya 13.760,22 ton dan tangkap 3,868,70).

Konsumsi ikan tahun 2006 sebesar 15,33 kg/kpt/th, tahun 2007 15,49 kg/kpt/th atau naik sebesar 1,04%, sedangkan perkiraan tahun 2008 adalah 15,02 kg/kpt/th.

Ikan yang masuk ke wilayah DIY jumlahnya jauh lebih besar dari pada ikan DIY yang keluar. Tahun 2006 ikan yang masuk sebesar 41.782,7 ton sedangkan yang keluar hanya 1.275,0 ton. Tahun 2007, ikan masuk 38.649,0 ton dan ikan keluar 1.466,3 ton. Terjadi penurunan jumlah ikan masuk 7,5 %, sedangkan ikan keluar mengalami kenaikan sebesar 15,0%. Perkiraan Tahun 2008, ikan masuk sebesar 35.019 ton dan ikan keluar 6.200 ton.

O. INDUSTRI

Pembangunan sektor industri di Provinsi DIY mengalami perkembangan yang berfluktuatif disebabkan situasi perekonomian yang belum mendukung untuk menjadikan iklim usaha yang kondusif. Perkembangan kinerja sektor industri dapat dilihat dari perkembangan unit usaha, penyerapan tenaga kerja, nilai investasi, nilai produksi dan sumbangan terhadap PDRB.

Perkembangan sektor industri (IKMB) DIY pada tahun 2007 sebanyak 75.140 unit usaha, apabila dibandingkan dengan tahun 2006 mengalami peningkatan 1,14%, yaitu menjadi sebanyak 74.291 unit usaha. Unit usaha tersebut meliputi industri pangan, sandang dan kulit, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronika, dan industri kerajinan, dengan jumlah unit usaha terbanyak adalah industri pangan kemudian diikuti industri kerajinan.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja sektor industri mempunyai peranan yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2007 terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 2,05 % apabila dibandingkan dengan tahun 2006, yaitu dari 213.942 orang menjadi sebesar 264.368 orang. Penyerapan tenaga terbanyak berasal dari industri pangan dan industri kerajinan.

Dari sisi investasi, perkembangan nilai investasi sektor industri pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 3,41 % apabila dibandingkan tahun 2006, yaitu dari sebesar Rp. 715.291.706.000,- menjadi sebesar Rp.739.687.038.700. Investasi terbesar pada industri kimia dan bahan bangunan.

Perkembangan nilai produksi pada tahun 2006 sebesar Rp. 2.561.148.825.000,- dan pada tahun 2007 sebesar Rp.2.561.148.825.000,- sehingga mengalami peningkatan sebesar 5,16%, dengan nilai produksi terbesar adalah industri kerajinan.

Sektor industri memberikan sumbangan terbesar keempat setelah sektor jasa-jasa, sektor pertanian dan sektor perdagangan hotel dan restoran, terhadap PDRB atas dasar harga berlaku, yaitu sebesar 13,86% pada tahun 2006 (DIY Dalam Angka 2006/2007 BPS DIY).

P. PERDAGANGAN

Sejalan dengan berkembangnya perekonomian nasional, kinerja sektor perdagangan telah berperan makin signifikan dalam mendorong perkuatan struktur dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam menghadapi era pasar yang makin terbuka, maka upaya untuk memantapkan pasar dalam negeri perlu didukung oleh semua pihak. Kebijakan untuk memantapkan dan memperluas pasar dilakukan melalui upaya meningkatkan sistem pelayanan perijinan, pengendalian inflasi, penciptaan kondisi persaingan yang sehat dan pemantapan kelembagaan/institusi perdagangan dan perlindungan konsumen.

Dari sisi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) realisasi jumlah penerbitan SIUP pada tahun 2006 sebanyak 29.363 buah, meningkat menjadi 31.250 buah pada tahun 2007 (bertambah 1.288 buah). Secara keseluruhan usaha perdagangan di DIY didominasi oleh pengusaha kecil (90%). Perkembangan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan dari 29.775 buah pada tahun 2006 menjadi 31.250 pada tahun 2007. Kota Yogyakarta paling banyak menerbitkan TDP, diikuti Kabupaten Sleman, Bantul, Gunung Kidul dan yang paling sedikit menerbitkan TDP adalah Kulon Progo. Berdasarkan bentuk perusahaan, perusahaan perorangan (PO) sangat mendominasi (67,84% total kumulatif TDP)

Perkembangan sektor perdagangan dilihat dari sisi tersedianya sarana perdagangan seperti pasar modern dan pasar tradisional menunjukkan dari tahun 2005 s/d 2007 mengalami perkembangan/peningkatan jumlah yakni untuk pasar modern tahun 2006 sebanyak 191 pasar meningkat menjadi 228 pasar pada tahun 2007. Sedangkan untuk pasar tradisional menunjukkan bahwa tahun 2006 sebanyak 254 pasar meningkat menjadi 3348 pasar pada tahun 2007.

Perkembangan ekspor Prop. DIY, selama lima tahun terakhir ini berfluktuatif, baik nilai, volume, jenis komoditi, negara tujuan, dan serta pelaku ekspornya. Pada tahun 2006, apabila dibandingkan dengan tahun 2005, nilai ekspor turun sebesar 3,48%, dengan volume ekspor juga turun sebesar 12,24%,. Pada tahun 2007 realisasi ekspor juga turun baik volume maupun nilainya, bila dibandingkan dengan tahun 2006. Pada tahun 2006 realisasi ekspor mencapai nilai 138,47 juta US\$ dengan volume ekspor 41,49 juta kg, tahun 2007 nilai ekspor mencapai 125,56 juta US\$ dengan volume ekspor mencapai 36,62 juta kg. Sehingga terjadi penurunan nilai sebesar 9,32% dan penurunan volume sebesar 11,73%. Komoditi terbesar ekspor DIY adalah mebel kayu dengan volume dan nilai sebesar 14,42 juta kg dan 26,10 juta US\$ (2007).

Penurunan ini disebabkan adanya persaingan yang semakin kompetitif baik di dalam dan luar negeri, apalagi antar daerah satu dengan daerah yang lain, kesinambungan kinerja ekspor ke depan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku ekspor di bidang perdagangan luar negeri.

Negara tujuan ekspor utama adalah Amerika Serikat, selanjutnya diikuti oleh negara – negara Uni Eropa (Belanda, Italia, Perancis, Inggris, Jerman, Belgia, Spanyol, Denmark), Jepang, Australia, Kanada, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Taiwan, Hongkong, serta Uni Emirat Arab sebagai *entry point* dari negara Timur Tengah.

Perkembangan impor DIY yang tercatat di Dinas Perindagkop Propinsi DIY menunjukkan tahun 2007 realisasi impor mengalami peningkatan nilai tetapi dari sisi volume import mengalami penurunan apabila dibandingkan tahun 2006. Tahun 2006 realisasi impor hanya mencapai nilai 7,44 juta USD dengan volume import sebesar 59,80 juta kg. Tahun 2007 realisasi impor mencapai nilai 42,62 US\$ dan volume sebesar 8,39 juta kg sehingga terjadi peningkatan nilai sebesar 28,73% dan penurunan volume sebesar 8,39%.

Kontribusi sektor perdagangan (termasuk hotel dan restoran) memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB atas dasar harga berlaku, yaitu sebesar 19,03% pada tahun 2006 (DIY Dalam Angka 2006/2007 BPS DIY)

Q. KOPERASI DAN UKM

Program pembangunan dalam mengembangkan koperasi dan UKM di DIY, salah satunya adalah memberdayakan usaha mikro dan kecil dan menengah yang disinergiskan dengan kebijakan program dari Kementerian Koperasi dan UKM RI. Salah satu upaya pembinaan UKM adalah melalui kelompok (sentra) karena upaya ini lebih efektif dan efisien, di samping itu dengan sentra akan banyak melibatkan usaha mikro dan kecil. Dalam jangka panjang koperasi dan UKM perlu terus ditumbuhkembangkan untuk menopang roda perekonomian daerah khususnya dan perekonomian nasional umumnya.

Perkembangan UKM di Provinsi DIY dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 tercatat sebanyak 10.866 UKM, mengalami kenaikan 215 UKM atau (2 %) dibanding tahun 2006 yang berjumlah 10.651 UKM dengan jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 58.092 orang. Jenis usaha UKM meliputi usaha perdagangan, industri pertanian, industri non pertanian dan aneka usaha. Jumlah usaha terbesar UKM adalah usaha perdagangan, yaitu sebanyak 4.705.

Modal untuk perkuatan UKM semenjak tahun 2003 hingga tahun 2006 terus mengalami kenaikan, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar 303,69% yaitu mencapai Rp. 105.828.000.000,-. Upaya untuk meningkatkan fungsi dan peranan Koperasi dan UKM serta Pembiayaan Perekonomian Syariah dalam bidang permodalan telah dilakukan melalui dana stimulan (Dana Bergulir) yang bersumber dari APBN dan APBD TA. 2007.

Perkembangan koperasi juga terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 jumlah koperasi sebanyak 2.095, terdiri 1.414 koperasi aktif dan 681 koperasi tidak aktif dengan jumlah anggota keseluruhan 610.550 orang dan volume usaha sebesar rata-rata sebesar Rp. 1.086.048.

Unit-unit usaha koperasi yang berkembang baik antara lain koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, sentra kulakan koperasi, warung serba ada koperasi dan pelayanan koperasi bidang agribisnis.

R. PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Bahan galian yang terdapat di wilayah Provinsi DIY memiliki nilai ekonomis yang layak dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Potensinya meliputi 28 jenis bahan galian, baik golongan B maupun C. Golongan C paling banyak potensi pertambangannya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa di beberapa lokasi terdapat bahan galian yang potensinya melimpah seperti batu kapur/batu putih ($5.658.458.428 \text{ m}^3$), andesit ($18.522.921.220 \text{ m}^3$), bentonit/abu bumi ($4.406.206 \text{ m}^3$), feldspar/kaolin ($8.876.336.655 \text{ m}^3$), serta tanah liat dan zeolit yang tersebar di empat kabupaten se Provinsi DIY. Bahan galian tersebut pemanfaatannya sedang dioptimalisasikan. Eksploitasi kumulatif pada tahun 2007 tercatat batu andesit (terdiri dari batu kali, batu hitam, andesit, batu gunung, split, batu pecah dan koral) 163.918 m^3 , sirtu (terdiri dari pasir, sirtu, kerikil, pasir urug dan agregat) 287.448 m^3 , batu kapur/batu putih 109.157 m^3 , bentonit/abu bumi $397,7 \text{ m}^3$, tanah liat 2.587 m^3 , tanah urug $56.546,8 \text{ m}^3$, breksi/batu apung 33.876 m^3 .

Dalam bidang ketenagalistrikan, kebijakan pemerintah adalah meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah serta meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik energi dan listrik guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil. Kebutuhan energi, khususnya listrik, minyak dan gas di Provinsi DIY dipasok oleh PT. PLN dan PT Pertamina. Gambaran kinerja sektor pertambangan dan energi, khususnya listrik, minyak dan gas di Provinsi DIY pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- Ratio elektrifikasi sebesar 84,71% (perbandingan jumlah pelanggan dan jumlah rumah tangga), meningkat bila dibandingkan tahun 2006 (73,51%).
- Kebutuhan minyak dan gas: minyak tanah 116.730 kiloliter, premium 348.521 kiloliter, solar 91.496 kiloliter dan LPG 27.600 kiloliter.

S. KAPASITAS DAERAH

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya adalah kompetensi aparatur pemerintah, kualitas pelayanan dan kinerja pemerintahan. Dengan demikian, upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting dan sangat mendasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah, guna mempercepat proses peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat

Konsekuensi atas berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi dituntut lebih profesional dan proporsional dalam melaksanakan kewenangannya. Pelaksanaan kewenangan dilakukan melalui peningkatan kinerja/kapasitas aparatur Pemerintah Daerah, yaitu dengan berbagai kebijakan (suprastruktur), regulasi transisi dan penyiapan suprastruktur (organisasi Pemerintah Daerah) yang memadai. Untuk merespon peraturan perundangan tersebut, pada saat ini sedang disusun peraturan daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Hal lain yang turut memacu langkah percepatan peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah adalah adanya tuntutan masyarakat yang semakin kuat akan pelayanan publik yang baik, akuntabilitas dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat juga menuntut untuk senantiasa dilibatkan dalam setiap proses pembangunan, baik pada saat perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi. Tuntutan masyarakat tersebut belum sepenuhnya dapat direspon oleh Pemerintah, karena keterbatasan sarana dan prasarana pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pemerintah provinsi DIY telah melakukan reformasi birokrasi. Hal tersebut tercermin dari membaiknya proses dan prosedur pelayanan publik kepada masyarakat dan transparansi terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Pada tahun 2009 pemerintah mempunyai agenda besar yaitu pemilihan umum dan dilanjutkan dengan Pemilihan Presiden. Guna menjaga stabilitas dan keamanan pelaksanaan pemilu, pemerintah daerah perlu semakin meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak. Dengan terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang intensif, diharapkan proses pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan kejadian-kejadian anarkis yang dapat merugikan masyarakat.

Dalam bidang peraturan daerah selama tahun 2007 telah dihasilkan 30 produk hukum terdiri dari Peraturan Daerah sebanyak 7 dokumen dan Peraturan Gubernur 23 dokumen. Selain itu juga dihasilkan Keputusan Gubernur 203 dokumen, Keputusan Gubernur (Tim) 67 dokumen, Keputusan Gubernur (Panitia) 15 dokumen, Keputusan Gubernur (Pemberian Ijin) 106 dokumen, Keputusan Wakil Gubernur 2 dokumen, Keputusan Sekretaris Daerah 136 dokumen dan Perjanjian 30 dokumen.

Dari segi perencanaan, tahun 2009 merupakan tahun yang penting bagi keberlanjutan pemerintahan DIY karena tahun 2008 merupakan tahun terakhir masa pemerintahan gubernur. Sehingga perlu dijaga konsistensi pembangunan dari tahun ke tahun (RKPD) dengan mendasar kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Namun demikian dokumen perencanaan yang mengatur hal tersebut secara formal belum tersedia. Pada saat ini hanya ada satu dokumen perencanaan yang akan segera dibahas di DPRD, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Sedangkan dokumen yang lainnya masih dalam tahap penyusunan termasuk juga Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY (RTRW).

Dari sisi pengawasan, hasil pemeriksaan selama tahun anggaran 2006 menunjukkan jumlah temuan sebanyak 378, dengan 473 rekomendasi dan sudah ditindaklanjuti sebanyak 465 temuan. Hasil temuan tersebut mengakibatkan kerugian negara/daerah sebesar Rp.589.859.013 (sudah disetor sebesar Rp.479.815.192, sisa yang belum disetor Rp. 110.043.821) sedangkan kewajiban setor kepada negara/daerah sebesar Rp. 301.601.467 (sudah disetor sebesar Rp.175.449.277 dan sisa yang belum disetor Rp. 126.152.190).

Jumlah temuan dari hasil pemeriksaan selama tahun anggaran 2007 sebanyak 194 temuan dengan 267 rekomendasi dan sudah ditindaklanjuti 193 yang mengakibatkan kerugian negara/daerah sebesar Rp.267.235.831 (sudah disetor Rp. 166.525.780, sisa yang belum disetor Rp. 100.710.051) sedangkan kewajiban setor kepada negara/daerah sebesar Rp.1.216.167.384 (sudah disetor sebesar Rp.352.596.809 dan sisa yang belum disetor Rp. 863.570.575).

Dalam rangka untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Provinsi DIY melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sampai tahun 2007 Provinsi DIY telah melakukan kerjasama dalam negeri sebanyak 174, yang terdiri dari 58 kerjasama antar pemerintahan, 38 kerjasama antar lembaga dan 79 kerjasama dengan swasta. Sedangkan sedang dalam proses penyusunan naskah kerjasama ada 14 kerjasama. Kerjasama luar negeri terdiri dari: dalam bentuk *syster province* ada 7, kerjasama dengan lembaga swasta/pemerintah ada 3 dan kerjasama dalam bentuk kerjasama teknis ada 2, sedangkan kerjasama yang masih dalam proses penyusunan naskah ada 1.

Dalam rangka penguatan kapasitas aparatur sebagai penyelenggara pemerintahan terus menerus dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat). Pada tahun 2006, Pemerintah DIY telah menyelenggarakan 12 jenis diklat, yang diikuti oleh sebanyak 727 orang PNS, dengan perincian diklat teknis/fungsional sebanyak 501

orang, diklat struktural sebanyak 55 orang dan diklat pra-jabatan 171 orang. Pada tahun 2007 penyelenggaraan diklat mengalami peningkatan menjadi 13 jenis diklat, yang diikuti oleh sebanyak 1.678 orang PNS, dengan perincian diklat teknis/fungsional sebanyak 1.510 orang, diklat struktural sebanyak 60 orang dan diklat pra-jabatan 108 orang.

Upaya lain yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM aparatur adalah peningkatan standarisasi dan legalitas penyelenggaraan diklat antara lain ditunjukkan dengan telah terakreditasinya penyelenggaraan struktural. Sedangkan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah, telah dilakukan pengiriman tugas belajar dan diklat, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Di bidang kelembagaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Pemerintah Provinsi DIY, akan menyempurnakan sistem dan prosedur SOTK baru agar lebih efisien dan efektif, termasuk di dalamnya analisis kelembagaan organisasi penanggulangan bencana. Di samping itu penyempurnaan sistem pendukung penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terus menerus dilakukan. Kemudian dalam rangka mengefisienkan dan mengoptimalkan aparat/pegawai Pemerintah Provinsi DIY, menerapkan konsep *minus growth* yang berarti secara umum tidak ada penambahan pegawai, tetapi lebih pada pegawai yang sudah ada dioptimalkan dengan penempatan yang tepat, sampai tahun 2009 ini hanya akan mengangkat Pegawai Tidak Tetap menjadi CPNS.

Untuk mendorong peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah, salah satunya dilakukan dengan diterapkannya kebijakan *reward and punishment* yang diberikan secara normatif, arif dan mendidik. Dalam pengelolaan manajemen kepegawaian telah dilakukan berbagai upaya antara lain melalui Sistem Pengembangan Informasi Kepegawaian, pengembangan SIMPEG dan jaringan interkoneksi yang dapat diakses oleh semua SKPD. Dengan upaya-upaya yang dilakukan tersebut diharapkan dapat mendorong komitmen dan motivasi aparatur pemerintah untuk bekerja secara profesional serta dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Dari sisi keuangan daerah, realisasi PAD DIY tahun 2006 mencapai Rp 436,48 milyar (dari Rp.368,52 milyar yang ditargetkan), sedangkan kontribusi PAD terhadap APBD mencapai 51,29%. Sedangkan realisasi PAD tahun 2007 mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp. 489,87 milyar (dari Rp.420,56 milyar yang ditargetkan) dengan kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 57,87%. Namun demikian, hal ini masih perlu ditingkatkan lagi upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, pemberdayaan, peningkatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan aset-asetnya. Selain itu, koordinasi dan kerja sama yang lebih sinergis dengan pusat dan kabupaten/kota dalam menggali sumber-sumber pendapatan guna pembiayaan kebutuhan pembangunan di daerah juga perlu ditingkatkan.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, sistem informasi manajemen pemerintah merupakan salah satu pendukung pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan, pelayanan publik dan administrasi pembangunan. Salah satu wujud nyata pelayanan publik yang lebih baik adalah adanya transparansi informasi kepada masyarakat melalui berbagai media tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga masyarakat dapat merespon kebijakan kebijakan pemerintah daerah secara cepat.

Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintah daerah bidang informasi, komunikasi dan kehumasan dilaksanakan sepanjang tahun melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis.

Terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan, telah dilaksanakan pengembangan jaringan dan komunikasi untuk mendukung pelayanan informasi. Sampai dengan tahun 2007 telah tersambung 66 titik sambungan interkoneksi antar instansi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DIY.

Dalam rangka mensosialisasikan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan telah dilaksanakan publikasi liputan media televisi dan dialog interaktif melalui media televisi sepanjang tahun. Pada tahun 2007, kegiatan serupa dilaksanakan sebanyak untuk publikasi liputan media televisi 207 kegiatan, publikasi LKPJ melalui 3 SKH, pembuatan spanduk sejumlah 60 buah. Kegiatan dialog interaktif di televisi 14 kegiatan dan di radio 199 kegiatan. Untuk mendukung sosialisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan hasil-hasilnya disusun/dibuat Buletin Siaran Pemerintah Daerah "Jogjawara" sebanyak 12.000 exemplar edisi bulanan dan 1.000 exemplar edisi khusus. Kegiatan lainnya adalah dokumentasi kegiatan pemerintah daerah berbentuk visualisasi video dan foto yaitu sebanyak 4.320 foto dan 100 unit *Video Compact Disc* (VCD) dan 4.000 unit *leaflet*.

Fasilitasi kegiatan pelayanan informasi tentang kebijakan dan hasil-hasil pembangunan pada tahun 2006 telah dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan, sedangkan pada tahun 2007 kegiatan pelayanan informasi yang dilakukan sebanyak 5 kegiatan. Diantaranya meliputi pameran (Pameran Pembangunan dan Pameran Sekaten) disamping itu juga mengikuti Pameran Pekan Raya Jakarta dan Pameran Invesda Expo serta layanan informasi pada masyarakat melalui Plaza Informasi. Selama tahun 2007 Plaza Informasi dikunjungi oleh 23.624 orang.

Terkait dengan masalah kearsipan, peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, peningkatan sarana prasarana kerja dan peningkatan manajemen kearsipan terus dilakukan. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis (Bintek) dan fasilitasi sepanjang tahun. Peningkatan manajemen kearsipan dilaksanakan dengan pembinaan kearsipan di perangkat Provinsi.

T. INVESTASI

Peran investasi swasta maupun pemerintah dalam rangka mendorong laju pertumbuhan perekonomian nasional maupun daerah, perlu terus ditingkatkan. Hal ini terutama sebagai upaya peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan, pendapatan daerah dan masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja.

Untuk menarik minat investor agar mau menanamkan modalnya ke DIY diperlukan upaya-upaya yang dapat memberikan nilai tambah bagi calon investor. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan antara lain melalui tiga langkah pokok, yaitu pembentukan kesan positif (*image building*). pemanfaatan peluang (*investment generating*) serta pelayanan investasi (*investment servicing*) antara lain melalui One Stop Services (OSS).

Selain itu perlu juga dipersiapkan hal-hal yang menjadi pertimbangan bagi investor, antara lain tersediaan infrastruktur yang memadai, sumberdaya manusia yang terampil dan profesional, terpeliharanya keamanan dan kepastian hukum, serta berbagai insentif yang dapat diberikan kepada calon investor.

Perkembangan nilai persetujuan penanaman modal/investasi dan nilai realisasi investasi PMA/PMDN adalah sebagai berikut:

Persetujuan penanaman modal PMA/PMDN tahun 2006 tercatat PMA sebesar Rp.438.891 juta yang terdiri dari 13 proyek dan PMDN sebesar Rp.89.555 juta yang terdiri dari 3 proyek. Sedangkan realisasinya sebesar Rp.397.754,152 juta yang terdiri dari PMA sebesar

Rp.377.754,152 juta terdiri dari 10 proyek dan PMDN sebesar Rp.20.000 juta terdiri dari 1 proyek.

Pada tahun 2007 persetujuan penanaman modal PMA/PMDN tercatat PMA sebesar Rp.185.961,2 juta yang terdiri dari 14 proyek dan PMDN sebesar Rp.4.000 juta yang terdiri dari 1 proyek. Sedangkan realisasinya sebesar Rp.40.083,4 juta terdiri dari 5 proyek yang berasal dari PMA saja.

Pada tahun 2008 persetujuan penanaman modal PMA/PMDN tercatat sebesar Rp.78.490 juta yang terdiri dari 4 proyek, sedangkan PMDN tidak ada persetujuan penanaman modal. Realisasi nilai investasinya sebesar Rp.77.946,7 juta terdiri dari 2 proyek.

Rencana pencapaian investasi tahun 2009 diharapkan naik kurang lebih 10% dari tahun 2008 (PMDN menjadi Rp. 2,90 triliun dan PMA menjadi Rp. 4,45 triliun).

BAB III

RANCANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

A. KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH DAN PERKIRAAN TAHUN 2009

Kondisi ekonomi makro DIY pada tahun 2009 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun 2008. Peristiwa menonjol yang akan mempengaruhi perkembangan makro ekonomi DIY adalah adanya agenda pemilihan umum dan pemilihan presiden, sedangkan dari sisi kontribusi sektor-sektor masih didorong oleh sektor jasa-jasa, pertanian, perdagangan hotel restoran, dan industri pengolahan. Adanya agenda pemilihan umum dan pemilihan presiden 2009 akan menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi seperti industri percetakan, sablon, konveksi dan jasa hiburan.

Perkembangan ekonomi pada tahun 2006-2008 memperlihatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tahun 2006 walaupun terjadi bencana alam gempa bumi, ekonomi DIY mampu tumbuh 3,69%, lebih rendah sedikit dari perkiraan tumbuh 3,71%.
2. Tahun 2007 ekonomi DIY tumbuh 4,2%, lebih rendah dari proyeksi awal sebesar 4,68%. Angka pertumbuhan ini terutama disumbang oleh sektor bangunan, sektor listrik-gas-air bersih, sektor pengangkutan-komunikasi dan sektor perdagangan-hotel-restoran.
3. Tahun 2008 ekonomi DIY diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,00%, lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,40%

Dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya, maka pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2009 diproyeksikan tumbuh sebesar 4.30-4.60%. Angka tersebut masih tetap di bawah target pertumbuhan nasional yang diperkirakan bergerak antara 6,4%-7%. Kondisi ini disebabkan oleh, pertama, pemerintah beberapa tahun terakhir ini diuntungkan dengan boom migas, yaitu subsektor yang tidak dimiliki oleh DIY. Kedua, porsi sektor industri pengolahan sebagai sektor dengan efek pengganda besar, relatif lebih besar di tingkat nasional.

Faktor pendorong pertumbuhan tersebut adalah:

1. Masih didorong sektor jasa-jasa, sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor industri pengolahan
2. Kegiatan-kegiatan ekonomi dari kampanye pemilihan umum dan kampanye pemilihan presiden 2009, seperti industri percetakan, sablon, konveksi dan jasa hiburan.

Sedangkan faktor penghambat yang memungkinkan proyeksi tersebut tidak tercapai, antara lain:

1. Kenaikan berbagai harga barang termasuk bahan-bahan pokok yang terjadi sejak akhir 2007 hingga 2008 dimungkinkan berpengaruh pada sektor produksi maupun konsumsi masyarakat.
2. Krisis energi, akibat trend harga minyak internasional yang meningkat (bahkan lebih dari US\$ 100/barrel) diperkirakan berdampak pada biaya ekonomi tinggi pada semua sektor, khususnya transportasi dan manufaktur.

Peranan sektoral terhadap pembentukan PDRB pada tahun 2009 menunjukkan sektor perdagangan hotel dan restoran memberikan kontribusi terbesar. Peranan sektor berturut-turut dari yang tinggi ke rendah adalah sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor

pertanian, sektor jasa-jasa, sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor bangunan, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan, sektor listrik gas dan air bersih, dan yang terendah adalah sektor pertambangan dan penggalian.

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 4.30-4.60%, maka PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2009 diperkirakan mencapai sebesar Rp.19.819.776,05-Rp 19.876.784,03 juta. Perkembangan PDRB DIY atas dasar harga konstan 2000, dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, pada tahun 2005 sebesar Rp.16.911.053 juta, tahun 2006 sebesar Rp.17.535.354 juta, tahun 2007 ditargetkan sebesar Rp.18.271.790 juta, dan tahun 2008 Rp.19.002.661,60 juta.

Perkembangan tingkat inflasi sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Inflasi Propinsi DIY dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang fluktuatif tergantung kestabilan kondisi politik dan ekonomi pada saat itu. Di samping itu pengaruh faktor musiman seperti tahun ajaran baru dan musim liburan juga mempunyai peran dalam mendorong inflasi DIY.

Perkembangan inflasi pada tahun 2005-2008 menunjukkan tingkat inflasi di DIY masih cukup tinggi, merupakan tingkat inflasi tertinggi di antara kota-kota di pulau Jawa. Secara berurutan tingkat inflasi di DIY dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahun 2005 tingkat inflasi sangat tinggi, yaitu sebesar 14,98%. Hal ini dipengaruhi oleh naiknya biaya produksi, merosotnya nilai tukar rupiah dan naiknya suku bunga perbankan.
2. Tahun 2006 tingkat inflasi turun menjadi 10,40%, tetapi masih diatas inflasi nasional sebesar 6,60%. Hal ini terkait dengan melonjaknya harga kelompok makanan terutama beras, sebagai akibat kebijakan pemerintah terhadap harga komoditas barang strategis (kenaikan harga dan kelangkaan BBM), dampak gempa dan kemarau panjang
3. Tahun 2007 tingkat inflasi lebih rendah dari 2006, yaitu turun menjadi 8,00%.
4. Tahun 2008 tingkat inflasi diperkirakan mencapai 10,10%, mengalami kenaikan dibandingkan 2007

Dengan memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi, maka tingkat inflasi di DIY pada tahun 2009 diperkirakan mengalami penurunan apabila dibandingkan 2008, yaitu menjadi sebesar 9,00%.

B. ARAH KEBIJAKAN PEREKONOMIAN DAERAH

Dalam rangka mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat, maka arah pengembangan perekonomian daerah adalah:

1. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan mengembangkan sistem dana jaminan sosial melalui program pemerintah.
2. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membantu keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, pertambangan, pariwisata serta industri kecil dan kerajinan rakyat.
3. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap

kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan.

4. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari pemerintah diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan latihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan dan lokasi berusaha.
5. Menata dan menyehatkan Badan Usaha Milik Daerah secara efisien, transparan dan profesional terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum.
6. Mengembangkan dukungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan BUMD, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi daerah.
7. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani dan nelayan serta peningkatan produksi.
8. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah dan ramah lingkungan dan secara berkelanjutan.
9. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik, dan air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil.
10. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu dan diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, meningkatkan pengupahan, penjaminan, kesejahteraan, perlindungan kerja dan kebebasan berserikat.
11. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi, perlindungan dan pembelaan tenaga kerja yang dikelola secara terpadu dan mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja.
12. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha terutama UKM dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.
13. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran, yang merupakan dampak dari krisis ekonomi.
14. Melakukan negosiasi dan kerjasama ekonomi baik dengan daerah lain maupun negara lain dalam rangka meningkatkan volume dan nilai ekspor terutama dari sektor industri yang berbasis sumber daya alam, serta menarik investasi finansial dan investasi asing tanpa merugikan pengusaha lokal/ daerah.

C. SUMBER PEMBIAYAAN DAERAH

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, sumber pembiayaan daerah dalam APBD masih menggantungkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendanaan APBD tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Pendapatan Asli Daerah**, terdiri dari:

- a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah.
- b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir, Retribusi Penjualan Usaha Daerah, Retribusi Ijin Trayek, Retribusi Dispensasi kelebihan Muatan dan Retribusi Jasa Umum
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Keuangan Non Bank, Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Angsuran/Cicilan Rumah Dinas, PT Jasa Raharja dan Pendapatan lain-lain

Kontribusi terhadap penerimaan PAD berturut-turut mulai dari yang tertinggi adalah:

- a. Pajak Daerah, terutama berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, terutama berasal dari Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Penerimaan PT Jasa Raharja dan Pendapatan lain-lain
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, terutama berasal dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah dan Bagian Laba Keuangan Non Bank
- d. Retribusi Daerah, terutama berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir, Retribusi Penjualan Usaha Daerah, Retribusi Dispensasi kelebihan Muatan dan Retribusi Jasa Umum

2. **Dana Perimbangan**, terdiri dari:

- a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah propinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah propinsi, bobot daerah propinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah propinsi.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Perimbangan dan PAD merupakan sumber pendanaan utama dalam pembiayaan pembangunan daerah. Dari tahun ke tahun sumber pembiayaan yang berasal dari Dana Perimbangan kecenderungannya terus meningkat. Untuk DAK, karena sifatnya yang khusus, pemberian Dana Perimbangan yang berasal DAK dari Pemerintah kepada

daerah bersifat tidak tetap setiap tahunnya tergantung kepada kebutuhan daerah. Pada tahun 2005-2007 Provinsi DIY tidak mendapatkan DAK, sedangkan pada tahun 2008 mendapatkan DAK untuk infrastruktur jalan dan irigasi.

3. **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**, terdiri dari:

- a. Pendapatan Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja.
- b. Sumber pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengandalkan dari sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif dan PT. Jasa Raharja.

D. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, APBD Provinsi DIY yang dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan. Pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah juga menunjukkan kecenderungan yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/ daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pada tahun 2009 pendapatan daerah (PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah) ditargetkan naik sebesar 3,57% apabila dibandingkan target tahun 2008, yaitu dari Rp.1,086 trilyun menjadi Rp.1,125 trilyun.

2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
- b. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah.
- c. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah
- d. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat

- e. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.
- f. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah

Peningkatan PAD di tempuh dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan. Intensifikasi dikaitkan dengan usaha untuk melakukan pungutan yang intensif, yaitu secara ketat, giat dan teliti, sedangkan ekstensifikasi berhubungan dengan usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru.

Upaya yang dilakukan, antara lain: penelitian potensi PAD, pembebasan BBN-KB II, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi Samsat Pembantu di Bantul dan Sleman untuk mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak, kegiatan rasia kendaraan bermotor dalam rangka upaya penagihan terhadap tunggakan pajak, penagihan pajak daerah *door to door*, pelayanan kesamsatan dengan mobil keliling. pelayanan kesamsatan pada *event* tertentu di kabupaten/kota seperti pameran pembangunan, pasar malam sekaten dan lain-lain.

3. Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait dengan kegiatan, sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan program/kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja tak terduga. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Selain itu belanja daerah juga dibagi dalam belanja untuk urusan wajib dan belanja untuk urusan pilihan.

4. Arah Kebijakan Belanja Daerah

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prastasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SILPA).

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

BAB IV PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

PERMASALAHAN

A. KEPENDUDUKAN

1. Jumlah dan pertumbuhan penduduk DIY yang semakin meningkat.
2. Persebaran penduduk DIY yang tidak merata.
3. Kualitas penduduk yang semakin menurun.
4. Meningkatnya urbanisasi penduduk dari desa ke kota.

B. TENAGA KERJA

1. Jumlah pengangguran yang semakin meningkat, karena adanya ketimpangan kesempatan kerja dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia.
2. Rendahnya ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja.
3. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha.
4. Lemahnya perlindungan, pengawasan dan kesejahteraan tenaga kerja.
5. Rendahnya Investasi sehingga daya serap tenaga kerja rendah.
6. Belum efektifnya Kerjasama Antar Daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi.

C. PENDIDIKAN

1. Belum optimalnya pemerataan dan aksesibilitas pendidikan.
2. Ketimpangan sumber daya pendidikan termasuk teknologi informasi dan kualitas pendidikan antardaerah/wilayah.
3. Animo masuk mahasiswa baru dari luar DIY belum pulih kembali seperti sediakala.
4. Daya saing pendidikan di tingkat nasional/internasional masih belum memadai.
5. Masih rendahnya minat dan budaya baca pada masyarakat.
6. Masih terbatasnya penyediaan fasilitas/ruang publik penunjang pendidikan yang representatif.
7. Belum sepenuhnya terwujud kondisi lingkungan yang kondusif terhadap pendidikan.

D. KEBUDAYAAN

1. Nilai-nilai luhur, kehidupan seni, bahasa dan sastra, adat dan tradisi yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat jika tidak dilestarikan, maka lama kelamaan akan punah ditelan jaman akibat globalisasi.
2. Sebagian Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya keadaannya rusak berat dan kondisinya cenderung mengalami keruntuhan yang disebabkan oleh faktor biotis, chemis, fisik dan mekanis serta terjadi intrusi sosial.

3. Banyaknya tindak kejahatan terhadap BCB dan KCB melalui pencurian, penjualan gelap, dan sebagainya.
4. Rendahnya minat masyarakat untuk mengunjungi museum yang disebabkan kurang menariknya tampilan benda koleksi yang disajikan.
5. SDM di bidang pelestarian seni budaya, baik yang bersifat modern maupun tradisional hampir mengalami stagnasi dalam kreativitas yang disebabkan kurangnya apresiasi dan manajemen pasca kreasi, termasuk rendahnya tingkat regenerasi.
6. Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana infrastruktur kebudayaan yang memadai untuk mengelola potensi kekayaan budaya Yogyakarta
7. Menurunnya pemahaman, penghargaan atas nilai-nilai budaya dan ketahanan budaya
8. Belum termanfaatkannya secara optimal teknologi informatika dan komunikasi untuk kegiatan pengembangan kebudayaan.
9. Terputusnya rantai hubungan antara pelaku pariwisata dan pekaya seni menyebabkan potensi kesenian belum termanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pariwisata
10. Kebanyakan pembangunan fisik hanya mengutamakan aspek teknis dan fungsi, mengesampingkan aspek filosofi makna simbolis yang terkandung.

E. PARIWISATA

1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang profesional.
2. Kerjasama lintas sektoral birokrasi yang belum sinergis
3. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kegiatan pariwisata yang belum mantap
4. Kondisi beberapa obyek wisata yang belum mencerminkan SAPTA PESONA (Aman-Tertib-Bersih-Sejuk-Indah-Ramah-Kenangan)

F. KESEHATAN

1. Masih tingginya angka kematian ibu, bayi dan balita
2. Tingginya kematian akibat penyakit tidak menular (jantung, stroke, hipertensi dan diabetes) termasuk akibat kecelakaan dan rudapaksa
3. Tingginya prevalensi gizi buruk
4. Tingginya prevalensi dan kematian akibat penyakit menular (penyakit TB, HIV/AIDS dan DBD)
5. Masih ditemukannya penularan indigenous malaria dan daerah dengan risiko (episentrum) KLB malaria
6. Tingginya penyakit akibat penyalahgunaan Napza
7. Redahnya perilaku hidup sehat masyarakat di DIY.

G. SOSIAL

1. Masih tingginya jumlah penyandang kesejahteraan sosial yang merupakan kategori masyarakat paling rendah kemampuannya untuk menolong dirinya sendiri.

2. Meningkatnya jumlah penyandang cacat khususnya yang berasal dari keluarga miskin.
3. Meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut terlantar yang memerlukan bantuan.
4. Semakin banyaknya gelandangan dan pengemis (tuna wisma, orang terlantar, anak jalanan)
5. Peranserta masyarakat dalam usaha pembangunan pembangunan sosial belum optimal.
6. Kualitas sumber daya manusia yang handal di bidang pembangunan kesejahteraan sosial khususnya pembangunan sosial masyarakat relatif masih rendah.
7. Kurangnya sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial baik system panti maupun non panti.

H. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan di bidang politik dan jabatan publik.
2. Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak
4. Masih adanya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki (kesenjangan gender).
5. Banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan belum peduli anak.
6. Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak termasuk ketersediaan data dan rendahnya partisipasi masyarakat.

I. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

1. Masih terjadinya berbagai bentuk gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat antara pelanggaran disiplin lalu lintas, pelanggaran hukum, kenakalan remaja serta penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.
2. Masih adanya berbagai macam/jenis kejahatan yang cenderung meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas.
3. Perlindungan masyarakat dan pembelaan negara (bela negara) masih perlu ditingkatkan.
4. Adanya kemiskinan dan pengangguran yang cenderung meningkat dapat menimbulkan kerawanan sosial yang dapat berpengaruh pada perwujudan atau penetapan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. Adanya globalisasi mengakibatkan komunikasi dan informasi menjadi sulit tersaring dan terbandung yang akhirnya bisa membawa pengaruh negatif pada ketentraman dan ketertiban masyarakat.

J. SARANA DAN PRASARANA WILAYAH

1. Transportasi

- a. Program penanganan transportasi, terutama jaringan jalan, yang dilakukan pemerintah ditekankan pada upaya mempertahankan berfungsinya jaringan jalan. Dengan keterbatasan anggaran, penanganan yang dilakukan belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan untuk mengatasi penurunan kondisi jalan. Apabila

penanganan jalan terlambat akan terjadi kerusakan jalan yang lebih cepat dan parah yang mengakibatkan biaya perbaikan yang jauh lebih besar (dibandingkan dengan perawatan rutin).

- b. Aksesibilitas wilayah dalam provinsi belum merata (beban lalu-lintas perkotaan semakin meningkat akibat tingkat kepadatan penduduk perkotaan yang semakin tinggi sedangkan masih banyaknya wilayah-wilayah yang terpencil/terisolasi akibat kondisi topografi yang berbukit-bukit menuntut upaya ekstra dalam penyediaan jaringan sarana dan prasarana).
- c. Akses ke luar wilayah provinsi belum optimal.
- d. Overload-nya volume lalu-lintas terhadap kapasitas jalan di beberapa ruas jalan.
- e. Penyalahgunaan ruas-ruas jalan (untuk kegiatan perdagangan, PKL, bongkar muat barang, naik/turun penumpang dll).
- f. Masih banyaknya tempat-tempat wisata yang belum terjangkau oleh pelayanan transportasi secara maksimal
- g. Masih adanya infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi kurang baik, akibat adanya bencana alam
- h. Banyaknya fasilitas keselamatan jalan yang hilang / rusak
- i. Kenyamanan dan waktu tempuh dalam perjalanan kurang memenuhi target dan harapan pengguna jalan dan angkutan umum
- j. Belum adanya terminal barang (bongkar-muat) yang representatif dan tidak adanya pembatasan area serta waktu operasi angkutan yang masuk ke dalam kota.
- k. Masih banyaknya perlintasan yang tidak dijaga, khususnya untuk yang berada di wilayah Yogyakarta.
- l. Perkembangan Bandara Adisucipto yang sangat pesat memerlukan peningkatan layanan prasarana penunjang yang lebih handal. Pengembangan konsep terminal multimoda diharapkan mampu mengurangi beban lalu lintas di sekitar bandara.
- m. Belum semua lokasi pendaratan kapal / TPK dilengkapi dengan [Sarana Bantu Navigasi Pelayaran](#) terutama untuk rambu alur

2. Sumber Daya Air

- a. Daerah tangkapan air
Penggunaan tanah dan pengelolaan tanah yang tidak baik di daerah tangkapan air telah menyebabkan percepatan erosi dan secara langsung dapat menurunkan produktivitas tanah serta menurunkan kuantitas dan kualitas air yang mengalir di badan sungai. Dengan terjadinya peningkatan beban sedimen didalam sistem sungai akibat erosi akan mengakibatkan perubahan kondisi hidromorfologi yang akibat lanjutannya adalah meningkatnya aliran permukaan dan menurunnya aliran dasar (*base flow*).
- b. Alih fungsi lahan
Pertambahan penduduk yang semakin meningkat, seiring dengan kebutuhan penduduk akan ruang-ruang hunian dan ruang pekerjaan, membuat beberapa areal lahan mengalami perubahan fungsi secara dramatis. Perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan penataan tata ruang wilayah, membuat kondisi hidrologi WS Progo-Opak-Oyo berubah pula. Terutama hal ini berkaitan dengan masalah konservasi daerah tangkapan air WS Progo-Opak-Oyo.
- c. Penurunan Kuantitas dan Kualitas air

Peningkatan limbah cair dari kegiatan penduduk dan industri secara langsung menyebabkan penurunan kualitas air di badan air di daerah yang bersangkutan.

d. Ketidakefisienan pemakaian air oleh masyarakat

Indikasi tidak efisiensinya pemakaian air diantaranya adalah di WS POO penggunaan air cenderung berlebihan. Kebiasaan masih mendominasi aktivitas bertani masyarakat yaitu menggunakan air yang berlebihan untuk jenis tanaman yang hanya memerlukan aliran air tertentu. Di Van Der Wijck dan Selokan Mataram (bagian hulu) banyak penggunaan air (khususnya untuk kolam ikan) yang seharusnya dapat dikembalikan ke system irigasi, ternyata langsung di buang ke sungai.

e. Pengambilan bahan galian C yang tidak terkendali

Berkurangnya pasokan sediment akibat pengambilan bahan galian golongan C berakibat terjadi degradasi sungai. Untuk menjaga kondisi morfologis sungai perlu penanganan secara baik antara lain perbaikan regulasi dan system perijinan dan pengawasan.

f. Banjir dan Kelangkaan Air

Banjir yang perlu mendapat perhatian adalah meluapnya Kali Tambak Bayan, Kali Code, dan Gajah Wong karena walaupun skalanya kecil namun banjir yang terjadi akan melewati daerah yang padat penduduk.

g. Kekeringan

Pada saat musim kemarau, kekeringan dan kelangkaan air merupakan masalah yang harus dihadapi oleh sebagian penduduk di Wilayah Sungai Progo-Opak-Oyo. Melihat kondisi geologi di wilayah kekeringan untuk di Kabupaten Kulon Progo diperlukan pembangunan waduk atau embung, untuk Kabupaten Gunung Kidul dengan mengoptimalkan penggunaan air bawah tanah yang potensinya cukup besar.

h. Kelembagaan

Adanya perubahan regulasi mengenai kelembagaan dengan adanya penataan struktur organisasi dan tata kerja berdampak pada belum adanya panduan dan pedoman terutama organisasi yang menangani pengelolaan irigasi. Di samping itu dengan adanya organisasi pusat di daerah maka pembagian peran penanganan perlu ada kesepakatan penanganan yang jelas antara pusat dan daerah.

3. Keciptakarya

a. Air Bersih

Permasalahan yang terjadi adalah pelayanan air bersih perpipaan di Kabupaten Bantul hanya memenuhi 23% kebutuhan, di Kabupaten Gunung Kidul 45%, Kabupaten Kulon Progo 42%, dan Kabupaten Sleman 20%. Sedangkan Kota Yogyakarta air bersih perpipaan dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan namun menghadapi kendala penurunan kapasitas produksi.

Perkembangan permukiman yang tumbuh pesat menuntut akan kebutuhan air bersih semakin bertambah, dengan demikian keberadaan PDAM sangat diharapkan oleh masyarakat. Namun karena berbagai kendala dan permasalahan maka perusahaan belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan senantiasa mengalami kerugian adalah karena tingginya biaya operasional tidak sebanding dengan pendapatannya.

b. Persampahan

Permasalahan persampahan dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Volume sampah yang selalu meningkat dan Tenaga angkut serta pengumpul sampah terutama yang melayani jalan-jalan di perkotaan dan jalan diwilayah lain terasa kurang sehingga perlu ditambah. Pada wilayah yang belum terjangkau sistem, penduduk membuang sampah di halaman rumah atau lahan kosong yang ada. Sejauh ini masih dijumpai pembuangan tidak terkendali di lahan kosong atau di sungai.

Sedangkan permasalahan persampahan yang terjadi adalah pengelolaan masih konvensional, kapasitas SDM rendah, peralatan belum memadai, dan kesadaran masyarakat rendah.

Dalam pengelolaan TPA diperlukan instalasi air lindi dan pengolahannya, dan alat berat baik untuk meratakan maupun pemadatan. Pelatihan ketrampilan dan penyediaan tempat pemisahan sampah ditiap keluarga merupakan hal yang harus dipikirkan dalam membentuk masyarakat peduli sampah.

c. Air Limbah

Limbah cair industri (dari industri besar maupun kecil) masih sering dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan. Pelayanan pengurusan tanki septik atau cubluk biasanya dilakukan oleh swasta dengan truk tinja atau secara manual. Biasanya lumpur dari tanki septik/cubluk baru disedot kalau fasilitasnya sudah buntu (dan sudah lama tidak berfungsi). Lumpur limbah ini dapat diolah di IPAL, tetapi masih sering langsung dibuang ke lingkungan. Membuang limbah air mandi, cuci dan dapur langsung ke saluran drainase masih sering dijumpai.

Fasilitas sanitasi komunal dilayani dengan menggunakan MCK (Mandi, Cuci, Kakus), namun masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam desain dan pelaksanaan fasilitas tersebut dan akibatnya tingkat rasa tanggung jawabnya masyarakat terhadap fasilitas tersebut menjadi rendah.

Terdapat fasilitas pengolahan air limbah terpusat di Kabupaten Bantul (IPAL Sewon), namun sampai kondisi saat ini pelayanannya masih sebatas perkotaan untuk Kota Yogyakarta dan sebagian wilayah Kabupaten Sleman.

Sudah mulai terasa dari munculnya pencemaran air tanah yang melewati ambang batas yang diperbolehkan.

Rumusan masalah dapat terangkum sebagai berikut ini:

- 1) Septic Tank tidak memenuhi syarat
- 2) Ketidakteraturan penyedotan tinja
- 3) Instalasi pengelolaan lumur tinja (IPLT) belum cukup tersedia
- 4) Kesadaran masyarakat rendah
- 5) Saluran limbah terbatas
- 6) Keterbatasan inovasi teknologi tepat untuk penanganan limbah (bau)

d. Drainase

- 1) Terjadinya genangan pada beberapa lokasi di wilayah Provinsi DIY
- 2) Kebijakan pembangunan antar kawasan:
 - a) Belum adanya kebijakan yang terpadu antar wilayah kota dan kabupaten di propinsi DIY untuk pengendalian kawasan resapan di daerah hulu sungai.
 - b) Belum adanya peraturan untuk mengendalikan luas lahan terbuka sebagai daerah resapan air.

- c) Belum adanya koordinasi dari para pelaku pengelolaan dari setiap komponen infrastruktur dalam perencanaan maupun pembangunannya.
- 3) Koordinasi pengawasan pembangunan
 - a) Perubahan Peruntukan Lahan
 - b) Pelanggaran terhadap Rasio KDB atau Koefisien Dasar Bangunan
 - c) Diabaikannya batas Peil Banjir
 - d) Pelanggaran Penggunaan Lahan Pada Kawasan Konservasi
- 4) Kondisi eksisting system drainase.
 - a) Tingkat pelayanan sistem yang ada masih rendah.
 - b) Kapasitas saluran belum di disain menurut sistem blok kawasan yang harus dilayani.
 - c) Sedimentasi dan timbunan sampah menyebabkan kapasitas pengaliran saluran berkurang.
 - d) Genangan yang terjadi dari hasil pengamatan disebabkan oleh luapan, baik dari jaringan tersier, sekunder maupun primer.
 - e) Sistem jaringan belum tertata menurut hirarki saluran.
 - f) Ukuran gorong – gorong yang terlalu kecil.
- e. Tata Bangunan dan Lingkungan
 - 1) Belum tertatanya Bangunan dan Lingkungan
Kurang ditegakkannya aturan keselamatan, keamanan dan kenyamanan Bangunan Gedung termasuk pada daerah-daerah rawan bencana
 - 2) Belum adanya penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
Prasarana dan sarana hidran kebakaran banyak yang tidak berfungsi dan kurang mendapat perhatian
 - 3) Tidak adanya program penataan dan pelestarian bangunan tradisonal/ bersejarah
Kurang diperhatikannya permukiman-permukiman tradisional dan bangunan gedung bersejarah, padahal punya potensi wisata.
 - 4) Belum tersedianya ruang terbuka hijau
Sarana lingkungan hijau/open space atau public space, sarana olah raga, dan lain-lain kurang diperhatikan hampir di semua kota, terutama kota Metro dan Besar.
 - 5) Tidak ada penataan dan pembangunan sarana prasarana permukiman kumuh
Lemahnya pengaturan penyelenggaraan Bangunan Gedung di daerah serta rendahnya kualitas pelayanan publik dan perijinan
 - 6) Belum tertibnya sarana reklame, belum terkelolanya sarana parkir dan Belum tertanya perijinan Bangunan Telepon Selular (BTS)
 - 7) Belum adanya penataan yang terpadu terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima
Terjadinya degradasi kawasan strategis, padahal punya potensi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan kota.

4. Perumahan

- a. Dari sisi permintaan, kemampuan ekonomi masyarakat sangat terbatas, pendapatan sekitar 70% rumah tangga perkotaan kurang dari Rp 1,5 juta per-bulan, dan kendala lain terbatasnya sumber pembiayaan perumahan.

- b. Sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lebih dari 33% tidak mempunyai peluang untuk memiliki perumahan berdasarkan mekanisme pemasaran perumahan yang ada, sehingga untuk fasilitasi dalam pembiayaan perumahan bagi MBR memerlukan mekanisme yang berbeda.
- c. Harga tanah dikawasan perkotaan tidak terjangkau untuk menyediakan perumahan bagi MBR, sedangkan mereka mempunyai mata pencaharian di perkotaan.
- d. Pembangunan dan penataan perumahan bagi MBR masih belum menjadikan prioritas utama bagi pemerintah Kab/Kota, dengan masih minimnya institusi khusus di pemerintah daerah yang menangani perumahan.
- e. Masih belum tertanganinya secara keseluruhan penataan perumahan di bantaran-bantaran sungai dan kawasan padat kumuh di kawasan perkotaan
- f. Belum adanya penetapan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun/Berdiri Sendiri (LISIBA/BS) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

K. TATA RUANG

- 1. Kesenjangan pertumbuhan wilayah (antar kawasan, antara wilayah tengah dengan wilayah barat dan timur, serta bagian tengah / utara dengan selatan).
- 2. Tekanan eksploitasi terhadap sumber daya alam/perubahan fungsi lahan.
- 3. Dokumen penataan ruang masih terbatas pada tingkat makro (RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota), masih terbatasnya rencana tata ruang rinci yang lebih bersifat operasional.
- 4. Pola pemanfaatan ruang khususnya pada wilayah perkotaan yang cenderung tidak teratur.
- 5. Pengendalian pemanfaatan ruang yang masih kurang efektif.
- 6. Intensitas pertemuan dalam kelembagaan penataan ruang (BKPRD) guna membahas substansi masih kurang.
- 7. Sosialisasi dokumen penataan ruang masih kurang
- 8. Belum adanya sistem informasi penataan ruang berbasis web

L. LINGKUNGAN HIDUP

- 1. Pencemaran sungai dan sumber-sumber air oleh limbah industri dan limbah domestik.
- 2. Menurunnya kualitas air tanah yang merupakan sumber air minum dan keperluan sehari-hari penduduk yang diakibatkan oleh meningkatnya pencemaran air tanah oleh limbah rumah tangga.
- 3. Penurunan kualitas udara ambient akibat aktifitas transportasi terutama di wilayah perkotaan (aglomerasi Kota Yogyakarta).
- 4. Pelanggaran tata ruang dan tata guna lahan akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.
- 5. Kurangnya komitmen dan sinergisitas para pemangku kepentingan dalam menangani permasalahan lingkungan hidup serta kurang terintegrasinya dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- 6. Erosi, tanah longsor, dan banjir pada musim hujan.

7. Pemahaman dan kesadaran berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan masih relatif rendah.
8. Kerusakan akibat kegiatan pertambangan bahan galian golongan C berupa batu, pasir tanah urug, batu kapur, gamping dan sebagainya baik yang dilakukan oleh masyarakat yang berijin maupun tidak berijin.
9. Eksploitasi/pengambilan daun pandan yang berfungsi sebagai buffer/jalur hijau, serta pengambilan terumbu karang.
10. Kerusakan akibat abrasi pantai terjadi pada pantai Trisik (Kulan Progo), Samas (Bantul), Sundak (Gunungkidul) dan Krakal (Gunungkidul). Kerusakan diakibatkan oleh erosi gelombang laut dan abrasi, dan diperburuk oleh hilangnya vegetasi pantai.
11. Perkembangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Sleman khususnya yang berdampak terhadap perubahan lahan (konversi lahan) berpengaruh cukup signifikan terhadap ketersediaan air tanah di wilayah bawahnya.
12. Pada musim penghujan terjadi peningkatan erosi tanah dan banjir yang destruktif di daerah sekitar sungai serta meningkatnya luasan genangan air di wilayah perkotaan yang mengganggu aktifitas penduduk.

M. PERTANIAN

1. Pertanian TPH dan Peternakan

- a. Harga sembilan bahan pokok semakin tinggi, mengakibatkan berkurangnya kemampuan petani untuk membeli saprotan.
- b. Berkurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani/tenaga kerja di sektor pertanian.
- c. Tingginya alih fungsi lahan pertanian yang sulit dikendalikan.
- d. Minimnya kepemilikan dan semakin menurunnya daya dukung lahan.
- e. Pemanfaatan lahan kering belum optimal.
- f. Pemanfaatan benih/bibit unggul belum optimal.
- g. Keterbatasan akses modal untuk saprodi.
- h. Masih besarnya jumlah petani miskin.
- i. Daya saing produk pertanian masih rendah.
- j. Masih rendahnya akses teknologi dan akses teknologi di setiap sub sistem agribisnis.
- k. Adanya wabah penyakit ternak/unggas yang berdampak pada kesehatan manusia.
- l. Berkembangnya hama/penyakit tanaman.
- m. Kelembagaan pertanian relatif stagnan/belum optimal (petani, penyuluh dan agribisnis).
- n. Anomali iklim (kekeringan dan banjir) yang sulit diprediksi.
- o. Masih rendahnya kemampuan sumberdaya manusia pertanian.

2. Kehutanan dan Perkebunan

- a. Produksi dan Produktifitas serta mutu produk komoditas perkebunan belum sesuai dengan standar teknis
- b. Kelembagaan petani kebun/hutan belum optimal
- c. Aneka produk perkebunan secara keseluruhan belum memenuhi standar mutu

- d. Penurunan daya dukung lahan, air, hutan dan kebun (tingkat kesuburan tanah)
- e. Menurunnya tenaga kerja muda di sektor perkebunan
- f. Sumber Daya Manusia aparatur perkebunan masih terbatas
- g. Masih adanya hama penyakit buah kakao dan penggerek buah kelapa
- h. Belum diperbaikinya sarana prasarana hutan yang rusak akibat gempa
- i. Masih adanya penduduk prasejahtera disekitar kawasan hutan sehingga ketergantungan dari fungsi ekonomi terhadap hutan masih tinggi
- j. Kawasan lahan kritis/marginal belum tertangani secara baik
- k. Kerapatan tanaman hutan masih ada yang dibawah normal
- l. Status dan fungsi hutan belum secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan
- m. Kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan masih kurang
- n. Masih terjadinya pencurian hasil hutan (di kawasan hutan)
- o. Penataan dan peredaran hasil hutan masih kurang (masih beredarnya kayu ilegal)
- p. Peredaran bibit/benih hutan dan kebun yang belum berlabel/ bersertifikat masih cukup tinggi
- q. Implementasi Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Biofuel belum sepenuhnya terfasilitasi

3. Perikanan dan Kelautan

- a. Adanya perubahan iklim yang berakibat mengganggu penangkapan ikan di laut serta rusaknya sarana prasarana akibat tsunami/gelombang pasang.
- b. Penerapan teknologi di sub sistem usaha perikanan dan kelautan masih rendah.
- c. Kurang motivasi pembudidaya/nelayan muda dalam usahanya di perikanan.
- d. Masih adanya nelayan dalam kondisi pra sejahtera.
- e. Penyediaan hasil perikanan dan kelautan belum mampu mengimbangi kebutuhan ikan di Propinsi DIY.
- f. Masih rendahnya kemampuan SDM aparatur dan pembudidaya/ nelayan.
- g. Masih rendahnya daya saing produk perikanan dan kelautan.
- h. Belum optimalnya kelembagaan di tingkat pembudidaya/nelayan maupun di kabupaten/kota.
- i. Sarana pelabuhan Glagah masih perlu dilengkapi untuk kesiapan beroperasionalnya.
- j. Masih adanya konflik kepentingan antara subsektor terkait dalam penggunaan lahan dan air.
- k. Masih terbatasnya pengawasan terhadap keamanan pangan perikanan dan kelautan.
- l. Terbatasnya akses modal dan pasar.
- m. Masih belum lancarnya pendataan di bidang perikanan dan kelautan.

N. INDUSTRI

- 1. Pemulihan IKM pasca gempa belum selesai.
- 2. Bahan baku untuk beberapa jenis industri tertentu masih tergantung dari daerah lain.

3. Masih banyaknya IKM yang menggunakan mesin tradisional dan mesin yang sudah melampaui batas usia teknis dan ekonomis.
4. Lemahnya pengembangan desain produk, inovasi teknologi dan diversifikasi produk.
5. Kemampuan SDM dalam menggunakan teknologi masih terbatas.
6. Kemampuan dalam mengakses pasar/informasi pasar melalui teknologi informasi masih terbatas.
7. Terbatasnya jaringan pasar IK.
8. Kurangnya kemitraan dalam usaha pemasaran IK.
9. IKM belum memanfaatkan peluang pasar secara optimal, disamping itu adanya isu HAM, Lingkungan hidup, HaKI yang juga harus diperhatikan oleh IKM.
10. Kemampuan promosi IKM masih terbatas, disebabkan biaya promosi dianggap masih relatif cukup tinggi dan bantuan promosi pemerintah masih terbatas.
11. Kurangnya IKM dalam menerapkan standar mutu dan sistem mutu.

O. **PERDAGANGAN**

1. **Usaha Kecil Menengah**

- a. Maraknya lalu lintas barang illegal dan semakin ketatnya persaingan di pasar ekspor pasar pasca kuota dihapuskan.
- b. Terbatasnya infrastruktur ekspor seperti Pelabuhan Muat, bandara Internasional, kawasan industri.
- c. Permesinan pada umumnya relatif sudah tua sehingga kualitas yang dihasilkan tidak mampu bersaing di pasar ekspor.
- d. Belum optimalnya lembaga perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.
- e. Masih tingginya ketergantungan bahan baku/ penolong impor.
- f. Terbatasnya pelaku usaha UKM yang berorientasi ekspor dan memiliki kemampuan mengakses informasi pasar, kompetensi manajemen ekspor, promosi ekspor masih kurang.
- g. Kondisi sarana dan prasarana penunjang perdagangan dalam negeri belum memadai untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa.
- h. Ekspor non migas masih bertumpu kepada keunggulan komparative yang seharusnya bertumpu kepada kemampuan inovasi, daya kreasi dan profesionalisme SDM.
- i. Semakin maraknya atribut ekspor dari negara mitra tujuan ekspor dengan alasan keamanan, lingkungan dan perlindungan produksi dalam negeri.

2. **Perdagangan Dalam Negeri**

- a. Kurangnya tingkat kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen.
- b. Masih adanya produk yang beredar di pasaran yang belum memenuhi persyaratan yang berlaku.
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri.

- d. Sistem distribusi nasional yang belum efisien dan efektif, sehingga barang kebutuhan masyarakat belum tersedia dengan harga yang wajar di seluruh daerah, disparitas harga antar wilayah masih relatif tinggi, fluktuasi harga belum terkendali.
- e. Sarana dan prasarana distribusi kurang memadai.
- f. Kondisi geografis dan penyebaran sentra produksi tidak merata.
- g. Masih adanya pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- h. Rendahnya posisi tawar produk KUKM karena belum optimalnya keberadaan kelembagaan.
- i. Daya saing produk serta kemampuan dalam mengakses pasar/ informasi/ promosi pasar masih relatif rendah, di lain sisi jaringan pasar terbatas karena masih kurangnya kemitraan dalam usaha perdagangan.
- j. Belum/tidak termonitornya sistem perdagangan melalui penjualan berjenjang/MLM.
- k. Upaya untuk mensosialisasikan penjualan berjenjang, perdagangan berjangka dan perdagangan yang tidak beretika belum dapat menjangkau semua kalangan masyarakat, karena terbatasnya anggaran yang tersedia.
- l. Program pendampingan untuk para pelaku usaha agar bisa mengikuti penyelenggaraan pasar lelang.

3. Perdagangan Luar Negeri

- a. Kurangnya promosi produk.
- b. Kurangnya daya saing produk.
- c. Kurangnya kualitas SDM.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana.
- e. Kurangnya iklim usaha yang kondusif.
- f. Pengaruh faktor internal dan eksternal.

P. KOPERASI DAN UKM

1. Potensi Koperasi dan anggota belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk percepatan perkembangan usaha koperasi. Hal ini disebabkan keterbatasan SDM pengelola koperasi.
2. Sebagian usaha anggota dan sentra UKM anggota koperasi tidak jalan dan produktifitas turun karena sarana usaha UKM dan sentra UKM rusak akibat bencana alam (gempa bumi).
3. Realisasi penyaluran kredit lunak BUMN pembina KUKM DIY belum maksimal (baru mencapai 50 %).
4. Masih banyaknya kendala yang dihadapi KUKM untuk mengakses Sumber permodalan dari perbankan karena persyaratan yang masih sulit dipenuhi KUKM.

Q. PERTAMBANGAN DAN ENERGI

1. Pertambangan Umum

- a. Kemampuan masyarakat/penambang dalam meningkatkan nilai tambah bahan galian masih rendah.
- b. Kemampuan aparat pengawas masih terbatas.
- c. Penyediaan data dan kerjasama antar daerah dalam mendorong investasi masih rendah.
- d. Belum terlaksananya pengelolaan bahan galian di lereng G. Merapi.
- e. Belum adanya regulasi untuk mengatur penambangan di kawasan karst.

2. Air Tanah

- a. Masyarakat pedesaan di daerah sulit air tidak mampu mendayagunakan air tanah dalam untuk memenuhi kebutuhan air baku.
- b. Kurangnya informasi / data daerah rawan bencana alam geologi.
- c. Prasarana Pemantauan air tanah dalam yang terbatas.

3. Energi

- a. Rasio elektrifikasi hingga akhir tahun 2006 di Provinsi DIY baru mencapai 66,13 %.
- b. Belum dilaksanakannya Inpres Nomor 10 tahun 2005 tentang Penghematan Energi.
- c. Upaya energi baru terbarukan belum optimal.

4. Migas

- a. Terbatasnya sarana, prasarana dan kemampuan aparat dalam pengawasan pendistribusian migas.
- b. Belum adanya koordinasi yang baik dalam melaksanakan pengawasan kuota dan distribusi migas.

R. KAPASITAS DAERAH

1. Hukum

- a. Sumber Daya Manusia yang belum memadai baik kualitas maupun kuantitas serta penempatannya yang kurang proporsional.
- b. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.
- c. Kualitas pelayanan publik masih rendah.
- d. Kurangnya koordinasi dari semua instansi dalam penegakan hukum.
- e. Perkembangan dan perubahan aturan hukum yang sangat cepat.
- f. Tumpang tindih produk hukum pusat yang digunakan sebagai acuan.
- g. Tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek KKN masih sangat tinggi.

2. Pengawasan

- 1. Kompetensi pegawai masih rendah, baik secara kualitas maupun kuantitas.

2. Koordinasi pengawasan antar lembaga pengawasan di luar pemerintah daerah masih sangat sulit, terlebih-lebih pada tingkat pusat.
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk menunjang pengawasan.
4. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dirasakan masih banyak kendala.

3. Kerjasama

- a. Terbatasnya kapasitas aparat pelaksana kerjasama.
- b. Kurangnya sarana prasarana teknologi informasi yang memadai.
- c. Keterbatasan data tentang profil provinsi-provinsi mitra/calon mitra kerjasama.
- d. Belum terintegrasinya Peraturan-perundang-undangan yang merupakan acuan pelaksanaan kerjasama (spt UU 32/2004 dan PP 50/2007) sehingga implementasi masih belum maksimal.
- e. Lemahnya koordinasi dengan semua pihak.
- f. Pembagian Urusan Pemerintahan berdasarkan PP 38/2007 belum sepenuhnya dipahami baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- g. Kurangnya inisiatif dan inovasi dalam mengajukan program-program untuk mengisi hubungan kerjasama.
- h. Tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama belum dilakukan.

4. Pemerintahan Umum

- a. Belum selesainya pembahasan Undang-Undang Keistimewaan DIY.
- b. Inkonsistensi kebijakan khususnya di tingkat pusat yang berdampak pada kebijakan di daerah.
- c. Belum selarasnya pelaksanaan otonomi daerah karena banyaknya multi tafsir terhadap peraturan yang ada.
- d. Belum diimplementasikannya pembagian urusan pemerintahan.
- e. Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Belum adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi seluruh urusan bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- g. Belum termanfaatkannya dan terpeliharanya sarana prasarana kerja dengan baik.
- h. Lemahnya koordinasi dengan semua pihak.
- i. Luasnya cakupan tugas pokok fungsi Kantor, yang masih belum didukung oleh SDM yang memadai, baik dari sisi jumlah maupun kompetensinya.
- j. Belum optimalnya fungsi Anjungan DIY di TMII Jakarta sebagai sarana promosi dan penyebaran seni budaya DIY.
- k. Belum adanya pelayanan yang baik karena belum terciptanya aparatur yang profesional.

- l. Belum memadai dan masih terbatasnya sarana prasarana penunjang dengan sistem informasi teknologi yang handal.
- m. Belum optimalnya penataan Komplek Kepatihan sesuai Master Plan yang telah direncanakan.
- n. Penataan Landscape dan tata lingkungan taman Komplek Kepatihan belum sepenuhnya mendukung bangunan-bangunan yang ada.

5. Perencanaan

- a. Belum selesainya pembahasan tentang Undang-Undang Keistimewaan DIY, yang akan berimplikasi pada proses penyusunan dokumen perencanaan secara makro, karena di dalamnya termuat arah pembangunan yang menspesifikasikan keistimewaan DIY.
- b. Belum adanya peraturan di daerah yang mengesahkan tentang tata ruang daerah.
- c. Berakhirnya masa berlaku dokumen perencanaan pembangunan RENSTRADA 2004-2008, sementara dokumen perencanaan pengganti (RPJPD dan RPJMD) belum juga selesai dibahas dan disahkan secara hukum.
- d. Belum adanya tindaklanjut dari hasil evaluasi terhadap RENSTRADA 2004-2008 yang juga berpengaruh terhadap penyusunan dokumen perencanaan yang baru, yang seyogyanya merupakan satu kesinambungan pelaksanaan pembangunan di daerah. Dimungkinkannya adanya dokumen perencanaan antara untuk menjembatani kefakuman dari RENSTRADA dan RPJPD/RPJMD.
- e. Salah satu fungsi yang menangani permasalahan investasi, belum ada dokumen perencanaan yang menjelaskan *Grand Design/Blue Print* Investasi Daerah.
- f. Dengan adanya PP 41/2007 dan rencana akan adanya penataan kelembagaan, mengharuskan perencanaan pembangunan dapat mengakomodir seluruh program kegiatan sesuai dengan kelembagaan yang baru.
- g. Penyusunan Program Kegiatan yang terpaku pada Permendagri 13/2006 yang diganti dengan Permendagri 59/2007, membatasi kreativitas daerah untuk menyusun Program Kegiatan sesuai dengan kondisi riil daerah, sementara untuk membuka Program Kegiatan baru di luar Permendagri tersebut harus dengan persetujuan Departemen Dalam Negeri.
- h. Tidak adanya pembahasan usulan perencanaan program kegiatan yang dibiaya dari dana-dana non APBD (APBN/Dekonsentrasi), mengakibatkan sering terjadinya duplikasi kegiatan, sementara pengendaliannya juga belum maksimal.
- i. Pelaksanaan evaluasi terhadap program kegiatan seolah-olah hanya dijadikan pemenuhan kewajiban dari suatu ketugasan saja tanpa benar-benar dilihat manfaat dan hasil dari program kegiatan tersebut. Akibatnya suatu program kegiatan dapat muncul kembali dalam perencanaan awal meskipun evaluasi dari padanya menunjukkan kondisi yang buruk.

6. Aparatur Pemerintahan

- a. Pola dan sistem penerimaan pegawai yang belum standard.
- b. Ada kecenderungan kuantitas SDM meningkat, tetapi tidak dibarengi dengan kualitas.
- c. Terbatasnya kapasitas sumberdaya manusia, dan belum optimalnya pengembangan kualitas pegawai.

- d. Belum optimalnya kaderisasi pimpinan.
- e. Belum adanya manajemen SDM/Kepegawaian yang efektif termasuk pola karier pegawai.
- f. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dengan sistem informasi teknologi yang canggih, namun ramah lingkungan.
- g. Belum optimalnya pelayanan publik yang baik karena belum terciptanya aparatur yang profesional dan tata lingkungan yang memadai.
- h. Pola Pengembangan Pegawai (termasuk Kebutuhan Diklat Pegawai) belum dirumuskan dengan jelas.

7. Kearsipan

- a. Masih terbatasnya produk hukum Kabupaten/Kota yang secara teknis mengatur pelaksanaan kearsipan.
- b. Terbatasnya SDM di bidang kearsipan baik secara Kuantitatif, maupun kualitatif.
- c. Terbatasnya sarana kearsipan dan tidak terpenuhinya sarana sesuai standarisasi yang telah ditentukan
- d. Sistem kartu kendali masih lebih rumit dibanding sistem agenda
- e. Kebiasaan penggunaan buku agenda masih merupakan kendala.
- f. Organisasi kearsipan belum jelas terlihat pada pembagian kewenangan serta tugas antara Unit Kearsipan dan Unit Pengolah tidak tergambar jelas.

S. INVESTASI

- 1. Lamanya proses dan panjangnya prosedur perijinan sebagai pelayanan kepada calon investor.
- 2. Kelambagaan yang belum jelas.
- 3. Terbatasnya SDM yang menangani investasi.
- 4. Regulasi yang masih belum menentu (dalam hal kewenangan pusat dan daerah).
- 5. Harga tanah tinggi.
- 6. Masih terbatasnya infrastruktur yang mendukung investasi.
- 7. Profil peluang investasi daerah yang belum lengkap.
- 8. Data base yang menyangkut potensi, ancaman, peluang, dan hambatan yang berkaitan dengan investasi belum mantap
- 9. Terjadinya penurunan volume investasi yang cukup besar.

TANTANGAN

A. KEPENDUDUKAN

- 1. Peningkatan pengendalian jumlah penduduk.
- 2. Peningkatan persebaran jumlah penduduk yang merata.
- 3. Peningkatan kualitas penduduk melalui program Keluarga Berencana.

4. Pengaturan mobilitas penduduk dari Desa ke Kota.

B. TENAGA KERJA

1. Pengurangan jumlah pengangguran.
2. Peningkatan kualitas ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja, melalui Sertifikasi dan Standardisasi kerja.
3. Peningkatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
4. Mendorong perluasan kesempatan kerja yang seluas-luasnya disektor Formal dan Informal, melalui Investasi yang ramah Ketenagakerjaan.
5. Peningkatan Hubungan Industrial yang harmonis.
6. Peningkatan perlindungan, pengawasan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
7. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dalam penyelenggaraan Transmigrasi.

C. PENDIDIKAN

1. Persaingan global akibat ekspansi pendidikan dari luar negeri.
2. Rendahnya linkage antara pendidikan dengan lapangan/pasar kerja.
3. Rendahnya daya beli masyarakat.

D. KEBUDAYAAN

1. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap keberadaan kcb/bcb masih rendah
2. Tingkat kerusakan bcb tinggi
3. Museum kurang menarik perhatian masyarakat
4. Daya serap budaya global lebih cepat dibanding daya serap budaya lokal
5. Fasilitasi terhadap apresiasi seni budaya dari masyarakat belum maksimal
6. Revitalisasi peran budaya kraton dan puro

E. PARIWISATA

1. Pasang surutnya sektor pariwisata sangat ditentukan oleh beberapa unsur penting yang terangkum dalam SAPTA PESONA yaitu Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah dan Kenangan. Dengan adanya pesta demokrasi pada tahun 2009 diperkirakan terjadi peningkatan suhu politik di Indonesia. Hal tersebut memungkinkan akan memberikan dampak positif maupun negatif terhadap kunjungan wisatawan.
Oleh karena itu perlu diantisipasi sejak dini, untuk mengeliminir semua dampak negatif, sehingga keamanan, ketertiban, kebersihan, Kesejukan, keindahan, Keramahan dan Kenangan tetap terjamin. Kepercayaan wisatawan merupakan faktor utama untuk meningkatkan kunjungan wisata maupun kunjungan ulang (*revisit*) ke Propinsi DIY.
2. Meningkatnya *image* (citra) pariwisata Provinsi D.I.Yogyakarta
3. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Provinsi D.I.Yogyakarta
4. Mengurangi tingkat pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat.
5. Pengembangan pariwisata akan menimbulkan kesempatan kerja, sehingga dapat menyerap tenaga kerja di Propinsi DIY yang belum mendapatkan pekerjaan dan sekaligus mengatasi pengangguran serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

6. Tersedianya Sumber Daya Manusia bidang pariwisata yang profesional
7. Penataan PKL & pengamen di Malioboro, sehingga kenyamanan wisatawan yang sedang menikmati makanan di kawasan ini terjaga.
8. Meningkatkan peran Desa Wisata yang ada di DIY.
9. Meningkatkan kerjasama dan saling bersinergi dengan Propinsi lain dan Negara lain dalam menjalin kerjasama pengembangan pariwisata.

F. KESEHATAN

1. Menurunkan angka kematian Ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (AKABA)
2. Meningkatkan promosi, penemuan dan penanganan penyakit kardiovaskuler (CVD) dan diabetes
3. Menurunkan jumlah kematian (case fatality rate/CFR) akibat kecelakaan dan rudapaksa
4. Meningkatkan jumlah deteksi dini (penemuan kasus) dan penanganan penyalahgunaan NAPZA
5. Meningkatkan angka kesembuhan pengobatan TBC
6. Menurunkan tingkat kematian (CFR) dan insidensi penyakit DBD
7. Meningkatkan penemuan dan penanganan penderita HIV/AIDS
8. Menurunkan penularan penyakit indigenous malaria dan daerah episentrum KLB malaria
9. Meningkatkan perilaku hidup sehat masyarakat di DIY
10. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan

G. SOSIAL

Tantangan yang dihadapi di bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, menurunkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, menangani trauma akibat bencana alam dan rehabilitasi setelah terjadi bencana, meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial, meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat, meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk menolong dirinya sendiri guna memperbaiki dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

H. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Tantangan di bidang pemberdayaan perempuan adalah jumlah penduduk perempuan yang sedemikian besar (lebih besar dari penduduk laki-laki) akan menjadi aset yang besar sebagai sumber daya pembangunan yang potensial. Optimalisasi penduduk sebagai sumber daya pembangunan harus diimbangi dengan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup baik laki-laki maupun perempuan untuk dapat berperan dalam pembangunan dan sekaligus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menentukan pilihan atas peran mereka dalam pembangunan tanpa melanggar kodrat perempuan yaitu fungsi reproduksinya.
2. Selain menghadapi tantangan dalam upaya pemberdayaan perempuan maka pemerintah daerah masih menghadapi permasalahan anak dan remaja dan upaya penanggulangannya. Berbagai tindak kekerasan terhadap anak meningkat, demikian

juga perdagangan anak masih terjadi, untuk itu upaya-upaya perlindungan anak perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan.

I. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

1. Pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dalam menghadapi ancaman stabilitas serta tuntutan perubahan dan dinamika perkembangan masyarakat perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
2. Tantangan lain yang dihadapi adalah mengurangi potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan, sehingga penanaman wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara perlu ditingkatkan serta dipahami oleh seluruh komponen masyarakat secara lebih efektif dengan tetap berada dalam rambu hukum sehingga masyarakat mempunyai kemandirian dan daya tangkal yang tangguh terhadap kemungkinan ancaman dan gangguan yang akan terjadi.

J. SARANA DAN PRASARANA WILAYAH

1. Transportasi

- a. Melayani perkembangan wilayah
- b. Meningkatkan aktivitas perekonomian di daerah-daerah yang dilalui
- c. Meningkatkan aksesibilitas: mendukung DIY sebagai Pusat Pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata
- d. Mengurangi disparitas pertumbuhan regional
- e. Memperkuat keterkaitan antar wilayah dalam provinsi dan dengan provinsi yang berbatasan
- f. Menjadikan keselamatan jalan sebagai tujuan utama penyelenggaraan lalulintas jalan
- g. Mengendalikan lalulintas berat dalam rangka melindungi kerusakan prasarana jalan
- h. Meningkatkan keselamatan pelayaran
- i. Mengharmoniskan pengembangan transportasi laut dengan pengembangan wilayah pantai selatan baik berkait dengan jalur jalan lintas selatan maupun jalur wisata Pantai Selatan
- j. Mendukung upaya ekspor, terutama hasil laut melalui laut, darat maupun udara
- k. Pengembangan fasilitas penerbangan menuju bandara berstandar internasional
- l. Memperkuat simpul bandara dengan mengkombinasikan menuju terminal terpadu
- m. Penyediaan terminal angkutan barang/cargo untuk mengurangi beban lalulintas dalam kota
- n. Mengembangkan penerbangan langsung dengan lebih banyak kota potensi wisatawan
- o. Menjadikan keselamatan jalan sebagai tujuan utama penyelenggaraan lalulintas jalan
- p. Menyeraskan penanganan berbagai moda transportasi jalan terutama menyangkut kendaraan tak bermotor, kendaraan tradisional
- q. Mengoptimalkan pelayanan lalulintas pada seluruh jaringan jalan yang ada melalui sistem informasi/petunjuk arah dan rute yang memadai
- r. Penyediaan parkir bagi masyarakat pengguna angkutan umum (park and ride)

- s. Menyeraskan penataan lalu lintas dan *traffic management* antar kabupaten/kota
- t. Memperkenalkan prinsip-prinsip pembatasan lalu lintas terutama di daerah perkotaan

2. Sumber Daya Air

- a. Mewadahi aspirasi dan kepentingan semua unsur stakeholders sumber daya air tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan wilayah sungai
- b. Memperbaiki sistem data dan informasi sumber daya air
- c. Menumbuh kembangkan manajemen terpadu dan regulasi sumber daya air wilayah sungai
- d. Membentuk organisasi pengelola sumber daya air yang profesional dan efektif
- e. Menjamin alokasi air yang adil dan efisien melalui pemberlakuan sistem hak guna air
- f. Menegakkan hukum dalam pengendalian pencemaran air melalui pembentukan kerangka kerja institusi
- g. Memberdayakan organisasi petani secara transparan
- h. Menjamin keberlanjutan pendanaan dan efisiensi kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi
- i. Reorganisasi administrasi layanan irigasi

K. TATA RUANG

1. Tingginya kebutuhan ruang untuk kegiatan budidaya seringkali memanfaatkan ruang pada kawasan lindung, oleh karena itu perlu pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung. Jika terpaksa harus ada kegiatan budidaya pada kawasan tersebut perlu diusahakan pembatasan kegiatan (kegiatan budidaya konservasi).
2. Pemanfaatan ruang pada kawasan lindung sepanjang pantai, perlu direncanakan upaya mengatasi atau mengurangi resiko bencana tsunami dan gelombang pasang pada kawasan tersebut.
3. Mengendalikan perkembangan wilayah pada kawasan tumbuh cepat dan mengupayakan strategi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru yang berupa pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana di luar kawasan perkotaan.
4. Mengatasi persoalan lahan kritis lingkungan seperti di Purwosari, Panggang, Tepus dan Rongkop (Kabupaten Gunungkidul) yang terkait dengan kekeringan, dan beberapa kawasan seperti Samigaluh, Kokap dan Giripurwo di Kabupaten Kulonprogo yang rawan longsor.
5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penataan ruang antar sector dan stakeholders serta mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang.
6. Belum adanya informasi penataan ruang yang berbasis web menyebabkan lambannya akses untuk mendapatkan informasi tentang penataan ruang. Untuk itu perlu pembuatan informasi penataan ruang berbasis web.
7. Meningkatkan manajemen penataan ruang baik yang menyangkut perencanaan, pemanfaatan serta pengendalian pemanfaatan ruang maupun kelembagaannya.

L. LINGKUNGAN HIDUP

1. Meningkatkan komitmen para pengambil keputusan (eksekutif dan legislatif) dalam pelestarian fungsi lingkungan masih lemah
2. Meningkatkan pengawasan terhadap konsistensi implementasi penataan ruang
3. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
4. Meningkatkan upaya pentaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup
5. Meningkatkan respon terhadap isu-isu lingkungan global (perubahan iklim, pemanasan global, penipisan lapisan ozon)
6. Meningkatkan konservasi sumber daya air dan keanekaragaman hayati
7. Mengendalikan laju pencemaran/kerusakan lingkungan
8. Menurunkan kompleksitas permasalahan lingkungan seiring dengan laju peningkatan pembangunan daerah yang menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan.

M. PERTANIAN

1. Pertanian TPH dan Peternakan

- a. Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Lahan Pertanian
- b. Peningkatan Produksi untuk Menciptakan Ketahanan Pangan dan Bahan Baku Industri
- c. Penurunan Tingkat Pengangguran dan kemiskinan
- d. Meningkatnya harga bahan makanan pokok
- e. Pemanfaatan dan Pengelolaan Perbenihan belum optimal
- f. Terbangunnya kawasan terpadu sampai tingkat Desa
- g. Pengembangan Kelembagaan Pertanian
- h. Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian

2. Kehutanan dan Perkebunan

- a. Pencurian dan perdagangan sumberdaya hutan ilegal
- b. Kebakaran hutan belum bisa diatasi
- c. Kawasan Hutan belum mantap
- d. Penduduk sekitar hutan/kebun masih miskin
- e. Penyediaan Lapangan Kerja bidang Kehutanan rendah
- f. Kebutuhan Lahan untuk berbagai kepentingan sangat tinggi
- g. Meningkatnya kebutuhan akses usaha kehutanan
- h. Kebijakan investasi dalam pengembangan usaha kehutanan kurang menarik
- i. Terbatasnya SDM perkebunan
- j. Peredaran Bibit Perkebunan/kehutanan belum berlabel masih tinggi
- k. Produk perkebunan/kehutanan belum memenuhi standar mutu
- l. Penurunan daya dukung lahan, air, hutan/kebun

3. Perikanan dan Kelautan

- a. Mutu dan daya saing Produk masih rendah
- b. Lembaga Pembudidaya/nelayan belum optimal
- c. Konflik kepentingan penggunaan lahan dan air
- d. Nelayan masih dalam kondisi pra sejahtera

- e. Hasil perikanan dan kelautan belum mencukupi Kebutuhan ikan
- f. Sarana dan prasarana perikanan belum memadai

N. INDUSTRI

1. Bahan baku lokal dan bahan baku daerah lain terbatas.
2. Ketrampilan SDM dalam peningkatan produktivitas, mutu dan diversifikasi produk sangat terbatas.
3. Penerapan standar mutu dan sistem mutu masih terbatas.
4. Sumber permodalan terbatas.
5. Kemampuan mengakses pasar melalui tehnologi informasi terbatas.

O. PERDAGANGAN

1. Perdagangan Dalam Negeri

- a. Kurangnya tingkat kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen.
- b. Rendahnya daya saing produk dan kemampuan dalam mengakses pasar melalui teknologi informasi.
- c. Masih adanya produk yang beredar di pasaran yang belum memenuhi persyaratan yang berlaku.
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri.
- e. Rendahnya posisi tawar produk KUKM karena belum optimalnya keberadaan kelembagaan.
- f. Kurang efektif dan efisiennya sistem distribusi sehingga fluktuatif harga barang kebutuhan masyarakat kurang terkendali.

2. Perdagangan Luar Negeri

- a. Terbatasnya pelaku usaha UKM berorientasi ekspor yang memiliki kemampuan mengakses informasi pasar, inovasi, daya kreasi dan profesionalisme SDM, dan kompetensi manajemen ekspor.
- b. Kurangnya promosi produk baik dalam negeri maupun luar negeri.
- c. Hambatan non tarif sangat berpengaruh terhadap daya saing produk.

P. KOPERASI DAN UKM

1. Keterbatasan SDM pengelola koperasi mengakibatkan potensi koperasi dan anggota belum dimanfaatkan secara maksimal untuk percepatan perkembangan usaha koperasi.
2. Kurangnya kemampuan manjerial dalam pengelolaan Koperasi.
3. Kurangnya kepedulian dan dukungan *stakeholders* terhadap keberadaan koperasi.
4. Masih banyaknya kendala yang dihadapi KUKM untuk mengakses sumber permodalan.

5. Masih rendahnya pengetahuan UKM dalam inovasi produk.

Q. PERTAMBANGAN DAN ENERGI

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan pertambangan rakyat kaitannya dengan kelestarian lingkungan.
2. Masih rendahnya kemampuan masyarakat/penambang dalam meningkatkan nilai tambah bahan galian.
3. Makin menurunnya permukaan air tanah mengakibatkan makin banyaknya daerah sulit air.
4. Masih banyaknya daerah pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik.
5. belum optimalnya upaya energi baru terbarukan.
6. Masih rendahnya pengawasan kuota dan distribusi migas dengan *stakeholders*.

R. KAPASITAS DAERAH

1. Hukum

- a. Penyusunan dan implementasi produk hukum yang belum sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat.
- b. Memberikan Fasilitasi Pengembangan Hukum dan Bantuan Hukum kepada semua unsur Pemerintah daerah dan Masyarakat.
- c. Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang bersih, demokratis dan tertib semakin tinggi.

2. Pengawasan

- a. Perubahan kelembagaan yang disebabkan oleh adanya peraturan perundangan.
- b. Perkembangan perubahan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang cepat terjadi, sehingga perlu penguasaan dan pemahaman secara komprehensif.
- c. Kualitas dan kuantitas temuan hasil pemeriksaan secara komprehensif.
- d. Jumlah tenaga pemeriksa yang relative sedikit dibanding dengan jumlah obyek pemeriksaan.

3. Kerjasama

- a. Menjaraing peluang tawaran dan melakukan penjajagan kerjasama dengan pihak-pihak lain.
- b. Mengaktifkan kembali kerjasama yang mengalami stagnasi.
- c. Menciptakan kerjasama yang betul-betul optimal sesuai dengan kebutuhan daerah.
- d. Mengambil keputusan/kebijakan secara tepat bagi semua tawaran kerjasama, yang telah dilakukan melalui mekanisme evaluasi.
- e. Meningkatkan kualitas sistem monitoring dengan ketersediaan peralatan yang memadai.

4. Pemerintahan Umum

- a. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- b. Turut mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum kepala negara 2009.
- c. Menggalang potensi masyarakat Yogyakarta di Jakarta, untuk ikut serta menggerakkan roda perekonomian di daerah, serta mewujudkan benteng budaya Yogyakarta di Jakarta.
- d. Membangun Networking dengan Pemerintah Pusat, Pihak Swasta dan Luar Negeri (Kedutaan Besar).
- e. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan manajemen sejalan dengan perkembangan iptek yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya sistem birokrasi yang berorientasi teknologi, prinsip-prinsip transparansi, efektif, organisasi yang berkualitas, staf yang berkualitas tinggi serta manajemen berdasarkan hasil.

5. Perencanaan

- a. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sebagai acuan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, sudah selayaknya dihasilkan sesuai dengan kondisi riil dan dapat dilaksanakan secara aplikatif.
- b. Perumusan program dan kegiatan yang akan dijalankan secara rinci ditentukan oleh institusi perencana dalam hal ini Bapeda yang sudah dikaji terlebih dahulu dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta betul-betul sudah disesuaikan dengan kewenangan penanganannya.
- c. Masing-masing bidang di Bapeda tidak hanya menjalankan ketugasan bidangnya masing-masing tetapi yang utama adalah menjalankan ketugasan ke-Bapeda-an secara menyeluruh. Oleh karena itu perlu adanya "studio perencanaan" yaitu suatu forum di mana semua bidang ketugasan berkumpul guna memecahkan suatu permasalahan/isu aktual ataupun mencari solusi, dengan menerapkan *cross functions*. Forum ini dilaksanakan menurut kaidah proses manajemen dilakukan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi hingga perencanaan awal kembali.

6. Aparatur Pemerintahan

- a. Komitmen reformasi pelayanan publik merealisasi good governance.
- b. Realisasi dan pemanfaatan konsep-konsep pengelolaan kepegawaian yang telah disusun.
- c. Proyek-proyek pilot dalam pengelolaan sumber daya aparatur seperti P3KSDM (*assessment center*), AKD, penanganan kelebihan pegawai, dan penempatan pegawai perlu dukungan dalam aplikasinya.
- d. Kesempatan yang seluas-luasnya bagi sumber daya aparatur untuk meningkatkan kualitas melalui Diklat sehingga memenuhi 4 standar minimal kompetensi pribadi yaitu *personal attitude, personal skill, personal performance* dan *personal experience*.
- e. Perlu pengaturan *system reward and punishment*.
- f. Dukungan Pemerintah Pusat terkait dengan kebijakan pengadaan PNS terutama untuk tenaga honorer.
- g. Kesejahteraan pegawai masih belum memadai.

7. Kearsipan

- a. Dasar hukum dan perundang-undangan
Masih terbatasnya produk peraturan Kabupaten/Kota yang secara teknis mengatur pelaksanaan kearsipan.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM).
Keterbatasan SDM di bidang kearsipan baik secara kuantitatif, maupun kualitatif.
- c. Sarana.
Keterbatasan sarana kearsipan dan tidak terpenuhinya sarana sesuai standarisasi yang telah ditentukan
- d. Sistim
 - 1) Sistim kartu kendali masih lebih rumit dibanding sistim agenda
 - 2) Kebiasaan penggunaan buku agenda masih merupakan kendala.
 - 3) Organisasi kearsipan belum jelas terlihat pada pembagian kewenangan serta tugas antara Unit Kearsipan dan Unit Pengolah tidak tergambar jelas.

S. INVESTASI

1. Peningkatan besaran investasi
2. Peningkatan daya tarik investasi
3. Kerjasama Stakeholder
4. Akselerasi pelayanan investasi
5. Penggunaan Teknologi Informasi
6. Terwujudnya Promosi Terpadu
7. Dari sisi informatika investasi: tersedianya data base yang menyangkut potensi, ancaman, peluang, dan hambatan yang berkaitan dengan investasi.
8. Dari sisi keuangan: meningkatnya realisasi volume investasi.

BAB V

ARAH SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

ARAH – SASARAN

A. KEPENDUDUKAN

1. Terlaksananya pengendalian jumlah penduduk.
2. Terlaksananya persebaran penduduk yang merata.
3. Terwujudnya penduduk yang berkualitas, yang memiliki IPTEK yang tinggi.

B. TENAGA KERJA

1. Pembangunan Ketenagakerjaan diarahkan pada pengurangan angka pengangguran dengan menciptakan peluang Investasi di sektor Formal dan Informal.
2. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi, sertifikasi standarisasi yang telah ditetapkan agar mampu bersaing dipasar global.
3. Pengembangan industri kecil dan industri rumah tangga tanpa polusi (non pulutan) yang mampu bersaing dipasar global dengan didukung teknologi tepat guna.
4. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja melalui sosialisasi dan pembinaan tenaga kerja baik sektor Formal maupun Informal sehingga tercipta Hubungan Industrial yang harmonis.
5. Menciptakan lapangan kerja Formal atau modern yang seluas-luasnya.
6. Meningkatkan produktivitas pekerja yang ditempuh dengan penciptaan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, outsourcing, pengupahan, PHK.
7. Menciptakan kesempatan kerja melalui Investasi yang ramah ketenagakerjaan.
8. Peningkatan penempatan calon transmigran melalui Kerjasama Antar Daerah.
9. Peningkatan pemberdayaan transmigrasi lokal.

C. PENDIDIKAN

1. Tercapainya peningkatan layanan pendidikan anak usia dini sebesar 2 %.
2. Tercapainya layanan pendidikan anak usia dikdas yang belum bersekolah sebesar 50 %.
3. Tercapainya peningkatan layanan pendidikan menengah sebesar 5 %.
4. Tercapainya peningkatan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus sebesar 40 %.
5. Tercapainya animo masuk mahasiswa baru dari luar DIY sebesar 3 %.
6. Tercapainya penanganan penduduk buta aksara usia 15-44 tahun sebesar 20%.
7. Tercapainya daya saing pendidikan di tingkat nasional masuk 5 besar.

8. Tercapainya peningkatan minat baca masyarakat sebesar 8 %.
9. Terlaksananya rintisan pengembangan kawasan pendidikan terkemuka.

D. KEBUDAYAAN

1. Peningkatan peradaban dan kualitas hidup masyarakat.
2. Peningkatan lingkungan yang bersih dengan tata nilai budaya, kecerdasan budi pekerti, dan jati diri yang kuat pada masyarakat.
3. Menjunjung tinggi nilai budaya lokal dan ketahanan budaya melalui pembinaan kepada masyarakat.
4. Melestarikan, melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan dalam setiap langkah tindakan secara bersama dengan melibatkan masyarakat, swasta dan pemerintah.

E. PARIWISATA

1. Meningkatnya infrastruktur pariwisata, khususnya sanitasi yang memadai (bersih, sehat dan layak) pada desa wisata.
2. Meningkatnya *image* (citra) pariwisata DIY, sehingga dapat mendorong kunjungan wisatawan mancanegara khususnya dan wisatawan nusantara pada umumnya.
3. Tersedianya SDM yang unggul dalam jumlah yang memadai.
4. Terbangunnya lingkungan sosial, ekonomi dan budaya yang kondusif bagi wisatawan.
5. Terwujudnya pengembangan ODTW dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama.

F. KESEHATAN

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya umur harapan hidup (UHH), menurunnya angka kematian Ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (AKABA)
2. Menurunnya risiko permasalahan status kesehatan masyarakat yang tercermin dari:
 - a. Menurunnya risiko terjadinya penyakit, kecelakaan dan dampak bencana yang ditunjukkan dari meningkatnya penemuan dan penanganan penyakit tidak menular khususnya CVD (kardiovaskuler) dan diabetes, menurunnya jumlah kematian akibat kecelakaan dan rudapaksa, meningkatnya jumlah deteksi dini (penemuan kasus) dan penanganan penyalahgunaan NAPZA, meningkatnya angka kesembuhan pengobatan TBC, menurunnya tingkat kematian (CFR) dan insidensi penyakit DBD, meningkatnya penemuan dan penanganan penderita HIV/AIDS dan menurunnya penularan penyakit indigenous malaria dan daerah episentrum KLB malaria
 - b. Meningkatnya perilaku hidup dan lingkungan sehat masyarakat di DIY yang tercermin dari meningkatnya kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan dan kesinambungannya, meningkatnya keterlibatan dalam pembangunan kesehatan serta upaya kesehatan berbasis masyarakat

- c. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang tercermin dari meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan termasuk gizi dan kesehatan lingkungan, meningkatnya mutu dan akses informasi kesehatan.

G. SOSIAL

1. Meningkatnya aksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar.
2. Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
3. Meningkatnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan dalam pelayanan kesejahteraan sosial.
4. meningkatnya ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatnya keserasian kebijakan kesejahteraan sosial.
6. Terjaminnya bantuan sosial dan meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial.
7. Meningkatnya kualitas manajemen kesejahteraan sosial.

H. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak.
2. Terjaminnya keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai program pembangunan dan kebijakan publik.
3. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak.
5. Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.
6. Tegaknya hak asasi manusia bagi perempuan.
7. Meningkatnya kualitas dan kemandirian organisasi perempuan.
8. Berdayanya organisasi kesiswaan di sekolah dan remaja di masyarakat.

I. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

1. Terjaminnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Meningkatnya solidaritas antara anggota masyarakat.
3. Terpilihannya persatuan dan kesatuan bangsa serta terhindar dari ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban setiap warga masyarakat dalam melakukan kegiatan.
4. Tumbuh dan berkembangnya kesadaran bela negara, kemandirian dan daya tangkal masyarakat yang tangguh dalam menghadapi ancaman dan gangguan keamanan.
5. Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat.

J. SARANA DAN PRASARANA WILAYAH

1. Transportasi

- a. Peningkatan pelayanan infrastruktur jalan dan sistem transportasi sesuai dengan standard pelayanan minimal
- b. Mengembangkan kebijakan pembangunan transportasi yang mendukung pengembangan sistem transportasi nasional yang andal, berkemampuan tinggi, terpadu dan efisien serta mengacu pada pola tata ruang dengan perhatian pada daerah pedesaan, perluasan jaringan jalan dan angkutan umum berikut sarana dan prasarananya ke daerah-daerah terpencil guna mendukung pemerataan penyebaran penduduk serta pembangunan industri, pertanian, perdagangan, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata.
- c. Menunjang keberadaan DIY sebagai salah satu pusat pendidikan dan kebudayaan, daerah tujuan wisata utama, pusat industri kecil dan kerajinan, melalui penataan sistem pelayanan transportasi secara terpadu yang mampu memberikan kemudahan bagi wisatawan dan pelajar untuk mengunjungi obyek – obyek wisata dan pendidikan.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan kondisi transportasi yang selamat, aman, handal, efisien dan terjangkau melalui pemahaman tentang pentingnya keselamatan transportasi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Sumber Daya Air

- a. Peningkatan pelayanan infrastruktur air bersih sesuai dengan standard pelayanan minimal
- b. Penataan dan penyusunan regulasi
- c. Perkuatan SDM
- d. Perkuatan Kelembagaan
- e. Penyusunan Sistem Informasi SDA yang handal
- f. Merintis Penegakan Hukum
- g. Merintis Kerjasama hulu hilir
- h. Mengefisiensikan air permukaan khususnya untuk penggunaan irigasi
- i. Pembuatan tampungan baru : tandon air komunal, embung, waduk

3. Keciptakarya

- a. Air Bersih
 - 1) Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana perumahan dan permukiman sehingga pelayanan air bersih mencapai 90%.
 - 2) Terpenuhinya kebutuhan air bersih khususnya diprioritaskan pada daerah sulit air bersih.
 - 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dan tetap mempertahankan fungsi lingkungan.
- b. Persampahan

- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan indikator sasaran cakupan layanan sampah Kota 60% Desa 25 %. Rasio sampah terangkut terhadap produksi sampah (85%).
 - 2) Pengelolaan sampah oleh Kelompok Rumah Tangga secara mandiri dengan penerapan metode 3 M (Mengurangi, Memanfaatkan Kembali dan Mendaur Ulang)
 - 3) Peningkatan efisiensi pengelolaan sampah serta meningkatkan umur pakai TPA
- c. Air Limbah
- 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.
 - 2) Terpenuhinya pengelolaan air limbah penduduk mencapai 95%.
 - 3) Meningkatnya perusahaan yang memiliki IPAL mandiri mencapai 10%.
 - 4) Optimalisasi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan pengembangan jaringan air limbah.
- d. Drainase
- 1) Perbaikan pola aliran, normalisasi sungai-sungai dan saluran-saluran drainase,
 - 2) mengembalikan fungsi bantaran sungai,
 - 3) menerapkan garis sempadan sungai dan saluran,
 - 4) meningkatkan kapasitas dan pemanfaatan situ,
 - 5) pemeliharaan sarana drainase, penanggulangan erosi lahan, dan penanggulangan banjir.
- e. Tata Bangunan dan Lingkungan
- 1) Penegakan aturan tata bangunan gedung dan lingkungan
 - 2) penyusunan peraturan dan legislas
 - 3) Pemantapan kelembagaan penataan bangunan gedung dan lingkungan
 - 4) Peningkatan sarana prasarana pemeliharaan bangunan dan lingkungan.
 - 5) Tercapainya indeks kenyamanan lingkungan (IKL) atau kepadatan ideal 1000 jiwa/km² adalah sebesar 75% (Kab. Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul) dan Kota Yogyakarta sebesar 10%.

4. Perumahan

- a. Pendataan, pembangunan dan perbaikan perumahan
- b. Strategi pengembangan perumahan swadaya skala provinsi
- c. Penyusunan dan sosialisasi Norma,Standar,Pedoman,Manual (NSPM) perumahan swadaya
- d. pembangunan dan perbaikan perumahan swadaya yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat
- e. Peingkatan kualitas prasarana sarana dasar perumahan berbasis pada pemberdayaan masyarakat
- f. pembangunan prasarana,sarana dan utilitas (PSU) sebagai stimulant Rumah Sederhana Sehat(RSh), Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa),Perumahan Nelayan
- g. penyelenggaraan perumahan dan peningkatan kapasitas penyelenggara dan pelaku pembangunan perumahan secara horizontal dan vertikal

- h. pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa dan milik.

K. TATA RUANG

1. Terimplementasinya RTRW sebagai acuan dan arahan pemanfaatan ruang dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan oleh Pemerintah daerah dan acuan bagi masyarakat dalam memilih lokasi yang sesuai dengan RTRW
2. Terkendalinya perkembangan wilayah perkotaan dan kawasan utara serta mendorong pengembangan wilayah pada kawasan di luar perkotaan dan kawasan utara
3. Tersusunnya rencana rinci tata ruang sebagai operasionalisasi dalam aspek pengendalian pemanfaatan ruang
4. Tersosialisasinya peraturan perundangan yang berkaitan dengan penataan ruang kepada stakeholders
5. Terlaksananya keterpaduan dan kesamaan persepsi dalam penataan ruang
6. Terbuatnya informasi penataan ruang berbasis web

L. LINGKUNGAN HIDUP

1. Penurunan tingkat parameter pencemaran sungai
2. Penurunan tingkat parameter pencemaran udara
3. Penurunan tingkat pencemaran tanah oleh limbah
4. Upaya penerapan budaya eko efisiensi
5. Pengembangan Data dan informasi LH berbasis E-government
6. Fasilitasi pembuatan SPAH di wilayah permukiman
7. Fasilitasi penanganan lahan kritis
8. Peningkatan Pengendalian kerusakan lahan penambangan rakyat
9. Peningkatan Konservasi Karst
10. Penurunan tingkat pencemaran air tanah
11. Peningkatan jumlah Organisasi Non Pemerintah yang peduli terhadap lingkungan hidup
12. Pengembangan kampung/desa lestari

M. PERTANIAN

1. Peningkatan produk dan produktivitas pertanian, perikanan dan perkebunan
2. Peningkatan mutu dan daya saing hasil/produk pertanian secara luas (pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan)
3. Peningkatan kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat sekitar hutan
4. Optimalisasi fungsi dan konservasi hutan dan lahan

N. INDUSTRI

1. Mendukung perkuatan daya saing dan perluasan produk industri.
2. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan secara profesional.

O. PERDAGANGAN

1. Perdagangan Dalam Negeri

Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi, tertib niaga dan kepastian berusahanya.

2. Perdagangan Luar Negeri

- a. Meningkatnya akses dan perluasan pasar ekspor.
- b. Perkuatan kinerja eksportir dan calon eksportir.

P. KOPERASI DAN UKM

1. Meningkatnya kemandirian koperasi.
2. Berkembangnya UKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan usaha dan peningkatan daya saing.
3. Berkembangnya usaha berskala mikro untuk peningkatan pendapatan masyarakat.

Q. PERTAMBANGAN DAN ENERGI

1. Meningkatnya pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan.
2. Terpenuhinya kebutuhan air tanah.
3. Terpenuhinya kebutuhan listrik.
4. Stabilisasi kuota minyak tanah dan gas.

R. KAPASITAS DAERAH

1. Hukum

- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- c. Peningkatan upaya penegakan hukum.
- d. Peningkatan upaya pemberantasan korupsi.

2. Pengawasan

- a. Meningkatnya kualitas kinerja instansi pemerintah Provinsi DIY.
- b. Terwujudnya aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah yang memadai dan profesional.
- c. Terwujudnya sistem dan prosedur pengawasan.
- d. Peningkatan upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

3. Kerjasama

- a. Arah: Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya daerah (termasuk di dalamnya mengembangkan IPTEK juga mewujudkan visi daerah dengan potensi unggulannya di bidang pariwisata, pendidikan, dan budaya) dengan cara menumbuhkan persahabatan (*friendship*) dan pengembangan saling pengertian (*mutual understanding*)
- b. Sasaran: Tercukupinya kebutuhan/kepentingan daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat

4. Pemerintahan Umum

- a. Arah: Memantapkan kedudukan Pemerintah Daerah yang katalistik menuju terwujudnya masyarakat yang kompetitif
- b. Sasaran: Peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik

5. Perencanaan

- b. Arah: Sinergitas dan penyelarasan rangkaian proses perencanaan pembangunan mulai di tingkat pusat, propinsi hingga kabupaten/kota (harmonisasi perencanaan dengan model *top down* dan *bottom up*).
- c. Sasaran: Keberhasilan pembangunan di daerah bagi kesejahteraan seluruh masyarakat.

6. Aparatur Pemerintahan

- a. Peningkatan Kualitas Kelembagaan/Pegawai.
- b. Peningkatan Pelayanan Kepegawaian.
- c. Perbaikan Sistem dan pengelolaan Pengembangan Pegawai.
- d. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai.
- e. Penyempurnaan Profil dan Pola Karier Pegawai.
- f. Penempatan Pegawai sesuai dengan kemampuan / kebutuhan.

7. Kearsipan

- a. Terciptanya kesadaran pada setiap instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tata kearsipan secara rapi dan benar.
- b. Terjalannya kerja sama dan koordinasi, baik internal maupun dengan lembaga lain untuk peningkatan profesionalitas bagi praktisi di bidang kearsipan.
- c. Tercapainya situasi kondisi untuk pelaksanaan kearsipan melalui penyuluhan, pendidikan dan latihan, pameran, seminar dan sebagainya.
- d. Terciptanya pengawasan dan monitoring tata kearsipan di lingkungannya.

8. Badan DIKLAT

- a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan daerah.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

S. INVESTASI

1. Kemudahan akses penanaman modal bagi investor
2. Peningkatan jumlah investor dan volume investasinya
3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
4. Terwujudnya kegiatan investasi sejak dari hulu sampai hilir yang memberikan manfaat optimal dengan Indikator sebagai berikut :
 - a. Mampu menyerap tenaga kerja besar (Padat Karya)
 - b. Mendorong pengembangan SDM, alih teknologi, infrastruktur dan UKM
 - c. Industri yang menggunakan sumber daya dalam negeri dan ekspor
 - d. Mempertahankan tingkat investasi yang sudah ada dan meningkatkan investasi baru
 - e. Meningkatkan ekspor
 - f. Mengembalikan kepercayaan pasar terhadap kemampuan produksi dan keamanan investasi

KEBIJAKAN

A. KEPENDUDUKAN

1. Peningkatan kualitas penduduk melalui program Keluarga Berencana.
2. Persebaran mobilitas penduduk yang merata.
3. Pengendalian pertumbuhan penduduk DIY kurang dari 1 % (tahun 2004 : 0,42%, tahun 2005 : 1,88 %).
4. Pengendalian perpindahan penduduk dari Desa ke Kota.

B. TENAGA KERJA

1. Mendorong penciptaan lapangan kerja formal.
2. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
3. Membangun daya saing SDM melalui peningkatan kompetensi keterampilan dan produktivitas tenaga kerja.
4. Promosi perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja.
5. Penguatan hubungan industrial, perlindungan sosial dan pengawasan ketenagakerjaan.
6. Peningkatan penempatan calon transmigran melalui Kerjasama Antar Daerah.
7. Peningkatan pemberdayaan Transmigrasi Lokal.

C. PENDIDIKAN

1. Meningkatkan pemerataan dan aksesibilitas pendidikan pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan.
2. Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan.
3. Meningkatkan minat dan budaya baca serta pembinaan perpustakaan.
4. Merintis pengembangan kawasan pendidikan terkemuka.

D. KEBUDAYAAN

1. Meletakkan dasar-dasar regulasi dan strategi kebijakan peningkatan ketahanan dan daya saing kebudayaan di Yogyakarta.
2. Meningkatkan upaya rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sebagai ikon warisan budaya masa lalu, termasuk revitalisasi peran kraton sebagai salah satu pusat pengembangan kebudayaan Yogyakarta dan motor penggerak kebudayaan rakyat.
3. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang, termasuk di dalamnya pusat-pusat penelitian dan pengembangan kebudayaan yang dapat menjangkau semua perkembangan budaya di masyarakat.
4. Melakukan kegiatan kaderisasi kebudayaan melalui internalisasi, sosialisasi, edukasi pada jalur pendidikan formal, keluarga, masyarakat maupun melalui jalur media massa.
5. Mengupayakan kegiatan-kegiatan yang dapat memberi iklim yang kondusif bagi kreatifitas dan inovasi yang berbasis kebudayaan.
6. Memanfaatkan teknologi informatika dan komunikasi untuk dokumentasi, kampanye, promosi, menjalin jejaring kebudayaan, dan meningkatkan kesadaran budaya masyarakat.
7. Melakukan kerjasama yang sinergis antara pusat-pusat pengembangan budaya dengan sektor-sektor lain, khususnya industri pariwisata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. PARIWISATA

1. Melakukan fasilitasi pembangunan/pengembangan/perbaikan infrastruktur pariwisata, khususnya di desa-desa wisata yang telah berkembang.
2. Melakukan promosi secara terpadu (*trade, tourism & investment*) pada *event* tertentu dengan melibatkan *stakeholder* terkait (pengrajin, pelaku seni budaya dan pelaku pariwisata).
3. Melakukan pengembangan SDM di bidang pariwisata secara berkesinambungan.
4. Melakukan pembinaan terhadap pelaku pariwisata melalui revitalisasi SAPTA PESONA.
5. Melakukan pendampingan dalam pengembangan ODTW dengan menerapkan pengembangan pariwisata yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

F. KESEHATAN

1. Penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit,

penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan serta upaya khusus melalui pelayanan kemanusiaan dan darurat (krisis).

2. Peningkatan peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat sejak usia dini perlu ditingkatkan melalui kemitraan swasta dalam pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan.
3. Kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan sehat yaitu keadaan lingkungan yang bebas dari resiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia.
4. Peningkatan pelayanan kesehatan terus ditingkatkan melalui pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit dan puskesmas dengan didukung tenaga kesehatan yang ahli dan terampil sesuai pengembangan ilmu dan teknologi serta berpegang teguh pada pengabdian dan etika profesi.

G. SOSIAL

1. Peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Peningkatan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat dan kelompok rentan sosial lainnya.
3. Peningkatan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial.
4. Pengembangan dan penyeresain kebijakan untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial.
5. Peningkatan ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai-nilai sosial/budaya bangsa.
6. Pengembangan sistem perlindungan sosial.
7. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial.
8. Peningkatan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial.
9. Peningkatan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.

H. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.
2. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan.
3. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.
5. Menyempurnakan perangkat perundang-undangan yang lebih lengkap dalam rangka melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk kekerasan dalam rumah tangga.
6. Memperkuat kemampuan lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan termasuk organisasi perempuan agar lebih berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

7. Memperkuat koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di segala bidang.

I. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

1. Meningkatkan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pertahanan sipil dan unsur rakyat lainnya agar mampu berperan dalam menghadapi ancaman serta gangguan yang terjadi serta memfasilitasi kerjasama lintas kabupaten/kota dibidang keamanan, ketertiban masyarakat.
2. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui penciptaan iklim kondusif, menghidupkan kembali nilai-nilai luhur kegotongroyongan dan pengembangan sikap kesetiakawanan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat.
3. Meningkatkan partisipasi rakyat terlatih yang tergabung dalam kelembagaan pertahanan sipil dan keamanan rakyat sebagai pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat.
4. Meningkatkan pemyarakatan pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN) kepada masyarakat lewat jalan formal dan informal dalam upaya menumbuhkembangkan kesadaran bela negara sejak dini.

J. SARANA DAN PRASARANA WILAYAH

1. Transportasi

- a. Pemeliharaan infrastruktur transportasi untuk mempertahankan keberlangsungan fungsi bangunan
- b. Rehabilitasi dan Pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah perbatasan, terisolir, wilayah cepat tumbuh dan yang mendukung pusat-pusat produksi dan ketahanan pangan, mendukung keseimbangan pembangunan antar daerah
- c. Percepatan pembangunan infrastruktur akibat bencana alam
- d. Terwujudnya peningkatan prasarana jalan berikut fasilitas pendukung keselamatan jalan dan pengendalian muatan untuk memberikan aksesibilitas transportasi yang tinggi dan menjangkau di wilayah Propinsi D.I. Yogyakarta, perbatasan antar Propinsi/Kabupaten dan mendukung pertumbuhan daerah.
- e. Terwujudnya peningkatan transportasi darat, laut dan udara melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang handal yang ditujukan untuk mengembangkan transportasi terpadu baik intra maupun antar moda sehingga akan terciptanya suatu transportasi yang tertib, lancar, selamat, aman dan nyaman.

2. Sumber Daya Air

- a. Konservasi Sumber Daya Air

Konservasi SDA merupakan upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengawetan air dan pengendalian pencemaran air dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan daya dukung, daya tampung dan fungsi sumber air disesuaikan dengan undang-undang.

Perlindungan dan pelestarian sumber air dapat dilakukan dengan kegiatan fisik dan non fisik. Untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kegiatan pemberdayaan dan peranserta masyarakat dan dalam upaya menyeimbangkan fungsi sosial, lingkungan dan ekonomi pengembangan SDA, maka

kegiatan non fisik perlu diutamakan antara lain: monitoring kualitas air di wilayah sungai secara rutin untuk mengetahui adanya penurunan kualitas air yang diakibatkan oleh pencemaran limbah.

Kebijakan konservasi Sumber Daya Air diarahkan kepada :

- Perlindungan dan pelestarian SDA
- Pemeliharaan keberlanjutan air
- Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air

b. Pendayagunaan Sumber Daya Air

Pendayagunaan SDA merupakan upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan Sumber Daya Air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

Pengelolaan sumberdaya air sampai saat ini belum memberikan kejelasan dalam hal proporsi antar fungsi sumber daya air, sehingga pendayagunaan lebih lanjut dari sumberdaya air dapat mengakibatkan ketidak seimbangan fungsi yang menjurus kepada kerusakan atau menjadi bencana dikemudian hari dari sumber air. Didalam menyelaraskan fungsi-fungsi tersebut, akan diperlukan sistem pengkajian, pemantauan dan evaluasi yang dapat memberikan data dan informasi yang transparan yang diperlukan didalam pengembangan pengelolaan sumber air lebih lanjut secara berkesinambungan. Transparansi dan akuntabilitas dari suatu pengelolaan sumber air akan menjamin keberlanjutan dari penyelenggaraan pengelolaan sumber air. Kebijakan pendayagunaan sumber daya air diarahkan kepada :

- Penetapan zona pemanfaatan sumber air
- Peruntukan SDA
- Penyediaan SDA
- Penggunaan SDA
- Pengembangan SDA

c. Pengendalian Daya Rusak Air

Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

Daya rusak air dapat berupa banjir, kekeringan, erosi dan sedimentasi, longsor tanah, banjir lahar dingin, amblesan tanah, perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika air, terancamnya kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa, da/atau wabah penyakit. Hal tersebut telah banyak menimbulkan kerugian baik yang terhitung maupun yang tidak terhitung.

Dampak daya rusak air terhadap kondisi sosial-ekonomi yang utama adalah terganggunya aktivitas masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.

Kebijakan pengendalian daya rusak air meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan bencana alam

3. Keciptakarya

- a. Menyediakan sarana dan prasarana dasar publik yang memadai di daerah perkotaan dan perdesaan dalam kerangka kerjasama antar daerah maupun pihak swasta.
- b. Meningkatkan penataan kawasan secara konsisten sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang efektif dan efisien dengan peran serta masyarakat dan swasta.

- c. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas sarana prasarana publik. yang terjaga dan berkelanjutan dengan peran serta masyarakat.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana-prasarana dasar.
- e. Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pengairan dan memperhatikan konservasi sumber- daya air melalui peningkatan peran serta masyarakat..
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perumahan dan permukiman melalui peningkatan peran serta masyarakat dan tetap mempertahankan fungsi lingkungan.
- g. Mewujudkan kualitas sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan dengan peran serta masyarakat dan swasta.

4. Perumahan

- a. Melaksanakan Pendataan, pembangunan dan perbaikan perumahan
- b. Peningkatan Strategi pengembangan perumahan swadaya skala provinsi
- c. Penyusunan dan sosialisasi Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) perumahan swadaya
- d. Pengembangan perumahan swadaya yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat
- e. Peningkatan kualitas prasarana sarana dasar perumahan berbasis pada pemberdayaan masyarakat
- f. Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) sebagai stimulant Rumah Sederhana Sehat (RSh), Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), Perumahan Nelayan
- g. Pengembangan perumahan dan peningkatan kapasitas penyelenggara dan pelaku pembangunan perumahan secara horizontal dan vertikal
- h. Peningkatan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa dan milik

K. TATA RUANG

1. Memantapkan RTRW sebagai acuan dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.
2. Membatasi kecenderungan perkembangan wilayah terbangun pada kawasan perkotaan dan kawasan utara serta mengupayakan strategi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru yang berupa pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat di luar kawasan perkotaan dan kawasan utara.
3. Menjadikan rencana rinci tata ruang sebagai instrumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Mengenalkan peraturan perundang-undangan penataan ruang kepada masyarakat.
5. Peningkatan keterpaduan dalam penataan ruang.
6. Meningkatkan kemudahan mendapatkan informasi penataan ruang
7. Mendorong pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan

L. LINGKUNGAN HIDUP

1. Mendorong kepada para pelaku usaha dan masyarakat untuk mengurangi laju pencemaran/kerusakan lingkungan
2. Perumusan perbaikan lingkungan hidup yang sinergi dengan percepatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mendorong pengembangan wilayah yang mengacu pada tata ruang dan tata guna lahan
4. Menggali dan mengembangkan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan
5. Meningkatkan edukasi kepada berbagai pihak dalam pelestarian fungsi lingkungan
6. Mempercepat terciptanya budaya eko efisiensi bagi para pemangku kepentingan dengan mendorong penerapan teknik, teknologi dan metode eko efisiensi
7. Mempermudah akses data dan informasi lingkungan dan sumber daya alam
8. Mendorong tumbuhnya kelompok masyarakat peduli lingkungan dan meningkatkan partisipasi publik dalam pelestarian fungsi lingkungan
9. Melaksanakan pemulihan kualitas lingkungan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan
10. Mendorong upaya pentaatan dan penegakan hukum lingkungan

M. PERTANIAN

1. Pertanian TPH dan Peternakan

- a. Pemberian subsidi Saprodi untuk petani miskin
- b. Penguatan modal usaha
- c. Kompensasi pengendalian pemanfaatan lahan abadi
- d. Peningkatan penanganan dan fasilitasi pemasaran hasil
- e. Diversifikasi bahan olahan spesifik lokal
- f. Diversifikasi usaha tani yang memihak bagi petani mandiri
- g. Fasilitasi Penanganan Penyebaran penyakit ternak dan pemberantasan hama/penyakit tanaman
- h. Pengurangan tingkat kemiskinan dan pendayagunaan tenaga kerja
- i. Optimalisasi penyuluhan pertanian
- j. Peningkatan mutu dan daya saing produk pertanian
- k. Peningkatan kapasitas kelembagaan/SDM pertanian
- l. Pengembangan perbenihan/pembibitan
- m. Perbaikan infrastruktur pertanian
- n. Perbaikan Sarana dan Prasarana di tingkat petani
- o. Peninjauan kembali tata ruang

2. Kehutanan dan Perkebunan

- a. Peningkatan mutu dan daya saing produk perkebunan
- b. Optimalisasi kelembagaan petani kebun/hutan
- c. Penanggulangan hama/penyakit tanaman perkebunan
- d. Pengurangan tingkat kemiskinan dan pendayagunaan tenaga kerja
- e. Peningkatan pendapatan petani sekitar hutan

- f. Pengkayaan Tanaman hutan
- g. Penataan Kawasan hutan (status dan fungsi hutan)
- h. Pengamanan Hutan
- i. Pengembangan bibit berkualitas
- j. Pengembangan Tanaman untuk biofuel
- k. Rehabilitasi hutan dan lahan
- l. Optimalisasi fungsi hutan dan lahan
- m. Peningkatan pendapatan petani sekitar hutan
- n. Peningkatan sarana prasarana/infrastruktur

3. Perikanan dan Kelautan

- a. Pengurangan tingkat kemiskinan dan pendayagunaan tenaga kerja perikanan
- b. Peningkatan Produk Perikanan Tangkap yang berkelanjutan
- c. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
- d. Peningkatan pendapatan petani pembudidaya dan nelayan
- e. Optimaslisasi kelembagaan di tingkat pembudidaya/nelayan maupun di tingkat kabupaten/kota
- f. Peningkatan Pengawasan terhadap keamanan pangan sub sektor perikanan dan kelautan
- g. Pengembangan akses modal dan pasar
- h. Peningkatan Sarana dan Prasarana usaha perikanan
- i. Peningkatan kemampuan SDM aparaturnya maupun pembudidaya/nelayan
- j. Peningkatan Penerapan teknologi perikanan

N. INDUSTRI

1. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai industri.
2. Meningkatkan nilai tambah.
3. Pengembangan Industri kecil dan menengah.
4. Pengembangan lingkungan bisnis yang nyaman dan kondusif.
5. Pertumbuhan klaster industri prioritas.
6. Penetapan prioritas persebaran.
7. Pengembangan kemampuan inovasi khususnya di bidang teknologi industri dan manajemen.

O. PERDAGANGAN

1. Perdagangan Dalam Negeri

- a. Penyederhanaan prosedur perijinan.
- b. Perkuatan kelembagaan perdagangan.

- c. Fasilitasi pengembangan sarana distribusi
- d. Peningkatan efektivitas pelaksanaan perlindungan konsumen, tertib ukur dan perkuatan sistem pengawasan barang beredar dan jasa.

2. Perdagangan Luar Negeri

- a. Meningkatkan akses dan perluasan pasar ekspor
- b. Perkuatan kinerja eksportir dan calon eksportir.

Aspeknya meliputi :

- a. Mendorong secara bertahap perluasan basis produk ekspor dengan tetap memperhatikan kriteria produk ekspor yang ramah lingkungan.
- b. Revitalisasi kinerja kelembagaan promosi ekspor dan perkuatan kapasitas kelembagaan pelatihan eksportir kecil.
- c. Peningkatan fasilitasi perdagangan melalui penyederhanaan prosedur ekspor – impor.
- d. Perkuatan kelembagaan pengamanan internasional.

P. KOPERASI DAN UKM

1. Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing, sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan berwawasan gender terutama untuk :
3. Memperluas akses kepada perbankan.
4. Menyederhanakan prosedur perijinan.
5. Memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi.
6. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja.
7. Mengembangkan UMKM melalui pendekatan kluster dan pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha.
8. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan teknologi dan peningkatan kualitas SDM.
9. Mengintegrasikan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing.
10. Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk:
 - a. Membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif serta kepastian hukum koperasi.
 - b. Meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan stakeholders kepada koperasi.
 - c. Meningkatkan kemandirian koperasi

Q. PERTAMBANGAN DAN ENERGI

1. Meningkatkan eksploitasi dengan selalu memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan khususnya mempertimbangkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.
2. Meningkatkan manfaat pertambangan dan nilai tambah.
3. Merehabilitasi kawasan bekas pertambangan.
4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan.
5. Peningkatan Efisiensi usaha penyediaan tenaga
6. Restrukturisasi sektor ketenagalistrikan, membantu masyarakat tidak mampu, fasilitasi penyediaan energi primer dan energi baru terbarukan, serta penataan usaha penunjang tenaga listrik

R. KAPASITAS DAERAH

1. Hukum

- a. Memberikan regulasi dan fasilitasi penegakan supremasi hukum.
- b. Reformasi birokrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
- c. Melanjutkan upaya sistematis pemberantasan korupsi secara konsisten.

2. Pengawasan

- a. Peningkatan pengawasan secara komprehensif.
- b. Memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan keprofesionalismenya aparat pengawasan.
- c. Pemberantasan KKN dan mewujudkan good governance, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- d. Mendorong dilaksanakannya pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kerjasama

Melaksanakan (termasuk merintis atau menindaklanjuti) kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak untuk kepentingan peningkatan pemberdayaan dan pelayanan sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat.

4. Pemerintahan Umum

- a. Melaksanakan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
- b. Memperkuat jejaring kerja dengan stakeholders di Jakarta (Paguyuban / Yayasan, Kantor-kantor Perwakilan se Indonesia maupun Pemerintah Pusat).
- c. Penataan Komplek Kepatihan.

5. Perencanaan

Pelaksanaan pembangunan di daerah secara bertahap dan berkesinambungan yang dituangkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah.

6. Aparatur Pemerintahan

- a. Memberi kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengembangkan kemampuan dan profesionalisme.
- b. Keberlanjutan penataan kelembagaan/pegawai.
- c. Memberikan regulasi dan fasilitasi tertatanya ketatalaksanaan dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- d. Optimalisasi SIMPEG untuk menciptakan sinergitas pengembangan aparatur.
- e. Realisasi dan pemanfaatan konsep-konsep pengelolaan kepegawaian yang telah disusun.
- f. Peningkatan kesejahteraan Pegawai.

7. Kearsipan

- a. Memberikan dorongan agar setiap instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan tata kearsipan secara benar sehingga berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Mengembangkan kerja sama dan koordinasi, baik internal maupun dengan lembaga lain untuk peningkatan profesionalitas bagi praktisi di bidang kearsipan.
- c. Mengembangkan situasi kondisi untuk pelaksanaan manajemen kearsipan melalui penyelenggaraan apresiasi kearsipan, penyuluhan, pendidikan dan latihan, pameran, seminar, dan sebagainya.
- d. Mengembangkan pengawasan dan monitoring tata kearsipan di lingkungannya.

S. INVESTASI

- 1. Meningkatkan koordinasi antar instansi dan stakeholder sebagai sumber data
- 2. Meningkatkan sosialisasi investasi
- 3. Meningkatkan nilai investasi pemerintah (penyertaan modal)
- 4. Meningkatkan fasilitasi modal usaha bagi sektor riil
- 5. Meningkatkan infrastruktur pendukung
- 6. Meningkatkan insentive investasi
- 7. Mendukung penciptaan iklim Investasi yang kondusif
- 8. Meningkatkan koordinasi antar instansi
- 9. Mempersingkat /mempermudah prosedur perijinan
- 10. Mengembangkan sarana prasarana penunjang investasi
- 11. Mendesign lembaga/unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di tingkat Provinsi
- 12. Issue *Global Warming*, implementasi investasi yang Ramah Lingkungan.

BAB VI
TEMA - PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN KEWILAYAHAN

A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PROVINSI DIY

1. Visi Pembangunan Provinsi DIY

Visi Pembangunan Provinsi DIY adalah *“Terwujudnya Pembangunan Regional sebagai wahana menuju pada kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2020 sebagai pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka, dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera lahir dan batin didukung oleh nilai-nilai kejuangan dan pemerintahan yang bersih dalam pemerintahan yang baik dengan mengembangkan Ketahanan Sosial Budaya dan sumberdaya berkelanjutan”*.

Kondisi yang secara bertahap ingin dicapai dengan ditetapkan visi tersebut, antara lain:

- a. Terbentuknya citra Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah pengembangan sosiokultural dan sosioekonomi yang dinamis dan inovatif, berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi maju serta moral masyarakat yang berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Tersedianya lapangan kerja yang memberikan penghasilan cukup bagi masyarakat secara adil dan merata.
- c. Terciptanya tingkat kesehatan dan gizi masyarakat yang cukup baik, sehingga faktor sumberdaya manusia yang maju, mandiri dan sejahtera dalam lingkungan yang sehat, sehingga dapat diandalkan dalam persaingan global.
- d. Terciptanya kondisi yang kondusif bagi partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah yang bertumpu pada tata nilai budaya serta sumberdaya yang berkelanjutan, dengan mengembangkan kerukunan hidup antar komponen masyarakat, baik antara agama, suku dan budaya.
- e. Terciptanya masyarakat yang menghormati dan menegakkan Hak Azasi Manusia (HAM) dalam segala aspek kehidupan.
- f. Terlaksananya pelayanan pemerintah yang handal, efisien dan transparan di dalam suasana kehidupan yang aman dan tenteram dalam kerangka otonomi daerah.

2. Misi Pembangunan Provinsi DIY

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan tersebut, maka Misi Pembangunan Provinsi DIY, adalah:

- a. Menjadikan DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka di Indonesia yang didukung oleh masyarakat yang berilmu pengetahuan dan teknologi tinggi.
- b. Menjadikan DIY sebagai pusat kebudayaan terkemuka di Indonesia dengan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pusat budaya, dan didukung oleh pilar-pilar pengembangan budaya dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, serta mampu memilih dan menyerap budaya modern yang positif dengan tetap melestarikan budaya daerah.
- c. Menjadikan DIY sebagai daerah otonom yang maju dan didukung oleh aparatur yang terpercaya, profesional, transparan dan akuntabel, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan berlandaskan pada supremasi hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Menjadikan DIY sebagai wilayah pembangunan yang terpadu, komplementatif dan sinergis antar wilayah dan antar sektor yang efisien dan efektif serta didukung pelibatan secara langsung dan aktif peran masyarakat dalam pembangunan daerah melalui ketahanan budaya dan ketahanan sumberdaya, yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Menjadikan DIY sebagai daerah tujuan wisata *Meeting, Incentive, Conference and Exhibition* (MICE) utama di Indonesia dan sekaligus mengembalikan posisi DIY sebagai daerah tujuan wisata kedua setelah Bali, yang didukung posisi DIY sebagai simpul strategis dan penting dalam perhubungan dan komunikasi di pulau Jawa.
- f. Menjadikan DIY sebagai wilayah pengembangan industri sedang dan kecil yang nonpolutan serta industri rumah tangga modern, yang didukung oleh pengembangan teknologi tepat guna dan sepadan, serta seni daerah dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata daerah dan permintaan pasar global.
- g. Menjadikan DIY sebagai wilayah pengembangan pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, peternakan, kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan) yang didukung oleh berkembangnya perekonomian rakyat yang berkualitas dalam rangka memenuhi tuntutan pasar lokal, regional dan global dengan produk agribisnis dan agroindustri yang kompetitif.

B. TEMA PEMBANGUNAN

Tema pembangunan tahun 2009 ditetapkan dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut:

1. Visi Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu: ***"Terwujudnya Pembangunan Regional sebagai wahana menuju pada kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2020 sebagai pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka, dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera lahir dan batin didukung oleh nilai-nilai kejuangan dan pemerintahan yang bersih dalam pemerintahan yang baik dengan mengembangkan Ketahanan Sosial Budaya dan sumberdaya berkelanjutan"***.

2. Rencana Kerja Pemerintah RI Tahun 2009, dengan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2009: **"Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan"**
3. Delapan tujuan pembangunan dalam *Millennium Development Goals*, yang terdiri dari:
 - a. Menghapuskan kemiskinan dan kelaparan;
 - b. Menyediakan pelayanan Pendidikan Dasar untuk semua;
 - c. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - d. Menurunkan angka kematian anak;
 - e. Meningkatkan kesehatan ibu;
 - f. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
 - g. Memastikan keberlanjutan lingkungan hidup;
 - h. Membangun kemitraan global dalam pembangunan.
4. Hasil Forum SKPD Provinsi DIY Tahun 2008 dan hasil Musrenbang Provinsi DIY Tahun 2008.

Dengan mengacu hal tersebut di atas dan mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi maka ditetapkan tema pembangunan Provinsi DIY pada tahun 2009 adalah: ***"Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perkuatan ekonomi daerah, penanganan kemiskinan dan pengangguran"***.

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN

Guna mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, dan juga pencapaian visi pemerintah pembangunan DIY, serta sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional yang terdiri:

1. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan.
2. Percepatan Pertumbuhan yang Berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi
3. Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi, dan Pemantapan Demokrasi serta Keamanan Dalam Negeri;

maka prioritas pembangunan Propinsi DIY Tahun 2009 adalah:

1. Revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan sosial
3. Pemberdayaan UMKM, dan peningkatan investasi dan ekspor
4. Pengembangan budaya dan pariwisata;
5. Peningkatan kapasitas daerah dan penegakan hukum

Prioritas tersebut disusun berdasarkan kriteria:

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan
2. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
3. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan

4. Merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah untuk melaksanakannya
5. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam RKPD ini, terdapat enam prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional, yaitu: partisipasi masyarakat, pembangunan berkelanjutan, berwawasan gender, berwawasan pelestarian lingkungan, tata pengelolaan yang baik, pengurangan kesenjangan antar wilayah dan percepatan daerah tertinggal serta padat karya.

D. SASARAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM

1. Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan

a. Sasaran

- 1) Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan penyediaan lapangan usaha pertanian di perdesaan
- 2) Meningkatnya pendapatan masyarakat perdesaan (petani, nelayan dan masyarakat sekitar hutan)
- 3) Meningkatnya daya saing produk pertanian

b. Kebijakan

- 1) Pemberian subsidi dan bantuan modal usaha petani dan nelayan/ pembudidaya ikan
- 2) Peningkatan produk dan produktivitas pertanian, perikanan dan perkebunan
- 3) Peningkatan nilai tambah hasil/produk pertanian secara luas (pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, perikanan, dan kelautan)
- 4) Optimalisasi fungsi hutan dan lahan
- 5) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM serta kelembagaan pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, dan kelautan
- 6) Pengembangan pertanian berkelanjutan
- 7) Pengembangan Jogja Seed Centre
- 8) Aplikasi teknologi di setiap sub sistem usaha agribisnis
- 9) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian
- 10) Pemberantasan hama/penyakit tanaman dan ternak
- 11) Peningkatan penanganan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil
- 12) Optimalisasi ketersediaan sumber air baku dan terpeliharanya jaringan irigasi
- 13) Optimalisasi pemanfaatan lahan marginal

c. Program Prioritas

Dinas Pertanian

- 1) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- 2) Program peningkatan produksi hasil peternakan
- 3) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
- 4) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan
- 5) Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan)

- 6) Program peningkatan kesejahteraan petani
- 7) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- 8) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

- 1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- 2) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
- 3) Perencanaan dan Pengembangan Hutan
- 4) Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
- 5) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
- 6) Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)
- 7) Peningkatan Kesejahteraan Petani
- 8) Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
- 9) Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Dinas Perikanan dan Kelautan

- 1) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
- 2) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
- 3) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
- 4) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- 5) Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
- 6) Program pengembangan perikanan tangkap
- 7) Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
- 8) Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat
- 9) Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut

Dinas Permukiman Prasarana Wilayah

- 1) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- 2) Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya
- 3) Program pengendalian banjir
- 4) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- 5) Program pengembangan infrastruktur perdesaan
- 6) Badan Perencanaan Daerah
- 7) Program perencanaan pembangunan ekonomi
- 8) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
- 9) Pembangunan Daerah Tertinggal
- 10) Kantor Pemberdayaan Perempuan
- 11) Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
- 12) Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
- 13) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Biro Kerjasama

- 1) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

2. **Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sosial**

a. **Sasaran**

- 1) Tercapainya peningkatan layanan anak berkebutuhan khusus
- 2) Tercapainya APK PAUD; SD/MI; SMP/MTs; SMA/SMK/MA
- 3) Tercapainya animo masuk mahasiswa baru perguruan tinggi
- 4) Tercapainya kualitas dan daya saing pendidikan di tingkat nasional
- 5) Menurunnya jumlah penduduk buta aksara usia 15- 44 tahun
- 6) Meningkatnya minat baca masyarakat
- 7) Meningkatnya proporsi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dengan cakupan rawat jalan 12%; rumah sakit dengan cakupan rawat inap 1,3%, pelayanan kesehatan jiwa 10%, pelayanan gawat darurat sesuai standart sebesar 45%
- 8) Penemuan penyakit CVD (cardio vasculer deseas) dan diabetes sebesar 40%, penurunan jumlah kematian (Case Fatality Rate) akibat kecelakaan dan rudapaksa 45,7%;
- 9) Penanganan penyakit penyalahgunaan NAPZA sebesar 90% dari penderita yang ditemukan
- 10) Kesembuhan pengobatan TBC sebesar 81%, Case fatality rate (CFR) DBD 1,01%, penemuan penderita AIDS sebesar 501 kasus, Indigenous penyakit malaria 21 kasus.
- 11) Menurunkan prevalensi gizi buruk 0,89%

b. **Kebijakan**

- 1) Meningkatkan pemerataan pendidikan pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan.
- 2) Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan.
- 3) Meningkatkan kualitas manajemen layanan pendidikan.
- 4) Meningkatkan pengembangan perpustakaan.
- 5) Meningkatkan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- 6) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman penyakit, kecelakaan dan dampak bencana; Peningkatan upaya pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan penyakit, kecelakaan dan dampak bencana; Meningkatkan peran lembaga pemerintah, non pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan kegiatan mengurangi faktor risiko.
- 7) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin; Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan oleh lembaga pemerintah dan swasta; Meningkatkan mutu dan akses pelayanan perbaikan gizi dan pelayanan perbaikan kesehatan lingkungan; Meningkatkan mutu dan akses informasi kesehatan oleh pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta yang mendukung tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan.
- 8) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan monitoring evaluasi pembangunan kesehatan di DIY; Mendorong masyarakat mandiri dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan dan kesinambungan pelayanan kesehatan; Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan upaya

kesehatan berbasis masyarakat melalui : Posyandu dan Desa Siaga, Lembaga Swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan lain dan organisasi keagamaan, Sektor swasta.

- 9) Penyusunan regulasi kesehatan dan dukungan penyusunan regulasi yang terkait pembangunan kesehatan; Perbaikan sistem surveilans dan pengembangan sistem informasi; Peningkatan mutu manajemen dan administrasi; Peningkatan fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan; Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan; Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan; Pengembangan asuransi kesehatan.
- 10) Pemasaran produk dan jasa pelayanan kesehatan Propinsi DIY; Pemasaran DIY sebagai pusat pendidikan, pelatihan, penelitian dan konsultasi kesehatan.

c. **Program Prioritas**

Dinas Pendidikan

- 1) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
- 2) Program Pendidikan Menengah
- 3) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- 4) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- 5) Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
- 6) Program Pendidikan Luar Biasa
- 7) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 8) Program Pendidikan Non Formal
- 9) Program pendidikan anak usia dini
- 10) Program Pendidikan Tinggi
- 11) Program Pendidikan Luar Biasa
- 12) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- 13) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
- 14) Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
- 15) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Badan Perpustakaan Daerah

- 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Biro Kerjasama

- 1) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

Dinas Kesehatan

- 1) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
- 2) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- 3) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
- 4) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
- 5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- 6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- 7) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
- 8) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
- 9) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
- 10) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

- 11) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 12) Program standarisasi pelayanan kesehatan
- 13) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- 14) Program, pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

RS Ghrasia

- 1) Program, pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
- 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- 3) Program standarisasi pelayanan kesehatan
- 4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

Dinas Sosial

- 1) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
- 2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- 3) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
- 4) Program Pembinaan Anak Terlantar
- 5) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
- 6) Program pembinaan panti asuhan / panti jompo
- 7) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Kantor Pemberdayaan Perempuan

- 1) Program keluarga Berencana
- 2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- 3) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
- 4) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
- 5) Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu -PADU
- 6) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
- 7) Program penguatan kelembagaan pengarusutaman gender dan anak
- 8) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- 9) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
- 10) Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat

Badan Perencanaan Daerah

- 1) Program perencanaan sosial dan budaya
- 2) Program perencanaan pembangunan ekonomi

Dinas Perindagkop

- 1) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah

- 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- 2) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
- 3) Program pengendalian banjir
- 4) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- 5) Program penyediaan dan pengelolaan air baku
- 6) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- 7) Program inspeksi kondiasi jalan dan jembatan
- 8) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- 9) Program Perencanaan Tata Ruang
- 10) Program pengembangan perumahan
- 11) Program pemberdayaan jasa konstruksi

3. **Pemberdayaan UMKM, dan Peningkatan Investasi dan Ekspor**

a. **Sasaran**

- 1) Meningkatkan pemberdayaan UMKM
- 2) Meningkatkan investasi
- 3) Meningkatkan ekspor
- 4) Meningkatkan pemberdayaan Industri Kecil, Menengah dan Besar (IKMB)

b. **Kebijakan**

- 1) Meningkatkan citra DIY yang nyaman dan aman serta prospektif untuk investasi
- 2) Peningkatan SDM bidang Investasi
- 3) Peningkatan kualitas materi promosi investasi
- 4) Pengembangan promosi investasi
- 5) Mengurangi biaya transaksi dan praktek ekonomi biaya tinggi.
- 6) Meningkatkan fasilitasi/pembinaan UMKM.
- 7) Meningkatkan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi dunia usaha.
- 8) Meningkatkan daya saing industri dan pengembangan ekspor.

c. **Program Prioritas**

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi

- 1) Program persaingan usaha
- 2) Program peningkatan Pengembangan Ekspor
- 3) Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional
- 4) Program peningkatan kemampuan teknologi industri
- 5) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
- 6) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
- 7) Program pengembangan industri kecil dan menengah
- 8) Program pengembangan bahan bakar dan energi
- 9) Program pembinaan industri rumah tangga (IRT), industri kecil dan menengah (IKM)
- 10) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
- 11) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Badan Perencanaan Daerah

- 1) Program perencanaan pembangunan ekonomi

- 2) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
- 3) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
- 4) Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

Kantor Perwakilan Daerah

- 1) Program kerjasama informasi dan Media Massa

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- 1) Program peningkatan kesempatan kerja
- 2) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- 3) Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

4. **Pengembangan Budaya dan Pariwisata**

a. **Sasaran**

- 1) Teridentifikasinya ciri khas DIY
- 2) Tampilan museum yang semakin menarik
- 3) Kaderisasi pelaku budaya
- 4) Optimalisasi, fasilitasi dan apresiasi seni masyarakat
- 5) Terpenuhinya infrastuktur kebudayaan berstandar internasional
- 6) Meningkatnya kesadaran masyarakat di UDTW
- 7) Terberdayakannya masyarakat di sekitar UDTW
- 8) Meningkatnya jumlah wisatawan
- 9) Meningkatnya *length of stay*
- 10) Terbukanya aksesibilitas wisatawan mancanegara

b. **Kebijakan**

- 1) Pengembangan dan pengelolaan budaya daerah.
- 2) Revitalisasi kelompok sadar wisata;
- 3) Memperkuat jejaring (*networking*) antar pelaku pariwisata;
- 4) Mensinergikan kegiatan dan peningkatan koordinasi lintas sektor
- 5) Mendorong pemerintah (pusat) untuk membuka kembali "*direct flight*"

c. **Program Prioritas**

Badan Pariwisata Daerah

- 1) Program pengembangan pemasaran pariwisata
- 2) Program pengembangan destinasi pariwisata
- 3) Program pengembangan kemitraan

Dinas Kebudayaan

- 1) Program pengembangan nilai budaya
- 2) Program pengelolaan kekayaan budaya
- 3) Program pengelolaan keragaman budaya
- 4) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Badan Perencanaan Daerah

- 1) Program perencanaan sosial dan budaya

- 2) Program perencanaan pembangunan ekonomi

Kantor Perwakilan Daerah

- 1) Program pengembangan nilai budaya
- 2) Program pengelolaan kekayaan budaya

Dinas Perhubungan

- 1) Program peningkatan pelayanan angkutan
- 2) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Biro Kerjasama

- 1) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

5. **Peningkatan Kapasitas Daerah dan Penegakan Hukum**

a. **Sasaran**

- 1) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik
- 2) Meningkatnya upaya penegakan hukum
- 3) Meningkatnya upaya pemberantasan KKN
- 4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- 5) Meningkatnya kapasitas kelembagaan daerah
- 6) Meningkatnya kinerja SKPD
- 7) Meningkatnya profesionalisme Aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan
- 8) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
- 9) Peningkatan kesejahteraan pegawai.

b. **Kebijakan**

- 1) Reformasi birokrasi
- 2) Pengembangan regulasi dan fasilitasi penegakan supremasi hukum;
- 3) Peningkatan pengawasan secara komprehensif.
- 4) Pemberian kesempatan yang luas bagi aparat untuk mengembangkan kemampuan dan profesionalisme
- 5) Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak untuk kepentingan peningkatan pemberdayaan dan pelayanan
- 6) Melaksanakan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
- 7) Memperkuat jejaring kerja dengan stakeholders di Jakarta (Paguyuban / Yayasan, Kantor-kantor Perwakilan se Indonesia maupun Pemerintah Pusat);
- 8) Keberlanjutan penataan kelembagaan/pegawai.
- 9) Memberikan regulasi dan fasilitasi tertatanya ketatalaksanaan dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

c. **Program Prioritas**

Biro Tata Pemerintahan

- 1) Prograam penyelesaian konflik-konflik pertanahan
- 2) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
- 3) Program optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan

- 4) Program penataan administrasi kependudukan
- 5) Program penataan daerah otonomi baru
- 6) Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- 7) Program pendidikan politik masyarakat
- 8) Program pengembangan wilayah perbatasan
- 9) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- 10) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah

Biro Kepegawaian

- 1) Program pembinaan dan pengembangan aparatur
- 2) Program pendidikan kedinasan

Biro Organisasi

- 1) Program peningkatan kapasitas kelembagaan daerah

Biro Hukum

- 1) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- 2) Program penataan peraturan perundang-undangan

Badan Pengawasan Daerah

- 1) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- 2) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- 3) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- 4) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Dinas Ketentraman dan Ketertiban

- 1) Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
- 2) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
- 3) Program Pemeliharaan Kamtramtibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- 4) Program pencegahan dini dan penaggulangan korban bencana alam
- 5) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 6) Program peningkatan keamaan dan kenyamanan lingkungan
- 7) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah
- 8) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Kantor Arsip Daerah

- 1) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
- 2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen /arsip daerah
- 3) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
- 4) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Badan Pendidikan dan Pelatihan

1) Program pendidikan kedinasan

Biro Kerjasama

1) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

Biro Umum

1) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

1) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

2) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

3) Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

4) Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

5) Program peningkatan pengendalian polusi

6) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

7) Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

Badan Perencanaan Daerah

1) Program perencanaan pembangunan daerah

2) Program pengembangan data /informasi

3) Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

4) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

5) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

6) Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

7) Program kerjasama pembangunan

8) Program perencanaan sosial dan budaya

9) Program perencanaan pembangunan ekonomi

10) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

11) Program pengembangan wilayah perbatasan

12) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Dinas Perhubungan

1) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

2) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

3) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

4) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

5) Program peningkatan pelayanan angkutan

6) Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

2) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota

3) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

4) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi

- 1) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
- 2) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
- 3) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
- 4) Program pengembangan bahan bakar dan energi

Badan Informasi Daerah

- 1) Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
- 2) Program Fasilitasi, Pembinaan , Pengendalian Pos Telekomunikasi dan Frekuensi
- 3) Program kerjasama informasi dan Media Massa
- 4) Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
- 5) Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

Sekretariat DPRD

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Kantor Perwakilan Daerah

- 1) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

Dinas Permukiman Prasarana Wilayah

- 1) Program pelayanan jasa pengujian
- 2) Program Perencanaan Tata Ruang
- 3) Program pemanfaatan ruang
- 4) Program pengembangan dan pengelolaan data dan Informasi sumber daya alam
- 5) Program pengendalian pemanfaatan ruang
- 6) Program pengaturan jasa konstruksi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- 1) Program peningkatan kesempatan kerja

E. KEWILAYAHAN

1. Wilayah Barat

a. Karakteristik

- 1) Lokasi di Kabupaten Kulon Progo di luar kawasan pesisir
- 2) Penggunaan lahan didominasi perkebunan, permukiman, tegalan dan sawah
- 3) Topografinya didominasi oleh perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500 – 1000 m dpal yang rawan longsor dan kekeringan dan perbukitan Sentolo dengan ketinggian sekitar 100 – 200 m dpal. Sebagian besar jenis tanahnya terdiri dari Latosol dan Grumusol.

- 4) Kondisi hidrologis pada kawasan timur dengan potensi air permukaan dan airtanah cukup tinggi karena curah hujan yang tinggi pula dan adanya sumber air yang berasal dari DAS Progo. Disamping itu terdapat sistem persawahan irigasi cukup baik. Pada kawasan barat selatan kebutuhan air dicukupi dari sumber air waduk Sermo.
- 5) Jumlah luasan hutan hanya sebesar 10 persen dan sebagian besar merupakan hutan rakyat.
- 6) Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, dan yang kedua di sektor industri pengolahan
- 7) Sektor unggulannya adalah pertanian bahan makanan, perkebunan dan peternakan.
- 8) Sebagian besar hasil produksi tanaman pangan berupa padi, jagung, ketela pohon dan kedelai serta kelapa, coklat dan cengkeh untuk tanaman perkebunan.
- 9) Dikategorikan sebagai daerah tertinggal

b. Prioritas

- 1) Konservasi hutan dan air
- 2) Pengembangan Kawasan Strategis Pertanian Terpadu
- 3) Pengembangan wisata perbukitan menoreh
- 4) Fasilitasi pengembangan kawasan industri Sentolo
- 5) Pengembangan irigasi
- 6) Pengembangan industri kecil dan rumah tangga
- 7) Fasilitasi pembangunan industri pasir besi
- 8) Pengurangan resiko bencana
- 9) Pengembangan peternakan dan perkebunan

2. Wilayah Tengah

a. Karakteristik

- 1) Meliputi 3 wilayah administrasi, yaitu Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul di luar kawasan pesisir
- 2) Wilayah ini berupa kawasan Gunung Merapi, dataran lereng kaki Merapi hingga dataran Graben Bantul, dengan ketinggian antara 26m dpal di Bantul hingga puncak Merapi 2968m dpal.
- 3) Jenis tanah terdiri dari Regosol dan Kambisol berbatuan dasar vulkanis yang subur. serta merupakan satu kesatuan ekosistem hulu-hilir.
- 4) Kualitas airnya cukup baik kecuali pada kawasan tengah dan selatan yang tercemar oleh kegiatan social ekonomi masyarakat.
- 5) Pada kawasan utara sebagian besar berfungsi sebagai kawasan lindung resapan air dan rawan bencana merapi
- 6) Sektor unggulannya adalah perkebunan, perikanan, hotel, dan jasa pada kawasan utara, jasa dan perdagangan pada kawasan tengah, dan pertanian, industri nir migas, dan bangunan pada kawasan selatan

- 7) Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor jasa dan pertanian pada kawasan utara, jasa dan perdagangan pada kawasan tengah serta pertanian dan industri pengolahan pada kawasan selatan
- 8) Konversi lahan pertanian sangat tinggi
- 9) Merupakan kawasan tumbuh cepat terutama pada kawasan perkotaan Yogyakarta
- 10) Sebagian kawasan selatan merupakan kawasan rawan bencana geologi.

b. Prioritas

- 1) Konservasi air dan hutan melalui penanaman berbagai jenis tanaman lindung, pembuatan SPAH dan pembatasan kegiatan budidaya di kawasan utara
- 2) Pengembangan agro industri pada kawasan utara
- 3) Pengendalian berbagai kegiatan yang berpotensi mencemari air
- 4) Penyediaan sarana prasarana lingkungan perkotaan
- 5) Pengurangan resiko bencana merapi pada kawasan utara dan bencana geologi pada kawasan selatan
- 6) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian
- 7) Pengendalian pertumbuhan permukiman baru khususnya pada kawasan utara dan perkotaan
- 8) Pengembangan jasa dan perdagangan
- 9) Pelestarian cagar budaya
- 10) Pengembangan irigasi
- 11) Pengembangan wisata alam dan buatan
- 12) Pengembangan perikanan
- 13) Penataan kawasan kumuh perkotaan
- 14) Fasilitasi pengembangan kawasan industri
- 15) Menyeraskan penataan lalulintas dan traffic manajemen antar kabupaten/kota

3. Wilayah Timur

a. Karakteristik

- 1) Lokasi di Kabupaten Gunungkidul
- 2) Topografinya terdiri dari 3 sub-zona yakni Pegunungan Baturagung dengan ketinggian antara 200 -1000 m dpal, Ledok Wonosari dengan ketinggian 100 - 200 m dpal dan Pegunungan karst Seribu berketinggian cukup kompleks dari 0 m hingga 600 m dpal.
- 3) Sebagian besar jenis tanahnya terdiri dari Latosol, Rendsina, Grumusol dan Mediterania
- 4) Merupakan daerah pegunungan yang sebagian merupakan kawasan karst yang luas dan unik dengan potensi sungai bawah tanah yang cukup besar.
- 5) Pada kawasan utara dan barat merupakan kawasan rawan longsor
- 6) Sebagian besar wilayahnya merupakan lahan kering yang rawan terhadap kekeringan
- 7) Luas lahan persawahan sangat sedikit, hanya sekitar 10 persen

- 8) Penggunaan lahannya di dominasi untuk tegal/kebun, pekarangan/bangunan, dan hutan.
- 9) Sektor unggulannya adalah pertanian lahan kering, perkebunan, peternakan dan kehutanan
- 10) Dikategorikan sebagai daerah tertinggal

b. Prioritas

- 1) Penyediaan air bersih
- 2) Konservasi kawasan karst
- 3) Pengembangan pertanian lahan kering
- 4) Konservasi hutan dan embung
- 5) Pengembangan peternakan dan perkebunan
- 6) Pengembangan geowisata karst

4. Wilayah Pesisir

a. Karakteristik

- 1) Merupakan kawasan pesisir yang membentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Kabupaten Gunungkidul
- 2) Merupakan kawasan yang rawan terhadap tsunami
- 3) Sebagian besar kawasannya merupakan kawasan lindung sepadan pantai
- 4) Kegiatan budidaya masih bisa dimungkinkan dengan persyaratan diusahakan pembatasan akibat dari keberadaan budidaya tersebut terhadap kelestarian pantai.
- 5) Sebagian besar tanahnya merupakan lahan tandus dan berpasir dan sebagian kecilnya difungsikan sebagai lahan pertanian
- 6) Potensi yang dapat dikembangkan adalah sektor perikanan laut termasuk pengolahan dan pemasaran hasil laut

b. Prioritas

- 1) Pengembangan wisata pantai
- 2) Peningkatan usaha di bidang perikanan laut
- 3) Fasilitasi pembangunan sarana prasarana perikanan laut
- 4) Pengembangan pertanian lahan pantai
- 5) Konservasi sepadan pantai dan penghijauan
- 6) Pengurangan resiko bencana tsunami
- 7) Fasilitasi pemasaran hasil laut
- 8) Penataan kawasan kumuh pantai
- 9) Mengharmoniskan pengembangan transportasi laut dengan pengembangan wilayah pantai selatan baik berkaitan dengan jalur jalan lintas selatan maupun jalur wisata pantai selatan.

BAB VII
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

A. Usulan RAPBN Provinsi DIY Tahun 2009

DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN	R M (Juta Rp)	PHLN (Juta Rp)	TOTAL (Juta Rp)
DEPARTEMEN DALAM NEGERI	<u>11,032.90</u>	<u>300.00</u>	<u>11,332.90</u>
BAWASDA	495.00	-	495.00
10110 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	495.00	-	495.00
112 Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengawasan	495.00	-	495.00
BAPEDA	-	300.00	300.00
10605 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	-	300.00	300.00
647 Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (Ilgr)	-	300.00	300.00
DINAS SOSIAL	5,861.90	-	5,861.90
69009 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	5,861.90	-	5,861.90
716 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit Pengaduan Masyarakat	197.50	-	197.50
847 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Pnpm Perdesaan Dengan Kecamatan	5,664.40	-	5,664.40
DINAS TRANTIBUM	4,676.00	-	4,676.00
10608 Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah	300.00	-	300.00
752 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Usaha Mitigasi Bencana dan Bahaya Kebakaran	300.00	-	300.00
30105 Program Pemeliharaan Kamtibmas	4,376.00	-	4,376.00
73 Perencanaan / Penyusunan / Pengembangan Program dan Sistem Prosedur	350.00	-	350.00
667 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Penyiapan Pedoman Bagi Aparat Pol Pp, Ppns dan Satuan Linmas	4,026.00	-	4,026.00
DEPARTEMEN PERTANIAN	<u>138,495.50</u>	-	<u>138,495.50</u>
DINAS PERTANIAN	123,617.00	-	123,617.00
40303 Program Pengembangan Agribisnis	19,126.00	-	19,126.00
1501 Pembinaan/ Penanganan Komoditas Strategi Nasional	384.00	-	384.00
1503 Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	6,703.00	-	6,703.00
1553 Pengembangan Pertanian Terpadu Tanaman-Ternak, Kompos, dan Biogas	950.00	-	950.00
1555 Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis (Pnpm-P)	2,340.00	-	2,340.00
1557 Pengembangan Fasilitas Pelayanan Agroindustri Terpadu	521.00	-	521.00
1582 Pengembangan Pertanian Terpadu Tanaman-Ternak, Kompos, dan Biogas (Tp)	7,152.00	-	7,152.00
1583 Pengembangan Fasilitas Pelayanan Agroindustri Terpadu (Tp)	1,076.00	-	1,076.00
40304 Program Peningkatan Ketahanan Pangan	87,910.00	-	87,910.00
1518 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	3,153.00	-	3,153.00
1519 Pengembangan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian	12,648.00	-	12,648.00
1520 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	770.00	-	770.00
1521 Pengembangan Perlindungan Tanaman	1,409.00	-	1,409.00
1522 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian	23,217.00	-	23,217.00
1531 Pembinaan dan Pengembangan Distribusi dan Akses Pangan	18,280.00	-	18,280.00
1537 Perlindungan Varietas Tanaman	1,573.00	-	1,573.00
1563 Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan (Pnpm-P)	6,363.00	-	6,363.00
1564 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (Opt), Penyakit Hewan, Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan	411.00	-	411.00

DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN	R M (Juta Rp)	PHLN (Juta Rp)	TOTAL (Juta Rp)
1565 Pengembangan Pembibitan Sapi/Kerbau	1,260.00	-	1,260.00
1567 Peningkatan Kegiatan Pasca Panen dan Pengolahan Pangan	1,946.00	-	1,946.00
1568 Penanganan dan Pengendalian Wabah Virus Flu Burung Pada Hewan dan Restrukturisasi Perunggasan	2,148.00	-	2,148.00
1570 Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Pertanian, Serta Pengembangan Kawasan	3,804.00	-	3,804.00
1588 Penanganan dan Pengendalian Wabah Virus Flu Burung Pada Hewan dan Restrukturisasi Perunggasan (Tp)	5,928.00	-	5,928.00
1589 Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Pertanian, Serta Pengembangan Kawasan (Tp)	5,000.00	-	5,000.00
40308 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	16,581.00	-	16,581.00
1538 Pembinaan dan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	3,902.00	-	3,902.00
1541 Koordinasi Penanganan Daerah Bencana Alam, Konflik, Tertinggal dan Perbatasan	560.00	-	560.00
1545 Pelayanan Pembiayaan Pertanian	376.00	-	376.00
1547 Pemberdayaan Petani, Pelaku Agribisnis dan Penyuluhan Pertanian	1,106.00	-	1,106.00
1574 Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani Melalui Pmuk dan Lm3	5,525.00	-	5,525.00
1575 Pengembangan Magang Sekolah Lapang	368.00	-	368.00
1594 Pengembangan Magang Sekolah Lapang (Tp)	4,744.00	-	4,744.00
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	14,878.50	-	14,878.50
40303 Program Pengembangan Agribisnis	10,078.50	-	10,078.50
1508 Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Perkebunan	1,280.00	-	1,280.00
1514 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Mutu Produk Perkebunan	3,152.00	-	3,152.00
1552 Pengembangan Agroindustri Perdesaan	2,796.50	-	2,796.50
1555 Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis (Pnpm-P)	2,850.00	-	2,850.00
40304 Program Peningkatan Ketahanan Pangan	4,260.00	-	4,260.00
1521 Pengembangan Perlindungan Tanaman	260.00	-	260.00
1570 Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Pertanian, Serta Pengembangan Kawasan	4,000.00	-	4,000.00
40308 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	540.00	-	540.00
1547 Pemberdayaan Petani, Pelaku Agribisnis dan Penyuluhan Pertanian	180.00	-	180.00
1575 Pengembangan Magang Sekolah Lapang	360.00	-	360.00
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	4,250.00	-	4,250.00
DINAS PERINDAGKOP	4,250.00	-	4,250.00
40504 Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Energi	1,200.00	-	1,200.00
2133 Pengkoordinasian/Penyelenggaraan Konservasi Energi	700.00	-	700.00
2146 Penyiapan Bimbingan Teknis Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	500.00	-	500.00
40601 Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	1,700.00	-	1,700.00
2115 Peningkatan Pemanfaatan Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi	700.00	-	700.00
2128 Pembinaan dan Pengusahaan Kegiatan Pertambangan	1,000.00	-	1,000.00
40602 Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas	1,350.00	-	1,350.00
8178 Pelayanan dan Pemantauan Usaha Gas Bumi	500.00	-	500.00
8213 Pengembangan dan Penggunaan Energi Alternatif	450.00	-	450.00
8214 Penyiapan dan Penentuan Harga dan Subsidi Bahan Bakar	400.00	-	400.00
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	41,664.90	-	41,664.90
DINAS PERHUBUNGAN	41,664.90	-	41,664.90
10109 Program Penerapan Pemerintahan yang Baik	367.10	-	367.10
1 Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	367.10	-	367.10
40803 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	29,851.20	-	29,851.20

DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN		R M (Juta Rp)	PHLN (Juta Rp)	TOTAL (Juta Rp)
	111 Perawatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1,814.70	-	1,814.70
	2202 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lljaj	24,549.60	-	24,549.60
	2203 Pembangunan/Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	2,432.10	-	2,432.10
	2211 Penataan dan Manajemen Rekayasa Lljaj	1,054.80	-	1,054.80
40810	Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Prasarana LLAJ	106.30	-	106.30
	90 Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/ Workshop/Publikasi	106.30	-	106.30
40814	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP	350.00	-	350.00
	2260 Pengadaan Speed Boat	350.00	-	350.00
40815	Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	190.10	-	190.10
	24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	190.10	-	190.10
40817	Program Pembangunan Transportasi Udara	10,800.20	-	10,800.20
	2271 Pengembangan/Peningkatan Bandara	10,800.20	-	10,800.20
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL		410,410.50	-	410,410.50
DINAS PENDIDIKAN		410,410.50	-	410,410.50
100101	Program Pendidikan Anak Usia Dini	7,095.70	-	7,095.70
	2304 Perluasan dan Peningkatan Mutu Tk	2,004.40	-	2,004.40
	2587 Penyelenggaraan Paud Rintisan	5,091.30	-	5,091.30
100201	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	331,905.50	-	331,905.50
	108 Pengadaan Peralatan Laboratorium	15,372.00	-	15,372.00
	2323 Bantuan Operasional Sekolah (Bos)	136,963.90	-	136,963.90
	2325 Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP	7,121.70	-	7,121.70
	2331 Perluasan dan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar	27,886.10	-	27,886.10
	2336 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pend. Khusus dan Pend. Layanan Khusus (Tingkat Dasar)	7,338.20	-	7,338.20
	2570 Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non Pns	25,857.40	-	25,857.40
	2571 Subsidi Tunjangan Profesi Guru	51,370.20	-	51,370.20
	2573 Penyelenggaraan Paket A Setara SD	249.00	-	249.00
	2574 Percepatan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik	6,298.40	-	6,298.40
	2581 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SMP	10,878.00	-	10,878.00
	2589 Penyediaan Beasiswa Bagi Siswa Miskin Jenjang SMP	4,280.50	-	4,280.50
	2590 Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Jenjang Pendidikan Dasar	18,900.00	-	18,900.00
	2645 Penyelenggaran Paket B Setara SMP	19,390.10	-	19,390.10
100301	Program Pendidikan Menengah	51,940.90	-	51,940.90
	2356 Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA	11,617.40	-	11,617.40
	2358 Perencanaan Peningkatan Mutu dan Evaluasi SMK	782.20	-	782.20
	2570 Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non Pns	11,609.50	-	11,609.50
	2574 Percepatan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik	616.80	-	616.80
	2585 Beasiswa Untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah	15,163.50	-	15,163.50
	2586 Rehabilitasi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan Menengah	1,842.80	-	1,842.80
	2594 Bantuan Operasional Manajemen Mutu (Bomm) SMA (Sekolah)	2,255.00	-	2,255.00
	2595 Bantuan Operasional Manajemen Mutu (Bomm) SMK (Siswa)	6,016.70	-	6,016.70
	3400 Pembangunan Gedung Pendidikan	2,037.00	-	2,037.00
100401	Program Pendidikan Non Formal	11,644.40	-	11,644.40
	17 Peningkatan/Pengkajian Kapasitas Kelembagaan	1,193.90	-	1,193.90
	2588 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Paket C)	1,446.10	-	1,446.10
	3409 Penyelenggaraan Kursus dan Magang	5,550.60	-	5,550.60
	3472 Pendidikan Keaksaraan Fungsional	3,453.80	-	3,453.80
100701	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4,051.50	-	4,051.50
	2394 Peningkatan Mutu dan Profesionalisme Guru (Program Pmpmk)	4,051.50	-	4,051.50
100702	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1,474.60	-	1,474.60
	2417 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Di Daerah	1,474.60	-	1,474.60
100703	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2,297.90	-	2,297.90
	35 Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran	591.80	-	591.80

DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN	R M (Juta Rp)	PHLN (Juta Rp)	TOTAL (Juta Rp)
2430 Penyelenggaraan Efisiensi Perencanaan Pendidikan (Dekonsentrasi)	817.60	-	817.60
2563 Perencanaan dan Pengendalian Dikdasmen	888.50	-	888.50
DEPARTEMEN KESEHATAN	<u>57,800.50</u>	-	<u>57,800.50</u>
DINAS KESEHATAN	52,555.00	-	52,555.00
60201 Program Lingkungan Sehat	750.00	-	750.00
2803 Pengembangan Wilayah Sehat	200.00	-	200.00
2804 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Masyarakat Miskin	200.00	-	200.00
2805 Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan	200.00	-	200.00
2806 Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan	100.00	-	100.00
2855 Pelayanan Dukungan Administrasi dan Manajemen (Ls)	50.00	-	50.00
70101 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1,285.00	-	1,285.00
2807 Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	125.00	-	125.00
2808 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan	810.00	-	810.00
2810 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan RS	350.00	-	350.00
70201 Program Upaya Kesehatan Perorangan	21,200.00	-	21,200.00
2813 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1,200.00	-	1,200.00
2815 Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan	20,000.00	-	20,000.00
70302 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1,250.00	-	1,250.00
2816 Pengembangan Promosi Kesehatan dan Teknologi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	500.00	-	500.00
2817 Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat	750.00	-	750.00
70303 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	18,090.00	-	18,090.00
2819 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas dan Jaringannya	3,165.00	-	3,165.00
2821 Peningkatan Kesehatan Masyarakat	4,100.00	-	4,100.00
2822 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar	4,000.00	-	4,000.00
2846 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu	2,000.00	-	2,000.00
2847 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak	3,000.00	-	3,000.00
2850 Peningkatan Kesehatan Komunitas	1,650.00	-	1,650.00
2851 Peningkatan Kesehatan Kerja	175.00	-	175.00
70304 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	2,980.00	-	2,980.00
2823 Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko	50.00	-	50.00
2824 Peningkatan Imunisasi	700.00	-	700.00
2825 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	950.00	-	950.00
2826 Penemuan dan Tatalaksana Penderita	1,100.00	-	1,100.00
2837 Pencegahan dan Penanggulangan Flu Burung/Penyakit Lainnya (Program P2P)	100.00	-	100.00
2854 Pelayanan Dukungan Administrasi dan Manajemen (P3)	80.00	-	80.00
70305 Program Perbaikan Gizi Masyarakat	2,450.00	-	2,450.00
2828 Peningkatan Pendidikan Gizi Masyarakat	200.00	-	200.00
2829 Penanggulangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat	2,000.00	-	2,000.00
2902 Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Gizi Buruk Pada Ibu Hamil dan Menyusui, Bayi dan Anak Balita	250.00	-	250.00
70501 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	500.00	-	500.00
2870 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	500.00	-	500.00
79001 Program Sumber Daya Kesehatan	2,000.00	-	2,000.00
2831 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan	2,000.00	-	2,000.00
79002 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	2,050.00	-	2,050.00
16 Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi	350.00	-	350.00
27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	150.00	-	150.00
35 Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran	750.00	-	750.00
46 Pengembangan Kapasitas/Administrasi/Manajemen SDM	200.00	-	200.00
2834 Peningkatan Pembiayaan Jaminan Kesehatan	600.00	-	600.00

DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN	R M (Juta Rp)	PHLN (Juta Rp)	TOTAL (Juta Rp)
R.S. GRHASIA	5,245.50	-	5,245.50
70201 Program Upaya Kesehatan Perorangan	5,245.50	-	5,245.50
2815 Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan	5,245.50	-	5,245.50
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	<u>3,554.90</u>	-	<u>3,554.90</u>
DINAS PERINDAGKOP	3,554.90	-	3,554.90
10113 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	170.00	-	170.00
36 Penatausahaan Anggaran, Penyelenggaraan Perbendaharaan	170.00	-	170.00
30302 Program Pembentukan Hukum	177.50	-	177.50
32 Pembinaan Hukum dan Organisasi	177.50	-	177.50
40702 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2,239.40	-	2,239.40
1 Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	150.00	-	150.00
2010 Pengembangan Ikm Unggulan Daerah	350.00	-	350.00
2011 Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor Ikm	50.00	-	50.00
2013 Pemberdayaan Ikm (Dekonsentrasi)	1,689.40	-	1,689.40
40703 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	968.00	-	968.00
21 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	210.00	-	210.00
35 Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran	58.00	-	58.00
48 Pengembangan Pendidikan Profesional dan Keahlian	700.00	-	700.00
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	<u>57,741.00</u>	-	<u>57,741.00</u>
DINAS NAKERTRANS	57,741.00	-	57,741.00
40201 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	42,316.00	-	42,316.00
24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	1,750.00	-	1,750.00
27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	299.00	-	299.00
35 Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran	333.00	-	333.00
65 Penyelenggaraan Pembinaan Teknis Administrasi	709.00	-	709.00
71 Penyusunan Rencana dan Program Strategis	57.00	-	57.00
79 Pembangunan Gedung	9,000.00	-	9,000.00
89 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung	11,700.00	-	11,700.00
90 Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/Workshop/Publikasi	20.00	-	20.00
100 Rehabilitasi/Peningkatan/Renovasi Gedung/Laboratorium/Perpustakaan	9,540.00	-	9,540.00
3504 Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi	2,979.00	-	2,979.00
3505 Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat	4,920.00	-	4,920.00
3506 Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Keliling (Mtu)	1,009.00	-	1,009.00
40203 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	3,066.00	-	3,066.00
27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	525.00	-	525.00
35 Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran	123.00	-	123.00
3523 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	1,790.00	-	1,790.00
3524 Peningkatan Fungsi Kelembagaan Ketenagakerjaan	228.00	-	228.00
3529 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	400.00	-	400.00
40204 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	5,167.00	-	5,167.00
16 Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi	122.00	-	122.00
27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	380.00	-	380.00
30 Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Data dan Informasi	336.00	-	336.00
35 Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran	81.00	-	81.00
3534 Konsolidasi Program-Program Perluasan Kesempatan Kerja	602.00	-	602.00
3537 Pengembangan Pasar Kerja Dalam Negeri	195.00	-	195.00
3542 Pengembangan Sistem dan Perluasan Kesempatan Kerja Dalam Negeri	1,559.00	-	1,559.00
3547 Penyelenggaraan Padat Karya Produktif	1,892.00	-	1,892.00
69002 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1,670.00	-	1,670.00

DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN	R M (Juta Rp)	PHLN (Juta Rp)	TOTAL (Juta Rp)
3569 Fasilitasi Dukungan Manajemen Ketransmigrasian di Wilayah Cepat Tumbuh	518.00	-	518.00
3572 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi di Wil Strategis & Cepat Tumbuh	291.00	-	291.00
3575 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi Di Wil. Strategis dan Cepat Tumbuh	861.00	-	861.00
69003 Program Pengembangan Wilayah Tertinggal	5,522.00	-	5,522.00
3594 Fasilitasi Dukungan Manajemen Ketransmigrasian Di Wilayah Tertinggal	532.00	-	532.00
3599 Pembinaan Promosi, Investasi dan Kemitraan Di Wilayah Tertinggal	1,509.00	-	1,509.00
3603 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Di Wilayah Tertinggal	3,481.00	-	3,481.00
DEPARTEMEN SOSIAL	34,581.80	-	34,581.80
DINAS SOSIAL	34,581.80	-	34,581.80
10109 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	540.50	-	540.50
70 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pembangunan	540.50	-	540.50
10113 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	214.00	-	214.00
49 Penyelenggaraan/Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia	214.00	-	214.00
110401 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	12,508.60	-	12,508.60
6303 Pemberdayaan Sosial Keluarga, Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Pmks Lainnya	10,689.20	-	10,689.20
7202 Pemberdayaan Sosial Keluarga Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Pmks Lainnya (Pemberdayaan Keluarga Miskin)	1,819.40	-	1,819.40
110601 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	10,721.10	-	10,721.10
7205 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak, Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi Tuna Sosial)	879.40	-	879.40
7206 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak, Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Kekerasan)	714.20	-	714.20
7207 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak, Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat)	1,610.70	-	1,610.70
7208 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak, Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan)	1,244.70	-	1,244.70
7209 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak, Lansia dan Penyandang Cacat (Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial)	3,057.60	-	3,057.60
7210 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak, Lansia dan Penyandang Cacat (Pembinaan dan Rehabilitasi Anak Jalanan)	1,885.40	-	1,885.40
7212 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak, Lansia dan Penyandang Cacat (Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Cacat)	858.30	-	858.30
7229 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak, Lansia dan Penyandang Cacat (Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal)	470.80	-	470.80
110801 Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	5,339.90	-	5,339.90
7213 Penyelenggaraan Pencarian Penyelamatan Musibah Bencana Alam dan Bencana Lainnya	2,721.80	-	2,721.80
7214 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Pemberdayaan Sosial Korban Bencana Sosial)	608.20	-	608.20
7215 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Perlindungan Sosial Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran)	940.00	-	940.00
7216 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Pendayagunaan Sumber Dana Sosial)	220.00	-	220.00

DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN	R M (Juta Rp)	PHLN (Juta Rp)	TOTAL (Juta Rp)
7217 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Akses Jaminan Sosial)	849.90	-	849.90
119002 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	5,257.70	-	5,257.70
7222 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat	2,291.00	-	2,291.00
7225 Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	2,966.70	-	2,966.70
DEPARTEMEN KEHUTANAN	<u>7,400.00</u>	-	<u>7,400.00</u>
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	7,400.00	-	7,400.00
10109 Program Penerapan Pemerintahan yang Baik	200.00	-	200.00
1 Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	160.00	-	160.00
29 Pembinaan dan Pelaksanaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Perlengkapan Departemen	40.00	-	40.00
30109 Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri	150.00	-	150.00
4055 Pengamanan Kawasan Hutan	150.00	-	150.00
40302 Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	5,475.00	-	5,475.00
4009 Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	200.00	-	200.00
4011 Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	275.00	-	275.00
4034 Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph)	5,000.00	-	5,000.00
50401 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	575.00	-	575.00
4014 Pengendalian Kebakaran Hutan	100.00	-	100.00
4015 Pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Lainnya (KSA/KPA/TB) dan Hutan Lindung	150.00	-	150.00
4016 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya	200.00	-	200.00
4018 Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi	125.00	-	125.00
50402 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	250.00	-	250.00
4041 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	250.00	-	250.00
50403 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	600.00	-	600.00
104 Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga	50.00	-	50.00
4022 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan dan Ekosistemnya	160.00	-	160.00
4023 Pembinaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	390.00	-	390.00
59001 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	150.00	-	150.00
4025 Pengembangan Rencana dan Statistik Kehutanan	150.00	-	150.00
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	<u>53,696.00</u>	-	<u>53,696.00</u>
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	53,696.00	-	53,696.00
40305 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	2,680.00	-	2,680.00
4102 Mitigasi Bencana Lingkungan Laut dan Pesisir	500.00	-	500.00
4103 Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	830.00	-	830.00
4107 Pengembangan & Pengelolaan Terpadu Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	1,350.00	-	1,350.00
40306 Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	50,666.00	-	50,666.00
2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	710.00	-	710.00
21 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	650.00	-	650.00
27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	190.00	-	190.00
32 Pembinaan Hukum dan Organisasi	175.00	-	175.00
35 Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran	2,115.00	-	2,115.00
4108 Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir	2,300.00	-	2,300.00
4109 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan	460.00	-	460.00
4110 Pengembangan dan Penyelenggaraan Karantina Perikanan dan Sistem Pengelolaan Kesehatan Ikan	100.00	-	100.00

DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN	R M (Juta Rp)	PHLN (Juta Rp)	TOTAL (Juta Rp)
4111 Pengembangan Data dan Statistik Perikanan	800.00	-	800.00
4113 Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri dan Ekspor Hasil Perikanan	450.00	-	450.00
4114 Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Serta Input Produksi Lainnya	32,795.00	-	32,795.00
4115 Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan	750.00	-	750.00
4116 Penyelenggaraan Revitalisasi Perikanan	8,776.00	-	8,776.00
4118 Pengelolaan Sumberdaya Ikan Secara Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	395.00	-	395.00
50402 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	350.00	-	350.00
4120 Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuaria dan Teluk	350.00	-	350.00
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	<u>478,950.70</u>	<u>169,405.00</u>	<u>648,355.70</u>
DINAS KIMPRASWIL	386,716.70	169,405.00	556,121.70
10112 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	3,537.00	-	3,537.00
17 Peningkatan/Pengkajian Kapasitas Kelembagaan	1,800.00	-	1,800.00
21 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	850.00	-	850.00
27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	887.00	-	887.00
40401 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber air Lainnya	20,470.00	-	20,470.00
94 Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem, Data, Statistik dan Informasi	60.00	-	60.00
109 Survey/Studi Kelayakan/Penyusunan Master Plan/DED/SID	2,010.00	-	2,010.00
111 Perawatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	2,050.00	-	2,050.00
112 Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengawasan	250.00	-	250.00
4417 Pembangunan Waduk, Embung, Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya	10,000.00	-	10,000.00
4418 Rehabilitasi Waduk, Embung, Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya	5,500.00	-	5,500.00
4419 Operasi dan Pemeliharaan Waduk, Embung, Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya	600.00	-	600.00
40403 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	62,638.00	-	62,638.00
21 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	778.00	-	778.00
22 Operasi dan Pemeliharaan	7,000.00	-	7,000.00
54 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	700.00	-	700.00
109 Survey/Studi Kelayakan/Penyusunan Master Plan/DED/SID	3,660.00	-	3,660.00
4422 Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi	27,000.00	-	27,000.00
4426 Rehabilitasi Jaringan Irigasi	19,500.00	-	19,500.00
4431 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	1,500.00	-	1,500.00
4467 Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	2,500.00	-	2,500.00
40801 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	50,489.70	-	50,489.70
4326 Rehabilitasi Jalan Nasional	38,678.80	-	38,678.80
4328 Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan Nasional	11,810.90	-	11,810.90
40802 Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan			
4330 Pembangunan Jalan Nasional	53,000.00	-	53,000.00
4346 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	10,572.00	-	10,572.00
4626 Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas	74,130.00	-	74,130.00
4644 Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa	119,000.00	-	119,000.00
4655 Pembangunan Jalan Baru dan Peningkatan Jalan Strategis	20,000.00	-	20,000.00
50101 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase	53,608.00	-	53,608.00
4257 Pengembangan Sistem Drainase dan Pengelolaan Persampahan	52,808.00	-	52,808.00
4474 Bantuan Teknis Bidang Plp	800.00	-	800.00
50404 Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	91,800.00	169,405.00	261,205.00
109 Survey/Studi Kelayakan/Penyusunan Master Plan/DED/SID	3,700.00	16,232.00	19,932.00

DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN	R M (Juta Rp)	PHLN (Juta Rp)	TOTAL (Juta Rp)
4432 Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendali Banjir	51,500.00	153,173.00	204,673.00
4436 Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pengendali Banjir	29,800.00	-	29,800.00
4439 Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengendalian Banjir	6,800.00	-	6,800.00
50501 Program Penataan Ruang	5,550.00	-	5,550.00
4265 Operasionalisasi Rtr Pulau, Rtrwn, Rtrwp, Rtr Kab/Kota	3,950.00	-	3,950.00
9305 Pembinaan Penataan Ruang	1,600.00	-	1,600.00
60101 Program Pengembangan Perumahan	46,475.00	-	46,475.00
4271 Penataan dan Revitalisasi Kawasan	14,738.00	-	14,738.00
4470 Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	10,694.00	-	10,694.00
4471 Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan	21,043.00	-	21,043.00
60202 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	4,233.00	-	4,233.00
4471 Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan	4,233.00	-	4,233.00
60301 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	28,800.00	-	28,800.00
109 Survey/Studi Kelayakan/Penyusunan Master Plan/DED/SID	3,050.00	-	3,050.00
115 Kegiatan Pembiayaan Lain-Lain	200.00	-	200.00
4442 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku	15,300.00	-	15,300.00
4444 Rehabilitasi Tampungan Untuk Air Baku	9,500.00	-	9,500.00
4456 Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Air Baku Lainnya	750.00	-	750.00
60302 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	5,495.00	-	5,495.00
35 Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran	1,050.00	-	1,050.00
4472 Bantuan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum	2,000.00	-	2,000.00
4612 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (Pamsimas) (PNPM-P)	2,445.00	-	2,445.00
69006 Program Pengendalian Pembangunan Kota-Kota Besar dan Metropolitan	8,178.00	-	8,178.00
4306 Penyiapan Rencana Tindak Pengembangan Kota-Kota Besar dan Metropolitan	500.00	-	500.00
4470 Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	200.00	-	200.00
4659 Pengendalian Pengembangan Kota-Kota Besar dan Metropolitan	7,478.00	-	7,478.00
69007 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan	5,443.00	-	5,443.00
4312 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	4,712.00	-	4,712.00
4602 Pembinaan Pembangunan Infrstruktur Perdesaan	731.00	-	731.00
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	<u>18,590.00</u>	-	<u>18,590.00</u>
DINAS KEBUDAYAAN	3,040.00	-	3,040.00
80102 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	2,540.00	-	2,540.00
4869 Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan	2,000.00	-	2,000.00
4870 Pengelolaan Permuseuman	540.00	-	540.00
80103 Program Pengelolaan Keragaman Budaya	500.00	-	500.00
4880 Pendukung Pengembangan Keragaman Budaya Daerah	500.00	-	500.00
BAPARDA	15,550.00	-	15,550.00
80105 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	15,550.00	-	15,550.00
4889 Fasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan	550.00	-	550.00
4893 Pendukung Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Daerah	15,000.00	-	15,000.00
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	<u>950.00</u>	-	<u>950.00</u>
BAPEDALDA	950.00	-	950.00
50401 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	950.00	-	950.00
5058 Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam	950.00	-	950.00
KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	<u>4,323.40</u>	-	<u>4,323.40</u>
DINAS PERINDAGKOP	4,323.40	-	4,323.40
40111 Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro	4,323.40	-	4,323.40
35 Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran	4,323.40	-	4,323.40
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	<u>1,500.00</u>	-	<u>1,500.00</u>

DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN	R M (Juta Rp)	PHLN (Juta Rp)	TOTAL (Juta Rp)
BADAN PERPUSDA	1,500.00	-	1,500.00
100702 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1,500.00	-	1,500.00
5714 Supervisi/Pembinaan/Stimulasi Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah	1,500.00	-	1,500.00
DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	<u>1,375.00</u>	-	<u>1,375.00</u>
BADAN INFORMASI DAERAH	1,375.00	-	1,375.00
80301 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1,375.00	-	1,375.00
30 Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Data dan Informasi	610.00	-	610.00
90 Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/ Workshop/ Publikasi	700.00	-	700.00
5781 Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	65.00	-	65.00
DEPARTEMEN PERDAGANGAN	<u>2,048.50</u>	-	<u>2,048.50</u>
DINAS PERINDAGKOP	2,048.50	-	2,048.50
40106 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	900.00	-	900.00
21 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	15.00	-	15.00
27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	30.00	-	30.00
71 Penyusunan Rencana dan Program Strategis	55.00	-	55.00
94 Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem, Data, Statistik dan Informasi	30.00	-	30.00
7478 Pengembangan Promosi Dagang	500.00	-	500.00
7489 Penyelenggaraan/Peningkatan Forum Koordinasi Teknis dan Sosialisasi	170.00	-	170.00
7506 Penyelenggaraan Diklat Ekspor	75.00	-	75.00
7517 Pemetaan dan Analisis Komoditas Utama dan Potensial	25.00	-	25.00
40112 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1,148.50	-	1,148.50
24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	96.40	-	96.40
64 Penyelenggaraan/Penataan/Peningkatan Sistem dan Prosedur Informasi Pengawasan	147.00	-	147.00
93 Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Per-UU-an	95.10	-	95.10
4763 Pembinaan Pasar dan Distribusi	180.00	-	180.00
7488 Pengembangan Pdn Daerah	205.00	-	205.00
7513 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	425.00	-	425.00
	1,328,365.60	169,705.00	1,498,070.60

USULAN R APBN PROVINSI DIY TAHUN 2009

DEPARTEMEN/KEMENTERIAN	R M (juta Rp)	PHLN (juta Rp)	TOTAL (juta Rp)
10 DEPARTEMEN DALAM NEGERI	11,032.90	300.00	11,332.90
1001 Badan Pengawas Daerah	495.00	-	495.00
1002 Badan Perencanaan Daerah	-	300.00	300.00
1003 Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum	4,676.00	-	4,676.00
1004 Dinas Sosial	5,861.90	-	5,861.90
18 DEPARTEMEN PERTANIAN	138,495.50	-	138,495.50
1801 Dinas Pertanian	123,617.00	-	123,617.00
1802 Dinas Kehutanan dan Perkebunan	14,878.50	-	14,878.50
19 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	3,554.90	-	3,554.90
1901 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	3,554.90	-	3,554.90
20 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	4,250.00	-	4,250.00
2001 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	4,250.00	-	4,250.00
22 DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	41,664.90	-	41,664.90
2201 Dinas Perhubungan	41,664.90	-	41,664.90
23 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	410,410.40	-	410,410.40
2301 Dinas Pendidikan	410,410.40	-	410,410.40
24 DEPARTEMEN KESEHATAN	57,800.50	-	57,800.50
2401 Dinas Kesehatan	52,555.00	-	52,555.00
2402 R.S. Ghrasia	5,245.50	-	5,245.50
26 DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	57,741.00	-	57,741.00
2601 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	57,741.00	-	57,741.00
27 DEPARTEMEN SOSIAL	34,581.70	-	34,581.70
2701 Dinas Sosial	34,581.70	-	34,581.70
29 DEPARTEMEN KEHUTANAN	7,400.00	-	7,400.00
2901 Dinas Kehutanan dan Perkebunan	7,400.00	-	7,400.00
32 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	53,696.00	-	53,696.00
3201 Dinas Perikanan dan Kelautan	53,696.00	-	53,696.00
33 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	663,418.70	169,405.00	832,823.70
3301 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah	663,418.70	169,405.00	832,823.70
40 DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	18,590.00	-	18,590.00
4001 Dinas Kebudayaan	3,040.00	-	3,040.00
4002 Badan Pariwisata Daerah	15,550.00	-	15,550.00
43 KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	950.00	-	950.00
4301 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah	950.00	-	950.00
44 KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	4,323.40	-	4,323.40
4401 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	4,323.40	-	4,323.40
57 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	1,500.00	-	1,500.00
5701 Badan Perpustakaan Daerah	1,500.00	-	1,500.00

DEPARTEMEN/KEMENTERIAN	R M (juta Rp)	PHLN (juta Rp)	TOTAL (juta Rp)
59 DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1,375.00	-	1,375.00
5901 Badan Informasi Daerah	1,375.00	-	1,375.00
90 DEPARTEMEN PERDAGANGAN	2,048.60	-	2,048.60
9001 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	2,048.60	-	2,048.60

USULAN R APBN PROVINSI DIY TAHUN 2009

KODE	DEPARTEMEN/KEMENTERIAN	R M (juta Rp)	PHLN (juta Rp)	TOTAL (juta Rp)
10	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	11,032.9	300.0	11,332.9
18	DEPARTEMEN PERTANIAN	138,495.5	-	138,495.5
19	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	3,554.9	-	3,554.9
20	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	4,250.0	-	4,250.0
22	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	41,664.9	-	41,664.9
23	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	410,410.4	-	410,410.4
24	DEPARTEMEN KESEHATAN	57,800.5	-	57,800.5
26	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	57,741.0	-	57,741.0
27	DEPARTEMEN SOSIAL	34,581.7	-	34,581.7
29	DEPARTEMEN KEHUTANAN	7,400.0	-	7,400.0
32	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	53,696.0	-	53,696.0
33	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	663,418.7	169,405.0	832,823.7
40	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	18,590.0	-	18,590.0
43	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	950.0	-	950.0
44	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	4,323.4	-	4,323.4
57	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	1,500.0	-	1,500.0
59	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1,375.0	-	1,375.0
90	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	2,048.6	-	2,048.6
	TOTAL	1,512,833.5	169,705.0	1,682,538.5

B. Usulan RAPBD Provinsi DIY Tahun 2009

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
DINAS PENDIDIKAN			198,117,432,165
BELANJA TIDAK LANGSUNG			43,043,507,365
BELANJA LANGSUNG			155,073,924,800
1.01.15, Program pendidikan anak usia dini			3,703,000,000
1.01.15.15, Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	- Tersedianya buku pedoman TK	2200 set	121,000,000
1.01.15.18, Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	- Tersedianya Alat Peraga untuk Pesert Didik	120 unit	612,000,000
	- Tersedianya APE (alat praktek dan peraga siswa)	40 set	410,000,000
1.01.15.42, Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	- Terlaksananya Rehab Gedung TK	40 sekolah	1,020,000,000
1.01.15.58, Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	- 2 Kabupaten/Kota	40 Desa	125,000,000
	- 5 Kabupaten/Kota	46 lembaga	200,000,000
	- 5 Kabupaten/Kota	15 Kejuaraan	125,000,000
1.01.15.59, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	- Terselenggaranya PAUD	100 Lembaga	315,000,000
	- Terkoordinasinya 2 lembaga	50 orang	130,000,000
1.01.15.62, Pengembangan kurikulum,bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	- Kurikulum, Bahan Ajar dan Modul	4 Naskah	180,000,000
	- Lembaga PAUD	14 Unsur	125,000,000
1.01.15.63, Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	- 3 Jenis	100 eksemplar	300,000,000
	- Anak-anak se Provinsi DIY	2000 anak	40,000,000
1.01.16, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun			29,754,000,000
1.01.16.41, Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	- Terlaksananya rehab gedung SD	50 SD	2,520,000,000
1.01.16.58, Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	- Pendidikan budaya bagi siswa	60 orang	60,000,000
1.01.16.61, Pembinaan SMP Terbuka	- Terlaksananya pembinaan Lomojari SMP Terbuka	12 Orang	18,000,000
1.01.16.66, Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS	- Sharing dana untuk SBI dan SSN	4 besar nasional	50,000,000
	- Sharing dana untuk SBI dan SSN	4 besar nasional	50,000,000
	- Tersedianya dana pengembangan SBI SMP dan SSN	10 sekolah	2,400,000,000
	- Tersedianya dana SBI SD	5 sekolah	500,000,000
	- Penyediaan dana pengembangan SSN SMP	50 sek	1,250,000,000
	- Tersedianya dana pengembangan SSN SD	46 SD	10,000,000,000
1.01.16.67, Penyelenggaraan paket A setara SD	- Terselenggaranya Paket A Setara SD	600 orang	110,000,000
1.01.16.68, Penyelenggaraan paket B setara SMP	- Terselenggaranya Paket B setara SMP	2200 orang	1,015,000,000
1.01.16.70, Pembinaan minat,bakat,dan kreativitas siswa	- Terlaksananya pembinaan OOSN SD	30 Orang	60,000,000
	- Terlaksananya pembinaan FLSSN SD ke tingkat nasional	20 Orang	30,000,000
	- Terlaksananya pembinaan OOSN SMP	50 Orang	10,000,000,000
	- Terlaksananya pembinaan FLSSN SMP ke tingkat nasional	30 Orang	45,000,000
	- Terlaksananya Lomba Sekolah Sehat dan Dokter Kecil	5 Kab	180,000,000
	- Terlaksananya pembinaan OSN SD ke tingkat nasional	40 Orang	200,000,000
	- Terlaksananya pembinaan OSN SMP ke tingkat nasional	60 Orang	300,000,000
1.01.16.74, Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus	- Tersedianya beasiswa retrieval anak putus sekolah	1 keg	30,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
sekolah	- Tersedianya beasiswa retrieval SD (baru)	200 orang	96,000,000
	- Tersedianya beasiswa retrieval SD (lanjutan)	400 orang	120,000,000
	- Tersedianya beasiswa retrieval SMP (baru)	200 orang	240,000,000
	- Tersedianya beasiswa retrieval SMP (lanjutan)	800 orang	480,000,000
1.01.17, Program Pendidikan Menengah			30,718,066,500
1.01.17.08, Pembangunan ruang serba guna/aula	- Gedung Serbaguna BLPT	1 unit	6,100,000,000
1.01.17.15, Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	- Siswa SMA dan SMK	52000 buku	2,630,000,000
1.01.17.18, Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (SMA, SMK)	- Alat Praktek di BLPT	5 paket	2,083,000,000
1.01.17.46, Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah	- Gedung B 08 BLPT	1 unit	250,000,000
1.01.17.57, Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik	- Tenaga Pengajar/Guru	20 Guru	50,000,000
1.01.17.61, Penyediaan Bantuan Operasional MAnajemen Mutu	- MGMP SMA, SMK Kecil dan MGMT SMK	6 kegiatan	5,915,000,000
1.01.17.62, Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu	- Siswa jenjang pendidikan menengah yang rawan putus sekolah dan siswa putus sekolah	3000 siswa	5,000,000,000
1.01.17.63, Penyelenggaraan paket C setara SMU	- Terselenggaranya Paket C Setara SMA	2000	620,000,000
1.01.17.64, Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	- Pemetaan fasilitas sarana prasarana sekolah jenjang pendidikan menengah	197 sekolah	485,000,000
1.01.17.66, Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri	- SMK se Provinsi DIY	150 siswa	300,000,000
1.01.17.68, Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah	- Sekolah yang telah berakhir masa status akreditasinya	40 sek, 80 prg	612,000,000
1.01.17.70, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	- Pelajar yang berprestasi di bidang Bahasa Inggris se DIY	6 orang	48,000,000
	- Pelajar berprestasi yang telah lolos seleksi di tingkat kab/kota	320 orang	650,000,000
	- Pelajar yang berprestasi di Bidang Olah Raga yang telah lolos seleksi di tingkat provinsi	130 orang	340,000,000
	- Pelajar berprestasi yang telah lolos seleksi di tingkat provinsi	80 orang	1,340,000,000
	- Hasil Karya Ilmiah Siswa dan Guru	3 Edisi	306,466,500
	- Pengurus OSIS SMA se Provinsi DIY	80 orang	86,000,000
	- Pelajar yang lolos seleksi cerdas cermat di tingkat provinsi	75 orang	160,000,000
	- Pengurus OSIS SMA se Provinsi DIY	80 orang	120,000,000
	- Siswa SMK yang berprestasi yang telah lolos seleksi	49 bidang	1,550,000,000
	- Pelajar SMK se Provinsi DIY	10 Program	250,000,000
	- Pelajar yang mempunyai kemampuan di bidang seni	1 Kontingen	200,000,000
	- SMK se Provinsi DIY	1 kegiatan	125,000,000
	- Siswa/peserta didik	2304 siswa	1,497,600,000
1.01.18, Program Pendidikan Non Formal			6,549,095,400
1.01.18.03, Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	- Lembaga Kursus	100 lembaga	125,000,000
	- 5 LPK	3 Jenis	125,000,000
	- Lembaga Kursus	14 Kursus	155,000,000
	- Terbinanya lembaga Gender	250 Orang	110,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.01.18.04, Pengembangan pendidikan keaksaraan	- Terbinanya lembaga berwawasan Gender	30 lembaga	150,000,000
	- Terbinanya pendidikan keaksaraan	10000 orang	2,521,000,000
	- Terbinanya Tutor keaksaraan fungsional	200 orang	55,720,000
1.01.18.05, Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	- Pengadaan Buku TBM	10000 Judul	156,700,000
	- Siswa SD/SMP/SMA/SMK	13 cab/47 kejuaraan/600 siswa	295,000,000
	- Santri Pondok Pesantren	75 Cab. Pesantren/150 Santri	110,000,000
	- Pimpinan Pondok Pesantren	200 Pondok Pesantren	160,000,000
	- Siswa SD/SMP/SMA/SMK	7 Cab. Kegiatan/50 Siswa	75,000,000
	- Lembaga TPA Kabupaten/Kota	365 Lembaga	150,000,000
	- Lembaga Majelestaklim/Sekolah Minggu	250 Lembaga Majelistaklim/60 Lembaga	125,000,000
	- lembaga Majelestaklim/Sekolah Minggu	250 Lembaga Majelistaklim/60 lembaga	125,000,000
	- Siswa SD/SMP/SMA/SMK	1500 siswa	200,000,000
	- Sekolah SD/SMP/SMA/SMK	50 sekolah/150 orang	115,000,000
	- Terbinanya Pendidikan Kecakapan Hidup	1 Naskah	45,000,000
	- Terbinanya Pendidikan Keaksaraan	1 Naskah	45,000,000
	- Terbinanya Forum PLS	5 Lembaga	210,000,000
	- Masyarakat Umum	150 orang	300,000,000
1.01.18.06, Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	- Tersedianya Modul Paket A,B,C	2050 set	437,900,000
	- Terevitalisasinya jam belajar masyarakat (JBM)	150 orang	50,000,000
1.01.18.08, Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	- Meningkatkan mutu dan kualitas program pendidikan	28 orang	5,738,500
	- Meningkatkan keaksaraan PAUD	28 orang	5,738,500
	- Meningkatkan kualitas PAUD	28 orang	5,738,500
	- Meningkatkan Tumbuh kembang anak	28 orang	6,572,500
	- Meningkatkan Permainan Edukatif	28 Orang	6,572,500
	- Meningkatkan PAUD Berbasis BCCT	28 Orang	6,572,500
	- Meningkatkan pembelajaran di alam terbuka	28 Orang	6,772,500
	- Meningkatkan Keaksaraan Fungsional	28 Orang	6,772,500
	- Meningkatkan Diklat Tumbuh Kembang Anak	32 orang	21,187,400
	- Meningkatkan diklat alat permainan edukatif	32 orang	22,413,400
	- Meningkatkan diklat PAUD Berbasis BCCT	32 Orang	22,413,400
	- Meningkatkan diklat pembelajaran di alam terbuka	32 orang	22,413,400
	- Meningkatkan diklat keaksaraan fungsional	32 Orang	20,787,400
	- Meningkatkan diklat Paket C Mapel Bhs Indonesia, Bhs Inggris, Matematika	32 Orang	21,082,400
1.01.18.09, Pengembangan kurikulum,bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	- Meningkatkan calon Magang	40 orang	60,000,000
	- Lembaga Kursus	4 Jenis	90,000,000
	- Lembaga Pendidikan Kursus	100 Pendidik	70,000,000
	- Tutor KF	3 SKK	70,000,000
	- PKBM	3 Jenis	70,000,000
	- Terlaksananya Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PNF	7 Naskah	167,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.01.19, Program Pendidikan Luar Biasa			8,361,000,000
1.01.19.01, Pembangunan gedung sekolah	- Asrama SLB Negeri di Kabupaten Kulon Progo	1 sekolah	450,000,000
1.01.19.18, Pengadaan mebeluer sekolah	- Pengadaan meubelair SLB Negeri/Swasta	20 sek	300,000,000
1.01.19.30, Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah	- Tersedianya layanan kesehatan siswa SLB Negeri	7 sek/12 bln	360,000,000
1.01.19.41, Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	- Rehabilitasi gedung SLB Swasta	10 sek	500,000,000
1.01.19.56, Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	- Terselenggaranya diklat guru SLB	90%	120,000,000
	- Terselenggaranya diklat guru SLB	90%	120,000,000
	- Terlaksananya diklat guru Keterampilan SLB	70 org	60,000,000
	- Terselenggaranya Diklat Braille	30 org	135,000,000
	- Terselenggaranya diklat Guru Autis	60 org	90,000,000
	- Terselenggaranya diklat guru SPPI dan GPK	140 org	140,000,000
	- Terselenggaranya diklat Pengelola Komputer SPPI	120 org	90,000,000
1.01.19.57, Pelatihan penyusunan kurikulum	- Peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan kurikulum Pendidikan Khusus	80 org	80,000,000
	- Terselenggaranya diklat Pengembangan Kurikulum SLB	80 OH	60,000,000
1.01.19.58, Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan	- Terpenuhinya perbandingan guru dan siswa sesuai dengan ketentuan	80 org	40,000,000
	- Tersosialisasinya Pendidikan ABK di Kabupaten/Kota	900 org	50,000,000
1.01.19.60, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	- Tersedianya PMTAS dan susu bagi siswa SLB	2500 org	768,000,000
	- Tersedianya PMTAS dan susu bagi siswa SLB	2500 org	768,000,000
	- Lomba, Festival, dan Gebyar PK-PLK	1 keg	250,000,000
	- Terselenggaranya lomba 11 cabang olah raga dalam rangka SOIna	1 keg	100,000,000
1.01.19.61, Bantuan Operasional Sekolah	- Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta pengendalian bantuan	1 keg	30,000,000
	- Tersedianya dana bantuan operasional SLB Swasta	55 sek	550,000,000
	- Tersedianya dana bantuan operasional SPPI	70 sek	700,000,000
	- Tersedianya dana bantuan operasional SPPI	70 sek	700,000,000
	- Tersedianya dana bantuan operasional SPPI	70 sek	700,000,000
	- Tersedianya dana bantuan operasional SPPI	70 sek	700,000,000
	- Terpenuhinya sarana dan prasarana sekolah yang dibutuhkan	8 sek	1,200,000,000
1.01.20, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			6,761,012,200
1.01.20.01, Pelaksanaan sertifikasi pendidik	- Guru Ketrampilan SLB	80 orang	120,000,000
1.01.20.02, Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	- Guru SMK	200 orang	400,000,000
	- Pengawas, Kepal Sekolah, Guru se Prov DIY	45 orang	45,000,000
1.01.20.03, Pelatihan bagi penyidik untuk memenuhi standar kompetensi	- Guru SMA	200 orang	450,453,700
	- Diklat Guru utk memnuhi standart kompetensi	5 mapel	280,000,000
1.01.20.04, Pembinaan Kelompok Kerja Guru(KKG)	- Teselenggaranya koordinasi MGMP lessson Study di SMP	20 kelompok	150,000,000
	- Kelompok Gugus SEQIP, MEQIP Bhs Inggris	100 kelompok	500,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.01.20.07, Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	- Guru SLB yang memenuhi syarat mengikuti uji kompetensi	250 orang	88,715,500
	- Guru SLB Lulusan Non Pendidikan Luar Biasa	30 orang	100,000,000
1.01.20.08, Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	- Diklat Kurikulum Guru SMA	400 orang	650,548,000
	- Diklat Kurikulum Guru SMK	300 orang	630,000,000
	- Tenaga Pendidik/guru SMA	120 orang	220,000,000
	- Pendidik dan Tenaga Pendidikan SMA	150 orang	172,840,000
	- Naskah SK/SI sesuai standart yg dikendaki	30 orang	60,000,000
	- Tersusunnya SK/SI Bhs Inggris SD	30 orang	60,000,000
	- Guru- guru di Prov. DIY	5800 orang	29,000,000
	- Tim Pengembang Kurikulum SD	90 orang	90,000,000
	- Tim Pengembang Kurikulum SMP	90 orang	90,000,000
	- Sekolah	500 eks	375,000,000
	- Guru Mapel SMP	150 orang	210,000,000
	- Guru SLB Lulusan D II Provinsi DIY	80 orang	788,625,000
	- GTT, PTT, SLB lolos uji publik/data base kepegawaian	130 orang	681,444,000
	- Guru SLB Negeri dan Swasta (SLB Tuna Netra)	30 orang	132,205,000
	- Guru SLB tersertifikasi di Provinsi DIY	60 orang	362,181,000
1.01.20.09, Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	- Data UASBN dari tahun 2007-2008	50 orang	75,000,000
1.01.22, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			13,395,817,400
1.01.22.01, Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	- Siswa-siswi SLB, SD/MI,SMP/MTs, SMA/MA, SMK yang menduduki kelas akhir	5 jenis/jenjang	2,145,000,000
	- Aparatur Perencana dan Pelaksana Bidang Pendidikan se DIY	1 dokumen	66,000,000
	- Aparatur Perencana dan Pelaksana Bidang Pendidikan se DIY	5 kab/kota	15,000,000
	- Kabupaten/Kota/Siswa	5000 Warga Belajar	750,000,000
	- Terlaksananya EHB	2 Paket	215,000,000
	- Siswa-siswi SD/MI yang menduduki kelas akhir	49400 orang	792,000,000
	- Pengawas, Kepala Sekolah, Guru Berprestasi	45 orang	225,000,000
	- SLB, SD/MI, SMP,MTs yang menduduki kelas Akhir	1 kegiatan	30,000,000
	- Kepala Sekolah SLB	62 orang	62,000,000
	- Ketua Yayasan Luar Biasa	1 kegiatan	45,000,000
1.01.22.02, Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	- PLS, SLB, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, PT	1 kegiatan	435,000,000
	- Pelajar se Provinsi DIY yang mempunyai kemampuan di Bidang Seni	1 Kontingen	340,000,000
	- SLBN	1 paket	300,000,000
	- Mahasiswa	3000 orang	525,000,000
	- Siswa SD, SMP, SMA, SMK se Provinsi DIY	1625 siswa	193,353,700
	- Modul praktik biologi untuk pembangunan lab alam flora dan fauna (anak-anak sekolah di Kab/Kota)	1 area/ 3 Ha	94,564,900

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.01.22.07, Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - SLB N3 - SLB Pembina - Siswa, Guru dan Seluruh Lapisan Masyarakat - Guru, Siswa-siswi SD,SMP,SMA dan yang sederajat - Materi/Metode Pembelajaran Berbasis Multimedia - Materi Pembelajaran Berbasis TI audio SD, SLB - Materi Pembelajaran Berbasis TI Video SD, SMP dan SLB - Materi Pembelajaran Berbasis WEB untuk SMA dan SMK - Pelayanan Pendidikan untuk TK - Pendidik Taman Kanak-kanak - Pendidik SD dan SMP - Pendidik SLB, SMA dan SMK - Pendidik dan Tenaga kependidikan - Sekolah se Provinsi DIY - Guru dan Tenaga Kependidikan di Provinsi DIY - Kepala Sekolah, Guru dan TU - Guru dan Tenaga Kependidikan yang menangani IT di SD dan SMP se Provinsi DIY - Instansi Pendidikan, Instansi Terkait dan Masyarakat Luas - PTN/PTS - Bahan Penyerta Program Pembelajaran Video dan Audio - Bahan Program Pembelajaran untuk Siaran Radio - Bahan Program Pembelajaran untuk Siaran TV Edukasi - SIM Perpustakaan Sekolah - Kabupaten/Kota di DIY 	<ul style="list-style-type: none"> 1 kegiatan 1 kegiatan 20 judul 3 terbitan 10 judul 10 judul 10 Judul 84 judul 8 judul 30 orang 40 orang 60 orang 30 orang 2 kali 560 guru, 240 TU 150 kasek, 150 guru/TU 480 orang 75% 1 paket 20 judul 20 kali 8 kali 5 Kab/Kota 1 kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> 150,000,000 300,000,000 390,000,000 950,000,000 750,000,000 350,000,000 650,000,000 400,000,000 350,000,000 36,000,000 87,000,000 90,000,000 45,000,000 18,000,000 719,567,400 448,472,000 708,945,400 162,914,000 80,000,000 35,000,000 48,000,000 44,000,000 300,000,000 50,000,000
1.01.23, Program Pendidikan Tinggi			3,415,000,000
1.01.23.01, Promosi Pendidikan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Sekolah Menengah di Ibukota Provinsi di luar DIY 	5 lokasi	1,025,000,000
1.01.23.02, Peningkatan Kualitas Pengeolaan LPM Bidang Kewirausahaan dan Sibertimas	<ul style="list-style-type: none"> - Dosen/Pengelola LPM PT DIY 	100 orang	125,000,000
1.01.23.03, Sinergi Pemberdayaan Potensi Pendidikan Tinggi dan Masyarakat (SIBERTIMAS) dan KKN	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa Universitas, Sekolah Tinggi dan Institut di DIY 	100 kelompok	300,000,000
1.01.23.04, Pembinaan minat, Bakat dan kreativitas mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa PTN/PTS - Mahasiswa semester akhir 	500 orang 240 orang	500,000,000 350,000,000
1.01.23.05, Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa kurang mampu yang berasal dari DIY 	500 orang	1,000,000,000
1.01.23.06, Pemberdayaan IKPM se Indonesia di Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> - IKPM Provinsi se Indonesia di DIY 	75 orang	75,000,000
1.01.23.07, Evaluasi pendirian/pembukaan penutupan PT	<ul style="list-style-type: none"> - PTN dan PTS di DIY 	1 kegiatan	40,000,000
1.18.15, Program pengembangan dan keserasian			80,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
kebijakan pemuda			
1.18.15.03, Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan	- OKP, Pelajar dan mahasiswa	150 orang	80,000,000
1.18.16, Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			968,000,000
1.18.16.01, Pembinaan organisasi kepemudaan	- Pembentukan dan Pelatihan Paskibraka	10 orang	324,000,000
	- Pertukaran Pemuda Antar Negara	3 orang	50,000,000
	- Seleksi kapal Pemuda Nusantara	40 orang	25,000,000
	- Pertukaran Pemuda Antar Negara	30 orang	50,000,000
	- Pembentukan dan Pelatihan Paskibraka	98 orang	324,000,000
1.18.16.02, Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	- Pemilihan Pemuda Pelopor	250 orang	65,000,000
	- Pelatihan dasar Kepemimpinan Pemuda	80 orang	55,000,000
1.18.16.06, Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda	- Lomba Baris Berbaris Pemuda/pelajar	250 orang	75,000,000
1.18.17, Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda			491,000,000
1.18.17.01, Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	- Terlaksananya Lomba Inovasi Bisini usahawan muda	50 orang	65,000,000
	- Pemuda drop out	150 orang	426,000,000
1.18.18, Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba			75,000,000
1.18.18.01, Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	- OKP, Pelajar dan mahasiswa	150 orang	75,000,000
1.18.20, Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga			32,920,933,300
1.18.20.01, Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga	- Masyarakat pada umumnya	1000 orang	138,490,000
1.18.20.02, Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah	- Guru, Masyarakat dan Karyawan	40 Orang	49,979,500
1.18.20.03, Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	- Pelatih dan atlit	292 orang	902,640,000
	- Peserta/Atlit 200, Pelatih 30 dan Panitia 12 orang	242 Orang	785,380,000
	- Guru, Masyarakat dan karyawan	90 orang	59,939,500
1.18.20.04, Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	- Karyawan/Karyawati Provinsi DIY	1856 Orang	124,111,100
1.18.20.05, Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	- Masyarakat pencandang cacat	300 orang	89,077,100
1.18.20.06, Penyelenggaraan kompetisi olahraga	- Santri Pondok Pesantren Kabupaten/Kota	11 Cab.OR dan seni 800 Atlit	561,000,000
	- Santri yang lolos dalam hasil POSPEDA	11 Cab.OR dan Seni 150 Atlit, Pelatih	120,000,000
	- Atlit hasil penjangkaran POSPEDA	11 Cab. OR dan Seni 175 orang (Atlit	2,100,000,000
	- Peserta, 927 /Official, 180/Aparat, 348/ Panitia 15 Orang	1470 orang	630,000,000
	- 18 Cabang olahraga	11067 orang	2,231,405,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.18.20.08, Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	- Peserta 33 Provinsi - Masyarakat umum	11067 Orang 400 orang	25,000,000,000 128,911,100
1.18.21, Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga			10,000,000,000
1.18.21.02, Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	- GOR Among Rogo Yogyakarta	Unit	10,000,000,000
x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4,534,000,000
x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Benda-benda pos dan jasa pengiriman	1 tahun	50,000,000
x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	- Listrik, Telepon, Air dan Internet	1 tahun	1,150,000,000
x.xx.01.03, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	30,000,000
x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	- Kendaraan Operasional Dinas	1 tahun	4,500,000
x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Pengelola Keuangan	66 orang	120,000,000
x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Seluruh Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DIY	1 tahun	350,000,000
x.xx.01.09, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Peralatan kerja kantor, AC dan jaringan listrik	1 tahun	40,000,000
x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Alat Tulis Kantor	1 tahun	300,000,000
x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Blangko dan naskah dinas	1 tahun	958,500,000
x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	- Alat-alat listrik/penerangan	1 tahun	105,000,000
x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Bahan Peralatan Kebersihan	1 tahun	60,000,000
x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an	- Bahan Bacaan/Surat Kabar Harian dan Buku Peraturan Per-UU-an	1 tahun	30,000,000
x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	- Peserta rapat dan tamu	1 tahun	385,000,000
x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Lumpsum dan tiket perjalanan dinas	1 tahun	750,000,000
x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	- Penjaga Malam - PNS dan Non PNS	1 tahun 1 tahun	190,000,000 11,000,000
x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2,985,000,000
x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor	- Perlengkapan gedung kantor	unit	210,000,000
x.xx.02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor	- Peralatan gedung kantor	unit	230,000,000
x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur	- mebelair	unit	150,000,000
x.xx.02.21, Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	- Rumah Dinas	1 tahun	55,000,000
x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Gedung Kantor yang memerlukan perbaikan	1 tahun	840,000,000
x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Kendaraan dinas	1 tahun	425,000,000
x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	- Perlengkapan Kantor yang memerlukan pemeliharaan	1 tahun	280,000,000
x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- Peralatan Kantor yang memerlukan pemeliharaan	1 tahun	310,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	- mebelair yang memerlukan pemeliharaan	1 tahun	85,000,000
x.xx.02.35, Rehabilitasi Sedang/Berat Gudang Kantor	- Gedung kantor yang mengalami kerusakan	unit	400,000,000
x.xx.03, Program peningkatan disiplin aparatur			123,000,000
x.xx.03.05, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	- Pakaian OR dan Pakaian Khusus HAN	3075 buah	123,000,000
x.xx.05, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			125,000,000
x.xx.05.01, Pendidikan dan pelatihan formal	- Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi DIY	30 orang	35,000,000
x.xx.05.02, Sosialisasi peraturan perundang-undangan	- Pegawai Dinas Pendidikan	60 orang	30,000,000
x.xx.05.03, Bimbingan teknis implementasi peraturan Per-UU-an	- Pengelola Administrasi Keuangan	120 orang	60,000,000
x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			115,000,000
x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	2 dokumen	35,000,000
	- Laporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	25,000,000
x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	- Laporan Prognosis Anggaran	2 dokumen	25,000,000
x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran	1 dokumen	30,000,000
BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH			15,956,250,189
BELANJA TIDAK LANGSUNG			3,992,573,689
BELANJA LANGSUNG			11,963,676,500
1.01.21, Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			4,645,945,000
1.01.21.02, Pengembangan minat dan budaya baca	- Terlaksananya layanan ekstensi	40lks,10prps ds, 30plj, 30org, 10klp, 50or, 30or, 1pkt	305,000,000
	- Terlaksananya lomba perpuustakaan desa/ masyarakat		
	- Terlaksananya pemilihan Raja dan Ratu Buku (Kategori A dan B)		
	- Terlaksananya Lomba Mendongeng untuk umum (Kategori A dan B)		
	- Terlaksananya Jambore Reading Club		
	- Terlaksananya Bedah Buku		
	- Bimbingan Menulis dan Membaca Cepat		
	- Terlaksananya Pengembangan Jaringan Internet pada Bagian/ Bidang di Perpusda Prov DIY		
1.01.21.03, Supervisi,pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum ,perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	- Terlaksanany pembinaan dan pemberdayaan perpustakaan	40angk, 120prp, 90prp, 3pkt,	825,000,000
	- terlaksananya Pembinaan profesi pustakawan	4mcm/100org, 2pkt, 1pkt	
	- Terlaksananya kajian dan penyusunan pedoman pengelolaan		

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.01.21.04, Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> perpustakaan instansi di prov.DIY - Terlaksananya Rapat Kerja Pustakawan Daerah Prov. DIY - Terlaksananya Pengembangan Jogja Public Access Library Net work - Terlaksananya Kerjasama Perpustakaan dengan Lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah/ Swasta - Terlaksananya Rapat Koordninsi Pelaksanaan Perda Prov.DIY No 12 Tahun 2005 dengan instansi pemerintah Prov.DIY 	10prp, 100or, 5lbg, 50pnrbt, 75 pnrbt	338,000,000
1.01.21.06, Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Sarasehan Penerbit/ Pengusaha Rekaman - Terlaksananya Rakor Dewan Pengembangan Perpustakaan Prov.DIY 	75 orang	50,000,000
1.01.21.07, Perencanaan dan penyusunan program budaya baca	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Rakor Pengembangan Perpustakaan - Terwujudnya penyediaan fasilitas rumah belajar modern 	80 orang, 2 paket	265,000,000
1.01.21.08, Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Publikasi dan Sosialisasi layanan perpustakaan - Terlaksananya promosi, publikasi perpustakaan dan minat baca - Terwujudnya Penerbitan Buletin Sangkakala - Publikasi dan Sosialisasi Promosi Perpustakaan - Penyusunan Data TI di Bidang Perpustakaan 	3hr,8pkt,7pkt,2400eks,12bln	255,000,000
1.01.21.09, Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Pelestarian Bahan Pustaka - Terlaksananya Penyiangan Bahan Pustaka - Terlaksananya Stockopname Bahan Pustaka - Terwujudnya Pendayagunaan Koleksi - Terlaksananya Penataan dan Perawatan Koleksi - Terwujudnya Otomasi Layanan Perpustakaan - Terlaksananya Pengembnagan Warintek - Terlaksananya Penyusunan KID - Terlaksananya Penyusunan Bibliografi Daerah - Terlaksananya Pembuatan Abstraksi Koleksi Yogyasiana - Terlaksananya Hunting KCKRpelaksanaan perpda Prov.DIY nomor 12 Tahun 2005 - Terwujudnya evaluasi dan pemantauan perda Prov DIY nomor 12 tahun 2005 - Terwujudnya pengadaan bahan pustaka - Terlaksananya pengolahan bahan pustaka - Terlaksananya penyiangan bahan pustaka - Terlaksananya pengamanan bahan pustaka 	16 paket	2,532,945,000
1.01.21.10, Monitoring,evaluasi dan pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 	3 paket	75,000,000
x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,133,650,000
x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat 	1750/ 2650 buah	3,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	- Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	181,250,000
x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	17,500,000
x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	137,500,000
x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	1 paket	40,000,000
x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7 macam	35,000,000
x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	- Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	14 macam	17,500,000
x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 paket	216,500,000
x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 macam	25,000,000
x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	140,400,000
x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	150,000,000
x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	- Terlaksananya penyediaan jasa keamanan gedung	16 orang	170,000,000
x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			6,028,550,000
x.xx.02.03, Pembangunan gedung kantor	- Terlaksananya pembangaunan gedung kantor	2 unit	3,750,000,000
x.xx.02.05, Pengadaan kendaraan dinas/operasional	- Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/ operasional	10 buah	1,125,000,000
x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor	- Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	10 macam	612,700,000
x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4 unit	125,000,000
x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	16 buah	300,000,000
x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4 unit	40,000,000
x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4 paket	40,000,000
x.xx.02.42, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	- Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2 unit	35,850,000
x.xx.05, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			35,850,000
x.xx.05.07, Pendidikan dan Pelatihan Lain-lain	- Terlaksananya kursus bendaharawan dan kursus Sistem Akuntansi Pemerintahan	6 orang	35,850,000
x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			119,681,500
x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Terlaksananya penyusunan laporan kinerja semesteran, tahunan, lakip dan evaluasi kinerja bulanan	3 macam	70,000,000
x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	- Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semesteran	2 paket	7,500,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
dan prognosis realisasi anggaran x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.xx.06.07, Penyusunan Realisasi Kegiatan Instansi	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran - Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Terlaksananya penyusunan realisasi kegiatan instansi 	<ul style="list-style-type: none"> 2 paket 1 paket 12 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> 12,500,000 10,500,000 19,181,500
DINAS KESEHATAN			64,261,127,000
BELANJA TIDAK LANGSUNG			17,500,000,000
BELANJA LANGSUNG			46,761,127,000
1.02.15, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan			250,290,000
1.02.15.04, Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pemantauan pelayanan kefarmasian di apotek, puskesmas dan RS 	50%	80,000,000
1.02.15.05, Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya workshop penyusunan kebijakan obat propinsi 2009 - Terlaksananya pertemuan CBIA 2009 - Terlaksananya pemantauan kasus penyalahgunaan & kesalahgunaan NAPZA di RS & Panti - Terlaksananya pemantauan & evaluasi IKOT 2009 - Terlaksananya pembinaan thd sarana distribusi obat di PBF 	<ul style="list-style-type: none"> 4% 4% 4% 4% 50% 	170,290,000
1.02.16, Program Upaya Kesehatan Masyarakat			4,311,893,000
1.02.16.02, Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya PJK - Cakupan rawat jalan - Penurunan jumlah kasus kematian ibu - Pengadaan reagen, media dan bahan penunjang habis pakai 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 12% 34 12 bln 	1,518,000,000
1.02.16.09, Peningkatan kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya operasional perizinan RS di propinsi DIY - Terlaksananya lisensi dan akreditasi sarana pelayanan kesehatan di prop. DIY - Terlaksananya registrasi dan lisensi nakes - Terlaksananya pembinaan operasional dlm rangka akreditasi nakes - Terlaksananya Pelatihan bagi Kader (Pramurukti Nifas, Pemanfaatan TOGA, Penggerak PHBS, Posyandu Usila, Pemandu Senam Usila, Posyandu Balita) 	50%, 6 Angkatan	191,996,000
1.02.16.12, Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan K1 - Cakupan K4 - Cakupan persalinan nakes yg memiliki kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> 97.30% 85.30% 86% 	2,288,897,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
	kebidanan/bidan		
	- Cakupan kunjungan nifas	81%	
	- Cakupan penanganan komplikasi obstetri	70%	
	- Cakupan bumil risti yg dirujuk	60%	
	- Cakupan Kunjungan neonatus (target 87%)		
	- Cakupan peserta KB aktif (target 78,90%)		
	- Cakupan kunjungan bayi (target 69%)		
	- Cakupan layanan kesehatan remaja (target 72%)		
	- Peningkatan sarana dg pelayanan gawat darurat 45%		
	- Terlaksananya manajemen PJK (target 100%)		
	- Diklat Teknis (30 OP), Diklat Non Teknis (20 OP) dan Sosialisasi Persiapan Rencana BLUD (80 OS)		
1.02.16.15, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Terlaksananya monitoring & evaluasi dan pelaporan	100%	151,000,000
	- Perawat/bidan yg terpapar SPMKK	21%	
1.02.16.16, Digital Government System Bidang Kesehatan	- Terimplementasinya DGS Kesehatan	40%	162,000,000
1.02.19, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			209,000,000
1.02.19.01, Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	- Terselenggaranya pentas dan siaran ketoprak dg pesan kesehatan	60%	209,000,000
	- Terselenggaranya road show di tk prop	100%	
	- Terselenggaranya PI mlil iklan layanan masyarakat		
	- Terlaksananya program promosi Layanan BP4		
1.02.19.02, Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	- Meningkatkan pola hidup sehat (individu, keluarga, institusi)	58%	565,550,000
	- Promosi Layanan Balai Labkes	100%	
1.02.20, Program Perbaikan Gizi Masyarakat			2,296,083,000
1.02.20.02, Pemberian tambahan makanan dan vitamin	- Memberbaiki status gizi masyarakat	60%	1,620,000,000
1.02.20.03, Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi ,Gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A,dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	- a)D/S, b)N/S,c)BGM/D,d)Cakupan Vit A, e)Cakupan FE, f)PMT P Gakin, g)Perawatan Balita Gizi Buruk, h)Bayi mendapat ASI eksklusif, i)Meningkatkan jumlah RT mengkonsumsi garam yodium, j) Semua Desa/Kel yang mengalami KLB ditangani kurang 24 jam, k)Meningkatn	a,b,e:80%, c:2%,i:60%, d,e,g,j:100%, h50%, k98%	590,875,000
1.02.20.04, Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi	- Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian sadar gizi	72%	23,558,000
1.02.20.06, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan	100%	61,650,000
1.02.21, Program Pengembangan Lingkungan Sehat			1,675,000,000
1.02.21.01, Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	- Meningkatkan persentase kejadian dampak kesehatan akibat pencemaran lingkungan dan kedaruratan lingkungan yg ditangani.	65%	480,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.02.21.02, Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya persentase kualitas bakteriologi air bersih - Meningkatnya persentase TPM yg memenuhi syarat - Meningkatnya persentase TTU yg memenuhi syarat - Meningkatnya persentase institusi (RS) yg melakukan pengelolaan limbah secara aman - Meningkatnya persentase KK yg mempunyai jamban 	70%	715,000,000
1.02.21.03, Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan persentase pengembangan wilayah sehat di kab/kota sehat 	60%	270,000,000
1.02.21.04, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya persentase keluarga penghuni rumah sehat 	72%	210,000,000
1.02.22, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			4,551,272,500
1.02.22.05, Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan insidensi DBD - Penurunan angka kematian DBD - Peningkatan penemuan penderita TB - Peningkatan angka kesembuhan pengobatan TB (cure rate) - Peningkatan penemuan penderita AIDS - Mempertahankan pengobatan infeksi - Penurunan jml penderita malaria endogenous - Menurunkan jml desa MCL (medium case incidence) 	63/100rb 1.01 55 .81 600ks 100 21 7	3,374,066,000
1.02.22.06, Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan cakupan laporan kesehatan Haji - Menurunkan jml kasus suspect flu burung - Meningkatkan ABJ vektor nyamuk penular DBD - Penanganan KLB malaria di daerah endemis 	80% 5/1 jt pddk 82% 100%	640,881,500
1.02.22.08, Peningkatan imunisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan cakupan UCI desa - Meningkatkan cakupan BIAS 	98.65%	140,890,000
1.02.22.09, peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	<ul style="list-style-type: none"> - Didapatnya data dasar kasus PTM (penyakit tidak menular) di DIY mli STP - Meningkatnya validitas data penyakit - Meningkatnya penanggulangan KLB 	74.66%	395,435,000
1.02.23, Program standarisasi pelayanan kesehatan			652,747,500
1.02.23.01, Penyusunan standar pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya penyusunan standar pelayanan kesehatan 	100%	133,047,500
1.02.23.02, Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas dg Sistem Manajemen Mutu (SMN) - Tersertifikasinya ISO 9001-2000 untuk 5 seksi/subbag - Uji Profisiensi, Supervisi dan Bimtek Laboratorium 	11% 100% 175 Lab	441,700,000
1.02.23.03, Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya buku profil kesehatan 	100%	78,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.02.24, Program pelayanan kesehatan penduduk miskin			16,500,000,000
1.02.24.12, Bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin	- Bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi maskin	100%	16,500,000,000
1.02.26, Program, pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata			6,478,698,000
1.02.26.17, Rehabilitasi bangunan rumah sakit	- Terpenuhinya pagar BP4	110 m	100,000,000
1.02.26.18, Pengadaan alat-alat rumah sakit	- Tersedianya alat-lat kesehatan rumah sakit		4,658,470,000
	a) BP4	20 unit	
	b) Balai Labkes	12 unit	
	c) Bapelkes	1 paket	
1.02.26.19, Pengadaan obat-obatan rumah sakit	- Terselenggaranya pengadaan obat-obatan	2 Paket	1,020,228,000
1.02.26.21, Pengadaan mebeuleur rumah sakit	- Tersedianya mebeuler rumah sakit	100%	50,000,000
1.02.26.22, Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)	- Tersedianya perlengkapan rumah tangga RS	100%	100,000,000
1.02.26.23, Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	- Tersedianya bahan-bahan logistik rumah sakit	100%	500,000,000
1.02.26.24, Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit	- Tersedianya format rekam medis	100%	50,000,000
1.02.27, Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata			253,175,000
1.02.27.01, Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	- Terselenggaranya pemeliharaan gedung BP4 secara rutin/berkala rumah sakit	1 tahun	50,000,000
1.02.27.16, Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah RS	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengelolaan limbah RS	1 tahun	35,175,000
1.02.27.17, Pemeliharaan rutin/berkala alat2 kesehatan RS	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala alat2 kesehatan RS	1 tahun	130,000,000
1.02.27.20, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan RS	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan RS	1 tahun	20,000,000
1.02.27.22, Pemeliharaan rutin/berkala hewan percobaan	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala hewan percobaan	1 tahun	18,000,000
1.02.28, Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan			633,000,000
1.02.28.04, Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan	- Terlaksananya Surkesda	1 pkaket	420,000,000
1.02.28.05, Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	- Terselenggaranya kemitraan dalam rangka peningkatan kualitas paramedis	120 SDMk	213,000,000
	- Tersusunnya uji coba dan finalisasi standar kompetensi nakes	50%	
	- Terlaksananya forkom dg organisasi profesi bidang kesehatan	50%	
1.02.29, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita			75,000,000
1.02.29.01, Penyuluhan kesehatan Anak Balita	- Terlaksananya sosialisasi buku KIA	Penurunan Angka kematian	25,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.02.29.04, Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya sosialisasi stimulasi, deteksi, intervensi dini tumbuh kembang balita - Terlaksananya sosialisasi pola asuh yg mendukung pola perkembangan anak - Terlaksananya pelatih. manajemen asfiksia - Terlaksananya pelatih. manajemen BBLR - Terlaksananya pelatih. manajemen masalah bayi baru lahir - Terlaksananya pelatih. SDIDTK bagi nakes - Terlaksananya sosialisasi vit.K1 - Terlaksananya lokakarya penanganan gangguan tumbuh kembang balita 	<p>Balita menjadi 19</p> <p>Penurunan A.Kematian Balita mjd 19</p>	25,000,000
1.02.29.07, Monitoring,evaluasi dan pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> - a. Terlaksananya monev dan bimtek program anak - b. Terlaksananya pertemuan evaluasi program anak 	19 angka kematian balita	25,000,000
1.02.30, Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			307,000,000
1.02.30.01, Pelayanan pemeliharaan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pemeliharaan kesehatan pada lansia 	70%	145,000,000
1.02.30.03, Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan Nakes dan Kader TP PKK Kab/Kota 	25%	30,000,000
1.02.30.06, Pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pelayanan kesehatan Lansia 	1.26%	80,000,000
1.02.30.07, Monitoring,evaluasi dan pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan Lansia di Pelayanan Dasar / Puskesmas 	20%	52,000,000
1.02.32, Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			364,000,000
1.02.32.01, Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan K1 - Cakupan K4 - Cakupan persalinan oleh nakes yg memiliki kompetensi kebidanan/bidan - Cakupan kunjungan nifas - Cakupan penanganan komplikasi obstetri - Cakupan bumil risti yg di rujuk - Cakupan Kunjungan neonatus - Cakupan peserta KB aktif 	<p>97.30%</p> <p>85.30%</p> <p>86%</p> <p>81%</p> <p>70%</p> <p>60%</p> <p>78%</p> <p>78.90%</p>	64,000,000
1.02.32.02, Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan K1 - Cakupan K4 - Cakupan persalinan oleh nakes yg memiliki kompetensi kebidanan/bidan - Cakupan kunjungan nifas - Cakupan penanganan komplikasi obstetri 	<p>97.30%</p> <p>85.30%</p> <p>86%</p> <p>81%</p> <p>70%</p>	200,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.02.32.03, Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan bumil risti yg di rujuk - Cakupan Kunjungan neonatus - Cakupan peserta KB aktif - Cakupan K1 - Cakupan K4 - Cakupan persalinan oleh nakes yg memiliki kompetensi kebidanan/bidan - Cakupan kunjungan nifas - Cakupan penanganan komplikasi obstetri - Cakupan bumil risti yg di rujuk - Cakupan Kunjungan neonatus - Cakupan peserta KB aktif 	<ul style="list-style-type: none"> 60% 87% 78.90% 97.30% 85.30% 86% 81% 70% 60% 87% 78.90% 	100,000,000
x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3,988,643,000
x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kelancaran administrasi surat menyurat dinas	100%	12,000,000
x.xx.01.03, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kelancaran komunikasi, penyediaan sumberdaya air dan listrik dinas	100%	701,620,000
x.xx.01.04, Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	- Kelancaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	100%	70,130,000
x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	- Kelancaran Operasional, Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	100%	12,500,000
x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Kelancaran Administrasi Keuangan Dinas	100%	85,000,000
x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Terjaminnya Kebersihan Kantor	100%	311,200,000
x.xx.01.09, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	66,820,000
x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	114,023,000
x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	300,000,000
x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	- Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	179,500,000
x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	106,000,000
x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	55,000,000
x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an	- Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	30,000,000
x.xx.01.16, Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	74,000,000
x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya Makanan dan Minuman	100%	470,600,000
x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Kelancaran Pelayanan Adiministrasi Perkantoran	100%	330,000,000
x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	- Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	193,000,000
x.xx.01.20, Penyediaan Jasa Paramedis	- Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	877,250,000
x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2,868,300,000
x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor	- Kelancaran Operasional Kantor	100%	398,800,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur	- Kelancaran Operasional Kantor	100%	160,000,000
x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Kelancaran Operasional Kantor	100%	510,000,000
x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Kelancaran Operasional Kantor	100%	440,000,000
x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	- Kelancaran Operasional Kantor	100%	79,500,000
x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	- Kelancaran Operasional Kantor	100%	20,000,000
x.xx.02.42, Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	- Terlaksananya rehab gedung kantor Dinas Kesehatan Propinsi & UPTD	100%	1,260,000,000
x.xx.03, Program peningkatan disiplin aparatur			45,000,000
x.xx.03.01, pengadaan mesin /kartu absensi	- Terlaksananya pengadaan mesin/kartu absensi	100%	45,000,000
x.xx.05, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			960,250,000
x.xx.05.01, Pendidikan dan pelatihan formal	- Terlaksananya Bimbingan teknis tentang Diklat pada institusi penyelenggaraan Diklat dan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan PNS	34 institusi Diknakes, 19 jenis pelatihan, 12 org	175,250,000
x.xx.05.01, Pendidikan dan pelatihan formal	- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	100%	110,000,000
x.xx.05.02, Sosialisasi peraturan perundang-undangan	- Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	88,000,000
x.xx.05.03, Bimbingan teknis implementasi peraturan Per-UU-an	- Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan Per-UU-an	100%	15,000,000
x.xx.05.04, Perencanaan Program dan Peningkatan Kualitas Layanan Data	- Terlaksananya perencanaan program dan peningkatan kualitas layanan Data	100%	250,000,000
x.xx.05.14, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	- Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100%	100,000,000
x.xx.05.17, Penyusunan D G S	- Terimplementasinya DGS bidang kesehatan	40%	162,000,000
x.xx.05.18, Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	- Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	100%	60,000,000
x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			59,000,000
x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	30,000,000
x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran	- Terlaksananya pelaporan keuangan semesteran Dinkes dan UPTD	100%	5,000,000
x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	- Terlaksananya pelaporan prognosis realisasi anggaran	100%	12,000,000
x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun	100%	12,000,000
RS GRHASIA			17,052,482,200
BELANJA TIDAK LANGSUNG			7,614,772,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
BELANJA LANGSUNG			9,437,710,200
1.02.16, Program Upaya Kesehatan Masyarakat			132,000,000
1.02.16.02, Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	- Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat	40%	109,000,000
1.02.16.15, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat di 5 Kab/Kota	100%	23,000,000
1.02.19, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			230,000,000
1.02.19.01, Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	- Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di 5 Kab/Kota DIY	100%	50,000,000
1.02.23, Program standarisasi pelayanan kesehatan			
1.02.23.02, Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	- Meningkatnya standart mutu pelayanan kesehatan seluruh unit rumah sakit bersertifikat	100%	180,000,000
1.02.26, Program, pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata			4,379,974,500
1.02.26.08, Pengembangan ruang terapi	- Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasaran RS Pengembangan Ruang Terapi, Tanaman Hias	100%	40,000,000
1.02.26.17, Rehabilitasi bangunan rumah sakit	- Peningkatan Saran dan Prasarana Rumah Saki Jiwa berupa Rehabilitasi Bangunan RS 937 m2 Bangsal P2, Bangsal P2A, Kamar Mayat	100%	1,383,949,000
1.02.26.18, Pengadaan alat-alat rumah sakit	- Pengadaan ,Peningkatan saran dan Prasaran RS Jiwa untuk Alat-alat Kesehatan Kulit Kelamin	100%	150,000,000
1.02.26.19, Pengadaan obat-obatan rumah sakit	- Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasaran RS Jiwa Obat-obatan RS untuk 5000 resep	100%	800,000,000
1.02.26.21, Pengadaan mebeuleur rumah sakit	- Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasaran RS Jiwa Mebelair Ruang Rapat	100%	150,000,000
1.02.26.22, Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dll)	- Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasaran RS Jiwa Perlengkapan Peralatan Rumah Tangga RS 7 paket	100%	394,491,000
1.02.26.23, Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	- Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS Jiwa bahan-bahan Logistik RS1.300 pasien, 6 pkt, 1 pkt bhn kimia, BNN	100%	1,320,892,000
1.02.26.24, Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit	- Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasaran RS Jiwa Pencetakan Administrasi dan Surat-menyurat RS	100%	100,642,500
1.02.26.26, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasaran RS Monitoring Evaluasi dan Pelaporan RS, 10 bln	100%	40,000,000
1.02.27, Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata			407,950,000
1.02.27.01, Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS 1 paket	100%	120,000,000
1.02.27.01, Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS 1 tahun 1 Paket	100%	120,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.02.27.16, Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah RS	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS IPAL RS dan Air Bersih 1 tahun	100%	87,950,000
1.02.27.17, Pemeliharaan rutin/berkala alat2 kesehatan RS	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Kesehatan RS	100%, 1 tahun 2 Paket	80,000,000
x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3,775,418,500
x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Pelayanan Administrasi Perkantoran 2200 surat	100%	10,700,000
x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	- Pelayanan Adminsitasi Perkantoran 4 nomor telepone, 3 blok jaringan listrik, PAM, Internet	100%	275,000,000
x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	- Pelayanan Adminsitasi Perkantoran utk Kendaraan 7 roda 2, 10 roda 4, 1 roda 6	100%	2,750,500
x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Pelayanan Administrasi Perkantoran 11 Pengelola Keuangan 4 pengelola barang	100%	34,122,000
x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk jasa kebersihan kantor 11000 m2	100%	160,000,000
x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Pelayanan Administrasi Perkantoran 15 bidang/sub bag/sub bid	100%	90,000,000
x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Pelayanan Administrasi Perkantoran 15 bidang/unit/sub bag 8 poli, 8 bangsal 4 instalasi	100%	110,000,000
x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	- Pelayanan Administrasi Perkantoran Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangan Kantor RS 1213 titik dalam 3 KVH meter	100%	40,000,000
x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Pelayanan Adminsitasi Perkantoran untuk Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	300,000,000
x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an	- Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Bahan bacaan dan Peraturan Per-UU-an 3 surat kabar dan 30 buku	100%	20,000,000
x.xx.01.16, Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Pelayanan Administrasi Kantor untuk Bahan Logistik Kantor 1 tahun	100%	184,639,500
x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	- Pelayanan Administrasi Kantor untuk Makanan dan Minuman Rapat 4000 orang	100%	300,000,000
x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 456 Dalam Daerah dan 50 Luar Daerah.	100%	150,000,000
x.xx.01.20, Penyediaan Jasa Paramedis	- Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Jaya Pelayanan Rumah Sakit 33 PTT, 279 PNS	100%	2,098,206,500
x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			314,826,000
x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Gedung Kantor 4 unit	100%	50,000,000
x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	- Peningkatan Sarana dan Prasana Apartaur Pemeliharaan Kendaran Dinas/Operasional 7 roda dua, 10 roda empat, 1 roda enam	100%	138,311,000
x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Gedung Kantor 139 buah	100%	82,515,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur untuk Peralatan Gedung Kantor 77 buah	100%	32,000,000
x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Mebelair RS 164 bh	100%	12,000,000
x.xx.05, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			117,750,000
x.xx.05.01, Pendidikan dan pelatihan formal	- Peningkatan Kapasitas SDM 12 orang	100%	92,750,000
x.xx.05.03, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	- Peningkatan Kapasitas SDM 125 org Pejabat Fungsional, 14 Jab Struktural,	100%	25,000,000
x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			79,791,200
x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Kegiatan : Lakip, Laporan Tahun, Profil RS	100%	30,000,000
x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Akhir Tahun	100%	24,791,200
x.xx.06.07, Penyusunan Realisasi Kegiatan Instansi	- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja : RKA-SKPD dan DPA-SKPD	100%	25,000,000
DINAS KIMPRASWIL			328,003,511,675
BELANJA TIDAK LANGSUNG			21,924,444,000
BELANJA LANGSUNG			306,079,067,675
1.03.15, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			131,280,050,000
1.03.15.01, Perencanaan pembangunan jalan	- DED Yogya-Paris, Yogya-Kaliurang, Akses TPA Piyungan, Srandakan-Toyan	23 KM	305,250,000
1.03.15.02, Survei kontur jalan dan jembatan	- Penyusunan Legger jalan	51,4 KM	300,000,000
1.03.15.03, Pembangunan jalan	- Pembangunan jalan Provinsi dan pengadaan tanah JJLS	40,4 KM & 11 KM (Tanah)	96,000,000,000
1.03.15.04, Perencanaan pembangunan jembatan	- DED Jembatan Ironayan	42 M	95,000,000
1.03.15.05, Pembangunan jembatan	- Pembangunan 9 bh jembatan	342 M	30,000,000,000
1.03.15.07, Pengawasan teknik peningkatan jalan dan jembatan	- 12 paket jalan & 9 paket jembatan	40,4 KM & 342 M	4,579,800,000
1.03.16, Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong			3,334,700,000
1.03.16.01, Perencanaan pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	- Bantuan Teknis Pengelolaan Drainase Perkotaan	12 Bulan	200,000,000
1.03.16.03, Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	- Pembangunan saluran air di sepanjang jalan provinsi	600 M	3,000,000,000
1.03.16.05, Pengawasan Teknik	- Pengawasan di 4 Kab/Kota	4 Konsultan	134,700,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.03.18, Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan			67,410,375,000
1.03.18.03, Rehabitasi /pemeliharaan jalan	- Rehab. 7 Ruas jalan dan pemel. rutin 4 Kab	652,25 KM	48,681,250,000
1.03.18.04, Rehabilitasi /pemeliharaan jembatan	- Rehab. 52 bh jembatan & 4 kab. pemel. rutin	3.675 M	16,436,900,000
1.03.18.06, Pengawasan Teknik	- 7 Ruas Rehab Jalan & 4 bh Rehab Jembatan	37 KM & 759,1 M	2,292,225,000
1.03.20, Program inspeksi kondiasi jalan dan jembatan			562,724,000
1.03.20.01, Inspeksi kondisi jalan	- Penyusunan IRMS	690,25 KM	262,295,000
1.03.20.02, Inspeksi kondisi jembatan	- Penyusunan BMS	3.709 M	300,429,000
1.03.24, Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi ,rawa dan jaringan pengairan lainnya			34,582,679,969
1.03.24.01, Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	- Tersusunya perencanaan teknis	12 Paket	2,000,000,000
1.03.24.03, Perencanaan pembangunan reservoir	- Tersusunya Perencanaan Pembangunan reservoir	7 Paket	2,050,000,000
1.03.24.05, Perencanaan normalisasi saluran sungai	- Tersusunya Perencanaan Normalisasi saluran sungai	4 Laporan	201,000,000
1.03.24.10, Rehabilitasi /pemeliharaan jaringan irigasi	- Terpeliharanya Jaringan Irigasi	2 Bh Bendung & 2075 Ha	8,844,970,000
1.03.24.15, Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	- Terlaksananya Opetimalisasi Fungsi Jaringan irigasi	100%	17,086,047,500
1.03.24.17, Monitoring,evaluasi dan pelaporan	- Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan pelaporan	100%	67,200,000
1.03.24.18, Pendampingan WISMP I	- Terlaksananya Pendampingan WISMP	100%	1,291,489,126
	- Terpeliharanya Bangunan Sarana Sungai	45 KM/ 3 Unit	2,321,973,343
	- Terlaksananya Pengawasan Tehnik Irigasi	2 Paket	720,000,000
1.03.25, Program penyediaan dan pengelolaan air baku			4,174,843,300
1.03.25.01, Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	- Pembuatan Sumur Diameter 2,4	1 Bh	3,432,000,000
1.03.25.04, Pembangunan sumur-sumur air tanah	- Pembuatan Sumur Bor	1 Buah	250,000,000
1.03.25.05, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air	- Pengkajian kualitas air baku & produksi	3 kegiatan	144,375,000
1.03.25.06, Peningkatan distribusi penyediaan air baku	- Perencanaan dan Pemantauan Alokasi Air	4 lokasi	83,468,300
1.03.25.07, Monitoring,evaluasi dan pelaporan	- Monitoring Kegiatan Pembangunan Air Baku	1 Laporan	250,000,000
1.03.25.08, Pengawasan Teknik	- Terlaksananya pengawasan Tehnik	100%	15,000,000
1.03.26, Program pengembangan,pengelolaan,dan konservasi sungai,danau,dan sumber daya air lainnya			14,878,733,020
1.03.26.01, Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	- Terlaksananya Pem,bangunan Embung	2 Bh	12,000,000,000
1.03.26.02, Pemeliharaan dan rehabilitasi embung,dan bangunan penampung air lainnya	- Terpeliharanya embung dan bangunan penampung air lainnya	8 Kegiatan	1,235,507,295

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.03.26.05, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya	- Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Sungai danau dan SDA lainnya.	7 Kegiatan	777,225,725
1.03.26.07, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 laporan	21,000,000
1.03.26.08, Pemeliharaan Hidrologi	- Pemeliharaan Pos dan Peralatan Hidrologi	9 Stasiun	125,000,000
1.03.26.09, Pengawasan Teknik	- Terlaksananya Pengawasan Tehnik Pembangunan Embung	2 Paket	720,000,000
1.03.27, Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah			4,295,304,770
1.03.27.02, Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	- Pemasangan Pipa Air Limbah	750 M'	2,000,000,000
1.03.27.03, Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah	- Fasilitasi Pembinaan Teknis Air Minum dan Bantuan Teknis Pengembangan air limbah perkotaan	12 Bulan	300,000,000
1.03.27.05, Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum	- Tim Pengkajian dan Pengembangan Air Bersih	1 Laporan	70,994,000
1.03.27.08, Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah	- Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Luimbah	700 M	1,900,000,000
1.03.27.09, Montoring, evaluasi dan pelaporan	- Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100%	24,310,770
1.03.28, Program pengendalian banjir			13,986,663,720
1.03.28.07, Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai kali	- Terlaksananya penanggulangan banjir dan kekeringan	7 Laporan	1,324,406,000
1.03.28.11, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100%	24,000,000
1.03.28.12, Pengawasan Teknik	- Terlaksananya Pengawasan Tehnik Pembangunan Embung	9 Lokasi	715,373,073
	- Terlaksananya rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran Sungai	9 Lokasi	11,922,884,647
1.03.29, Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh			4,407,950,000
1.03.29.01, Perencanaan pengembangan infastuktur	- Bantuan Teknis Master Plan Pengelolaan Sampah Perkotaan	12 Bulan	200,000,000
1.03.29.02, Pembangunan peningkatan infrastuktur	- Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) dan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	4 Kabupaten	3,500,000,000
1.03.29.03, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100%	40,000,000
1.03.29.04, Penyusunan Amdal	- Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kawasan Industri Sentolo	1 Laporan	367,950,000
	- Tersedianya data/informasi lahan-lahan yang beralih fungsi dan cepat tumbuh di Provinsi DIY	15 buku	300,000,000
1.03.30, Program pengembangan infrastruktur perdesaan			1,440,000,000
1.03.30.02, Pembangunan jalan dan kembang perdesaan	- Terlaksananya Pembangunan jalan Lingkungan dan SAH	3 Lokasi	835,000,000
1.03.30.03, Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan swadaya berbasis komunitas/kelompok	3 Kab	605,000,000
1.03.31, Program Pengembangan & Pengelolaan Data dan Informasi SDA			1,366,801,626
	- Pemutakhiran dan penyusunan data SDA	3lap dan 10 layer	1,366,801,626

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.03.32, Program Pelayanan Jasa Pengujian			7,106,044,000
1.03.32.01, Peningkatan kualitas pelayanan publik	- Operasional Pelayanan Jasa pengujian bahan bangunan	8 kegiatan	3,553,022,000
	- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	8 Kegiatan	3,553,022,000
1.03.33, Program Pengaturan Jasa Konstruksi			1,693,000,000
1.03.33.01, Sosialisasi dan diseminasi peraturan Per-UU-an Jasa Konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait	- Sosialisasi SIPJAKI	1 Laporan	150,000,000
	- Terwujudnya pemahaman yang sama terhadap peraturan jasa konstruksi	1 laporan	797,000,000
	- Study Keterkaitan UU dan PP dalam mewujudkan mutu konstruksi dan Study Metode Plaksanaan yang Efektif dan Efisien	2 Laporan	197,000,000
1.03.33.03, Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	- Study Keterkaitan UU dan PP dalam Mewujudkan Mutu Konstruksi	1 laporan	99,000,000
	- Sistem Data Base Jasa Konstruksi	1 Laporan	200,000,000
	- Tersosialisasinya Peraturan Terkait	15%	250,000,000
1.03.34, Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi			900,000,000
1.03.34.01, Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi	- Terwujudnya pelaksanaan kontrak yang bertanggung jawab bagi penyedia jasa	10%	400,000,000
1.03.34.02, Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi	- Terwujudnya pelaksanaan kontrak yang bertanggung jawab bagi pengguna jasa	10%	400,000,000
1.03.34.03, Pemberdayaan jasa konstruksi kepada masyarakat (forum jasa konstruksi daerah)	- Terlaksananya Pemberdayaan Jasa Konstruksi	10%	100,000,000
1.03.35, Program Pengawasan Jasa Konstruksi			575,000,000
1.03.35.02, Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	- Terwujudnya ketertiban usaha dengan benar	12%	100,000,000
1.03.35.02, Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	- terwujudnya ketertiban usaha dengan benar	12%	125,000,000
1.03.35.03, Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	- Terwujudnya Ketertiban Usaha dengan benar	12%	150,000,000
1.03.35.04, Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan jasa konstruksi	- Terwujudnya Ketertiban Usaha dengan benar	12%	100,000,000
1.03.35.05, Pengawasan terhadap K-3	- Terwujudnya Ketertiban Usaha dengan benar	12%	100,000,000
1.04.15, Program pengembangan perumahan			1,414,912,000
1.04.15.01, Penetapan kebijakan ,strategi dan program perumahan	- Up dating data perumahan dan bangunan gedung negara	1 Laporan	164,912,000
1.04.15.01, Penetapan kebijakan ,strategi dan program perumahan	- Penyusunan RPJM Bidang Perumahan di Provinsi DIY	2 Laporan	450,000,000
	- Inventarisasi dan Sinkronisasi Peraturan Bidang Perumahan di Provinsi DIY		
1.04.15.02, Penyusunan norma,standar,prosedur dan manual	- tersusunnya NSPM Bidang Perumahan	1 Laporan	100,000,000
1.04.15.06, Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	- fasilitasi Kegiatan Bidang Perumahan	100 %	600,000,000
1.04.15.08, Monitoring,evaluasi dan pelaporan	- Pembinaan Teknis Program Perumahan		
	- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Perumahan	1 Laporan	100,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.05.15, Program Perencanaan Tata Ruang			2,250,000,000
1.05.15.05, Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	- Kawasan Yogya-Pulowatu, Jl. Yogya-Pakem dan Lapangan Terbang Gading	1 Dokumen	900,000,000
1.05.15.08, Penyusunan rancangan peraturan daerah ttg RTRW	- Masyarakat yang tinggal di Provinsi DIY	1 Dokumen	600,000,000
1.05.15.11, Revisi rencana tata ruang	- Daerah Sekitar Kawasan Pantai Selatan Kabupaten Kulon Progo	1 Dokumen	600,000,000
1.05.15.12, Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	- Aparat Pemerintah Kabupaten dan Kota	1 Dokumen	150,000,000
1.05.16, Program pemanfaatan ruang			1,600,000,000
1.05.16.02, Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang	- Pemerintah kabupaten dan Kota di Provinsi DIY	75 %	1,600,000,000
1.05.17, Program pengendalian pemanfaatan ruang			790,000,000
1.05.17.01, Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	- Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat yang tinggal di Provinsi DIY	75 %	500,000,000
1.05.17.02, Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang	- Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat yang tinggal di Provinsi DIY	75 %	100,000,000
1.05.17.05, Pengawasan pemanfaatan ruang	- Dinas dan Instansi terkait yang menangani pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang	75 %	80,000,000
1.05.17.06, Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten /kota	- Dinas dan instansi terkait yang menangani pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang	75 %	110,000,000
1.08.16, Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup			117,845,000
1.08.16.07, Pengkajian dampak lingkungan	- Pengkajian kawasan industri	100 %	42,875,000
1.08.16.08, Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan	- Terlaksananya Pengelolaan Lingkungan Pertambangan	75 %	74,970,000
x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,404,200,447
x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	- Pemenuhan kebutuhan Jasa Komunikasi, air dan Listrik di Lingkungan Dinas	12 Bulan	542,740,000
x.xx.01.05, Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	- Terpenuhinya jasa jaminan barang milik daerah	12 Bulan	11,487,300
x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	- Terpenuhinya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	100 %	9,900,000
x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Terlaksananya Jasa Administrasi dan Keuangan	12 Bulan	107,161,175
x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	103,620,000
x.xx.01.09, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Terpenuhinya Peralatan Kerja bagi setiap pegawai	12 Bulan	151,970,500
x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Bagi Pegawai	12 bulan	198,500,720
x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	- Terpenuhinya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	16,500,000
x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	633,945,752
x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Terpenuhinya peralatan Rumah Tangga	12 bulan	2,750,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an	- Tersedianya buku-buku bacaan dan peraturan Per-UU-an	100 %	79,700,000
x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	- Terpenuhinya Makanan dan minuman untuk lembur dan rapat	100 %	79,750,000
x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Terpenuhinya Kebutuhan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	100 %	466,175,000
x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			3,700,641,700
x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor	- Penyusunan/Inventarisasi standard prototip bangunan gedung negara	2 Laporan	200,000,000
x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	265,779,800
x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 bulan	815,100,000
x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	- Terpeliharanya mebealair	12 bulan	59,761,900
x.xx.02.42, Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	- Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Kimpraswil dan Kantor Bidang Bina Marga	1204 m2	1,960,000,000
x.xx.02.52, Pengadaan Sistem Pengukuran Dan Penilaian Aset/Barang Daerah	- Pendataan Sarana/Prasarana Bangunan Gedung - Bantuan Teknis Keandalan Bangunan Publik (Building Assesment and Cimmisioning)	1 Laporan	400,000,000
x.xx.05, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			1,728,164,800
x.xx.05.04, Perencanaan Program dan Peningkatan Kualitas Layanan Data	- Tersusunnya pengumpulan data dan informasi	6 Laporan	1,278,164,800
x.xx.05.12, Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi	- Tersedianya Data/Informasi Sarana dan Prasarana Bid. Ke-PU-an	20 buku	100,000,000
x.xx.05.12, Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi	- Tersedianya data/informasi yang terinci mengenai harga bahan bangunan dan upah bidang ke-Ciptakarya-an.	20 laporan	100,000,000
x.xx.05.13, Inventarisasi, Integrasi dan Pengelolaan Barang	- terinventarisasinya integrasi dan pengelolaan barang	3 Laporan	250,000,000
x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			78,434,323
x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	22,265,650
x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran	- Tersusunnya laporan keuangan semesteran	1 Laporan	15,752,990
x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	- Tersusunnya laporan progres realisasi anggaran	1 Laporan	20,200,961
x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	20,214,722
BAPEDA			21,175,890,000
BELANJA TIDAK LANGSUNG			5,394,890,000
BELANJA LANGSUNG			15,781,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.06.15, Program pengembangan data /informasi			1,293,000,000
1.06.15.01, Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan			25,000,000
1.06.15.02, Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	- Terwujudnya sinkronisasi, keterpaduan, keselarasan data dan informasi perencanaan pembangunan	100%	230,000,000
1.06.15.05, Penyusunan profile daerah	- Tersusunnya Profil Provinsi DIY dan adanya kesepakatan pemahaman tentang pemanfaatan data profil daerah	100%	121,000,000
1.06.15.06, Pengembangan Website	- Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan informasi bapeda melalui web site serta terwujudnya peningkatan dan pemeliharaan jaringan internet	100%	100,000,000
1.06.15.07, Pengelolaan Sistem Pendukung Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan	- Terwujudnya kesepakatan pemahaman tentang sistem informasi pendukung perencanaan dan pelaksanaan program	100%	90,000,000
1.06.15.08, Penyempurnaan dan pengembangan sistem aplikasi pengendalian pelaksanaan program/kegiatan			133,000,000
1.06.15.12, Pengembangan Data Base Spacial GIS	- Pembuatan peta kesesuaian lahan, Pembuatan sistem informasi Penataan Ruang, Mengelola outlet peta	1 paket	245,000,000
1.06.15.13, Upgrade Sistem Aplikasi Monev		-	55,000,000
1.06.15.14, Entry Data APBD dan Non APBD		-	25,000,000
1.06.15.15, Pemetaan Data Pelaksanaan Pembangunan Transportasi dan Sarpras		-	90,000,000
1.06.15.16, Pengembangan Metadata Sistem Informasi Spasial Daerah	- Terwujudnya pengembangan metadata sistem informasi daerah	100%	140,000,000
1.06.15.17, Update CD Interaktif Pembangunan Daerah	- Terselenggaranya update CD Interaktif Pembangunan Daerah	100%	39,000,000
1.06.16, Program kerjasama pembangunan			192,000,000
1.06.16.01, Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan	- Stakeholders lingkungan hidup, SDA, fisik da prasarana di Perbatasan kabkota	12 KOORD, 2 FGD, 2 LAP	40,000,000
1.06.16.02, Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	- Stakeholders pembangunan MGM, dan stakeholders kerjasama kab/kota/prov	15 KOORD	75,000,000
1.06.16.04, Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	- Stakeholders terkait di kab/kota/prov	10 KOORD	77,000,000
1.06.17, Program pengembangan wilayah perbatasan			22,000,000
1.06.17.10, Koordinasi Perencanaan Trasportasi di Perbatasan	- Stake holders transportasi di perbatasan Sleman-Magelang, Kulon Progo-Purworejo, Gunungkidul-Klaten	12 pertemuan	22,000,000
1.06.18, Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh			287,000,000
1.06.18.06, Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis, Cepat Tumbuh dan Perdesaan	- Koordinasi antar sektor, antar stake holders, antar provinsi/kab/kota	10 kali koordinasi	55,000,000
1.06.18.07, Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Transportasi	- Calon investor gedung parkir (off street parking) di kawasan	1 lap hsl studi	232,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
Kawasan Perkotaan	perkotaan		
1.06.19, Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar			321,000,000
1.06.19.02, Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	- Dinas Perhubungan, Dinas Kimpraswil, BAPPEDA dan stakeholder transportasi	15 KL PERTEMUAN	14,000,000
1.06.19.07, Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	- Koordinasi antar sektor, antar stakeholder, antar provinsi/kab/kota	10 kl koord	25,000,000
1.06.19.08, koordinasi perencanaan penanganan perparkiran	- Dinas Perhubungan, Dinas Kimpraswil, Bapeda dan stake holders transportasi	15 kl pertemuan	50,000,000
1.06.19.14, Koordinasi Perencanaan Penanganan Infrastruktur Perkotaan	- Koordinasi antar sektor, antar stake holders, antar provinsi/kab/kota	15 kali koordinasi	47,000,000
1.06.19.15, Fasilitasi dan Sinkronisasi Perencanaan praswil	- Dinas dan stake holders	1 Workshop, 2 FGD, 20 koordinasi	69,000,000
1.06.19.16, Fasilitasi dan Koordinasi Penataan Transportasi Antar Wilayah yang Berkelanjutan (Sustainable Transport)	- Dinas Perhubungan, Dinas Kimpraswil, BAPPEDA dan Stakeholders Trans di Provinsi	12 kali pertemuan, 1 laporan, 1 SIM P	95,000,000
1.06.19.17, Fasilitasi Infra dan Inter Moda Transportasi		20 kali pertemuan	21,000,000
1.06.21, Program perencanaan pembangunan daerah			4,105,000,000
1.06.21.07, Penetapan RPJMD	- Terfasilitasinya penetapan dokumen RPJMD sebagai arahan pembangunan lima tahunan	1 dokumen	300,000,000
1.06.21.08, Penyusunan rancangan RKP	- Tersusunnya rancangan awal RKP Tahun 2010	1 dokumen	200,000,000
1.06.21.09, Penyelenggaraan musrenbang RKP	- Terlaksananya Musrenbang RKP	1 kali	275,000,000
1.06.21.10, Penetapan RKP	- Tersusunnya rancangan akhir RKP dan ditetapkannya Pergub tentang RKP	1 dokumen	150,000,000
1.06.21.16, Fasilitasi dan Koordinasi Penelitian		100%	210,000,000
1.06.21.17, Inventarisasi Hasil Penelitian Tahunan		100%	90,000,000
1.06.21.19, Forum hasil pelaksanaan program/kegiatan		100%	60,000,000
1.06.21.21, Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa		100%	90,000,000
1.06.21.22, Penyusunan KUA dan PPA	- Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS	2 dokumen	250,000,000
1.06.21.23, Penyusunan KUA dan PPA Perubahan	- Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS 2009 perubahan	2 dokumen	200,000,000
1.06.21.24, Sinkronisasi dan koordinasi program pembangunan	- Tersusunnya materi perencanaan pembangunan daerah, Terselenggaranya Rakortek di daerah (Bapeda,Program,SKPD), Partisipasi DIY dalam Musrenbang, Musrenbangnas, Rakornas Pusat untuk penyalarsan prog/keg daerah dengan regional dan nasional, Partisipasi dalam forum Komunikasi Bapeda Provinsi se Indonesia	100%	500,000,000
1.06.21.25, Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan		100%	110,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.06.21.27, Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, RKT dan Penetapan Kinerja	- Stake holders terkait di Provinsi DIY	15 koordinasi	130,000,000
1.06.21.28, Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan	- Stakeholder terkait provinsi dan kab/kota	15 koordinasi	25,000,000
1.06.21.29, Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program / kegiatan Setda dan Setwan			100,000,000
1.06.21.30, Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program / kegiatan Lembaga Teknis Daerah			100,000,000
1.06.21.31, Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program / kegiatan Dinas Daerah			200,000,000
1.06.21.32, Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan			50,000,000
1.06.21.33, Penelitian tentang Isu-Isu Strategis			100,000,000
1.06.21.34, Penyusunan Dokumen Informasi dan Sosialisasi Hasil Litbang			40,000,000
1.06.21.35, Evaluasi dan Analisis Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan			200,000,000
1.06.21.36, Evaluasi dan Analisis Kebijakan Pembangunan Bidang Transportasi dan Prasarana Wilayah			200,000,000
1.06.21.37, Penyusunan Analisis Kebijakan Pelaksanaan Program sesuai dengan Visi Pemerintah Daerah			200,000,000
1.06.21.38, Koordinasi Penanganan Dana DAK	- Dana-dana DAK	100%	65,000,000
1.06.21.39, Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bidang Prasarana Wilayah	- SPM	100%	110,000,000
1.06.21.40, Fasilitasi, Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan IDP3	- Perencanaan IDP3	100%	150,000,000
1.06.22, Program perencanaan pembangunan ekonomi	-		3,114,000,000
1.06.22.02, Penyusunan indikator ekonomi daerah	- Pemerintah daerah dan stake holders	100%	94,000,000
1.06.22.12, Penyusunan Analisis PDRB	- Satuan kerja perangkat daerah	100%	91,000,000
1.06.22.13, Fasilitasi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi (P-KSP)	- Pemerintah Daerah dan stakeholders	100%	101,000,000
1.06.22.14, Penyusunan Perencanaan Makro Ekonomi Tahunan	- SKPD	100%	124,000,000
1.06.22.22, Koordinasi rural community development (pembangunan masyarakat pedesaan)	- Pelaku Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat pedesaan (CD), Pelaku Pengembangan Biofarmaka, Pelaku pengembangan biogas dan biofuel	100%	175,000,000
1.06.22.23, Fasilitasi forum jogja seed center	- Pelaku Pengembangan Perbenihan	100%	150,000,000
1.06.22.24, Koordinasi pengelolaan plasma nutfah/ sumberdaya genetik	- Pelaku Pengelolaan plasma nutfah/sumberdaya genetika	100%	175,000,000
1.06.22.26, Koordinasi perencanaan penanganan pengangguran	- SKPD terkait, masyarakat dan stakeholders	100%	85,000,000
1.06.22.29, Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	- Penyusunan dan pelaku perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat	100%	225,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.06.22.30, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas	- penyusunan dan pelaku perencanaan program pembangunan perrtanian dalam arti luas	100%	150,000,000
1.06.22.31, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Program Indagkop dan ESDM		100%	264,000,000
1.06.22.32, Penyusunan Masterplan Pengembangan UKM		100%	123,000,000
1.06.22.33, Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan		100%	206,000,000
1.06.22.34, Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi dan UKM		100%	196,000,000
1.06.22.35, Penyusunan Kebijakan Bidang ESDM		100%	201,000,000
1.06.22.36, Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian, dan Keduniasahaan		100%	175,000,000
1.06.22.37, Penyusunan Kajian Perencanaan Kebijakan Kependudukan		100%	150,000,000
1.06.22.38, Koordinasi Perencanaan Program Pariwisata Alam	- Rumusan strategi pengembangan pariwisata alam	100%	72,000,000
1.06.22.39, Koordinasi Perencanaan Program Pariwisata Pendidikan	- Rumusan strategi pengembangan pariwisata pendidikan	100%	70,000,000
1.06.22.40, Koordinasi Perencanaan Program Pariwisata Budaya	- Rumusan strategi pengembangan pariwisata budaya	100%	72,000,000
1.06.22.41, Penyusunan Perencanaan Pengembangan Pariwisata Pantai	- Tersusunnya strategi pengembangan pariwisata pantai	100%	215,000,000
1.06.23, Program perencanaan sosial dan budaya			2,171,000,000
1.06.23.02, Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan	- SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi DIY serta stake holders terkait	1 dokumen	90,000,000
1.06.23.05, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	- SKPD Kab/Kota dan Provinsi DIY serta stake holders	1 dokumen	85,000,000
1.06.23.06, Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	- SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi DIY serta stake holders terkait	1 dokumen	87,000,000
1.06.23.07, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya	- Kebijakan Pengembangan Pembangunan Kebudayaan	100%	64,000,000
1.06.23.08, Koordinasi pengembangan minat baca dan perpustakaan	- Rumusan strategi pengembangan minat baca	100%	58,000,000
1.06.23.09, Koordinasi Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah	- Rumusan strategi pengembangan pendidikan dasar dan menengah	100%	88,000,000
1.06.23.10, Koordinasi pengembangan Pendidikan Tinggi	- Rumusan strategi pengembangan pendidikan tinggi	100%	58,000,000
1.06.23.11, Koordinasi Pengembangan PAUD dan Non Formal	- Rumusan strategi pengembangan PAUD dan Non Formal	100%	83,000,000
1.06.23.12, Koordinasi Pengembangan Pemuda dan Olah Raga	- Rumusan strategi pengembangan pemuda dan olah raga	100%	81,000,000
1.06.23.18, Koordinasi perencanaan program pemberdayaan masyarakat	- SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi DIY serta stake holders terkait	1 dokumen	85,000,000
1.06.23.20, Koordinasi Perencanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi DIY serta stake holders terkait	1 dokumen	80,000,000
1.06.23.21, Koordinasi Perencanaan Program Ketentraman dan Ketertiban	- SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi DIY serta stake holders terkait	1 dokumen	75,000,000
1.06.23.22, Penyusunan Analisis Data Pendudukan Miskin	- Penduduk miskin se-DIY	1 laporan	300,000,000
1.06.23.23, Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat	- Program Pemberdayaan Masyarakat di DIY	1 laporan	80,000,000
1.06.23.24, Fasilitasi Perencanaan Program Keluarga Harapan	- Program keluarga harapan dan stakeholders terkait	1 laporan	60,000,000
1.06.23.25, Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	- PNPM (P2KP dan PKK serta stake holders terkait)	1 laporan	60,000,000
1.06.23.26, Koordinasi Pengembangan Cluster Pendidikan	- Rumusan strategi pengawasan pendidikan	100%	234,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.06.23.27, Koordinasi Pengembangan Daya Saing Aparatur	- Kebijakan pengembangan daya saing aparatur	100%	88,000,000
1.06.23.28, Penyusunan Analisis Kontribusi Budaya Lokal terhadap Budaya Nasional	- Rumusan kajian kontribusi budaya lokal terhadap budaya nasional	100%	238,000,000
1.06.23.29, Penyusunan Perencanaan Program Pengembangan SDM di Bidang Kesenian	- Rumusan strategi pengembangan SDM di bidang kebudayaan	100%	177,000,000
1.06.24, Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam			235,000,000
1.06.24.09, Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Koordinasi antar sektor, antar stake holders, antar provinsi, antar kab/kota - Program kegiatan berbasis pembangunan berkelanjutan	10 koordinasi	120,000,000
1.06.24.10, Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam	- Koordinasi antar sektor, antar stakeholder, antar provinsi/kab/kota	10 kali koord	25,000,000
1.06.24.11, Fasilitasi dan Koordinasi Sumber Daya Air	- Koordinasi antar sektor, antar stakeholder, antar provinsi/kab/kota	10 kali koord	21,000,000
1.06.24.12, Fasilitasi dan Koordinasi Kelembagaan Pengelola Irigasi	- Dinas terkait, Komisi Irigasi, Wakil P3A/GP3A	1 WORKSHOP, 2 FGD, 20 KOORD	69,000,000
1.06.28, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah			150,000,000
1.06.28.01, Penguatan Kelembagaan Sumber Daya Air	- Satker WISMP, dinas terkait, P3A/GP3A	1 pendampingan	150,000,000
1.06.29, Pembangunan Daerah Tertinggal			60,000,000
1.06.29.01, Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Daerah Tertinggal	- Stakeholders terkait di provinsi dan kabupaten	12 koordinasi, 1 workshop, 1 FGD	60,000,000
1.16.15, Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi			1,162,000,000
1.16.15.01, Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah		100 %	50,000,000
1.16.15.02, Pengembangan potensi unggulan daerah		100 %	201,000,000
1.16.15.03, Fasilitasi dan Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT)		100%	43,000,000
1.16.15.04, koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA		100 %	95,000,000
1.16.15.05, Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal		100	122,000,000
1.16.15.06, Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha		100 %	50,000,000
1.16.15.08, Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal		100 %	104,000,000
1.16.15.09, Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi		100 %	30,000,000
1.16.15.10, Penyelenggaraan Pameran Investasi	- Calon Investor dari dalam dan luar negeri	5 kl Dalam Negeri, 1 kl Luar Negeri	450,000,000
1.16.15.11, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Kegiatan dalam program	9 kegiatan, 9 laporan	17,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.16.16, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			303,000,000
1.16.16.03, Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	- Calon Investor, Investor dan masyarakat secara umum	1 master 50 buku	96,000,000
1.16.16.04, Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	- Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Instansi swasta, calon investor dan masyarakat secara umum	1 master laporan	54,000,000
1.16.16.09, Monitoring, evaluasi dan pelaporan		100 %	15,000,000
1.16.16.12, Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi	- Instansi di Lingkungan Pemerintah Prov. DIY, Pihak Swasata, Asosiasi dan lembaga lain	1 pertemuan	63,000,000
1.16.16.13, Penyusunan Data Base Potensi Investasi	- Calon Investor, Investor dan masyarakat secara umum	1 master 50 buku	75,000,000
1.16.17, Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah			72,000,000
1.16.17.01, Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi		100 %	72,000,000
1.23.15, Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah			277,000,000
1.23.15.02, Pengolahan, updating dana analisis data dan statistik daerah	- Terselenggaranya Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	100 %	176,000,000
1.23.15.04, Pengolahan, upadating dan analisis data PDRB	- Terselenggaranya Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB	100 %	101,000,000
x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,428,000,000
x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- SKPD BAPEDA Provinsi DIY	100%	14,000,000
x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	- SKPD BAPEDA Provinsi DIY	100%	103,000,000
x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	- SKPD BAPEDA Provinsi DIY	100%	4,000,000
x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- SKPD BAPEDA Provinsi DIY	100%	24,000,000
x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- SKPD BAPEDA Provinsi DIY	100%	71,000,000
x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	- SKPD BAPEDA Provinsi DIY	100%	78,000,000
x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- SKPD BAPEDA Provinsi DIY	100%	35,000,000
x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	- SKPD BAPEDA Provinsi DIY	100%	8,000,000
x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- SKPD BAPEDA Provinsi DIY	100%	82,000,000
x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- SKPD BAPEDA Provinsi DIY	100%	7,000,000
x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an	- SKPD BAPEDA Provinsi DIY	100%	17,000,000
x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	- SKPD BAPEDA Provinsi DIY	100%	109,000,000
x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- SKPD BAPEDA Provinsi DIY	100%	876,000,000
x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			424,000,000
x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor	- SKPD BAPEDA Provinsi DIY	100%	30,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur	- SKPD BAPEDA Provinsi DIY	100%	40,000,000
x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- SKPD BAPEDA Provinsi DIY	100%	25,000,000
x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- SKPD BAPEDA Provinsi DIY	100%	277,000,000
x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	- SKPD BAPEDA Provinsi DIY	100%	17,000,000
x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- SKPD BAPEDA Provinsi DIY	100%	18,000,000
x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	- SKPD BAPEDA Provinsi DIY	100%	10,000,000
x.xx.02.44, Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas /operasional	- SKPD BAPEDA Provinsi DIY	100%	7,000,000
x.xx.05, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			59,000,000
x.xx.05.01, Pendidikan dan pelatihan formal	- SKPD BAPEDA Provinsi DIY	100%	37,000,000
x.xx.05.02, Sosialisasi peraturan perundang-undangan	- SKPD BAPEDA Provinsi DIY	100%	22,000,000
x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			106,000,000
x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- SKPD BAPEDA Provinsi DIY	100%	80,000,000
x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran	- SKPD BAPEDA Provinsi DIY	100%	5,000,000
x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- SKPD BAPEDA Provinsi DIY	100%	21,000,000
DINAS PERHUBUNGAN			105,794,297,195
BELANJA TIDAK LANGSUNG			8,061,474,000
BELANJA LANGSUNG			97,732,823,195
1.07.15, Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan			3,805,217,220
1.07.15.01, Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dhub Prov. DIY - Pengguna Jasa Transportasi	100%	82,092,800
1.07.15.03, Koordinasi dalam pembangunan prasaana dan fasilitas perhubungan	- Instansi/Lembaga yang bergerak di sektor Transportasi	70%	40,000,000
1.07.15.05, Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang	- Lalu-lintas angkutan barang	1 unit	3,000,000,000
1.07.15.06, Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai,danau,dan penyeberangan	- Kapal Nelayan	200 kapal	21,830,750
1.07.15.09, Survei Lalu Lintas	- Kinerja Lalu-lintas	40 ruas, 30 simpng, 36,86 km, 2000 sis	223,441,570
1.07.15.10, Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang	- Masyarakat yang berdomisili di dekat prasarana KA dan	500 orang	52,852,100

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
dan Jalan Kereta Api 1.07.15.13, Perencanaan jaringan transportasi	perlintasan sebidang - Angkutan perbatasan	1 dokumen, 1 dokumen	385,000,000
1.07.16, Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ			1,694,121,900
1.07.16.05, Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	- Fasilitas Keselamatan Lalu-lintas di Provinsi DIY	42 unit Traffic Light, 117 unit counting	1,500,000,000
1.07.16.06, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laut dan ASDP	- Sarana dan Prasarana Laut ASDP	1 paket	194,121,900
1.07.17, Program peningkatan pelayanan angkutan			39,734,699,400
1.07.17.01, kegiatan penyuluhan bagi para sopir /juru mudik untuk peningkatan keselamatan penumpang	- Pengemudi angkutan umum	100 orang	114,478,000
1.07.17.05, Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan angkutan umum di jalan raya	- Kendaraan bermotor, angkutan umum, angkutan barang, informasi penegakan hukum	5 shift/hari, 1 unit kend. roda 4, 80 or	827,000,000
1.07.17.10, Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	- Penyedia Jasa Transportasi	1544 armada	250,000,000
1.07.17.12, Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	- Masyarakat Pengguna Jasa Transportasi Umum Trans-Jogja	500000 orang	37,850,137,000
1.07.17.13, Fasilitasi kebijakan dibidang perhubungan	- Penyedia Jasa Transportasi	3241 kendaraan	90,600,400
1.07.17.18, Penegakan Hukum Kelebihan Muatan Barang	- Angkutan Muatan Barang	300 org pengemd angk, 12 bln pen.hk	532,500,000
1.07.17.19, Sosialisasi Prakiraan Musim dan Hujan	- Masyarakat pengguna jasa informasi	80%	69,984,000
1.07.18, Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			43,662,401,300
1.07.18.02, Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	- Provinsi DIY	1 paket	9,950,000,000
1.07.18.04, Pembangunan Poswaskespel	- Kelancaran Lalu-lintas Pelayaran	1 unit SBNP, 1 UNIT Mess, 1 paket ins	378,820,400
1.07.18.05, Pengembangan Bandara	- Bandara Adisutjipto	100%	11,350,006,600
1.07.18.06, Pengadaan tanah (ruislag)	- Bandara Adisutjipto Yogyakarta	18.250 m2	21,983,574,300
1.07.19, Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas			5,056,413,200
1.07.19.01, Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	- Pengguna Lalu-Lintas	Rambu 150 unit, Traffic 2 unit, RPPJ 2	850,000,000
1.07.19.03, Pengadaan pagar pengaman jalan	- Masyarakat Pengguna Lalu-lintas	1000m'	750,000,000
1.07.19.04, Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan	- Masyarakat Pengguna Lalu-lintas	200 unit	1,600,000,000
1.07.19.05, Pos Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perhubungan Udara	- Jumlah Pesawat terbang, Penumpang, Barang dan Tarif	80%	154,011,400
1.07.19.06, Pengaturan dan Pengamanan Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru	- Kondisi Fasilitas Bandar Udara		
	- Tower yang ada di wil. KKOP		
	- arus mudik dan arus balik	Monitoring arus mudik dan arus balik	275,000,000
1.07.19.08, Penjagaan pintu perlintasan sebidang bandara	- Masyarakat yang melintasi perlintasan sebidang	12 bln, 50 buah, 200 m', 3 buah	737,542,100

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
Adi Sucipto			
1.07.19.09, Patroli Keselamatan Pelayaran	- Transportasi laut	1 tahun	191,555,300
1.07.19.10, Pengadaan alat pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi	- Keselamatan Lalu Lintas Jalan	5 unit	498,304,400
1.07.20, Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor			79,428,500
1.07.20.04, Pelaksanaan Registrasi Uji Tipe Rancang Bangun dan Penilaian Fisik Penghapusan Kendaraan Bermotor	- Kendaraan rakitan, kendaraan yang akan dihapuskan	250 kend, 1 unit komputer, 1 unit mes	44,428,500
1.07.20.05, Pengendalian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	- UPT Pengujian kendaraan Bermotor kab/kota se Prov. DIY	5 UPT PKB	35,000,000
x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,542,798,550
x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Dinas Perhubungan Prov. DIY	1.600 Surat	7,051,000
x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	- Dinas Perhubungan Propinsi DIY	12 bulan	212,540,000
x.xx.01.03, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Dinas Perhubungan Propinsi DIY	5 unit	4,895,000
x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	- Dinas Perhubungan Propinsi DIY	45 kend dinas & 20 bus buy the servic	9,425,000
x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Dinas Perhubungan Propinsi DIY	12 bulan	35,100,000
x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Dinas Perhubungan Propinsi DIY	12 bulan	196,428,700
x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Dinas Perhubungan Propinsi DIY	1 Paket	129,694,550
x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Dinas Perhubungan Propinsi DIY	2 Paket	168,413,300
x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	- Dinas Perhubungan Propinsi DIY	1.276 buah	16,004,500
x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Dinas Perhubungan Propinsi DIY	7 unit	50,600,000
x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Dinas Perhubungan Propinsi DIY	13 unit	974,500
x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an	- Dinas Perhubungan Propinsi DIY	144 eksemplar	8,640,000
x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	- Dinas Perhubungan Propinsi DIY	144 eksemplar	36,500,000
x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Dinas Perhubungan Propinsi DIY	4.866 org	603,304,000
x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	- Dinas Perhubungan Propinsi DIY	100%	31,614,000
x.xx.01.29, Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	- Dinas Perhubungan Propinsi DIY	3 org	31,614,000
x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1,901,867,125
x.xx.02.05, Pengadaan kendaraan dinas/operasional	- Dinas PerhubunganProvinsi DIY	100%	606,500,000
x.xx.02.06, Pengadaan perlengkapan rumah jabatan /dinas	- Dinas Perhubungan Provinsi DIY	2 unit	3,740,000
x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Dinas Perhubungan Propinsi DIY	14 unit, 830.275 m2, 717 m2	305,347,125
x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	- Dinas Perhubungan Propinsi DIY	22 + 22 + 1 Kendaraan	689,234,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
dinas/operasional			
x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	- Dinas Perhubungan Propinsi DIY	110 unit	20,000,000
x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- Dinas Perhubungan Propinsi DIY	121 unit	228,600,000
x.xx.02.60, Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi	- Masyarakat yang menggunakan informasi Perhubungan DIY	70%	48,446,000
x.xx.03, Program peningkatan disiplin aparatur			107,100,000
x.xx.03.02, Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya	- Dinas Perhubungan Propinsi DIY	153 orang	107,100,000
x.xx.05, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			70,823,450
x.xx.05.01, Pendidikan dan pelatihan formal	- Dinas Perhubungan Propinsi DIY	54 orang	70,823,450
x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			77,952,550
x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perhubungan Prop DIY	4 laporan	56,650,000
x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran	- Dinas Perhubungan Propinsi DIY	1 Paket	7,610,275
x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	- Dinas Perhubungan Propinsi DIY	1 Paket	7,240,000
x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- Dinas Perhubungan Propinsi DIY	1 Paket	6,452,275
BAPEDALDA			11,994,098,000
BELANJA TIDAK LANGSUNG			2,629,598,000
BELANJA LANGSUNG			9,364,500,000
1.08.15, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			225,000,000
1.08.15.05, Pengembangan teknoogi pengolahan persampahan	- Masyarakat perkotaan	1 dok; 4 unit	100,000,000
1.08.15.11, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	- Masyarakat	110 orang	125,000,000
1.08.16, Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup			3,604,000,000
1.08.16.01, Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	- Masyarakat perkotaan	4 Kab/ 1 kota	150,000,000
1.08.16.02, Koordinasi penilaian langit biru	- Masyarakat, aparatur dan dunia usaha	1 kali rakor; Bimtek 40 orang	44,000,000
1.08.16.03, Pemantauan kualitas lingkungan	- Kualitas udara, kualitas air sumur, kualitas air sungai dan kualitas air laut	224 titik/ 804 sample	400,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.08.16.04, Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH	- Pemrakarsa Dunia Usaha / kegiatan	40 Usaha/Kegiatan; 250 peserta ; 5 ka	175,000,000
1.08.16.06, Pengelolaan B3 dan Limbah B3	- Dunia Usaha	25 kegiatna usaha, 1 dokumen	150,000,000
1.08.16.07, Pengkajian dampak lingkungan	- Pemrakarsa dunia usaha / kegiatan	5 dokumen	165,000,000
1.08.16.10, Pengelolaan Prokasih/Superkasih	- Pemrakarsa dunia usaha / kegiatan	1 kali rakor, Bimtek 40 orang, 2 RS	400,000,000
1.08.16.11, Pengembangan produksi ramah lingkungan	- Masyarakat Peduli Lingkungan	2000 ex. leaflet; 5 lokasi	150,000,000
1.08.16.12, Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	- Dunia Usaha / kegiatan	1 dokumen	100,000,000
1.08.16.14, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	- Masyarakat Peduli Lingkungan	6 kali sarasehan; 1500 ex. leaflet; 160	170,000,000
1.08.16.16, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Pelaksana kegiatan Pengendalian dampak lingkungan	3 kali	45,000,000
1.08.16.19, Sinkronisasi program pengelolaan LH di Provinsi DIY	- Masyarakat dan dunia usaha	2 kali	80,000,000
1.08.16.20, Pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup kawasan sungai	- Warga Masyarakat Kawasan Bantaran Sungai	10 lokasi; 1 kl lomba lukis; 500 ex. kale	100,000,000
1.08.16.27, Pembinaan teknis pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, dan DPL	- Pemrakarsa Dunia Usaha / Kegiatan	20 Usaha/ kegiatan; 2 software	175,000,000
1.08.16.28, Pemantapan program adiwiyata	- Dunia pendidikan / sekolah	15 sekolah; 1 dokukumen	350,000,000
1.08.16.29, Pondok pesantren berwawasan lingkungan hidup	- Pondok pesantren	3 kapet	100,000,000
1.08.16.32, Peningkatan kapasitas labotatorium pengujian kualitas lingkungan	- laboratorium lingkungan	15 laboratorium	400,000,000
1.08.16.33, Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium Bapedalda	- Laboratorium Bapedalda	3 paket	300,000,000
1.08.16.34, Penyelesaian sengketa lingkungan hidup	- Pemrakarsa Dunia Usaha / kegiatan	5 kasus	100,000,000
1.08.16.35, Sosialisasi pedoman pengelolaan limbah laboratorium	- Laboratorium Pendidikan	25 lab	50,000,000
1.08.17, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			1,670,000,000
1.08.17.01, Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	- Kelompok Masyarakat	500 unit spah; 300 unit Biopori	600,000,000
1.08.17.02, Pantai dan laut lestari	- Bekas Penambangan bahan galian gol. C	penanaman sepanjang 1000m x 5 m d	125,000,000
1.08.17.06, Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	- Bekas Penambangan bahan galian gol. C	3 ha di kabupaten Bantul dan 3 ha di l	145,000,000
1.08.17.07, Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	- Daerah tangkapan air hujan yang mengalami perubahan fungsi cukup pesat	1dokumen tentang konversi lahan per	230,000,000
1.08.17.08, Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA	- Fluktuasi Muka air tanah/ Sumur dangkal daerah rawan longsor	8 hektar di kabupaten Kulon Progo	150,000,000
1.08.17.09, Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	- Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota	2 kali	75,000,000
1.08.17.10, Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	- Kelompok masyarakat yang peduli terhadap Keanekaragaman Hayati	Terlaksananya up dating data profil Ke	150,000,000
1.08.17.14, Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	- Kelompok Masyarakat, Perorangan, Peduli Lingkungan	4 orang pemenang Kalpataru sesuai ka	120,000,000
1.08.17.17, Pelatihan konservasi air tanah	- Kelompok Masyarakat	Terlaksananya pelatihan konservasi ai	75,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.08.18, Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam			425,000,000
1.08.18.02, Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	- Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota serta pemangku kepentingan	1 dokumen	75,000,000
1.08.18.03, Rehabilitasi hutan dan lahan	- Kelompok Masyarakat	800 batang bibit penghijauan lahan kr	250,000,000
1.08.18.07, Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	- Kelompok Masyarakat	1 orang PKL dan 1 kelompok talahan k	100,000,000
1.08.18, Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam			25,000,000
1.08.18.08, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan	1 dokumen	25,000,000
1.08.19, program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup			1,225,000,000
1.08.19.01, Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	- Masyarakat	7 paket	250,000,000
1.08.19.02, Pengembangan data dan informasi lingkungan	- Para Pemangku Kepentingan	3 paket	250,000,000
1.08.19.04, Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah	- masyarakat	Data Base LH, Pekan LH Nasioanl	275,000,000
1.08.19.12, Penyusunan dan Penertiban Buletin KALPATARU	- Masyarakat	2 edisi	50,000,000
1.08.19.13, Penyusunan Dilaporan Status LH Daerah	- Para pemangku kepentingan	2 paket	75,000,000
1.08.19.14, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Dana Kegiatan Bidang LH	- Kelompok Masyarakat Peduli LH	20 Kelompok Masyarkat	25,000,000
1.08.19.15, Penyusunan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Stategis Provinsi DIY	- Pegunungan Seribu	1 dokumen	300,000,000
1.08.20, Program peningkatan pengendalian polusi			670,000,000
1.08.20.01, Pengujian emisi kendaraan bermotor	- Kendaraan Bermotor	1500 kendaraan	50,000,000
1.08.20.02, Pengujian emisi /polusi udara akibat aktivitas produksi	- Usaha / kegiatan	50 ttk sample	50,000,000
1.08.20.03, Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	- kegiatan/usaha sumber pencemar	85 sample	70,000,000
1.08.20.05, Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	- usaha dan atau kegiatan	2 paket	500,000,000
1.08.24, Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			650,000,000
1.08.24.02, Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH	- Warga Masyarakat untuk 4 Kab/1 Kota	1. Terlaksananya sosialisasi kebijakan	100,000,000
1.08.24.05, Penataan RTH	- Kawasan Perkotaan	1. terlaksananya Penataan RTH di 4 ka	550,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			870,500,000
x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- jasa surat menyurat	100 %	6,000,000
x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	- Jasa Komunikasi dan Listrik	100 %	27,500,000
x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	- Kendaraan bermotor	100%	17,500,000
x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- administrasi keuangan	100%	25,000,000
x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- kebersihan kantor	100%	48,000,000
x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	- tulis kantor	100%	30,000,000
x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- cetakan dan penggandaan	100 %	45,000,000
x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	- penerangan bangunan kantor	100 %	9,000,000
x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	95,000,000
	- peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	95,000,000
x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- peralatan rumah tangga	100%	20,000,000
x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an	- bacaan dan peraturan perundang - undangan	100%	12,500,000
x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	- makanan dan minuman	100 %	15,000,000
x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	400,000,000
x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	- jasa Keamanan	100%	25,000,000
x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1,340,000,000
x.xx.02.05, Pengadaan kendaraan dinas/operasional	- kendaraan dinas	100 %	260,000,000
x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur	- Sarana Prasarana kantor	100 %	20,000,000
x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Gedung Kantor Bapedalda DIY	100 %	100,000,000
x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Kendaraan Dinas Bapedalda DIY	100 %	185,000,000
x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	- Gedung Kantor Bapedalda DIY	100 %	25,000,000
x.xx.02.42, Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	- Gedung Bapedalda DIY	100 %	750,000,000
x.xx.05, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			30,000,000
x.xx.05.01, Pendidikan dan pelatihan formal	- Pegawai Bapedalda DIY	100 %	25,000,000
x.xx.05.03, Bimbingan teknis implementasi peraturan Per-UU-an	- Aparatur Pemerintah	100 %	5,000,000
x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			90,000,000
x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Instansi sektoral	100 %	50,000,000
x.xx.06.02, Penyusunan laporan keuangan semesteran	- laporan Keuangan	100 %	15,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
dan prognosis realisasi anggaran			
x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	- laporan Prognosis	100 %	10,000,000
x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- Laporan Keuangan	100 %	15,000,000
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			9,565,463,000
BELANJA TIDAK LANGSUNG			1,232,272,000
BELANJA LANGSUNG			8,333,191,000
1.11.15, Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan			300,000,000
1.11.15.03, Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	- Kader / Pembina PAUD	480 org, 6 sosialisasi	100,000,000
1.11.15.05, Inisiasi Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri)	- Desa / Kelurahan	4 Desa, 1 Kelurahan	200,000,000
1.11.16, Program penguatan kelembagaan pengarusutaman gender dan anak			1,445,000,000
1.11.16.02, Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	- Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	100%	500,000,000
1.11.16.04, Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	- Intansi/Organisasi Perempuan	90 org.	100,000,000
1.11.16.05, Penguatan kelembagaan pengarusutaman gender dan anak	- Instansi Pemerintah Lembaga Masyarakat. TKPBG, TOrmas, Toga	1 rekomendasi, 1 laporan	100,000,000
1.11.16.06, Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	- Forum KE PUG, Forum PUG Agama, Forum PPE. Forum PKHP, LSM	3 rekomendasi, 1 laporan	150,000,000
1.11.16.07, Evaluasi pelaksanaan PUG	- Instansi Pemerintah, LSM	1 laporan	20,000,000
1.11.16.08, Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	- Web KPP DIY	1 WEB	25,000,000
1.11.16.13, Pemetaan Daerah Rawan Gender	- Kecamatan	1 laporan	125,000,000
1.11.16.14, Pemetaan Nilai Budaya Yang Mendukung Peningkatan Kualitas Hidup	- Kecamatan	1 laporan	125,000,000
1.11.16.15, Pemetaan Wilayah Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	- Kecamatan	1 laporan	100,000,000
1.11.16.16, Analisis dan Sosialisasi Data Terpilah	- Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Ekonomi	1 laporan	200,000,000
1.11.17, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			900,000,000
1.11.17.02, Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan korban KDRT	- Perangkat Kelurahan, Guru BK, PSM, PKK	1365 orang	200,000,000
1.11.17.04, Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan	- TP PKK Prov Kabupaten Kota	100 orang	50,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
Buta Aksara Perempuan (PBAP)			
1.11.17.08, Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	- Instansi/lembaga/LSM/Masyarakat/Anak	1365 orang	350,000,000
1.11.17.10, Penyelenggaraan Gerakan Sayang Ibu	- Satuan Tugas GSI Kecamatan dan Desa	250 orang, 1 kecamatan	100,000,000
1.11.17.11, Membangun Kreativitas Anak Dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak	- Anak-anak	200 Anak	200,000,000
1.11.18, Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan			1,850,000,000
1.11.18.01, Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	- Organisasi Perempuan	210 orang	100,000,000
1.11.18.02, Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	- Organisasi Politik, Legislatif,	200 orang	350,000,000
1.11.18.04, Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	- PST Pelatihan manajemen usaha th 2007 dan 2008	300 orang	500,000,000
1.11.18.05, Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan	- UUPKS, UP2K, Perempuan Pengusaha Kecil dibawah	50 Kelompok, 50 orang	200,000,000
1.11.18.07, Sarasehan Hari Ibu, Kartini dan Peringatan Hari Kartini	- Masyarakat, Organisasi Perempuan	2 Sarasehan 1 puncak	100,000,000
1.11.18.09, Pelatihan dan Pendidikan Politik Berwawasan Gender	- ORPOL/Organisasi Perempuan	100 orang	300,000,000
1.11.18.11, Pelatihan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Ibu Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Ekonomi dan Pendapatan Keluarga	- PKK	150 orang	250,000,000
1.11.18.12, Gerakan Perempuan Peduli Lingkungan	- Ibu rumah tangga	50 orang	50,000,000
1.12.15, Program keluarga Berencana			175,000,000
1.12.15.02, Pelayanan KIE	- tersedianya materi pelayanan KB	100 buah	50,000,000
1.12.15.03, Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	- Masyarakat	50 orang	25,000,000
1.12.15.04, Promosi Pelayanan KHIBA	- Kader, Toga, Tomas	200 orang	75,000,000
1.12.15.05, Pembinaan keluarga berencana	- Peserta KB	30 orang	25,000,000
1.12.16, Program Kesehatan Reproduksi Remaja			225,000,000
1.12.16.01, Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	- Kelompok Remaja, Karang taruna, Pelajar	150 orang	100,000,000
1.12.16.02, Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat	- LSM, Kecamatan	10 LSM, 78 orang	125,000,000
1.12.18, Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri			100,000,000
1.12.18.01, Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	- Kelompok masyarakat, yandu - masyarakat peduli KB	100 orang 10 pkt	50,000,000 50,000,000
1.12.19, Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat			105,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.12.19.01, Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	- masyarakat	150 orang	105,000,000
1.12.20, Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR			145,000,000
1.12.20.02, Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	- Kelompok remaja, pelajar - tomas, toga, instansi terkait	150 orang 1 bh forum	120,000,000 25,000,000
1.12.24, Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu -PADU			100,000,000
1.12.24.01, Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	- Organisasi Perempuan, masyarakat, instansi	150 orang	100,000,000
1.22.15, Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan			1,039,591,000
1.22.15.01, Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan Melalui Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) & kader	- terkoordinasinya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	5 Kabupaten/Kota	779,591,000
1.22.15.02, Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat	- KPMD/PMD	50 orang	110,000,000
1.22.15.03, Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa	- Masyarakat	250 orang	150,000,000
1.22.17, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			600,000,000
1.22.17.02, Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	- terbangunnya TMMD 2008	10 Desa	575,000,000
1.22.17.04, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	- terlaksananya monev pemberdayaan desa	1 kegiatan	25,000,000
1.22.19, Program peningkatan peran perempuan di perdesaan			25,000,000
1.22.19.01, Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha bidang usaha ekonomi produktif	- Perempuan	30 orang	25,000,000
x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			612,600,000
x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Instansi/lembga terkait	3250 Surat	2,400,000
x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	- tersedianya kebutuhan listrik, telepon, internet dan air	12 Bulan	55,000,000
x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	- terbayarnya STNK 2 unit Kendaraan Roda 4 dan 2 unit Kendaraan Roda 2	4 bh STNK	300,000
x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- lancarnya administrasi keuangan dan barang kantor	12 Orang	23,400,000
x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- terpeliharanya kebersihan kantor	2 Unit / 12 bulan	49,600,000
x.xx.01.09, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- terpeliharanya peralatan kerja kantor	15 PC, 2 LCD, 2 SOund, 1 Fax, 5 Mesin	10,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	- tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	32,500,000
x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	30,000,000
x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	- tersedianya persediaan komponen listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	8,000,000
x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- tersedianya peralatan pendukung kerja kantor	1 PC, 1 Sound Sistem, 1 Video, 1 Digit	55,000,000
x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an	- tersedianya buku bacaan harian dan peraturan Per-UU-an	3 Koran, 4 majalah, 10 bk bacaan	6,500,000
x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	279,900,000
x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	- tersedianya jasa keamanan kantor	5 Orang	60,000,000
x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			676,000,000
x.xx.02.03, Pembangunan gedung kantor	- tersedianya ruangan dan tempat untuk korban kekerasan Perempuan	200 m2	500,000,000
x.xx.02.05, Pengadaan kendaraan dinas/operasional	- tersedianya sarana mobilitas kantor	3 bh sepeda motor	49,500,000
x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- terpeliharanya 2 unit gedung kantor	2 unit Gedung Kantor	65,000,000
x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- terpeliharanya sarana mobilitas kantor	2 Roda empat, 2 roda dua	50,000,000
x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	- terpeliharanya sarana perlengkapan gedung kantor	17 AC, 2 mesin pompa	6,000,000
x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	- terpeliharanya mebelair kantor	15 Meja Kursi, 4 almari	5,500,000
x.xx.05, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			15,000,000
x.xx.05.07, Pendidikan dan Pelatihan Lain-lain	- tersedianya SDM yang mandiri dan profesional	10 orang	15,000,000
x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			20,000,000
x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6 Laporan	20,000,000
DINAS SOSIAL			57,960,925,385
BELANJA TIDAK LANGSUNG			12,586,815,000
BELANJA LANGSUNG			45,374,110,385
1.13.15, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			6,402,753,368
1.13.15.02, Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	- USEP Keluarga Miskin, KUBE FM, KUBE KMM, KUBE PACA, Perbaikan Rumah Kel. Miskin, terlaksanan monev program, Pengembangan USEP KM, Lembaga Keuangan Mikro (LKM).	1800 KK, 34 Klp, 200 KK, 1 Keg, 10 Kl	5,916,689,968
1.13.15.05, Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	- USEP Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	420 orang	486,063,400

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.13.16, Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial			6,715,660,400
1.13.16.03, Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	- Terlaksananya Penyuluhan Sosial Melalui Kesenian Tradisional Dan Program Askesos Dan Bksp	24 LOK	154,480,000
1.13.16.05, Pelayanan psikologi bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	- Wanita Korban Tindak Kekerasan Yang Mendapatkan Pelayanan Psikososial	15 ORG	159,000,000
1.13.16.07, Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	- Terlaksananya Pemberian Bantuan Permakanan Bagi Lu Terlantar, Anak Cacat, Eks Kronis, Anak Terlantar, Pengasramaan Murid Sdlb, Bimb Sos Lu Terlantar, Biaya Pendidikan Bagi At	1700 LU, 2250 AT, 300 AC, 20 EKS KRC	4,983,408,500
1.13.16.08, Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS	- Terlaksananya Pemutakhiran Data Pmks Dan Psks	438 DS/KEL	505,792,300
1.13.16.09, Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	- Terlaksananya Raker Program Bidang Kesejahteraan Sosial	35 ORANG, 2 KL	52,130,000
1.13.16.10, Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	- Terlaksananya Pemberian Bantuan Bak Pah, Pemulangan Pmks, Pemantapan Tagana	120 BAK PAH, 200 ORG	855,549,600
1.13.16.11, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Terlaksananya Monev Program Pelayanan Dan Rehab Kesos	1 KEG	5,300,000
1.13.17, Program Pembinaan Anak Terlantar			654,748,300
1.13.17.02, Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	- Terlaksananya Rekomendasi Adopsi At, Pelat Uep At, Pelat Uep Anjal, Pelat At Di Blpt, Pelet Pemberdayaan Bago Ortu At	20 BALITA, 20 ANJAL, 120 AT, 30 ORT	651,998,300
1.13.17.06, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Terlaksananya Monev Program Pembinaan At	3 LOK	2,750,000
1.13.18, Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma			451,224,000
1.13.18.03, Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	- Terlaksananya Bimb Sos Dan Ketrampilan Bagi Eks Penderita Sakit Jiwa, Pengembangan Eks Sakit Jiwa, Pelat Sistim Isyarat Bahasa Indonesia, Dan Rehabilitasi Sosial Paca Di Lbk	50 EKS SAKIT JIWA, 30 PACA	288,680,000
1.13.18.04, Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	- Terlaksananya Pengembangan Usaha Mandiri Paca, Revitalisasi Paca	60 PACA	159,694,000
1.13.18.10, Monitoring dan Evaluasi Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	- Terlaksananya Monev Program Pembinaan Para Paca Dan Trauma	3 LOK	2,850,000
1.13.19, Program pembinaan panti asuhan / panti jompo			3,782,607,325
1.13.19.04, Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan / jompo	- Terlaksananya Pelayanan, Rehabilitasi Dan Pelatihan Bagi Penghuni Psbn, Pskw, Psbk, Psbr, Psaa Dan Pstw	195 AT, 50 PACA NETRA, 160 LU, 50 B	3,782,607,325

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.13.20, Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,PSK,narkoba dan penyakit sosial lainnya)			1,102,782,400
1.13.20.01, Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi eks Penyandang Penyakit Sosial	- Terlaksananya Bimbingan Dan Ketrampilan Bagi Tuna Susila, Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Napza Dalam Panti, Korban Napza Luar Panti, Bi,Bingan Dan Ketrampilan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan, Pelatihan Kader Rbm	20 WTS, 60 NAPZA 25 EKS NAPI, 30 R	1,098,782,400
1.13.20.05, Monitoring dan Evaluasi Program Pembinaan Eks Penyandang Cacat Sosial	- Terlaksananya Monev Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	4 LOK	4,000,000
1.13.21, Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial			2,357,457,000
1.13.21.01, Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	- Terlaksananya Pembinaan Pub Dan Ugb, Sarasehan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Forum Komunikasi Pengelola Tmp, Mpp Dan Mpn, Penyusunan Buku2 Sejarah Dan Kepahlawanan, Penyusunan Film Dokumenter Kepahlawanan, Ziarah Wisata,Fasilitasi Kesejahteraan Kel.Pahlawan	PUB DAN UGB 25 LOK, SARASEHAN 30	981,801,000
1.13.21.02, Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	- Terlaksananya Bimbingan Psm, Pengurus Orsos, Bantuan Operasional Bk3s,Bimbingan Manajemen Orsos Dibidang Uks, Bimbingan Uep Orsos Dibidang Uks, Forum Diskusi Pembangunan Kesos Antar Stakholder, Terbentuknya Himpunan Wanita Paca, Bantuan Operasional Lembag	78 PSM, 10 ORSOS, 20 KT,50 WANITA	1,286,436,000
1.13.21.04, Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	- Terlaksananya Binjut Askesos Dan Bksp, Dan Peningkatan Pengelolaan Program Jaminan Sosial	410 ORG	89,220,000
1.13.22, Program Pengembangan Kehidupan Beragama			3,974,692,500
1.13.22.01, Fasilitasi Penyelenggaraan STQ DIY dan Pengiriman Kafilah STQ Tk. Nasional Provinsi DIY	- Terlaksananya Stq Dan Tc	STQ 250 ORG, TC 60 ORG	834,893,250
1.13.22.02, Pembinaan Kerukunan Lintas Umat Beragama	- Terlaksananya Pembinaan Iman Pns/Tni/Polri Prop.Diy	8200 ORG	186,194,000
1.13.22.04, Fasilitasi Pembinaan Mental Agama	- Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	4750 ORG	436,430,750
1.13.22.06, Fasilitasi Gerakan Pemahaman Isi Kandungan Al-Quran	- Terlaksananya Gerakan Pemahaman Isi Kandungan Alquran	344 ORG	304,267,000
1.13.22.07, Forum Komunikasi Antar Paroki se Propinsi DIY	- Terlaksananya Forum Komunikasi Antar Paroki Se Prop.Diy	28 PAROKI, 160 ORG	68,481,500
1.13.22.11, Pembinaan Iman Remaja dan Pengembangan Musik	- Terlaksananya Pembinaan Iman Anak,Remaja Dan Pendalaman Kitab Suci, Paduan Suara Gerejani, Workshorp Pengembangan Musik Gerejani	960 ORG	60,080,000
1.13.22.12, Fasilitasi Maulud Nusantara	- Terlaksananya Kontingen Festival Maulud Nusantara Tk Nas	100 ORG	120,834,000
1.13.22.13, Forum Komunikasi Antar Pimpinan Dinominasi dan Pembinaan Iman Agama Kristen	- Pimpinan dinominasi, umat beragama Kristen	200 org, 56 org.	103,935,000
1.13.22.14, Fasilitasi Forum Musyawarah Intern Majelis dan Pendalaman Agama Budha	- Umat dan tokoh Agama Budha	120 orang	69,450,000
1.13.22.15, Fasilitasi Penyelenggaraan Peswarawi Prov. DIY	- Kontingen Pesparawi	90 orang	622,172,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
dan Pengiriman Kontingen Peswarawi TK Nasional Tahun 2009 di Samarinda			
1.13.22.16, Fasilitas Pengiriman Kontingen Festival Masjid Bersejarah dan Keraton Nusantara	- Kontingen Festival Masjid Bersejarah dan Kraton Nusantara	510 orang	552,980,000
1.13.22.17, Fasilitas Penyelenggaraan Karya Bakti Sosial Keagamaan Tk. Prov. DIY	- Tokoh dan Umat 5 Agama (Islam, Kresten, Katholik, Hindu, Budha)	300 orang	160,863,500
1.13.22.18, Fasilitas Penyelenggaraan Optimalisasi Pemberdayaan Pekerja Sosial Kemasyarakatan	- Kaum Rois	300 orang	120,678,500
1.13.22.19, Fasilitas Penyelenggaraan Festival Seni Baca Tripitaka	- Umat Budha	3009 orang	333,433,000
x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			13,482,345,440
x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Tersedianya kelengkapan surat menyurat	100%	6,749,057,720
x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	- Terlaksananya tertib administrasi jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	594,920,000
x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	- Terawatnya kendaraan untuk operasional kedinasan	100%	12,310,000
x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan	100%	177,480,000
x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Terawatnya Ruang Kerja, R.Rapat Km/Wc Dan Halaman Kantor	100%	342,035,800
x.xx.01.09, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Pemeliharaan Dan Service Peralatan Kerja	100%	114,470,000
x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	199,218,250
x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Tersedianya Barang Cetak Dan Penggandaan	100%	183,323,870
x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	- Tersedianya Alat Listrik Dan Elektronika	100%	137,551,350
x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	100%	365,874,200
x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Tersedianya Bahan Bacaan Dan Buku-Buku Perpustakaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	50,182,000
x.xx.01.16, Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Tersedianya Kebutuhan Logistik Kantor	100%	3,174,822,250
x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya Makanan Dan Minuman Dalam Rapat Dinas Dan Jamuan Makan Tamu	100%	265,725,000
x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Terlaksananya Kegiatan Rakor Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Serta Terlaksananya Koordinasi Dengan Uptd/Kab/Kota/Kec/Desa	100%	531,033,000
x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	- Tersedianya Tenaga Keamanan Kantor	100%	369,506,000
x.xx.01.20, Penyediaan Jasa Paramedis	- Tersedianya Jasa Paramedis	100%	174,836,000
x.xx.01.21, Pemulangan dan Pemakaman Orang Terlantar	- Terbantunya Orang Terlantar Yang Kehabisan Bekal, Terawatnya Jenasah Terlantar/Gelandangan	100%	40,000,000
x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			6,273,519,652
x.xx.02.03, Pembangunan gedung kantor	- Terlaksananya pembangunan gedung kantor	100%	1,211,062,902

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor	- Tersedianya peralatan gedung kantor serta penambahan daya listrik	100%	1,221,510,000
x.xx.02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor	- Tersedianya peralatan gedung kantor	100%	308,008,750
x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur	- Terlaksananya pengadaan mebeleur PSBK dan PSTW	100%	53,332,100
x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Terselenggaranya pemeliharaan gedung dan lingk. kantor	100%	649,662,500
x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Terawatnya kendaraan operasional dinas	100%	774,993,100
x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	- Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	100%	153,045,800
x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- Terpeliharanya peralatan gedung kantor dan peralatan rumah tangga	100%	36,200,000
x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	- Terpeliharanya mebeleur	100%	58,875,000
x.xx.02.42, Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	- Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	100%	1,806,829,500
x.xx.03, Program peningkatan disiplin aparatur			10,000,000
x.xx.03.03, Pengadaan pakaian kerja lapangan	- Tersedianya pakaian kerja lapangan	100%	10,000,000
x.xx.05, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			149,420,000
x.xx.05.01, Pendidikan dan pelatihan formal	- Terlaksananya pelatihan editing vidio, editing audio serta teknis komputer	6 orang	16,000,000
x.xx.05.03, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	- Terlaksananya penilaian angka kredit bagi pekerja fungsional dan forum pekerja sosial fungsional	100 orang	133,420,000
x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			16,900,000
x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Tersusunnya laporan kinerja dinas	12 bln	7,800,000
x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	12 bln	9,100,000
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			53,426,596,000
BELANJA TIDAK LANGSUNG			14,648,676,000
BELANJA LANGSUNG			38,777,920,000
1.14.15, Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja			10,318,018,000
1.14.15.09, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Kegiatan program Peningkatan Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja	1 Keg	40,000,000
1.14.15.11, Fasilitasi untuk kelompok kerja produktif (KKP)	- Kelompok Kerja Produktif (KKP)	30 klpk	124,750,000
1.14.15.12, Fasilitasi peserta pemagangan ke jepang	- Masyarakat pencari kerja	100 orang	483,500,000
1.14.15.13, Fasilitasi peserta pemagangan ke perusahaan untuk Alumni pelatihan BLK/LPK/LLK	- Alumni BLK/LPK se Prov DIY	200 org	622,763,000
1.14.15.14, Fasilitasi peningkatan ketrampilan bagi	- Kelompok kerja produktif bidang modiste	15 klpk/100 org	227,500,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
kelompok kerja modiste			
1.14.15.15, Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	- Pencari kerja yang terdaftar di Disnakertrans Kab / Kota	150 org	240,000,000
1.14.15.16, Pengembangan produktivitas melalui pelatihan kewirausahaan	- Pencari kerja, pemuda putus sekolah, punya usaha kecil-kecilan	300 org	772,645,000
1.14.15.17, Pengukuran produktivitas kerja	- Karyawan perusahaan industri manufaktur	250 org	75,000,000
1.14.15.18, Pelatihan Ketrampilan Untuk Penempatan	- Masyarakat pencari kerja	200 org / 10 akt	630,000,000
1.14.15.19, Pelatihan Ketrampilan Untuk Tenaga Kerja Mandiri	- Masyarakat pencari kerja	100 org / 5 akt	541,960,000
1.14.15.21, Pelatihan ketrampilan swadaya	- Masyarakat pencari kerja	260 org / 13 akt	390,000,000
1.14.15.23, Pelatihan ketrampilan keliling mobil training unit	- Masyarakat pencari kerja	120 org / 6 akt	503,250,000
1.14.15.24, Training Need Assesment	- Kab / kota	1 paket	70,000,000
1.14.15.27, Sosialisasi program pemagangan ke Jepang	- Masyarakat pencari kerja	100 org	62,000,000
1.14.15.28, Pelatihan pra seleksi pemagangan ke Jepang	- Masyarakat pencari kerja	200 org	84,500,000
1.14.15.29, Sosialisasi program pemagangan di perusahaan (untuk perusahaan tempat magang)	- Perusahaan	100 org	40,000,000
1.14.15.30, Pengembangan jejaring pemagangan	- Perusahaan	20 perush	20,000,000
1.14.15.31, Pemberdayaan alumni program pemagangan ke Jepang	- Mantan peserta magang Jepang	50 perush	128,300,000
1.14.15.33, Sertifikasi tenaga kerja	- Pekerja dan masyarakat pencari kerja	50 org	196,000,000
1.14.15.34, Sosialisasi program 3 in 1	- Lembaga-Lembaga Pelatihan	50 org	210,000,000
1.14.15.35, Bimtek akreditasi LKP	- Lembaga-lembaga pelatihan	20 org	62,000,000
1.14.15.36, Penyusunan modul CBT	- Pekerja dan masyarakat pencari kerja	1 Paket	84,000,000
1.14.15.37, Akreditasi LKP	- Lembaga - lembaga pelatihan	20 LPK	180,000,000
1.14.15.38, Fasilitasi rakor/munas DPD HILSI dan AISI	- Lembaga-lembaga pelatihan dan instruktur	2 paket	110,000,000
1.14.15.39, Sertifikasi uji kompetensi tenaga kerja di bidang otomotif, pariwisata dan listrik	- Masyarakat pencari kerja	60 org / 3 akt	130,000,000
1.14.15.40, Pelatihan keterampilan institusional bagi pencari kerja	- Masyarakat pencari kerja	60 org / 3 akt	200,000,000
1.14.15.41, Pelatihan keterampilan teknologi tepat guna untuk usaha mandiri	- Masyarakat pencari kerja	40 org / 2 akt	413,250,000
1.14.15.42, Pelatihan keterampilan kelompok usaha mandiri dibidang budidaya pertanian / perternakan	- Masyarakat pencari kerja	40 org / 2 akt	110,000,000
1.14.15.43, Pelatihan keterampilan bidang teknisi hape bagi pencari kerja	- Masyarakat pencari kerja	60 org / 3 akt	150,000,000
1.14.15.44, Fasilitasi OJT ke perusahaan bagi siswa pelatihan BLK	- Masyarakat pencari kerja	60 org / 3 akt	150,000,000
1.14.15.45, Forum komunikasi informasi edukasi pengembangan jejaring sistem informasi manajemen pemasaran pelatihan dan penempatan tenaga kerja ihan BLK	- Pengusaha dan masyarakat pencari kerja	60 org / 3 akt	75,000,000
1.14.15.46, Promosi pelatihan keterampilan tenaga kerja	- Program Pelatihan ketrampilan di BLK Yogyakarta	1 paket	30,000,000
1.14.15.47, Pengembangan Produktivitas melalui Pemberdayaan Asosiasi Produktivitas Nasional Indonesia (APNI)	- APNI di masyarakat dan perusahaan / instansi	50 Lembaga	125,000,000
1.14.15.48, Pengembangan Produktivitas melalui TOT Kader	- Kader-kader yang telah dilatih produktivitas	50 org	160,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
Produktivitas di Kabupaten / Kota			
1.14.15.49, Pelatihan Manajemen Usaha dan Peningkatan Produktivitas Bagi Kelompok Usaha di Pedesaan	- Pemuda putus sekolah / penganggur yang tergabung dalam kelompok Karang Trauna di pedesaan	150 or	300,000,000
1.14.15.50, Pelatihan Manajemen wirausaha budidaya Ikan Air Tawar bagi Petani Ikan Air Tawar	- Petani ikan, pemuda putus sekolah / penganggur yang tergabung dalam kelompok Karang Trauna	100 org	230,000,000
1.14.15.51, Pelatihan Manajemen wirausaha budidaya pertanian tanaman pangan bagi petani tanaman pangan	- petani tanaman pangan, pemuda putus sekolah / penganggur yang tergabung dalam kelompok Karang Taruna di pedesaan	300 org	690,000,000
1.14.15.52, Pelatihan manajemen usaha melalui peningkatan motivasi dan produktivitas bagi Pemuda Putus Sekolah di desa Produktif	- Pencari kerja pemuda putus sekolah	350 org	551,600,000
1.14.15.53, Pelatihan Manajemen Partisipatori melalui Peningkatan Produktivitas bagi Perangkat Desa di Desa Produktif	- Perangkat desa yang menangani pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	50 org	65,000,000
1.14.15.54, Pelatihan Manajemen Usaha dan Produktivitas bagi UKM di Pedesaan	- UKM di pedesaan	100 org	230,000,000
1.14.15.55, Pelatihan Produktivitas kerja bagi Pengembangan Usaha Swadaya Masyarakat	- Pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	250 org	500,000,000
1.14.15.56, Pelatihan manajemen kewirausahaan budidaya tanaman obat bagi kelompok tani tanaman obat	- Petani tanaman obat, pemuda putus sekolah/penganggur yang tergabung dalam kelompok Karang Taruna	50 org	115,000,000
1.14.15.57, Koordinasi kebutuhan tenaga ahli dan tenaga kerja terampil di kota industri	- SKPD Provinsi, Kab/Kota, dan luar daerah	1 Paket	85,000,000
1.14.15.58, Pelatihan keterampilan usaha mandiri dibidang teknologi pertanian / perternakan	- Masyarakat pencari kerja	40 org / 2 akt	110,000,000
1.14.16, Program Peningkatan Kesempatan Kerja			11,603,559,000
1.14.16.07, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Kegiatan program peningkatan kesempatan kerja	1 Kgt	55,000,000
1.14.16.08, Pembentukan kelompok usaha melalui perluasan kerja sistem padat karya (PKSPK) dan pendampingan	- Penganggur dan setengah penganggur (pencaker)	300 orang/15 lokasi	1,050,000,000
1.14.16.09, Bimbingan usaha bagi Pencaker lulusan SMK	- Lulusan SMK	180 orang/6 akt/30 KUB	850,000,000
1.14.16.10, Pembentukan wirausaha baru melalui pendayagunaan tenaga kerja pemuda mandiri profesional (TKPMP) dan pendampingan	- Lulusan S1. dan S2	150 orang/5 Akt	700,000,000
1.14.16.11, Pembentukan wirausaha baru melalui pendayagunaan tenaga kerja mandiri terdidik (TKMT) dan pendampingan	- Lulusan SLTA	150 orang/5 Akt	700,000,000
1.14.16.12, Pendayagunaan tenaga kerja sukarela (TKS) dan pendampingan	- Lulusan S1 dan S2	120 orang / 4 Akt	600,000,000
1.14.16.13, Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja mandiri sektor informal (TKMSI)	- Kelompok usaha mandiri sektor informal	100 orang	750,000,000
1.14.16.14, Perluasan kesempatan kerja bagi wanita pelaku usaha kecil sektor informal (Grameen Bank)	- Ibu rumah tangga pelaku usaha kecil	150 orang	825,000,000
1.14.16.18, Penyelenggaraan bursa kerja terbuka	- Pencari kerja	7000 Pnpt/90 Prsh.	450,000,000
1.14.16.24, UP dating data ketenagakerjaan dan transmigrasi	- Kelurahan / Desa	100 buku	230,000,000
1.14.16.25, Operasional bursa tenaga kerja on-line	- Pencari kerja dan perusahaan	2000 orang	71,100,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.14.16.26, Fasilitasi purna tenaga kerja Indonesia Wanita (TKI Wanita) Usaha Mandiri	- Purna TKI	100 orang	300,000,000
1.14.16.27, Pemberdayaan Tenaga Kerja akibat PHK	- Tenaga kerja wanita ter-PHK	300 orang / 15 Akt	420,000,000
1.14.16.28, Pembinaan usaha mandiri purna magang Jepang	- Purna magang jepang	25 orang	80,000,000
1.14.16.30, Fasilitasi KKPBI (Kelompok Kerja Produksi Buruh Informal)	- Kelompok Ibu rumah tangga pelaku usaha kecil	100 orang	150,000,000
1.14.16.33, Bimbingan Usaha Berbasis Tepat Guna Bagi Pencaker Lulusan SD dan SLTP	- Penganggur dan Setengah Penganggur	300 orang / 15 Akt	600,000,000
1.14.16.34, Evaluasi Kinerja Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	- Lembaga penempatan swasta	40 Lbg	75,000,000
1.14.16.35, Peningkatan Regulasi di Bidang Ketenagakerjaan	- Tersusunnya Draft raperda.	1 Pkt	150,000,000
1.14.16.36, Kerjasama dan Koordinasi Antar Stake Holders dan Institusi terkait	- Rumusan kesepakatan	1 Pkt	100,000,000
1.14.16.37, Identifikasi Tenaga Kerja Informal di Sepanjang Sungai Progo	- Penambang batu pasir disekitar sungai progo	1 Pkt	88,700,000
1.14.16.38, Pembentukan Wira Usaha Baru (WUB) Purna Penambang Pasir dan Pendampingan	- Purna penambang pasir kali Opak	50 orang	300,000,000
1.14.16.39, Pembinaan dan Fasilitasi Sektor Informal Buruh Gendong dan Kuli Angkut Pasar	- Kelompok buruh gendong dan kuli angkut pasar	50 orang	150,000,000
1.14.16.40, Pembuatan data Base Purna kerja dan UMSI (Usaha Mandiri Sektor Informal) di Provinsi DIY	- Tenaga kerja/Usaha sektor informal	5 Kab/Kota	100,000,000
1.14.16.41, Operasi Layanan KK Berbasis TI (DGS)	- Masyarakat dan perusahaan.	2000 orang	175,000,000
1.14.16.42, Monitoring Kesempatan Kerja Sektor (MKS)	- Instansi sektoral Provinsi DIY	1 buku	250,000,000
1.14.16.43, Pembinaan dan fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKAD	- Pencaker dan penganggur	1000 org	1,240,000,000
1.14.16.44, Fasilitasi Penempatan Penyandang Cacat	- Penyandang cacat	100 org	300,000,000
1.14.16.45, Pembinaan lembaga penempatan swasta	- Lembaga penempatan swasta	200 lbg	350,000,000
1.14.16.46, Penyebaran informasi pasar kerja	- Masyarakat, pengguna tenaga kerja, dan pencari kerja	1 paket	113,759,000
1.14.16.47, Penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah (PTKD)	- Instansi sektoral prov DIY, Disnakertrans Kab/Kota	1 paket	200,000,000
1.14.16.48, Penyusunan rencana kerja pengentasan pengangguran dan ketransmigrasian	- Disnakertrans Prov DIY	1 buku	80,000,000
1.14.16.49, Koordinasi perencanaan pengurangan pengangguran	- SKPD Provinsi dan Kab/Kota maupun luar daerah	1 Buku	100,000,000
1.14.17, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			6,108,872,000
1.14.17.08, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Kegiatan program perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1 Keg	35,000,000
1.14.17.13, Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Norma Ketenagakerjaan dan K3	- Perusahaan yang melanggar norma ketenagakerjaan dan K3 berkurang	10 kasus	75,000,000
1.14.17.14, BIMTEK Calon Ahli K3	- Perusahaan yang ada P2K3 tetapi belum memiliki ahli K3	120 org	100,000,000
1.14.17.15, Pelatihan Sistem Manajemen K3	- Perusahaan yang belum melaksanakan Sistem Manajemen K3 dan yang sudah melaksanakan SMK3 tetapi belum aktif	120 org	150,000,000
1.14.17.16, Pelatihan HIPERKES dan KK Bagi Dokter Perusahaan	- Dokter perusahaan	180 org / 6 akt	330,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.14.17.17, Pelatihan HIPERKES dan KK Bagi Teknisi Perusahaan	- Teknisi perusahaan besar di DIY dan luar DIY	90 org / 3 akt	105,000,000
1.14.17.18, Pelatihan Hiperkes dan KK Bagi Mahasiswa	- Mahasiswa dari luar DIY	210 org / 7 akt	122,500,000
1.14.17.19, Pelatihan Hiperkes dan KK Bagi Tenaga Kerja UKM Rawan Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja	- Tenaga kerja UKM rawan kecelakaan dan penyakit akibat kerja	150 org / 5 akt	120,000,000
1.14.17.20, Pelatihan Hiperkes dan KK Bagi Paramedis	- Perawat	60 org / 2 akt	60,000,000
1.14.17.21, Pembinaan dan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan	- Perusahaan rawan pelanggaran norma ketenagakerjaan	120 Perush	104,650,000
1.14.17.22, Penilaian Nihil Kecelakaan Kerja	- Perusahaan yang mempunyai resiko bahaya tinggi	120 Perush	85,000,000
1.14.17.23, Pemeriksaan dan Pengujian alat-alat K3	- Peralatan K3 yang belum ada ijin operasionalnya	120 Perush	72,000,000
1.14.17.25, Akreditasi Internal Lanjut/Penambahan Parameter	- Akreditasi laboratorium	2 parameter	75,000,000
1.14.17.30, Monitoring Perusahaan Rawan Perselisihan Hubungan Industrial	- Perusahaan rawan perselisihan HI se prov. DIY	180 Persh / 1 Pkt	152,308,000
1.14.17.31, Pelatihan Usaha Produktif Dan Pemberdayaan Bagi Buruh Penghasilan Rendah (Miskin)	- Buruh berpenghasilan rendah	100 orang / 4 Akt	200,000,000
1.14.17.32, Pemberdayaan Buruh Sektor Transportasi	- Lembaga kesejahteraan buruh sektor transportasi	16 Koperasi	200,000,000
1.14.17.33, Pembinaan Buruh Wanita	- Buruh wanita sektor tekstil, sandang dan kulit	100 orang / 4 Akt	250,000,000
1.14.17.34, Pembinaan Penghuni RUSUNAWA Asrama Ledok Code	- Penghuni rusunawa ledok code	90 orang / 2 Akt	150,000,000
1.14.17.35, Pembinaan Kesejahteraan Buruh Gendong	- Buruh gendong di Pasar Beringharjo	300 orang/ 3 Akt	125,000,000
1.14.17.36, Pengujian Lingkungan Kerja dan Pemeriksaan Kesehatan Kerja di Sektor UKM dan Pihak Kerja (di Perusahaan menengah dan besar)	- Perusahaan menengah dan besar	50 Perush	125,000,000
1.14.17.38, Penyuluhan Pembuatan PK, PP Bagi Perusahaan Penyedia Jasa	- Pekerja, Serikat pekerja, Pengusaha, Organisasi pengusaha.	90 orang / 3 Akt	75,000,000
1.14.17.39, Pencegahan PHI melalui Penyuluhan KB Bagi SP/SB	- Pekerja, Serikat Pekerja, Pengusaha, Organisasi pengusaha.	90 orang / 3 Akt	75,000,000
1.14.17.40, Fasilitasi Penyelesaian Kasus PHI	- Perusahaan rawan perselisihan HI	90 orang / 1 Pkt	50,000,000
1.14.17.41, Pelatihan Pencegahan Kecelakaan Kerja dan Bahaya Kebakaran	- Perusahaan yang mempunyai resiko bahaya tinggi	120 org	145,000,000
1.14.17.42, Sosialisasi Perlindungan Hak dan Kewajiban Bagi Tenaga Kerja Wanita	- Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja wanita	60 org	80,000,000
1.14.17.43, Workshop Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Pekerjaan Terburuk Bagi Anak	- Perusahaan yang mempkerjakan anak dibawah umur	50 org	86,250,000
1.14.17.45, Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri	- PJTKI dan TKI yang mau berangkat dan pulang ke/dari luar negeri	60 org	75,000,000
1.14.17.47, Pembinaan dan Pengembangan Serikat Pekerja	- Pekerja, Serikat Pekerja, Pengusaha, Organisasi Pengusaha	180 orang / 6 AKT	131,925,000
1.14.17.49, Pelaksanaan Survey KHL dan Penyusunan UMP DIY Tahun 2010	- Pasar tradisional, Serikat pekerja, Asosiasi pengusaha se Provinsi DIY	1 Pkt	441,190,000
1.14.17.50, Identifikasi Penanggungan UMP Tahun 2010	- Perusahaan penanggung UMP tahun 2010	25 perhn	29,000,000
1.14.17.51, Seminar Pengupahan dan Kesejahteraan Buruh Miskin	- Dewan pengupahan Prtov. DIY, LKS Tripartit Prov. dan Kab./Kota, Pakar KK, Pakar Ekonomi, Depnakertrans.	75 orang / 1 hari	60,000,000
1.14.17.52, Pembinaan dan Perlindungan Hubungan Industrial dan Pengawasan Norma Kerja	- Pegawai pengawas KK (Prov. Kab./Kota dan Prov. lain yang dianggap berhasil) Kab/Kota (pejabat HI dan PTK)	75 orang / 2 hari	218,437,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.14.17.54, Pemasyarakatan HI bagi pelaku/Proses Produksi	- Pekerja, Serikat Pekerja, Pengusaha, Organisasi Pengusaha.	90 orang / 3 Akt	75,000,000
1.14.17.55, Penyebaran Informasi Tata Cara Penyelesaian PHI diluar Pengadilan HI	- Pekerja, Serikat Pekerja, Pengusaha, Organisasi Pengusaha.	1 Pkt / 6 Stasiun Radio	91,000,000
1.14.17.56, Peningkatan kemampuan Teknis bagi Mediator Konsiliator HI dan Penyelesaian PHI	- Mediator, Konsiliator se-DIY.	90 orang / 3 Akt	75,000,000
1.14.17.57, Verifikasi keanggotaan SP/SB dan Penetapan Keterwakilan dalam kelembagaan HI	- SP/SB se DIY	180 Persh / 1 Pkt	137,112,000
1.14.17.58, Peningkatan Pengaturan Syarat Kerja	- Pekerja, Serikat Pekerja, Pengusaha, Organisasi Pengusaha.	90 orang / 3 Akt	75,000,000
1.14.17.59, Pemberian Dorongan Pelaksanaan Negosiasi bagi Pengurus LK Bipartit	- Pekerja, Serikat Pekerja, Pengusaha, Organisasi Pengusaha di Provinsi DIY	90 org / 3 paket	75,000,000
1.14.17.60, Pembinaan dan Fasilitasi Konsiliator HI	- Mediator, Konsiliator se Provinsi DIY	60 org	24,000,000
1.14.17.61, Up Dating data sarana-sarana HI	- Data sarana HI se Provinsi DIY	180 Perush	22,000,000
1.14.17.62, Pembentukan P2K3 dan pemberdayaan P2K3	- Perusahaan yang belum membentuk P2K3 dan yang sudah ada P2K3 tetapi belum aktif sesuai tugas dan fungsinya	120 org	150,000,000
1.14.17.63, Penyebaran informasi wajib lapor ketenagakerjaan	- Perusahaan yang belum melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan (UU no 7 / 1981)	60 org	75,000,000
1.14.17.64, Sosialisasi Jamsostek	- Perusahaan yang belum/sudah mengikuti Jamsostek	60 org	105,000,000
1.14.17.65, Pembinaan dan fasilitasi bagi UMKM	- UMKM	50 UMKM	150,000,000
1.14.17.66, Pelatihan dan fasilitasi alat keselamatan kerja bagi kelompok penderes kelapa Kulon Progo	- Penderes kelapa di Kulon Progo	100 org	200,000,000
1.14.17.67, Pemeriksaan kesehatan bagi buruh gendong, pekerja angkut-angkut, penambang batu kapur dan nelayan	- Buruh gendong, pekerja angkut-angkut, penambang batu kapur, dan nelayan	300 org	75,000,000
1.14.17.68, Penelitian pengaruh paparan debu kayu pada perusahaan furniture	- Pekerja pada perusahaan furniture, pengusaha furniture dan instansi terkait	100 buku	100,000,000
1.14.17.69, Sarasehan kesejahteraan purna kerja	- Pakar purna kerja, BKD/BKN, taspen, asuransi/jaminan purna kerja, pakar pralenan/pakar pangrukti loyo, Dinas Kesehatan, RS Ghrasia, RS Murangan (RS Lanjut Usia)	75 org	166,000,000
1.14.17.70, Pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja bagi teknisi perusahaan (non PAD)	- Teknisi dari perusahaan sedang dan UMKM	90 org / 3 akt	112,500,000
1.14.17.71, Pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja bagi mahasiswa (non PAD)	- Mahasiswa dari DIY	60 org / 2 akt	48,000,000
1.14.17.72, Pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja pada sektor UMKM (non PAD)	- UMKM	40 UKM	250,000,000
2.08.15, Program pengembangan wilayah transmigrasi			2,445,400,000
2.08.15.02, Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	- Pelaku / penyelenggara transmigrasi baik pusat, daerah asal dan daerah transmigran	1 paket	190,000,000
2.08.15.03, Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	- Transmigran asal DI Yogyakarta	5 Paket	850,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
2.08.15.05, Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhanSDM	- Masyarakat di wilayah target group (buruh tani, petani gurem, pengangur) dan Target Area (daerah bencana alam, kritis tandus, daerah aliran sungai)	250 KK	1,125,000,000
2.08.15.06, Monitoring evaluasi dan pelaporan	- Kegiatan program ketransmigrasian	1 Keg	35,000,000
2.08.15.07, Promosi program transmigrasi	- Daerah transmigrasi (Jambi, Sulteng, Kaltim)	1 paket	109,400,000
2.08.15.08, Rintisan dan program pengembangan wilayah transmigrasi	- Provinsi DIY dan luar DIY	1 Keg	136,000,000
2.08.16, Program transmigrasi lokal			260,000,000
2.08.16.03, Perbaikan/pembangunan talud di lokasi tranmigrasi lokal	- Translok Karangtengah	400 m2	260,000,000
2.08.17, Program transmigrasi regional			660,000,000
2.08.17.02, Pelatihan transmigrasi regional	- Masyarakat di wilayah target group (buruh tani, petani gurem, pengangur) dan target area (daerah bencana alam, kritis tandus, daerah aliran sungai)	250 KK	660,000,000
x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,823,506,800
x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Terlaksananya jasa surat menyurat	100%	18,110,000
x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	- Terlaksana dan tersedianya jasa kantor	100%	473,674,000
x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	- Terlaksananya dan tersedianya jasa pemeliharaan perijinan kendaraan	100%	9,182,800
x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Tertib administrasi keuangan	100%	102,217,000
x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Tercapainya kebersihan kantor	100%	275,612,000
x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya barang pakai habis	100%	138,559,000
x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Tersedianya barang cetak	100%	103,928,000
x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	- Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	100%	40,705,000
x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an	- tersedianya bahan bacaan dan peraturan Per-UU-an	100%	18,345,000
x.xx.01.16, Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Tersedianya bahan logistik kantor	100%	11,533,000
x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	- pelayanan penyediaan makanan dan minuman	100%	46,496,000
x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- penyediaan anggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	408,911,000
x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	- terpenuhinya kemandirian gedung kantor	100%	130,234,000
x.xx.01.41, Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	- Tertib administrasi kepegawaian	100%	46,000,000
x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			5,087,823,400
x.xx.02.05, Pengadaan kendaraan dinas/operasional	- Tersedianya kendaraan dinas / operasional	100%	377,500,000
x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor	- Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100%	551,260,000
x.xx.02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor	- Tersedianya sarana peralatan gedung kantor	100%	1,487,646,400
x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur	- Tersedianya sarana dan prasarana mebeleur	100%	274,800,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	100%	548,178,000
x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Terwujudnya sarana dan prasarana kendaraan dinas / operasional	100%	722,239,000
x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	- Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor	100%	56,600,000
x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- Tersedianya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor	100%	142,400,000
x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	- Tersedianya sarana dan prasarana mebeleur kantor	100%	52,200,000
x.xx.02.42, Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	- Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	100%	875,000,000
x.xx.05, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			352,918,800
x.xx.05.01, Pendidikan dan pelatihan formal	- Pendidikan dan Pelatihan teknis fungsional bagi pegawai	141 org	280,329,000
x.xx.05.02, Sosialisasi peraturan perundang-undangan	- Pegawai	74 org	30,000,000
x.xx.05.18, Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	- Pejabat fungsional	74 org	42,589,800
x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			117,822,000
x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran	- Tersusunnya laporan keuangan semesteran	100%	34,500,000
x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	- Tersusunnya laporan prognosis	100%	46,502,000
x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	100%	36,820,000
DINAS PERINDAGKOP			31,253,229,500
BELANJA TIDAK LANGSUNG			11,607,464,000
BELANJA LANGSUNG			19,645,765,500
1.15.15, Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif			1,826,498,000
1.15.15.12, Diklat Administrasi Pembukuan Usaha Kecil	- UKM Sentra	2 %, 30 UKM Sentra	45,755,000
1.15.15.15, Pendampingan Pengendalian Dana Bergulir Syariah	- KSP/ USP Pola Syariah se Provinsi DIY	2 %, 12 Kop Pola Syariah	14,565,000
1.15.15.16, Bintek Penyaluran Dana PKBL-BUMN dan Akses Kepada Perbankan Bagi KUKM/IKM	- KUKM/ LKM se Provinsi DIY	2%	16,805,000
1.15.15.20, Fasilitasi Sarjana Prospek Mandiri Berbasis Koperasi	- 1 Koperasi	28 Orang (1 Koperasi)	206,080,000
1.15.15.25, Bintek Sumber-sumber Pembiayaan dan Cara Membuat Proposal	- Kop/KJKS/UJKS	40 Kop/KJKS/UJKS	14,646,000
1.15.15.26, Bintek Peningkatan Kualitas Pengusaha Makanan dan Minuman	- Pengusaha Makanan dan Minuman	5 %, 30 peserta	24,070,000
1.15.15.27, Fasilitasi Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil Berorientasi Jender	- Pengusaha Mikro dan Kecil Wanita	5 %, 30 Orang	19,032,000
1.15.15.28, Peningkatan Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha	- Koperasi Wisata	10 Kop	526,672,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
Sektor Wisata melalui Stimulasi Dana Bergulir			
1.15.15.29, Pelatihan IT bagi Sentra Potensial dalam rangka Peningkatan Akses Informasi dan Teknologi dan Menciptakan Peluang Pasar	- UKM pada Sentra - Sentra Potensial	2 %, 30 UKM Sentra	65,364,000
1.15.15.30, Optimalisasi Pemantauan Bantuan Dana Bergulir Pengembangan ke Sektor Lainnya	- Koperasi Penerima Dana Bergulir Pasca Gempa	5 %,, 50 peserta	20,807,000
1.15.15.31, Fasilitasi Rumah Pintar untuk Perkassa	- Koperasi yang telah menerima bantuan perkuatan Modal Program Perkassa	5%	500,000,000
1.15.15.32, Penyelesaian kredit bermasalah UMKM Pasca Gempa	- UMKM yang mempunyai kredit bermasalah di Bank	4500 UMKM	312,702,000
1.15.15.33, Koordinasi Wilayah Perbatasan (Sektor Koperasi dan UKM)	- Aparatur	30 orang	20,000,000
1.15.15.34, Panitia Kerja Tetap Daerah dalam rangka Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas (Sektor Koperasi dan UKM)	- Aparatur dan Lembaga Non Pemerintah	20 orang, 6 bln	20,000,000
1.15.15.35, Pemantauan dan Evaluasi Efektivitas Implementasi Penerapan dan Kebijakan di Sektor Koperasi dan UKM	- Aparatur	3 bulan	20,000,000
1.15.18, Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi			173,979,000
1.15.18.10, Bintek Pengembangan Koperasi Siswa dan Koperasi Mahasiswa	- Kopsis dan Kopma se Provinsi DIY	2%	15,000,000
1.15.18.11, Bintek Strategi Pengembangan KJKS/UJKS Koperasi Syariah	- KJKS/ UJKS, Kop. Syariah	KJKS/ UJKS, Kop. Syariah	11,120,500
1.15.18.12, Sosialisasi Penjaminan Kredit Bagi KUKM	- KUKM se Provinsi DIY	0,17 %, 50 KUKM	11,967,000
1.15.18.13, Lomba Tangkas Trampil Koperasi Siswa	- Koperasi Siswa SMA/ SMK	10 %, 5 Kopsis	30,000,000
1.15.18.17, Bintek Peningkatan SDM Pengelola KJKS/UJKS	- KJKS/ UJKS	2%	13,725,000
1.15.18.18, Diklat Dasar-dasar Perekonomian Syariah	- KJS/ UJKS, Kop. Syariah	30 KJKS/UJKS, Kop.Syariah	21,808,500
1.15.18.19, Bintek Manajemen Pengelolaan KJKS/UJKS, Koperasi Syari'ah	- KJKS/ UJKS, Kop. Syariah	40 KJKS/ UJKS, Kop. Syariah	15,358,000
1.15.18.20, Bintek Akuntansi Koperasi	- Koperasi	2 %, 30 Koperasi	15,000,000
1.15.18.21, Bintek Perkoperasian	- Koperasi	2 %, 30 Koperasi	15,000,000
1.15.18.22, Temu Usaha Antar KUD dalam Usaha Distribusi Pupuk	- Koperasi yang menyalurkan distribusi pupuk	2%	10,000,000
1.15.18.24, Pengembangan Kelompok Usaha yang Responsif Jender	- Kelompok anggota Koperasi Wanita	2%	15,000,000
2.03.15, Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan			2,482,650,000
2.03.15.07, Optimalisasi pemanfaatan bahan galian	- Kelompok penambang	1 lokasi	167,650,000
2.03.15.09, Pendayagunaan Air Tanah	- Masyarakat di daerah sulit air	5 unit sumur bor	1,050,000,000
2.03.15.14, Penyusunan Neraca Bahan Galian	- Potensi dan produksi bahan galian di Propinsi DIY	1 laporan	250,000,000
2.03.15.15, Model Kemitraan Pengelolaan Penambangan Pasir Wilayah Merapi	- Pengelolaan Penambangan Pasir Sungai	1 lokasi	100,000,000
2.03.15.16, Pemanfatan Bahan Galian Zeolit untuk Pengkondisian Lahan Pantai	- Penambang zeolit - Lahan pantai	1 laporan	75,000,000
2.03.15.17, Survei dan Pemasangan Titik KOnترول Pengawasan Tambang	- Wilayah pertambangan aktif	1 laporan, 4 lokasi	90,000,000
2.03.15.18, Analisis Potensi Bahan Galian Batu Gamping, Lempung,	- 5 lokasi potensi bahan baku industri semen	1 laporan	500,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
Tras, Pasir Kuarsa, Pasir Besi untuk Bahan Industri Semen			
2.03.15.19, Inventarisasi Penambangan Pasir Di Wilayah Sungai di Provinsi DIY	- Kegiatan penambangan di wilayah sungai	1 laporan	200,000,000
2.03.15.20, Koordinasi Penambangan Pasir di Wilayah Sungai di Provinsi DIY	- Terlaksananya koordinasi penambangan pasir di wilayah sungai di Propinsi DIY	1 Lap	50,000,000
2.03.16, Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan			1,243,000,000
2.03.16.04, Konservasi air tanah	- Wilayah pengambilan air tanah	40 unit SPAH	80,000,000
2.03.16.07, Sosialisasi Daerah Rawan Bencana Geologi	- Masyarakat daerah rawan bencana geologi	3 kali	80,000,000
2.03.16.09, Pengawasan dan Pengendalian Pengambilan Air Tanah	- Pengambil air tanah	240 lokasi	50,000,000
2.03.16.10, Monitoring Daerah Rawan Bencana Geologi	- Wilayah rawan bencana geologi	3 lokasi	250,000,000
2.03.16.11, Penelitian, Penyelidikan, Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Geologi	- Wilayah rawan bencana geologi tsunami, gempa bumi dan gerakan tanah	3 laporan	600,000,000
2.03.16.12, Penelitian dan Penyelidikan Geologi Teknik dan Geologi Lingkungan	- Kawasan Karst	1 laporan	150,000,000
2.03.16.13, Penyusunan Peraturan Di Bidang Geologi dan Air Tanah	- Tersusunnya rancangan peraturan daerah di bidang air tanah	1 jenis peraturan	33,000,000
2.03.17, Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan			4,269,960,000
2.03.17.01, Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan jaringan distribusi	- Terbangunnya 1 unit PLTMH	1 unit PLTMH	463,800,000
2.03.17.02, Penyusunan desain detail jaringan listrik pedesaan	- Tersusunnya Perencanaan Detail Pembangunan Jaringan Listrik Perdesaan di Propinsi DIY	6 dusun	215,000,000
2.03.17.07, Penyusunan Audit Energi Listrik	- Terauditnya pemakaian energi listrik di Propinsi DIY	6 lokasi	288,000,000
2.03.17.09, Perluasan Jaringan Listrik	- Terbangunnya Jaringan Listrik di Propinsi DIY	3 dusun	2,000,000,000
2.03.17.10, Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Baru Terbarukan	- Perbaikan Sarpras PLTS di DIY	Perbaikan sarpras PLTS di 4 kabupaten	56,000,000
2.03.17.11, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	- Terpenuhinya kebutuhan air pada daerah kritis	1 lokasi	283,000,000
2.03.17.12, Pengembangan Bio Gas untuk Masyarakat Persdesaan	- Kelompok Ternak Lembu dan Industri Tahu	8 unit	215,000,000
2.03.17.13, Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah	- Tersusunnya Rencana Umum Energi Daerah	1 laporan	215,900,000
2.03.17.14, Penyusunan Peta Kelaikan Operasi Instalasi Ketenagalistrikan	- Tersusunnya Peta Kelaikan Operasi Instalasi Ketenaga Listrikan	1 laporan	199,260,000
2.03.17.15, Penyusunan DED Pemanfaatan Energi Angin	- Tersusunnya DED Pemanfaatan Energi Angin	1 laporan	191,000,000
2.03.17.16, Penyusunan Database Energi DIY	- Tersusunnya Data Base Energi DIY	1 paket	100,000,000
2.03.17.17, Monitoring dan Evaluasi Implementasi Hemat Energi	- Instansi dan Perusahaan	1 laporan	43,000,000
2.03.18, Program Pengembangan Bahan Bakar dan Energi			935,275,500
2.03.18.02, Pengawasan DO BBMT ditingkat Pangkalan di Kab. Bantul (Pasca Gempa)	- Pangkalan minyak tanah	250 pangkalan	78,141,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
2.03.18.04, Forum Komunikasi Energi	- Instansi terkait sektor Energi se Provisi DIY	1 laporan	100,000,000
2.03.18.05, Pembinaan Pengembangan dan Pemanfaatan Biofuel	- Masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan BBM secara kontinyu	1 laporan	178,134,500
2.03.18.06, Pembuatan Demplot/Percontohan Pemanfaatn Briket Batu Bara Untuk IKM	- Industri kecil menengah	1 laporan	179,000,000
2.03.18.07, Optimalisasi Distribusi Bahan Bakar Bersubsidi	- Pangkalan minyak tanah	1 laporan	150,000,000
2.03.18.08, Pelatihan Teknis Proses Pengolahan Biofuel	- Aparat pemerintah dan kelompok tani	10 orang	100,000,000
2.03.18.09, Valuasi Daerah Konversi Minyak Tanah ke Gas	- Kecamatan yang sudah terkena proram konversi minyak tanah ke gas LPG 3kg	1 laporan	150,000,000
2.06.15, Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan			440,000,000
2.06.15.06, Sosialisasi UU No. 8 Th. 1999 Tentang Perlindungan konsumen	- Konsumen, Pelaku usaha dan pejabat terkait se Provinsi DIY	100 orang	400,000,000
2.06.15.09, Koordinasi Wilayah Perbatasan (Sektor Perdagangan)	- Aparatur	30 orang	20,000,000
2.06.15.10, Pemantauan dan Evaluasi Efektivitas Implementasi Penerapan dan Kebijakan di Sektor Perdagangan	- Aparatur	3 bulan	20,000,000
2.06.16, Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional			30,000,000
2.06.16.08, Forum Hasil-hasil Kesepakatan Perundingan Internasional	- Pelaku Usaha, Aparat, Masyarakat	3%	30,000,000
2.06.17, Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor			950,000,000
2.06.17.03, Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	- Eksportir dan calon eksportir	100 Eksportir	20,000,000
2.06.17.05, Kerjasama standardisasi mutu produk baik nasional ,regional dan internasional	- Pelaku Usaha	2%	60,000,000
2.06.17.08, Bintek pembuatan/pengolahan dan pengujian bokar, kopi biji sesuai dengan sni disentra produksi	- Pelaku Usaha di Prov.DIY	2%	30,000,000
2.06.17.13, Pendidikan dan pelatihan Teknis Bagi UKM Ekspor	- UKM ekspor yang belum memahami teknis ekspor dan impor, eksportir yang mempunyai motivasi untuk memacu ekspornya	60 UKM, 3 Eksportir	70,000,000
2.06.17.14, Pameran Luar Negeri	- UKM di Provinsi DIY yang belum di Promosikan	2%	750,000,000
2.06.17.15, Panitia Kerja Tetap Daerah dalam rangka Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas (Sektor Perdagangan)	- Aparatur dan lembaga non pemerintah	20 orang	20,000,000
2.06.18, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			1,160,000,000
2.06.18.03, Pengembangan 10 unit pasar desa di kab/kota	- 10 pasar desa di Kab/Kota	2%	150,000,000
2.06.18.04, Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	- Pelaku Usaha	2%	130,000,000
2.06.18.06, Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	- Pelaku usaha, aparat	2%	25,000,000
2.06.18.08, Partisipasi Pameran Dalam Negeri	- UKM di Provinsi DIY yang belum di Promosikan	2%	700,000,000
2.06.18.09, Penyusunan Potensi Perdagangan DIY	- Pelaku Usaha	2%	95,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
2.06.18.11, Partisipasi Pameran Dekranas Pusat	- Pelaku Usaha	2%	60,000,000
2.06.20, PROGRAM PERSAINGAN USAHA			102,500,000
2.06.20.01, Penyelenggaraan Pasar Lelang	- Petani agribisnis dan buyer	14%	40,000,000
2.06.20.09, Pelatihan UKM Potensial Diwaralabakan	- UKM yang potensial diwaralabakan	18%	25,000,000
2.06.20.10, Pembinaan Wanita Pengusaha	- pengusaha wanita	15%	10,000,000
2.06.20.11, Penyusunan Profil Pasar Tradisional	- Tersedianya informasi pasar tradisional	17%	15,500,000
2.06.20.12, Penyusunan Profil Pasar Modern	- TYersediaanya informasi pasar modern	12%	12,000,000
	-		
2.07.16, Program pengembangan industri kecil dan menengah			1,468,993,000
2.07.16.01, Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya	- Ik Pangan di DIY	20 perusahaan	15,485,000
2.07.16.02, Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	- Industri Kecil dan Menengah DIY	100%	107,908,000
2.07.16.04, Promosi produk daerah	- Industri Kecil dan Menengah DIY	100%	113,095,000
2.07.16.06, Operasional pelaksanaan kegiatan dekranasda	- Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Dekranasda	100%	134,260,000
2.07.16.11, Fasilitasi Dekranasda	- Pengusaha Kerajinan se DIY	100%	108,500,000
2.07.16.12, Fasilitasi Temu Usaha Pupuk Organik se-Provinsi DIY	- IK Pupuk Organik di DIY	20 orang	50,000,000
2.07.16.13, Optimalisasi Pendampingan Pembuatan spec ADC 12 (kelompok penetes)	- Kelompok Penetes	30 pengrajin	325,000,000
2.07.16.14, Pendampingan peningkatan mutu produk untuk kelompok assesories	- Kelompok Aluminium / Asessoris	15 perajin	165,000,000
2.07.16.15, Pendampingan produk-produk presisi berupa pembuatan sparepart after market untuk memunculkan 4 sample produk	- Kelompok perajin sparepart after market	3 perusahaan	266,000,000
2.07.16.16, Fasilitasi Sertifikasi Produk Pangan	- IK Pangan di DIY	20 perusahaan/sertifikat	28,745,000
2.07.16.18, Fasilitasi Pengembangan Klaster Industri Mebel	- IK Mebel di Provinsi DIY	10 orang	80,000,000
2.07.16.19, Fasilitasi Temu Usaha Klaster Industri Kulit	- IK Kulit di Provinsi DIY	30 orang	75,000,000
2.07.17, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri			676,503,000
2.07.17.16, Pelatihan Manajemen Bagi Pengelolaan CFSMI	- Pengelola CFSMI	25 orang	31,960,000
2.07.17.28, Diklat dan penerapan GMP (Good Manufacturing Practice) IK pangan	- IK Pangan yang ada di Provinsi DIY	7 perusahaan	88,498,000
2.07.17.30, Peningkatan Teknologi Proses Tenun ATBM Jaguard	- IK Tenun di Provinsi DIY	20 orang	80,000,000
2.07.17.31, Pengembangan Desain Industri Kecil Konveksi	- IK Konveksi di DIY	20 orang	70,000,000
2.07.17.32, Peningkatan Teknologi Finishing Kerajinan Kayu	- IK Kerajinan Kayu di DIY	20 orang	75,000,000
2.07.17.33, Penerapan SNI Produk Genteng	- IK Genteng di DIY	20 orang	70,100,000
2.07.17.34, Praktek Kerja Industri Motive Anyaman di Kalteng	- IK Anyaman Serat alam di DIY	10 orang	79,000,000
2.07.17.35, Pelatihan Packaging bagi IK Pangan	- IK Pangan di DIY	20 perusahaan	19,790,000
2.07.17.36, Pelatihan dan Bantuan Alat Promosi Bagi IK Pewarna Alam	- IK Pewarna Alam di DIY	20 orang	91,155,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
2.07.17.37, Pelatihan dan Bantuan Alat Peningkatan Mutu Makanan Bagi IK Pangan	- IK Pangan di DIY	20 pengusaha	16,000,000
2.07.17.38, Pelatihan dan Bantuan Alat Vocum Sealre Bagi IK Pangan	- IK Pangan di DIY	12 perajin IK Pangan	55,000,000
2.07.18, Program penataan struktur industri			115,000,000
2.07.18.04, Koordinasi Penyusunan Kompetensi Inti Daerah	- Aparatur	30 orang	25,000,000
2.07.18.05, Forum Koordinasi Penjabaran PP nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Perizinan Industri)	- Aparatur	30 orang	15,000,000
2.07.18.06, Koordinasi Wilayah Perbatasan (Sektor Industri)	- Aparatur	30 orang	20,000,000
2.07.18.07, Panitia Kerja Tetap Daerah dalam rangka Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas (Sektor Perdagangan)	- Aparatur	20 orang, 6 bln	20,000,000
2.07.18.08, Koordinasi Pengembangan CFSMI Kayu, Kulit dan Kemasan	- Aparatur dan Pengelola CFSMI	30 orang	15,000,000
2.07.18.09, Pemantauan dan Evaluasi Efektivitas Implementasi Penerapan dan Kebijakan di Sektor Industri	- Aparatur	3 bln	20,000,000
2.07.19, Program pengembangan sentra-sentra industri potensial			45,000,000
2.07.19.02, Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	- Pengusaha IKM se- DIY	1000 eksemplar	45,000,000
2.07.20, Program Pembinaan Industri Rumah Tangga (IRT), Industri Kecil Dan Menengah (IKM)			769,745,000
2.07.20.03, Diklat Manajemen Produksi KUB	- Industri Kecil dan Menengah DIY	1 kali	30,328,000
2.07.20.04, Festival Makanan Tradisional	- IKM Pangan di Provinsi DIY khususnya dan IKM Pangan pada umumnya	200 peserta	61,020,000
2.07.20.09, Fasilitasi Sertifikat P-IRT	- IK Pangan yang mempunyai Sertifikat HACCP	1 kali	26,535,000
2.07.20.10, Peningkatan Teknologi Proses Minyak Kelapa (Krengsengan)	- IK Minyak Kelapa di Provinsi DIY	20 orang	80,000,000
2.07.20.11, Pelatihan Desain Produk Industri Kecil Mebel Bambu	- IK Mebel Bambu di Provinsi DIY	20 orang	70,000,000
2.07.20.12, Pelatihan Desain Produk Industri Kecil Mebel	- IK Mebel di DIY	20 orang	80,000,000
2.07.20.13, Penerapan gugus kendali mutu pada Industri Kecil	- Industri Kecil dan Menengah di Provinsi DIY	10 Gugus	100,000,000
2.07.20.14, Peningkatan Teknologi Proses Tempe Benguk	- IK Tempe di Provinsi DIY	20 orang	79,990,000
2.07.20.15, Pelatihan dan Pengembangan Desain IK Batu Hias	- IK Batu Hias di DIY	20 perusahaan	24,836,000
2.07.20.16, Pelatihan dan Bantuan Alat IK Konveksi Pondok Pesantren	- IK Pondok Pesantren di DIY	10 orang	40,000,000
2.07.20.17, Pelatihan dan Bantuan Alat Bagi IK Sandang	- IK Sandang di DIy	20 orang	27,036,000
2.07.20.18, Pendampingan Untuk Meningkatkan Mutu Produk Alat Rumah Tangga	- Perusahaan Aluminium	10 perusahaan	150,000,000
x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,166,768,100
x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Mendukung kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	7,150,000
x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	- Terselenggaranya Pelayanan Jasa Komunikasi Air dan Listrik	100%	721,102,800

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	- Lancarnya Operasional Kantor	100%	7,370,000
x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Terselenggaranya Administrasi Keuangan	100%	60,720,000
x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Kebersihan Kantor Terjaga	100%	252,532,500
x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Aparatur Disperindagkop. Prov. DIY	100%	129,800,000
x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Aparatur Disperindagkop. Prov. DIY	100%	111,330,000
x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	- Aparatur Disperindagkop. Prov. DIY	100%	27,500,000
x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Peralatan Gedung Kantor	100%	98,142,000
x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Peralatan Gedung Kantor	100%	24,483,800
x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an	- Aparatur Disperindagkop. Prov. DIY	100%	16,799,200
x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	- Aparatur Disperindagkop. Prov. DIY	100%	49,376,300
x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100%	418,025,900
x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	- Aparatur dan Perlengkapan Kantor Disperindag Prov. DIY	100%	242,435,600
x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			695,674,500
x.xx.02.03, Pembangunan gedung kantor	- Gedung Kantor BPTTG Disperindgkop. Prov. DIY	100%	175,999,300
x.xx.02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor	- Aparatur Disperindagkop. Prov. DIY	100%	3,742,200
x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur	- Mebeleur Kantor Disperindagkop. Prov. DIY	100%	15,840,000
x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Gedung Kantor dan Kelengkapannya yang Berdaya Guna dan Berhasil Guna	100%	71,896,000
x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Kendaraan Operasional Disperindagkop. Prov. DIY (Roda 2, 4 dan 6)	100%	366,465,000
x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	- Perelngkapan Kantor Disperindagkop. Prov. DIY	100%	11,440,000
x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- Peralatan Gedung Kantor Disperindagkop. Prov. DIY	100%	50,292,000
x.xx.05, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			26,400,000
x.xx.05.01, Pendidikan dan pelatihan formal	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100%	26,400,000
x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			67,819,400
x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan	100%	55,110,000
x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran	- Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan	100%	3,366,000
x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	- Kegiatan yang telah dilaksanakan	100%	1,610,400
x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- Kegiatan yang telah dilaksanakan	100%	7,733,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
DINAS KEBUDAYAAN			42,507,786,500
BELANJA TIDAK LANGSUNG			7,387,509,000
BELANJA LANGSUNG			35,120,277,500
1.17.15, Program pengembangan nilai budaya			3,690,000,000
1.17.15.01, Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	- Terlaksananya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	100%	3,195,000,000
1.17.15.03, Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah	- Tersusunnya Kebijakan tentang budaya lokal daerah	2 Dokumen	210,000,000
1.17.15.04, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	- Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	3 Kegiatan	45,000,000
1.17.15.05, Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	- Terlaksananya pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	10 Seniman, 400 anak dan 3 grup per	240,000,000
1.17.16, Program pengelolaan kekayaan budaya			15,211,000,000
1.17.16.01, Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	- Terlaksananya fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	100%	1,535,000,000
1.17.16.02, Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	- Terlaksananya Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	100%	625,000,000
1.17.16.04, Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	- Terlaksananya sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	100%	1,550,000,000
1.17.16.05, Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala ,museum dan peninggalan bawah air	- Terklaksananya Pengelolaan dan Pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggaln bawah air	100%	7,132,000,000
1.17.16.09, Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala	- Terlaksananya perumusan kebijakan sejarah dan purbakala	75 Orang	50,000,000
1.17.16.10, Pengawasan,Monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya	- Terlaksananya Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaopran pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya	7 kegiatan	20,000,000
1.17.16.11, Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	- Terlaksananya pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	100%	3,511,000,000
1.17.16.12, Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	- Terlaksananya pengelolaan karya cetak dan karya rekam	100%	598,000,000
1.17.16.13, Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala	- Terlaksananya pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala	1 dokumen	190,000,000
1.17.17, Program Pengelolaan Keragaman Budaya			4,253,500,000
1.17.17.01, Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	- Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	100%	2,505,000,000
1.17.17.02, penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan	- Terlaksananya penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan	100%	1,178,500,000
1.17.17.03, Penyelenggaraan dialog kebudayaan	- Terlaksananya dialog kebudayaan	100%	500,000,000
1.17.17.07, Monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya	- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya	3 Kegiatan	70,000,000
1.17.18, Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan			300,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
Kekayaan Budaya			
1.17.18.03, Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	- Terwujudnya kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	2 Grup	300,000,000
x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,736,777,500
x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Terkirimnya Surat-surat Dinas baik untuk instansi pemerintah maupun non pemerintah	1300 Surat	6,000,000
x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	- Tersedianya jasa telepon, listrik, internet, hosting, dan air untuk dinas dan UPT	1 tahun	400,000,000
x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	- Terpenuhinya administrasi dan ijin kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	9 mobil, 7 sepeda motor,	2,500,000
x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Terpenuhinya Honorarium Pengelola Keuangan dan barang daerah	20 Orang	41,580,000
x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Terwujudnya kebersihan gedung dinas dan UPT	43.774 m2	500,000,000
x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya ATK untuk dinas dan UPT	62 Jenis ATK	90,000,000
x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan/foto copy untuk Dinas dan UPT	32 jenis cetakan, 32500 lembar	70,000,000
x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	- Terpenuhinya kebutuhan penerangan dan alat elektronik	11 Jenis alat listrik	55,000,000
x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an	- Tersedianya Surat Kabar dan Majalah	5 Macam surat kabar/majalah	7,200,000
x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	- Terpenuhinya kebutuhan makan dan minuman untuk rapat dan extrafooding	4.613 orang sidang dan 4.320 extrafooding	66,997,500
x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Keikutsertaan dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	35 Kali	275,000,000
x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	- Terwujudnya kondisi aman kantor D. Kebudayaan & UPTD	1 Tahun	222,500,000
x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			9,641,500,000
x.xx.02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor	- Terpenuhinya Peralatan gedung kantor : Komputer, bahan kimia, bendera, cinderamata, mesin Tik, isi tabung pemadam kebakaran, kursi penonton concert hall, meja kursi karpet ruang vip, meja kursi ruang sidang, genzet 150 KVA, AC 2 PK, Open cup Kijang, Transfer data dari VHS ke Digital, Pengangan Tangga Concert hall,	100%	5,371,500,000
	- Mesin pemotong rumput, Piano Yamaha, Tata suara (setara TOA), Data Logger, vacuum cleaner, elektronik micro motor, digital HP meter, Barang Kkerajinan, Kursi rapat, meja rapat, Kursi Pejabat eselon, Kursi Hadap tamu eselon		
x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Terawatnya Gedung kantor : Pengecatan tembok dan pagar keliling, WC sumur dan ledeng, Pintu Jendela, Atap lantai	15.000 m2, 3 unit, 125 buah, 1000 m2	200,000,000
x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	- Terpeliharanya Kendaraan dinas /operasional : .	100%	200,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
dinas/operasional			
x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	- Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor ; telepon, faximile, pemotong rumput, komputer, genzet, Ac Central, Ac split, sound system, buku, katalog, benda bercorak kebudayaan	100%	275,000,000
x.xx.02.42, Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	- Terlaksananya rehabilitasi ; atap kantor, Galeri, Souvenir shop, Atap amphiteater, Laboratorium bahasa jawa	100%	3,595,000,000
x.xx.05, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			200,000,000
x.xx.05.07, Pendidikan dan Pelatihan Lain-lain	- Terdidiknya Pegawai negeri sipil di lingkungan dinas kebudayaan Prov. DIY	100%	200,000,000
x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			87,500,000
x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran	- Tersusunnya Laporan Keuangan semesteran	1 dokumen	12,500,000
x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	- Tersusunnya Laporan Prognosis realisasi Anggaran	1 dokumen	7,500,000
x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- Tersusunnya Laporan Keuangan akhir tahun	1 dokumen	12,500,000
x.xx.06.07, Penyusunan Realisasi Kegiatan Instansi	- Tersusunnya realisasi kegiatan instansi	1 dokumen	20,000,000
x.xx.06.08, Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program	- Tersusunnya Pengembangan Perencanaan program	1 dokumen	35,000,000
DINAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			48,633,531,000
BELANJA TIDAK LANGSUNG			8,222,237,000
BELANJA LANGSUNG			40,411,294,000
1.19.15, Program peningkatan keamaan dan kenyamanan lingkungan			1,326,400,000
1.19.15.04, Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	- Tersosialisasinya Tindakan administrasi bagi kegiatan yang melakukan pelanggaran lingkungan	100%	50,000,000
1.19.15.10, Peningkatan Motivasi Kerja POL PP	- Termotivasinya anggota pol PP dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan	100%	190,000,000
1.19.15.11, Pemantauan Pelaksanaan Perlindungan Hak Sipil (PHS)	- Gepeng dan Anjal	100%	120,000,000
1.19.15.12, Penyelenggaraan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban pada hari besar agama, Nasional dan selama bulan Romadhon	100%	137,500,000
1.19.15.14, Rapat Kerja Daerah Jaringan Penanganan Gepeng dan Anjal	- Diperolehnya pemahaman yang sama dalam penanganan Gepeng dan Anjal melalui Jaringan Kerja	100%	250,000,000
1.19.15.19, Pengerahan Anggota Sat Pol PP dalam Tugas-tugas Pengamanan	- Penjagaan dan Pengamanan kantor Gubernur dan Wagub, DPRD, Instansi Pemerintah dan Aset penting	100 %	374,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.19.15.20, Fasilitasi Pengamanan Asset dan Pemberdayaan Mitra Kerja Bidang Pengamanan dan Pengawasan	- Kesiapan dan kelancaran pelaksanaan Pamwal	100%	54,900,000
1.19.15.22, Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pol PP se Provinsi DIY	- Terselenggaranya Forkom Pol PP se DIY	100%	150,000,000
1.19.16, Program Pemeliharaan Kamtramtibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal			1,522,550,000
1.19.16.06, Rakerda Pengembangan Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Tersusunnya kesepakatan pengembangan program di Prov,Kab/Kota dan daerah perbatasan	4 akt, 2 hari	175,000,000
1.19.16.08, Koord. Pengawasan Orang Asing di Prop. DIY	- Orang asing yang berada di Provinsi DIY	Orang asing pemegang KITAS/KITAP	67,550,000
1.19.16.09, Publikasi Media Cetak dan Elektronik	- Tersebarluaskannya informasi tentang Trantib	100%	125,000,000
1.19.16.11, Pembinaan Phisik bagi POL PP	- tersedianya anggota Pol PP yang siap fisik	100%	75,000,000
1.19.16.13, Bintek Operasional PPNS Propinsi DIY	- PPNS yang lebih profesional	100%	150,000,000
1.19.16.14, Operasi Non Yustisi	- Terbinanya masyarakat dalam penegakan per-UU-an	100%	130,000,000
1.19.16.15, Operasi Yustisi	- Terselenggaranya Binwas dan Dalops PPNS	100%	125,000,000
	- Terprosesnya pelanggaran per-UU		
	- Tersusunnya Informasi pelaksanaan peraturan per-UU		
1.19.16.17, Penyuluhan Kepada Masyarakat di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan	- Tercapainya pemahaman dan partisipasi masy dan aparat dalam Penegakan Per-UU	5 kali	130,000,000
1.19.16.19, Pendataan Potensi Hansip/Linmas PAMSUNG TPS Pemilu 2008	- Terbentuknya Pamsung dan Pamteksung - BP	100%	45,000,000
	- Penyusunan buku potensi Linmas		
	- Terbentuknya PAM Pemilu untuk BKO, Pangkolak PAM Jateng DIY		
1.19.16.23, Forum Komunikasi PPNS DIY	- Kesamaan Visi Misi dan Komunikasi sehingga memperlancar tugas Penegakan Peraturan Perundang-undangan	100%	125,000,000
1.19.16.24, Raker Teknis Pengembangan Jaringan Kerja Lintas Kabupaten/Kota	- Kesepakatan Teknis Operasional dalam Pemeliharaan Kamtramtibnas	100%	80,000,000
1.19.16.25, Forkom Pengembangan Kapasitas Mitra Kerja Bidang Trantib	- Kesepakatan dan dukungan mitrakerja dalam rangka pemeliharaan Kamtramtibnas	100%	45,000,000
1.19.16.26, Pendataan potensi hansip linmas pamsung TPS Pemilu 2009	- Terdatanya Potensi hansip Linmas Pamsung TPS Pemilu 2009	100%	250,000,000
1.19.17, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			1,285,000,000
1.19.17.06, Peningkatan Ketahanan dan Kewaspadaan Nasional	- Terbentuknya Komitmen dan penguatnya Ketahanan dan Kewaspadaan Nasional	100%	130,000,000
1.19.17.08, Fasilitasi Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Dewan Penasehat FKDM	- Terfasilitasinya Pembentukan dan kegiatan FKDM	100%	200,000,000
1.19.17.09, Fasilitasi kegiatan Kominda	- Terbentuknya dan terfasilitasinya Dewan Penasehat FKDM		
	- Terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini melalui koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara profesional	100%	150,000,000
1.19.17.10, Fasilitasi koordinasi forum komunikasi antar umat beragama	- Terfasilitasinya koordinasi antar umat beragama	100%	100,000,000
1.19.17.11, Pendataan Orpol, Ormas, LSM	- Tersedianya data orpol.Ormas, LSM	100%	95,000,000
1.19.17.12, Forkomkon bagi Fungsi Partai Politik di DIY	- Terwujudnya situasi yang kondusif di DIY	100%	75,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.19.17.13, Sosialisasi UU Bidang Politik	- Meningkatnya Pemahaman tentang kondisi Sospol bagi fungsionaris Parpol, Ormas dan LSM	100%	150,000,000
1.19.17.14, Peningkatan Pemahaman Kondisi Sosial Politik dan Kemasyarakatan bagi Aparatur Pemerintah Provinsi, Kab/Kota se-DIY	- Tersosialisasikannya UU Bidang Politik	100%	75,000,000
1.19.17.17, Pembentukan Desk Pemilu dan PilPres 2009	- Meningkatnya pemahaman kondisi Sospol dan kemasyarakat bagi aparat Provinsi, Kabupaten/Kota	100%	110,000,000
1.19.17.18, Penyusunan/Pembuatan Peta Politik hasil Pemilu 2009	- Terbentuknya Desk Pemilu dan Pilpres 2009	100%	90,000,000
1.19.17.20, Fasilitasi PAW	- Tersusunnya Peta Politik Hasil Pemilu	100%	50,000,000
	- Terfasilitasinya proses PAW (Pergantian Antar Waktu) anggota DPRD Prov dan Kabupaten/Kota	100%	60,000,000
1.19.18, Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			400,000,000
1.19.18.05, Penyusunan Indikator Kesbang	- Tersusunnya draft Indikator Kesbang di DIY	100%	150,000,000
1.19.18.06, Forum Komunikasi dan Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	- Rakor rutin	100%	250,000,000
	- Seminar / Diskusi/ Forkom tentang Peningkatan Wasbang		
	- Fasilitasi kegiatan peningkatan Wasbang		
1.19.19, Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			283,400,000
1.19.19.01, Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Masyarakat	- Terbentuknya Satkamlingmasy di tingkat kecamatan se DIY	78 kecamatan	50,000,000
1.19.19.02, Pemetaan Daerah Rawan Gangguan Trantibum di Daerah Perbatasan	- Tersusunnya peta daerah rawan gangguan Trantib	100%	30,000,000
1.19.19.04, Pemberdayaan Masyarakat dalam Kerangka Hak Sipil	- Meningkatnya partisipasi aktif dan kesadaran hukum masy utk menggunakan Sarpras Umum	100%	150,000,000
1.19.19.07, Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	- Meningkatnya kemampuan aparat penjaga aset negara dalam penanggulangan kebakaran	1 akt, 80 org, 3 hari	53,400,000
1.19.20, Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat			430,000,000
1.19.20.09, Fasilitasi Pelaksanaan P4GN	- Terwujudnya P4GN	100%	250,000,000
1.19.20.10, Rakornas/Rakernis BNN, Raker BNP/BNK se DIY	- Terkoordinasinya instansi terkait dalam memerangi nafsa	100%	35,000,000
1.19.20.11, Sosialisasi Operasi P4GN	- Masyarakat dan aparat mengetahui serta memahami UU tentang NAPZA	100%	90,000,000
1.19.20.12, Operasi P4GN	- Terselenggaranya operasi P4GN bagi pemilik kost, pengelola [pendidikan, pengelola perusahaan dan masyarakat umum	100%	55,000,000
1.19.22, Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			31,567,277,000
1.19.22.05, Pelatihan Penyusunan rencana Kontinjensi	- Terlatihnya aparat dan masyarakat dalam penyusunan rencana kontinjensi	100%	130,000,000
	- Tersusunnya draft rencana kontinjensi kebencanaan		
1.19.22.06, Pelatihan Dasar Manajemen Kebencanaan dan Kedaruratan	- Terlatihnya masyarakat dan aparat dalam panajemen kebencanaan dan kedaruratan	2 akt, 100 orang	132,277,000
1.19.22.07, Kesiapsiagaan Aparat dan Masyarakat dalam	- Meningkatnya kesiapsiagaan aparat dan masyarakat	100%	125,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
Penanganan Bencana (PB)	melalui gladi Posko dan gladi Lapangan		
1.19.22.09, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana	- Masyarakat dan aparat di daerah bencana akrab dengan kondisi daerahnya	100%	55,000,000
1.19.22.11, Pengerahan Potensi Linmas dalam Tugas-tugas Kelinmasan	- Kesiapsiagaan potensi Linmas dalam PB	100%	1,400,000,000
1.19.22.12, Fasilitasi Koordinasi SATKORLAK PBP	- Lancarnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas Satkorlak/Satlak PB	100%	150,000,000
1.19.22.13, Sosialisasi Kesiapsiagaan Peringatan Dini dalam mengantisipasi terjadinya bencana bagi masyarakat	- Tersosialisasikannya Peringatan dini Antisipasi terjadinya bencana bagi masyarakat daerah rawan bencana	100%	100,000,000
1.19.22.15, Pelatihan SAR Linmas Propinsi DIY	- Terlatihnya anggota SAR Linmas	100%	80,000,000
1.19.22.18, Penyusunan Protap Penanganan Bencana	- Tersusunnya Prosedur tetap PB	100%	250,000,000
1.19.22.23, Pengadaan perlengkapan operasional dan pakaian petugas Pam Pemilu	- Tersedianya Pakaian dan Perlengkapan Petugas Pam Pemilu se DIY sebanyak 28.000 stel	100%	28,000,000,000
1.19.22.24, Penyerahan Linmas BKO PANGKOLAK PAM Jateng DIY	- Penyerahan Linmas dari Gubernur kepada Pangkolak pam Jateng-DIY	100%	20,000,000
1.19.22.25, Pelatihan simulasi Pam TPS	- Sistem Rayon Kabupaten Kota	100%	125,000,000
1.19.22.26, Penyusunan dan pembuatan data RUPUSDALOPS PB	- Tersusun dan tersedianya data Rupusdalpos	100%	250,000,000
1.19.22.27, Pengadaan sarana operasional PB	- Tersedianya sarana prasarana PB	100%	300,000,000
	- Tersedianya sarana operasional PB	100%	300,000,000
1.19.22.30, Pendataan dan pembinaan potensi linmas di daerah 15 s/d 55 tahun	- Terdata dan terbinanya Potensi Linmas di daerah Umur 15 s/d 55 Tahun	100%	125,000,000
1.19.22.32, Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan PB	- Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan PB	100%	25,000,000
1.20.16, Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah			188,570,000
1.20.16.12, Pengamanan dan Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, dan tamu Daerah	- Terlaksananya Pengamanan dan Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur dan Tamu Daerah	133 kali	188,570,000
x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,237,097,000
x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Distrantib	100 %	10,000,000
x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	- Distrantib	100%	88,800,000
x.xx.01.03, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Distrantib	100 %	135,000,000
x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	- Distrantib	100 %	6,225,000
x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Distrantib	100 %	24,000,000
x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Distrantib	100 %	39,000,000
x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Distrantib	100 %	115,000,000
x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Distrantib	100%	35,000,000
x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	- Distrantib	100%	18,000,000
x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Distrantib	100%	275,000,000
x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an	- Distrantib	100%	6,500,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	- Distrantib	100%	30,000,000
x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Distrantib	100%	250,000,000
x.xx.01.29, Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	- Terbayarnya Honor PTT/Banpol dan Pengendali Banpol PP	100%	204,572,000
x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1,025,000,000
x.xx.02.05, Pengadaan kendaraan dinas/operasional	- 3 Sepeda Motor Patroli dan 1 sepeda Motor standar	100%	175,000,000
x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor	- Distrantib	100%	160,000,000
x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur	- Distrantib	100%	110,000,000
x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Terpeliharanya perlengkapan Gedung Kantor	100%	40,000,000
x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- 28 kendaraan Roda 4/ 2	100%	340,000,000
x.xx.02.62, Pembuatan talud pengamanan tower repiter dan perlengkapannya	- Terbangunnya Talud pengamanan Tower Repiter dan perlengkapannya di Dusun Tegalsari, Purwosari, Girimulyo Kulonprogo	100%	200,000,000
x.xx.05, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			846,000,000
x.xx.05.06, Pelatihan Penyegaran Korsi Pemda DIY	- Meningkatkan kemampuan Aparat dalam KORSIK	100%	86,000,000
x.xx.05.14, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	- Program dan Kegiatan Bakeslinmas	100%	30,000,000
x.xx.05.16, Pelatihan Ketahanan Fisik dan Mental Bagi Aparat	- Distrantib	100%	60,000,000
x.xx.05.19, pembinaan Mental Pol PP	- Terbinanya Mental Pol PP	100%	20,000,000
x.xx.05.20, Bintek operasional PPNS	- Meningkatkan Profesionalisme PPNS DIY	100%	150,000,000
x.xx.05.21, Pembinaan Fisik Pol PP	- Tersedianya Pakaian Dinas PPNS		
x.xx.05.22, Rakerda pengembangan program	- Terlaksananya Pelatihan Kesamaptaan dan Bela diri bagi anggota Pol PP	100%	65,000,000
x.xx.05.24, Forkom pengembangan program antar anggota MPU	- Kesepakatan Pengembangan Program Kesbanglinmas Provinsi/Kabupaten/Kota dan daerah Perbatasan	100%	210,000,000
	- Kesepakatan Program antar anggota MPU	100%	225,000,000
x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			300,000,000
x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran	- Tersusunnya Laporan Keuangan Semester I dan II	100%	15,000,000
x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	- Distrantib	100%	15,000,000
x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	20,000,000
x.xx.06.08, Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program	- Tersedianya Rentra 2009 s/d 2014, Program Tahunan, Program Menengah dan Program jangka panjang	100%	250,000,000
BIRO UMUM			52,627,100,000
BELANJA TIDAK LANGSUNG Ka. DAERAH/Waka DAERAH			1,296,185,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
BELANJA TIDAK LANGSUNG BIRO UMUM			5,177,685,000
BELANJA LANGSUNG			46,153,230,000
1.20.16, Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah			3,525,000,000
1.20.16.02, Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/lembaga pemerintah non departemen / luar negeri	- Tamu-tamu Pemda DIY baik dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri	1 Tahun	2,200,000,000
1.20.16.06, Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	- Tercapainya Peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	1 Tahun	1,250,000,000
1.20.16.07, Biaya Pemeliharaan Kesehatan	- Terpeliharanya kesehatan KDH/WKDH	1 Tahun	75,000,000
1.20.26, Program panataan peraturan perundang-undangan			150,000,000
1.20.26.02, Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	- Acuan/pedoman bagi pengelola barang setiap SKPD	1 Raperda	150,000,000
x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			10,626,500,000
x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000 Naskah dinas	22,500,000
x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	2,421,000,000
x.xx.01.03, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Pejabat Negara, PNS, TNI POLRI dan Masyarakat	16 Kali	1,130,000,000
x.xx.01.05, Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	- Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas	1 Tahun	390,000,000
x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	- Kendaraan bermotor dinas operasional	1 Tahun	20,000,000
x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Pengelola keuangan, barang dan honorarium	42 orang	276,000,000
x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Kebersihan kantor di lingkungan Sekretariat Daerah	1 Tahun	1,545,000,000
x.xx.01.09, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Perbaikan peralatan kerja	1 Tahun	514,000,000
x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Penggunaan alat tulis kantor	1 Tahun	250,000,000
x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	300,000,000
x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	- Suasana kerja yang nyaman di lingkungan Kerja	1 Tahun	371,000,000
x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	434,000,000
x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Tercukupi kebutuhan peralatan rumah tangga	1 Tahun	109,500,000
x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an	- Terpenuhinya Bahan bacaan dan Peraturan Per-UU-an	1 Tahun	50,000,000
x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	- Terpenuhinya hidangan makan dan minum untuk Tamu Pemda	1 Tahun	1,393,500,000
x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Tercapainya koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	1,400,000,000
x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			31,198,560,000
x.xx.02.03, Pembangunan gedung kantor	- Terlaksananya Pembangunan Kantor	10 unit	18,332,600,000
x.xx.02.05, Pengadaan kendaraan dinas/operasional	- Kendaraan Dinas / Operasional	23 unit	4,822,000,000
x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor	- Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor	10 unit	170,000,000
x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur	- Tersedianya Meubeleir untuk Pemda DIY	100%	53,000,000
x.xx.02.20, Pemeliharaan rutin /berkala rumah jabatan	- Rumah Gubernur dan Wakil Gubernur	2 UG	150,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
x.xx.02.21, Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	- Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	3 unit	34,000,000
x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Terpeliharanya secara rutin gedung kantor	22 unit	980,000,000
x.xx.02.23, Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	- Perawatan Kendaraan Bermotor	7 unit	364,000,000
x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Kendaraan Bermotor Dinas / Operasional	72 unit	1,432,000,000
x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	- Terpeliharanya secara rutin Perlengkapan Gedung Kantor	100%	212,000,000
x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- Terpeliharanya secara rutin Peralatan Gedung Kantor	66 unit	126,500,000
x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	- Terpeliharanya Peralatan Meubeler	100%	20,000,000
x.xx.02.30, Pemeliharaan rutin/berkala fumigasi	- Pemeliharaan Naskah Dinas	100%	263,460,000
x.xx.02.41, Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	- Rehabilitasi Rumah Dinas	100%	80,000,000
x.xx.02.42, Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	- Rehabilitasi Gedung Kantor 7 unit	6 unit	3,900,000,000
x.xx.02.54, Sertifikasi Tanah Pemda Provinsi DIY	- Terbitnya Sertifikasi dan Asal-usul Tanah Pemda DIY	10 sert, Data aset tanah	84,000,000
x.xx.02.55, Perubahan Status Hukum Barang Daerah	- Barang Daerah yang tidak layak pakai	1 Tahun	150,000,000
x.xx.02.58, Penyusunan RKB/RTBU	- Penyusunan DRKB /DRTB	1 Lap	25,000,000
x.xx.03, Program peningkatan disiplin aparatur			169,670,000
x.xx.03.02, Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya	- Terpenuhinya Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	KDH - WKDH dan Pimpinan	110,000,000
x.xx.03.03, Pengadaan pakaian kerja lapangan	- Terpenuhinya Pakaian Kerja Lapangan	142 Stel	47,170,000
x.xx.03.05, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	- Terpenuhinya Pakaian Khusus Tertentu Untuk Petugas Protokol	1 Thn	12,500,000
x.xx.05, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			255,000,000
x.xx.05.02, Sosialisasi peraturan perundang-undangan	- Aparat Protokoler di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY dan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	3 kali	75,000,000
x.xx.05.03, Bimbingan teknis implementasi peraturan Per-UU-an	- Para Penyimpan Barang dan Pengurus Barang	1 Tahun	180,000,000
x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			228,500,000
x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	7,500,000
x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran	- Terwujudnya laporan semesteran	2 Laporan	11,500,000
x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	- Tersusunnya laporan Prognosis Anggaran	1 Laporan	12,000,000
x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	12,500,000
x.xx.06.07, Penyusunan Realisasi Kegiatan Instansi	- Hasil kegiatan Instansi	1 Laporan	125,000,000
	- Tersusunnya Data Inventarisasi Barang Daerah	2 Lap	60,000,000
BIRO TATA PEMERINTAHAN			13,430,117,980
BELANJA TIDAK LANGSUNG			3,471,967,980
BELANJA LANGSUNG			9,958,150,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.06.17, Program pengembangan wilayah perbatasan			433,000,000
1.06.17.01, Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	- Terselesaikannya permasalahan perbatasan antar daerah	100%	100,000,000
1.06.17.06, Fasilitasi dan Koordinasi Penegasan Batas Daerah	- Terfasilitasinya penegasan batas daerah di Provinsi DIY	100%	85,000,000
1.06.17.07, Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbatasan	- Terfasilitasinya sarana dan prasarana di daerah perbatasan	100%	160,000,000
1.06.17.08, Falisitasi Penamaan Unsur-Unsur Geografis	- Terfasilitasinya penamaan unsur-unsur geografis di Provinsi DIY	100%	88,000,000
1.09.16, Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			1,760,000,000
1.09.16.02, Penyuluhan hukum petanahan	- Terlaksananya penyuluhan hukum pertanahan di Provinsi DIY	100%	60,000,000
1.09.16.03, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pertanahan	- Terfasilitasinya pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pertanahan di Provinsi DIY	100%	50,000,000
1.09.16.05, Fasilitasi Sertifikasi Tanah Kas Desa	- Terfasilitasinya pensertifikatan tanah kas desa di Provinsi DIY	100%	1,250,000,000
1.09.16.06, Inventarisasi Tanah SG dan PAG	- Terfasilitasinya pelaksanaan inventarisasi tanah SG dan PAG di Provinsi DIY	100%	250,000,000
1.09.16.07, Fasilitasi Pengelolaan Tanah SG dan PAG	- Terfasilitasinya pengelolaan tanah SG dan PAG di Provinsi DIY	100%	150,000,000
1.09.17, Prograam penyelesaian konflik-konflik pertanahan			260,000,000
1.09.17.01, Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Masalah Pertanahan	- Terfasilitasinya penyelesaian konflik-konflik masalah pertanahan	100%	80,000,000
1.09.17.02, Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan Tanah Kas Desa	- Terfasilitasinya pelaksanaan koordinasi dan penanganan permasalahan tanah kas desa	100%	180,000,000
1.10.15, Program penataan administrasi kependudukan			1,000,000,000
1.10.15.03, Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	- Terselenggaranya implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	100%	200,000,000
1.10.15.05, Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	- Terselenggaranya Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	100%	169,000,000
1.10.15.06, Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	- Terlaksananya pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	100%	75,000,000
1.10.15.09, Pengembangan Database Kependudukan	- Terlaksananya pengembangan database kependudukan	100%	100,000,000
1.10.15.10, Penyusunan Kebijakan Kependudukan	- Terlaksananya penyusunan kebijakan kependudukan	100%	100,000,000
1.10.15.11, Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil	- Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	100%	45,000,000
1.10.15.12, Sosialisasi kebijakan kependudukan	- Terselenggaranya sosialisasi kebijakan kependudukan	100%	100,000,000
1.10.15.14, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kependudukan	100%	85,000,000
1.10.15.16, Koordinasi Pendataan Orang Asing	- Terselenggaranya koordinasi pendataan orang asing dan pengawasan orang asing	100%	62,000,000
1.10.15.19, Fasilitasi Pelantikan Pejabat P4	- Terselenggaranya penunjukan, pengangkatan dan pelantikan pemuka agama sebagai pembantu pegawai pencatat perkawinan	100%	22,000,000
1.10.15.22, Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pencatatan Sipil	- Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan kebijakan pencatatan sipil	100%	42,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.19.18, Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			146,000,000
1.19.18.04, Fasilitasi dan Koordinasi Pemahaman Tentang Wawasan Kebangsaan	- Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemahaman tentang wawasan kebangsaan	100%	146,000,000
1.19.21, Program pendidikan politik masyarakat			243,000,000
1.19.21.01, Penyuluhan kepada masyarakat	- Terlaksananya penyuluhan orientasi pematapan budaya politik bagi masyarakat dan birokrat	100%	116,000,000
1.19.21.09, Fasilitasi dan Koordinasi Kepada Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	- Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi kepada partai politik dan organisasi kemasyarakatan	100%	127,000,000
1.20.16, Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah			441,000,000
1.20.16.03, Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	- Terselenggaranya rapat koordinasi unsur MUSPIDA	100%	226,000,000
1.20.16.04, Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	- Terselenggaranya rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	100%	215,000,000
1.20.27, Program penataan daerah otonomi baru			885,000,000
1.20.27.05, Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan P3D	- Terfasilitasinya pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan P3D di Provinsi DIY	100%	50,000,000
1.20.27.06, Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	- Terfasilitasinya penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan	100%	80,000,000
1.20.27.07, Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	- Terfasilitasinya pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Provinsi DIY	100%	60,000,000
1.20.27.08, Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	- Terfasilitasinya pelaksanaan sosialisasi peraturan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Provinsi DIY	100%	50,000,000
1.20.27.09, Penyusunan Kebijakan Otonomi Daerah	- Terfasilitasinya pelaksanaan penyusunan kebijakan otonomi daerah di Provinsi DIY	100%	80,000,000
1.20.27.10, Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah	- Terfasilitasinya pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi DIY	100%	265,000,000
1.20.27.11, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah	- Terfasilitasinya pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah	100%	300,000,000
1.20.28, Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan			2,866,000,000
1.20.28.08, Fasilitasi dan Koordinasi Pengangkatan Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum	- Terfasilitasinya pengangkatan anggota DPRD hasil pemilihan umum di Provinsi DIY	100%	285,000,000
1.20.28.09, Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Daerah	- Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemilihan umum di daerah	100%	119,000,000
1.20.28.10, Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketatapemerintahan yang Baik	- Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik	100%	190,000,000
1.20.28.11, Pembinaan Peran dan Fungsi Camat	- Terselenggaranya pembinaan peran dan fungsi camat	100%	122,000,000
1.20.28.12, Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Pusat	- Terselenggaraan koordinasi pelaksanaan urusan	100%	138,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
di Daerah	pemerintahan pusat di daerah		
1.20.28.13, Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah	- Terselenggaranya sosialisasi peraturan penyelenggaraan pemerintahan di daerah	100%	233,000,000
1.20.28.14, Koordinasi Pemanfaatan Potensi di Kawasan Pedesaan	- Terselenggaranya koordinasi pemanfaatan potensi di kawasan pedesaan	100%	41,000,000
1.20.28.15, Pembinaan Aparatur Pengelola Kawasan Perkotaan	- Terselenggaranya pembinaan paratur pengelola kawasan perkotaan	100%	43,000,000
1.20.28.16, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	- Tersusunnya LPPD	100%	150,000,000
1.20.28.17, Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah	- Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ibadah haji di daerah	100%	1,261,000,000
1.20.28.18, Fasilitasi dan Koordinasi Peran Serta DPD RI di Daerah	- Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi peran serta DPD RI di daerah	100%	284,000,000
1.22.18, Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			975,000,000
1.22.18.05, Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	- Terfasilitasinya penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi DIY	100%	150,000,000
1.22.18.06, Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	- Terfasilitasinya pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi DIY	100%	250,000,000
1.22.18.07, Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	- Terfasilitasinya pelaksanaan sosialisasi peraturan penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi DIY	100%	65,000,000
1.22.18.08, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	- Terfasilitasinya pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi DIY	100%	50,000,000
1.22.18.09, Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	- Terfasilitasinya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi DIY	100%	120,000,000
1.22.18.10, Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBMGR)	- Terfasilitasinya pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat (BBMGR) di Provinsi DIY	100%	50,000,000
1.22.18.11, Perlombaan Desa/Kelurahan	- Terfasilitasinya pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat Provinsi DIY	100%	195,000,000
1.22.18.12, Penyuluhan Bagi Desa/Kelurahan Berprestasi	- Terfasilitasinya pelaksanaan penyuluhan bagi desa/kelurahan berprestasi	100%	95,000,000
x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			606,150,000
x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Tersedianya jasa surat menyurat	100%	6,000,000
x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	- Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	18 kendaraan	1,650,000
x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Tersedianya jasa administrasi keuangan	100%	20,000,000
x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya alat tulis kantor	100%	81,000,000
x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Tersedianya barang cetak dan penggandaan	100%	97,500,000
x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	27,000,000
x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Tersedianya peralatan rumah tangga	100%	17,000,000
x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an	- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	12,000,000
x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	100%	70,000,000
x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Tersedianya dukungan dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	263,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	- Tersedianya jasa petugas keamanan gedung	100%	11,000,000
x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			242,000,000
x.xx.02.05, Pengadaan kendaraan dinas/operasional	- meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Biro	100%	60,000,000
x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor	- Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100%	8,000,000
x.xx.02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor	- Tersedianya peralatan gedung kantor	100%	52,000,000
x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor	100%	11,000,000
x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinas/operasional secara rutin	100%	76,000,000
x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan gedung kantor	100%	35,000,000
x.xx.03, Program peningkatan disiplin aparatur			20,000,000
x.xx.03.01, pengadaan mesin /kartu absensi	- Meningkatkan kedisiplinan pegawai	100%	20,000,000
x.xx.04, Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS			8,000,000
x.xx.04.01, Pemulangan pegawai yang pensiun	- Adanya tali asih bagi pegawai yang pensiun	100%	8,000,000
x.xx.05, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			40,000,000
x.xx.05.01, Pendidikan dan pelatihan formal	- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	100%	40,000,000
x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			33,000,000
x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	100%	15,000,000
x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran	- Tersusunnya laporan keuangan semesteran	100%	6,000,000
x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	- Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	100%	6,000,000
x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	100%	6,000,000
BIRO ORGANISASI			5,640,675,000
BELANJA TIDAK LANGSUNG			1,600,000,000
BELANJA LANGSUNG			4,040,675,000
1.20.30, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah			3,172,175,000
1.20.30.02, Fasilitasi Evaluasi Kelembagaan Kabupaten/Kota	- Perangkat Daerah	100%	52,300,000
1.20.30.04, Fasilitasi Balnce Score Card	- Perangkat Daerah	100%	144,150,000
1.20.30.10, Menyusun Standarisasi Harga barang dan Jasa	- Perangkat Daerah	100%	204,250,000
1.20.30.11, Menyusun Standar Pembiayaan Minimal dan Revisi	- Perangkat Daerah	100%	297,325,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
Analisis Standar Belanja (ASB)			
1.20.30.12, Asistensi penyusunan Lakip/RKT/PK Instansi	- Perangkat Daerah	100%	207,050,000
1.20.30.13, Penilaian Kinerja instansi Pelayanan Publik	- Perangkat Daerah	100%	218,750,000
1.20.30.14, Review uraian tugas unit SOTK baru	- Perangkat Daerah	100%	385,200,000
1.20.30.15, Penyusunan pedoman uraian kegiatan unit	- Perangkat Daerah	100%	146,300,000
1.20.30.16, Analisis kelembagaan organisasi penanggulangan bencana alam dan sekretariat KPID	- Perangkat Daerah	100%	42,200,000
1.20.30.17, Evaluasi kelembagaan non struktural	- Perangkat Daerah	100%	56,400,000
1.20.30.18, Penyusunan uraian tugas jabatan lingkup SETDA, SETWAN, LTD dan UPTD dibawah LTD	- Perangkat Daerah	100%	236,400,000
1.20.30.19, Sosialisasi kualifikasi jabatan fungsional umum dan formasi jabatan fungsional tertentu	- Perangkat Daerah	100%	49,150,000
1.20.30.20, Bimtek budaya kerja	- Perangkat Daerah	100%	67,200,000
1.20.30.21, Penyusunan pola karir jabatan	- Perangkat Daerah	100%	185,500,000
1.20.30.22, Fasilitasi pemberian tunjangan kinerja aparatur daerah (penyusunan juknis, sosialisasi, penilaian kinerja)	- Perangkat Daerah	100%	123,850,000
1.20.30.23, Penyusunan standarisasi kebutuhan kendaraan bermotor SKPD di lingkungan Pemprov DIY	- Perangkat Daerah	100%	57,450,000
1.20.30.24, Kompetisi antar daerah bidang pelayanan publik	- Perangkat Daerah	100%	220,500,000
1.20.30.25, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pakta integritas bidang tata kelola pemerintahan	- Perangkat Daerah	100%	98,500,000
1.20.30.26, Penyusunan pola koordinasi perangkat daerah	- Perangkat Daerah	100%	52,600,000
1.20.30.27, Pengaturan naskah dinas di lingkungan Pemprov DIY	- Perangkat Daerah	100%	52,100,000
1.20.30.28, Penyusunan pembuatan panduan naskah elektronik	- Perangkat Daerah	100%	150,000,000
1.20.30.29, Fasilitasi TIMPI	- Perangkat Daerah	100%	125,000,000
x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			446,000,000
x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Biro Organisasi	100%	4,000,000
x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	- Biro Organisasi	100%	3,500,000
x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	- Biro Organisasi	100%	1,000,000
x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Biro Organisasi	100%	16,000,000
x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Biro Organisasi	100%	5,000,000
x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Biro Organisasi	100%	26,000,000
x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Biro Organisasi	100%	28,000,000
x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an	- Biro Organisasi	100%	4,500,000
x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	- Biro Organisasi	100%	58,000,000
x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Biro Organisasi	100%	300,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			278,000,000
x.xx.02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor	- Biro Organisasi	100%	92,000,000
x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Biro Organisasi	100%	150,000,000
x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- Biro Organisasi	100%	36,000,000
x.xx.05, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			75,000,000
x.xx.05.01, Pendidikan dan pelatihan formal	- Perangkat Daerah	100%	75,000,000
x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			69,500,000
x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Biro Organisasi	100%	19,000,000
x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran	- Biro Organisasi	100%	9,500,000
x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	- Biro Organisasi	100%	26,000,000
x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- Biro Organisasi	100%	7,000,000
x.xx.06.06, Penyusunan Laporan Tahunan	- Biro Organisasi	100%	8,000,000
BIRO KEPEGAWAIAN			54,605,007,658
BELANJA TIDAK LANGSUNG			10,378,209,000
BELANJA LANGSUNG			44,226,798,658
1.20.26, Program panataan peraturan perundang-undangan			30,076,000
1.20.26.02, Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	- Terselainya Rancangan Peraturan Gubernur dan Buku Himpunan Peraturan	2 RSK dan 125 buku himpunan peratur	30,076,000
1.21.15, Program pendidikan kedinasan			57,762,125
1.21.15.02, Pendidikan penjenjangan struktural	- Terlaksananya diklatpim Tk. II	15 orang	57,762,125
1.21.16, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			1,282,644,225
1.21.16.02, Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah	- Terkirimnya PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan Tk. II	10 PNS	311,051,250
1.21.16.03, Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	- Terkirimnya PNS yang mengikuti diklat teknis	150 orang	549,711,250
1.21.16.04, Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah	- Terkirimnya PNS yang mengikuti diklat fungsional	50 PNS	197,966,250
1.21.16.05, Pendidikan dan pelatihan teknis bagi pengelola P3KSDM Provinsi DIY	- Terlaksananya diklat teknis untuk Assesor - Terlaksananya diklat teknis Psycodiagnostic	-10 orang dan 15 orang	223,915,475

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.21.17, Program pembinaan dan pengembangan aparatur			30,234,069,774
1.21.17.01, Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	- Tersusunnya Peraturan Gubernur Tentang Pola Karier PNS	1 Pergub	72,938,875
1.21.17.03, Penempatan PNS	- Terlaksananya Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY	1.000 PNS	369,289,400
1.21.17.04, Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	- Diterbitkannya Surat Keputusan Kenaikan Pangkat bagi PNS	4.000 SK/PNS	380,482,950
1.21.17.05, Pembangunan /pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	- Tersedianya portal kepegawaian yang terintegrasi dengan database SIMPEG	8.000 data PNS Aktif	165,515,225
1.21.17.08, Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	- Terseleksinya dan penyerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 2008 bagi PNS - Pemberian Tali Asih bagi PNS Purna Tugas	570 orang dan 500 orang	1,123,476,200
1.21.17.09, Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	- Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	20 SK/Surat Dokumen	133,717,600
1.21.17.11, Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	- Terlaksananya pemberian bantuan bagi PNS yang mengikuti tugas belajar	20 orang	355,003,939
1.21.17.14, Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)	- Tersusunnya laporan identifikasi kebutuhan diklat untuk masing-masing instansi	32 SKPD	57,040,375
1.21.17.18, Penyelenggaraan ujian dinas	- Terlaksananya ujian dinas	150 PNS	44,549,200
1.21.17.19, Penyelesaian penetapan hukum pegawai dan pejabat negara	- Terselesaikannya permintaan surat izin mencalonkan sebagai kades, surat ijin cuti dan surat izin cerai	50 surat izin/keterangan	33,593,020
1.21.17.20, Pembekalan PNS calon Pensiun	- Terlaksananya pembekalan PNS yang memasuki batas usia Pensiun (BUP)	450 orang	64,000,000
1.21.17.21, Penanganan Pegawai Tidak Tetap	- Terselesaikannya SK PTT	315 SK/PTT	27,147,775
1.21.17.25, Penyusunan Formasi CPNS	- Tersusunnya SK Gub tentang Formasi CPNS	1 SK Gub tentang formasi CPNS	27,000,000
1.21.17.26, Pengangkatan CPNS	- Terlaksananya pengangkatan dan penetapan NIP bagi Tenaga Honorer menjadi CPNS	78 orang	93,400,000
1.21.17.27, Pemrosesan Ijin Luar Negeri dan Ijin Belajar	- Terlaksananya proses ijin ke luar negeri dan ijin belajar	105 ijin	30,322,225
1.21.17.28, Peningkatan Kesejahteraan Jasmani	- Terlaksananya pelatihan SKJ bagi PNS - Terlaksananya lomba SKJ - Terlaksananya tes kebugaran bagi PNS	100 PNS, 320 PNS dan 1.200 PNS	61,272,670
1.21.17.29, Peninjauan Masa Kerja PNS	- Terlaksananya peninjauan masa kerja PNS Pemerintah Provinsi DIY	100 SK/PNS	19,920,450
1.21.17.30, Fasilitasi Pembinaan, Motivasi dan Implementasi Jabatan Fungsional Tertentu	- Terlaksananya pembinaan bagi pejabat fungsional di masing-masing SKPD	sesuai formasi & usulan	122,986,600
1.21.17.31, Pengelolaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)	- Tersusunnya LHKPN	1 laporan	63,418,600
1.21.17.32, Fasilitasi Pelaksanaan Pilot Project Penggunaan Nomor Induk Pegawai (NIP) Baru	- Tersedianya kelengkapan data PNS secara lengkap dari CPNS hingga pangkat terakhir	8.250 pegawai	89,868,500
1.21.17.33, Pelaksanaan Pemberian Reward dan Punishment	- Terlaksananya pemberian tunjangan kinerja aparatur daerah	8.250 pegawai	26,105,272,900
1.21.17.34, Pengukuran Kompetensi Bagi Pejabat Struktural Pemerintah Provinsi DIY	- Terlaksananya pengukuran dan tersedianya profil kompetensi bagi pejabat struktural Pemerintah Provinsi DIY	54 orang	364,158,434
1.21.17.35, Tes Psikologi Bagi PNS Pemerintah Provinsi DIY	- Terselenggaranya tes psikologi	200 orang	86,482,619

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.21.17.36, Bimbingan Psikologis bagi PNS Pemerintah Provinsi DIY yang Bermasalah	- Terlaksananya layanan bimbingan psikologis bagi PNS yang mempunyai masalah	30 orang	25,103,910
1.21.17.37, Penyusunan Motivasi Fit bagi PNS Provinsi DIY	- Tersusunnya Profil Motifasi Pegawai	2 SKPD	318,108,307
1.24.15, Program perbaikan sistem administrasi kearsipan			71,665,400
1.24.15.01, Pembangunan data base informasi kearsipan	- Tersedianya sarana penyimpanan dan tertatanya data arsip file perorangan pegawai, data kolektif pegawai	2.000 arsip dinamis	71,665,400
x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,821,755,400
x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Terkirimnya surat dan paket dinas ke alamat yang dituju	3400 surat, 70 paket	15,000,000
x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber data air dan listrik	7 rekening	171,800,000
x.xx.01.03, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Penyediaan jasa peralatan kantor	10 jenis	58,620,000
x.xx.01.04, Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	- Pemberian bantuan kepada pegawai yang kecelakaan, rawat inap di rumah sakit, meninggal dunia - Pemberian bantuan kepada PNS yang sakit dan tewas karena menjalankan tugas dinas - Terdeteksinya secara dini kondisi kesehatan pejabat eselon I,II,III dan IV	8.250 PNS, 100 PNS, 740 PNS	1,500,317,550
x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	- Terbayarnya pajak kendaraan dinas roda dua dan roda empat	7 unit kendaraan roda empat dan 5 ur	2,145,000
x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Terbayarnya honorarium bendahara, pembantu bendahara, PPK dan pembantu PPK	11 PNS	25,000,000
x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Terpeliharanya kebersihan bangunan gedung tempat bekerja	gedung,halaman, taman	125,729,000
x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya alat tulis kantor untuk operasional SKPD	1 paket	33,170,000
x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan barang operasional SKPD	1 paket	64,900,000
x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	- Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	seluruh Kompleks	8,600,000
x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	11 jenis	191,000,000
x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Tersedianya peralatan rumah tangga yang lengkap	20 jenis	8,473,000
x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an	- Tersedianya bahan bacaan, koran dan buku-buku pustaka	100 eksemplar	19,518,000
x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya makanan dan minuman pendukung rapat	300 kali rapat	55,000,000
x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi bidang kepegawaian ke luar daerah	50 kali	443,700,000
x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	- Terbayarnya honorarium penjaga keamanan kantor (PTT)	6 orang PTT	60,690,000
x.xx.01.22, Pelayanan Taperum	- Monitoring dan pelayanan taperum PNS	5 kabupaten/kota, Provinsi dan instansi	38,092,850
x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			4,601,110,000
x.xx.02.03, Pembangunan gedung kantor	- Tersedianya sarana penyimpanan ruang arsip file kepegawaian	1 gedung	3,200,000,000
x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor	- Tersedianya perlengkapan gedung kantor	penangkal petir P3KSDM	150,000,000
x.xx.02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor	- Terpenuhinya peralatan gedung kantor	1 jenis	13,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur	- Tersedianya mebel kantor yang memadai	5 jenis mebel	57,000,000
x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Terpeliharanya gedung kantor	4 jenis	137,250,000
x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Terpeliharanya kelayakan kendaraan	7 unit kendaraan roda empat dan 5 ur	173,250,000
x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	- Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	5 buah	1,500,000
x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- Terpeliharanya peralatan gedung kantor	7 jenis	14,850,000
x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	- Terpeliharanya mebeleur sarana kantor	4 jenis	18,810,000
x.xx.02.30, Pemeliharaan rutin/berkala fumigasi	- Terlaksananya fumigasi ruang arsip kepegawaian	2 ruang	35,450,000
x.xx.02.42, Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	- Terlaksananya rehab gedung kantor	1 kompleks	800,000,000
x.xx.03, Program peningkatan disiplin aparatur			4,580,688,650
x.xx.03.01, pengadaan mesin /kartu absensi	- Tersedianya mesin/kartu absensi	100 buah	583,175,600
x.xx.03.02, Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya	- Tersedianya bahan pakaian dinas harian + ongkos jahit	8.250 PNS	3,878,713,100
x.xx.03.08, Pembuatan Kartu Identitas / ID Card Bagi PNS, PTT dan Guru Bantu Pemprov DIY	- Tersedianya ID Card PNS, PTT dan guru bantu Pemerintah Provinsi DIY	8250 kartu	107,080,150
x.xx.03.09, Penyelesaian Pembuatan Karpeg. Karis dan Karsu Bagi PNS Provinsi DIY	- Terlaksananya penerbitan karpeg, karis dan karsu bagi PNS Pemerintah Provinsi DIY	525 kartu	11,719,800
x.xx.04, Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS			319,221,200
x.xx.04.01, Pemulangan pegawai yang pensiun	- Terselesaikan dan penyerahan SK Pensiun tepat waktu	500 SK	138,600,000
	- Terlayannya pemindahan PNS antar kabupaten/kota dalam provinsi dari dan ke kabupaten/kota provinsi lain	400 PNS	180,621,200
x.xx.05, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			69,305,884
x.xx.05.03, Bimbingan teknis implementasi peraturan Per-UU-an	- Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	31 instansi	69,305,884
x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			158,500,000
x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	5 buku	70,000,000
x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran	- Tersusunnya laporan keuangan semesteran	2 bendel	22,000,000
x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	- Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	4 bendel	24,500,000
x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 bendel	22,000,000
x.xx.06.06, Penyusunan Laporan Tahunan	- Tersusunnya laporan akhir tahun	1 bendel	20,000,000
BIRO KERJASAMA			5,245,513,825
BELANJA TIDAK LANGSUNG			1,516,513,825

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
BELANJA LANGSUNG			3,729,000,000
1.20.25, Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah			3,022,000,000
1.20.25.01, Fasilitasi /pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	- Meningkatkan Terbentuknya Kerjasama Antar Pemerintah Prov. DIY dengan Pihak Lain	100%	272,000,000
1.20.25.02, Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi	- Meningkatkan Terbentuknya Kerjasama Antar Pemerintah Prov. DIY dengan Pihak Lain di bidang Ekonomi dan Investasi	100%	160,000,000
1.20.25.05, Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak-Pihak di Dalam Negeri	- Memantapkan Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga di Dalam Negeri	100%	107,000,000
1.20.25.06, Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Kerjasama dengan Pihak-Pihak di Dalam Negeri	- Memantapkan Program Kerjasama Sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah	100%	65,000,000
1.20.25.07, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak-Pihak Dalam Negeri	- Meningkatkan efektivitas Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemerintah Prov. DIY dengan Pemerintah Daerah, Lembaga, dan Pihak Swasta di Dalam Negeri	100%	215,000,000
1.20.25.09, Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Kerjasama dengan Pihak-Pihak di Luar Negeri	- Memantapkan Program Kerjasama dengan Mitra Luar Negeri sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Daerah	100%	646,000,000
1.20.25.10, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama dengan Pihak-Pihak di Luar Negeri	- Meningkatkan efektivitas Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemerintah Prov. DIY dengan Pihak-pihak di Luar Negeri	100%	210,000,000
1.20.25.14, Penanganan Kerjasama DIY dalam Pelaksanaan MPU	- Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah MPU	100%	321,000,000
1.20.25.15, Penanganan Kerjasama DIY-Jawa Tengah	- Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Kerjasama DIY - Jawa Tengah	100%	170,000,000
1.20.25.16, Penanganan Kerjasama DIY-Jawa Timur	- Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Kerjasama DIY - Jawa Timur	100%	149,000,000
1.20.25.17, Penanganan Kerjasama DIY-Kalimantan Timur	- Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Kerjasama DIY - Kalimantan Timur	100%	149,000,000
1.20.25.18, Penanganan Kerjasama DIY - Kyoto Prefecture, Jepang	- Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Kerjasama DIY - Kyoto Prefecture	100%	76,000,000
1.20.25.19, Penanganan Kerjasama DIY - Jerman	- Meningkatkan efektivitas Pelaksanaan Kerjasama DIY - Jerman	100%	295,000,000
1.20.25.20, Penanganan Kerjasama DIY - Chiangmai, Thailand	- Meningkatkan efektivitas Pelaksanaan Kerjasama DIY - Chiangmai	100%	45,000,000
1.20.25.22, Penanganan Kerjasama DIY - Gyengsangbukdo, Korea Selatan	- Meningkatkan efektivitas Pelaksanaan Kerjasama DIY - Gyeongsangbukdo, Korea Selatan	100%	142,000,000
x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			589,000,000
x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Tersedianya perangko, materai, dan terkirimnya surat	100%	6,000,000
x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	- Terpenuhinya kebutuhan pegawai dalam penggunaan kendaraan dinas/operasional untuk menyelesaikan tugas pekerjaan	100%	1,000,000
x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Terpenuhinya honorarium pengadministrasi keuangan dan barang	100%	15,000,000
x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Tersedianya alat dan bahan pembersih untuk menjaga kebersihan kantor	100%	3,000,000
x.xx.01.09, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Terpeliharanya Peralatan Kantor	100%	8,000,000
x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	65,000,000
x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Terlaksananya Pencetakan dan Penggandaan sebagai penunjang kelancaraan pelaksanaan tugas pekerjaan	100%	40,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	- Tersedianya sarana penerangan ruang kerja	100%	6,000,000
x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya Notebook, Komputer, dan Printer sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan	100%	55,000,000
x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an	- Tersedianya Surat Kabar	100%	5,000,000
x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Pelaksanaan Rapat Koordinasi	100%	85,000,000
x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Tersedianya kendaraan untuk tanu, Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas ke Pusat, dan Perjalanan Dinas keluar Provinsi untuk keperluan rapat koordinasi, dan konsultasi	100%	300,000,000
x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			108,000,000
x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	100%	105,000,000
x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	- Terpeliharanya Mebelair sebagai Sarana & Prasarana Kerja	100%	3,000,000
x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			10,000,000
x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Tersusunnya LAKIP sebagai Tolak Ukur Keberhasilan Kinerja SKPD	100%	5,000,000
x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran	- Tersusunnya Laporan Semesteran Instansi Tahun 2009	100%	1,000,000
x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	- Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Keuangan Instansi Tahun 2009	100%	1,000,000
x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- Tersusunnya Laporan Keuangan Instansi Akhir Tahun 2009	100%	3,000,000
BIRO HUKUM			6,095,915,000
BELANJA TIDAK LANGSUNG			1,734,985,000
BELANJA LANGSUNG			4,360,930,000
1.20.23, program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			23,000,000
1.20.23.01, Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	- Entry data perda, peraaturan gubernur, keputusan gubernur	10 perda, 20 pergub, 300 kepgub	23,000,000
1.20.26, Program panataan peraturan perundang-undangan			3,723,860,000
1.20.26.01, Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	- Terselenggaranya Forum Konsultasi Hukum,Forum Dilkehjapol, Identifikasi dan Fasilitasi Permasalahan HAM, Identifikasi dan Verfikasi Kebijakan Gubernur, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Rakornis Pengawasan	4 kali,3 kali,20 mslh,5 bid,8 Raperda,4	680,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.20.26.02, Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Kebijakan Daerah Kab/Kota, Inventarisasi dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Produk Hukum Kab/Kota - Ditetapkannya Prolegda 2009, penyusunan rencana Prolegda 2010	1 Prolegda 2009, 1 rencana Prolegda 2010	40,000,000
1.20.26.03, Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	- Terlaksananya pembahasan Raperda, PerGub, Kep. Gubernur, Keputusan Sekda, Keputusan Wakil Gubernur, SE Gubernur	5 raperda, 30 pergub, 200 kepgub, 100 keput	687,000,000
1.20.26.04, Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	- Terselenggaranya Workshop Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kab/Kota, Sosialisasi HAM, Sosialisasi HAM melalui media elektronik, Rapat Koordinasi Penegakan HAM, Sosialisasi Produk Hukum, Workshop JDI Hukum, Rapat Kerja JDI Hukum, Pembinaan Legal Audit, Diksus Pembina PPNS	50 org, 5 kl, 2 kl, 50 org, 50 org, 5 kl, 1 kl, 50 org	830,000,000
1.20.26.05, Publikasi peraturan perundang-undangan	- Terlaksananya Pencetakan LD dan BD, Penyusunan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan, Penyusunan Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk CD	3000 buku, 3000 buku, 100 buku, 50 buku	165,000,000
1.20.26.06, Kajian peraturan per-UU-an daerah terhadap peraturan per-UU-an yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan per-UU-an daerah	- Terselenggaranya sarasehan dalam rangka pengkajian produk hukum, telaahan dan kajian rancangan produk hukum dan rancangan produk hukum Kab/Kota	3 kali, 60 buah produk hukum	280,000,000
1.20.26.07, Penyelesaian Permasalahan Hukum	- Fasilitasi penanganan sengketa hukum	3 kasus	210,000,000
1.20.26.08, Coaching clinic dan pembekalan advokasi hukum	- Terselenggaranya coaching clinic, pembekalan advokasi hukum	2 kali 100 orang, 80 orang	230,000,000
1.20.26.10, Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	- Terlaksananya pengelolaan dokumen hukum, pembinaan JDI Hukum	5000 buku, 5 Kab/Kota	224,500,000
1.20.26.11, Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum	- Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum Provinsi, Lokakarya Evaluasi Implementasi Produk Hukum Provinsi, Lokakarya Pengawasan Kebijakan Daerah Kab/Kota, Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota yang telah berjalan minimal 5 tahun, Penyusunan protap pengawasan produk hukum kab/kota	20 buah, 50 org, 2 kl 100 org, 12 kl, 40 kl	377,360,000
x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			442,070,000
x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Terkirimnya surat	2000 surat	4,100,000
x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	- Terwujudnya pengurusan STNK dan KIR kendaraan dinas/operasional	7 unit	1,500,000
x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan	5 program 30 kegiatan	15,720,000
x.xx.01.09, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	17 mesin ketik, 9 AC, 17 komputer, 14 n	19,500,000
x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Terlaksananya pengadaan ATK	1 paket	34,750,000
x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 paket	33,250,000
x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	- Terlaksananya pengadaan alat listrik/penerangan	1 paket	8,500,000
x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Terlaksananya pengadaan LCD, komputer, printer	1 LCD, 2 komputer, 2 printer	40,000,000
x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an	- Tersedianya surat kabar dan buku peraturan Per-UU-an	3 surat kabar, 1 paket WPU, 100 buku	15,500,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	- Terlaksananya pembelian hidangan rapat dan extra fooding	50 kali rapat,extra fooding untuk 21 o	33,500,000
x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Terpenuhiya rapat dan konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	55 kali ke Luar Daerah, 57 kali ke Dala	235,750,000
x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			161,500,000
x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur	- Terlaksananya pengadaan meja kursi tamu, rak arsip	1 set meja kursi tamu, 2 rak dixicion	9,500,000
x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Terpeliharanya peralatan gedung/kantor	1 paket	4,250,000
x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Terpeliharanya kendaraan bus, mobil, motor	1 bus, 4 mobil, 2 motor	110,500,000
x.xx.02.30, Pemeliharaan rutin/berkala fumigasi	- Terlaksananya fumigasi ruang dokumentasi/perpustakaan hukum	2 kali	37,250,000
x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			10,500,000
x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD	14 eksemplar	2,500,000
x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran	- Tersusunnya Laporam Keuangan Semesteran	14 eksemplar	2,500,000
x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	- Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	14 eksemplar	2,500,000
x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	17 eksemplar	3,000,000
SEKRETARIAT DEWAN			44,791,753,680
BELANJA TIDAK LANGSUNG DPRD			11,482,285,000
BELANJA TIDAK LANGSUNG SEKRETARIAT DEWAN			4,371,770,215
BELANJA LANGSUNG			28,937,698,465
1.20.15, Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			20,976,010,350
1.20.15.01, Pembahasan rancangan peraturan daerah	- Terlaksananya pembahasan Raperda/Nota Kesepakatan/ Rekomendasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DIY: - Raperda APBD 2009 - Raperda Perhitungan APBD 2008 - Raperda APBD 2009 Perubahan - Raperda APBD 2010 - Ranc. Nota Kes. KUA & PPAS 2009 Perubahan - Ranc. Nota Kes.KUA dan PPAS 2010 - Evaluasi APBD 2008 semester I - Evaluasi APBD 2008 semester II	100%	6,306,493,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.20.15.02, Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat /tokoh agama	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Rakepwan dan Nota Kesepakatan : 10 PANSUS/AKD/TIM) - Terlaksananya penerimaan : - Dengar pendapat/hearing/audiensi : 96 kali - Demo/Unjuk rasa : 40 kali - Tamu : 60 kali - Sarasehan (coffee morning/openhouse) : 2 kali 	100%	288,746,200
1.20.15.03, Rapat-rapat alat Kelengkapan Dewan	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya rapat-rapat rutin alat kelengkapan Dewan <ul style="list-style-type: none"> 1) Rapat Pimpinan 24 kali 2) Rapat Komisi/AKD 144 kali/komisi 3) Rapat Panmus 48 kali 4) Rapat BK 72 kali 5) Rapat Panggar 10 kali 6) Rapat Gabungan AKD/ AKD 48 kali 7) Ragabpim/Rakerpim/AKD 48 kali 	100%	648,795,000
1.20.15.04, Rapat-rapat paripurna	<ul style="list-style-type: none"> - Terselenggaranya Rapat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Propinsi DIY : 6 kali 	100%	111,740,000
1.20.15.05, Kegiatan reses	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya kegiatan Reses : 330 OH 	100%	708,164,000
1.20.15.06, Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPR dalam daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah : 70 kali/komisi 	100%	785,280,000
1.20.15.07, Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPR	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Keikutsertaan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri Bimtek (seminar/ workshop/ lokakarya/ pelatihan/kursus) : 275 OK 	100%	3,647,940,000
1.20.15.09, Pembahasan LKPJ Gubernur DIY	<ul style="list-style-type: none"> - Terbahasnya LKPJ Gubernur DIY oleh Pansus DPRD DIY 1 Pansus LKPJ akhir Tahun 2008 	100%	408,161,000
1.20.15.11, Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Propinsi DIY ke Luar Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Peningkatan wawasan pengetahuan Anggota Alat kelengkapan DPRD Propinsi DIY melalui konsultasi ke Pusat / kunjungan kerja keluar daerah <ul style="list-style-type: none"> 1) Komisi 2 kali/komisi 2) Pimpinan Dewan 12 kali 3) Panitia Musyawarah 2 kali 4) Panitia Anggaran 1 kali 5) Badan Kehormatan 2 kali 6) Pendampingan Mitra Kerja 4 kali/anggota 7) Koordinasi dan Pelaksanaan Tugas Luar Daerah 2 kali/anggota 8) Delegasi 4 kali 	100%	6,487,411,000
1.20.15.12, Koordinasi dan komunikasi Pimpinan dan Sekretaris DPRD Provinsi DIY	<ul style="list-style-type: none"> - Keikutsertaan dalam Pertemuan Forum Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD se Indonesia : 8 kali - Keikutsertaan dalam Pertemuan B Kehormatan DPRD se Indonesia : 3 kali - Keikutsertaan dalam Pertemuan BK DPRD se DIY : 2x - Keikutsertaan dalam Pertemuan Sekt DPRD se DIY: 3x 	100%	454,722,800

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.20.15.13, Penyusunan Research Brief	<ul style="list-style-type: none"> - Terselenggaranya Pertemuan Asosiasi BK se DIY : 1 x - Tersedianya Referensi Hasil Kajian/ Penelitian Bagi Anggota DPRD sesuai bidang tugas komisi dalam Research Brief : 24 Judul 	100%	77,800,000
1.20.15.14, Optimalisasi Pengelolaan Informasi dan Penyelenggaraan Pengkajian	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dan terkelolanya Data dan Informasi : <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Penelitian / Kajian sesuai Bidang Komisi 100 Hasil Penelitian/ Kajian dari Instansi/Lembaga/Perguruan Tinggi, LSM dan Massmedia - Makalah Hasil Seminar / Workshop/ Lokakarya : 50 Makalah Seminar/ Lokakarya / Work Shop - Jurnal Ilmiah/Umum/Buletin:12 Jurnal Ilmiah/umum/Buletin - Terjalinnya Kerjasama dengan Sumber data (Instansi/ Lembaga/ Perguruan Tinggi, LSM dan Massmedia) : 45 Sumber data - Terselenggaranya Forum Diskusi dengan Narasumber : 12 diskusi 	100 %	61,300,000
1.20.15.15, Fasilitasi Pembahasan Raperda Inisiatif, Rancangan Nota Kesepakatan, Rakepwan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Bahan Pra Raperda dan Raperda Inisiatif/Rancangan Nota Kesepakatan/ Rakepwan DPRD Provinsi DIY : 2 draft 	100 %	130,308,900
1.20.15.16, Penyelenggaraan Publikasi Kegiatan DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - Terselenggarakannya kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD : <ul style="list-style-type: none"> - Media Cetak : 7 kali - Audio (radio) - dialog interaktif : 20 kali - siaran langsung : 22 kali - Audio Visual (Tv) - dialog interaktif : 12 kali - siaran langsung : 4 kali - Pameran Pembangunan : 1 kali - Terselenggaranya Kemitraan Dengan Wartawan - Konperensi Pers : 8 kali - Presrealese : Bahan Berita 90 Kegiatan DPRD - Olah raga : 1 kali 	100 %	509,361,350
1.20.15.17, Penerbitan Majalah Mimbar Legislatif, Pembuatan Booklets dan Pembuatan Film Kegiatan Komisi DPRD Propinsi DIY	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Penerbitan Majalah Mimbar Legislatif (ML) dan Booklets <ul style="list-style-type: none"> 1.Majalah Mimbar Legislatif : 4 edisi 2.Booklets: 1000 buku 	100 %	83,550,100
1.20.15.18, Pengelolaan Website DPRD DIY	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya informasi website milik DPRD Propinsi DIY tentang : <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Perundangan produk DPRD DIY 3 jenis b. Jadwal Kegiatan harian DPRD DIY : 1 tahun c. Berita - Berita Kegiatan DPRD DIY : 1 tahun d. Hasil Publik Hearing : 1 tahun e. Layanan SMS Gateway: 1 tahun 	100 %	70,035,000
1.20.15.19, Fasilitasi Penyusunan Hasil Kerja DPRD Periode 2004 - 2009	<ul style="list-style-type: none"> - Tersajinya laporan hasil kerja D P R D Propinsi DIY Periode 2004 -2009 	100 %	196,202,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4,041,066,653
x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Surat Terkirim : 1500 surat	100%	13,860,000
x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	- Terlaksananya pembayaran tagihan rekening berlangganan selama 1 tahun - Rekening Telephone 5 SST - Rekening Listrik 2 Rekening - Internet 2 Jenis	100 %	740,400,000
x.xx.01.04, Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	- Terlaksananya penyediaan jasa asuransi kesehatan bagi anggota DPRD Provinsi DIY beserta keluarganya selama 1 tahun 220 orang	100 %	1,745,481,600
x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	- Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas/operasional -STNK dan KIR KBM RODA 4 : 29 Bh -STNK KBM RODA 2: 5 Bh	100 %	10,805,000
x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Terlaksananya adminitrasi keuangan oleh 12 orang	100 %	31,920,000
x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor DPRD DIY melalui : 1) pengadaan alat dan bahan pembersih 2) pengadaan jasa cleanning servis 3) terbayarnya retribusi sampah	100 %	200,910,400
x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Terlaksananya pengadaan/pembelian ATK	100 %	252,812,800
x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Terlaksananya pengadaan/pembelian barang cetakan dan Penggandaan	100 %	140,153,000
x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	- Terlaksananya pengadaan/pembelian komponen peralatan listrik dan penerangan bangunan Kantor	100 %	11,330,100
x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Terlaksananya pengadaan / pembelian peralatan Rumah Tangga DPRD Provinsi DIY	100 %	32,170,000
x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Terlaksananya pengadaan/pembelian bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	112,180,000
x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	- Terlaksananya Pengadaan/pembelian Makanan dan Minuman untuk : - ekstra fooding - Rakor sekretariat Dewan - Tamu Sekretariat Dewan - Petugas Pengamanan Unjuk Rasa - Petugas jaga keamanan - Pisah sambut anggota dewan lama dan baru	100 %	194,025,000
x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Terlaksananya Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi sekretariat DPRD Provinsi DIY dalam dan luar daerah yaitu : - Koordinasi ke Kabupaten Kota 4 kab/kota - Konsultasi dan koordinasi di dalam jawa 10 kali - Koordinasi / kunjungan ke Luar Jawa 5 kali	100 %	259,844,000
x.xx.01.29, Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	- Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor DPRD	100 %	295,174,753

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
	Provinsi DIY 12 bulan		
x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			3,218,520,312
x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor	- Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	100 %	321,257,450
x.xx.02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor	- Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	100 %	1,036,421,992
x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur	- Terlaksananya pengadaan mebeulair Rumah Jabatan ketua DPRD	100 %	107,145,170
x.xx.02.20, Pemeliharaan rutin /berkala rumah jabatan	- Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan Ketua DPRD Provinsi DIY 1 unit	100 %	25,000,000
x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor DPRD Provinsi DIY	100 %	175,398,500
x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Sekretariat DPRD Propinsi DIY - Roda 4 : 29 bh - Roda 2 : 5 bh	100 %	699,195,200
x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	- Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 1 tahun	100 %	228,825,000
x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor 1 tahun	100 %	137,475,000
x.xx.02.42, Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	- Terlaksananya Penataan Sekretariat DPRD : - Penataan Ruang Sekretariat DPRD Lantai II - Pembangunan toilet - Penambahan Ruang Tunggu	100 %	487,802,000
x.xx.03, Program peningkatan disiplin aparatur			500,189,750
x.xx.03.02, Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya	- Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya : - Pakaian Sipil Harian (PSH) DPRD 110 stel - Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan Panjang DPRD 55 stel - Pakaian Sipil Resmi (PSR) DPRD 55 stel - Pakaian Sipil Lengkap (PSL) DPRD BARU 55 stel dan SETWAN 20 stel	100 %	488,629,750
x.xx.03.03, Pengadaan pakaian kerja lapangan	- Tersedianya Pakaian kerja lapangan : - Jas Hujan : 89 potong - Pakaian Petugas Pendamping 20 potong - Jaket 10 potong - Pakaian Pramuladi 10 potong - Pakaian Petugas Keamanan 5 stel	100 %	11,560,000
x.xx.05, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			73,346,000
x.xx.05.09, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Kesekretariatan	- Terkirimnya peserta pelatihan tentang kesekretariatan : 14 orang	100 %	73,346,000
x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			128,565,400

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Terlaksananya penyusunan Laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja : 8 jenis buku / laporan	100 %	62,134,300
x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran	- Terlaksananya pembuatan pelaporan keuangan : 2 semester	100 %	24,771,800
x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	- Terlaksananya pembuatan laporan keuangan progrosis realisasi keuangan : 4 triwulan	100 %	18,137,100
x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- Terlaksananya pembuatan Laporan keuangan akhir tahun : 1 paket	100 %	23,522,200
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			342,579,727,806
BELANJA TIDAK LANGSUNG			315,145,077,566
BELANJA LANGSUNG			27,434,650,240
1.20.17, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			13,142,514,510
1.20.17.06, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	- Terlaksananya penyusunan peraturan daerah tentang APBD tahun 2009 dan APBD tahun 2010	100%	816,333,250
1.20.17.07, Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	- Terlaksananya penyusunan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD 2009, penjabaran APBD T.A 2010 dan penyusunan DPA SKPD TA 2009	100%	637,393,250
1.20.17.09, Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabran perubahan APBD	- Terlaksananya penyusunan peraturan gubernur tentang perubahan APBD TA 2009 dan DPPA SKPD TA. 2009	100%	279,585,000
1.20.17.10, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	- Tersusunnya peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.2008	100%	356,784,000
1.20.17.11, Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	- Tersusunnya peraturan gubernur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.2008	100%	89,774,300
1.20.17.15, Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang Laporan realisasi Anggaran, Penyusunan neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan di SKPD se DIY	- Terwujudnya pemahaman pelaksanaan pembuatan laporan keuangan di seluruh SKPD Prov.DIY	80%	243,496,000
1.20.17.16, Peningkatan manajemen aset/barang daerah	- Terlaksananya optimalisasi pemanfaatan asset, tersedianya profil asset daerah dan bahan promosi	80%	425,496,000
1.20.17.19, Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	- Terealisasinya penerimaan PBB, BPHTB, PPh 21 & PPh OPDN dari capaian target dana perimbangan	90%	899,293,785
1.20.17.20, Pengelolaan gaji dan Pengendalian Gaji	- Terkoordinasinya pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian gaji dengan instansi terkait	90%	488,781,250
1.20.17.23, Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD	- Terlaksananya penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD TA.2009	100%	374,888,000
1.20.17.24, Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUMD	- Terlaksananya peningkatan kinerja BUMD dan	80%	790,670,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.20.17.25, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan di KPPD Kota Yogyakarta	meningkatnya kinerja 75 BUKP - Terlaksananya peningkatan pendapatan di KPPD Kota Yogyakarta	100%	950,000,000
1.20.17.26, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan di KPPD Bantul	- Terlaksananya peningkatan pendapatan di KPPD kabupaten Bantul	100%	1,140,000,000
1.20.17.27, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan di KPPD Kulon Progo	- Terlaksananya peningkatan pendapatan di KPPD Kabupaten Kulonprogo	100%	427,580,000
1.20.17.28, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan di KPPD gunung Kidul	- Terlaksananya peningkatan pendapatan di KPPD Gunungkidul	100%	446,930,140
1.20.17.29, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan di KPPD Sleman	- Terlaksananya peningkatan pendapatan di KPPD Kabupaten Sleman	100%	1,602,640,000
1.20.17.30, Pemungutan Pajak daerah	- Terealisasinya penerimaan pendapatan sebesar dari Pajak Daerah sebesar Rp. 490.796.468.400,-	100%	432,634,000
1.20.17.31, Pembinaan Teknis Pengelolaan PKB dan BBNKB	- Terwujudnya koordinasi antar 3 instansi SAMSAT	80%	1,112,769,000
1.20.17.41, Pemungutan Restribusi Lelang Hasil Hutan	- Terealisasinya pemungutan retribusi lelang hasil hutan sebesar Rp.550.000.000,-	100%	432,461,100
1.20.17.42, Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2008	- Tertingkatnya pemahaman masyarakat wajib pajak (WP) terhadap peraturan Pajak Daerah	80%	166,161,000
1.20.17.43, Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	- Terwujudnya penerimaan pendapatan dari sumbangan pihak ketiga	80%	70,217,475
1.20.17.44, Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah	- Tersusunnya target pendapatan dan realisasi pendapatan tahun 2010	100%	369,196,160
1.20.17.46, Penyusunan Perda Tentang Perubahan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	- Tersusunnya PERDA Perubahan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	1 paket	110,000,000
1.20.17.47, Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	- Tertingkatnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah	80%	353,202,000
1.20.17.48, Pembinaan Teknis Retribusi Daerah	- Tertingkatnya pemahaman instansi pengelola pendapatan tentang peraturan retribusi dan PPL	80%	126,228,800
1.20.18, Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota			397,764,300
1.20.18.01, Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten /kota	- Terlaksananya evaluasi Perda tentang APBD Kab/Kota TA.2009, Perhitungan TA.2008, Perubahan TA.2009 dan APBD TA.2010	85%	339,209,750
1.20.18.02, Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD kabupaten /kota	- Terlaksananya evaluasi Peraturan Bupati/Walikota tentang APBD Kab/Kota TA.2009, Perhitungan TA.2008, Perubahan TA 2009 dan APBD TA.2010	85%	58,554,550
1.20.20, Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			310,019,000
1.20.20.03, Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	- Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	28 SKPD	179,107,500

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.20.20.04, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	- Terkurangnya kerugian Daerah	85%	70,911,500
1.20.20.09, Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP)	- Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti di seluruh SKPD se Provinsi DIY	100%	60,000,000
1.20.23, program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			107,500,000
1.20.23.02, Pengkajian Opini Publik	- Terwujudnya/terlaksananya kajian opini publik tentang keuangan daerah	100%	42,500,000
1.20.23.03, Penyusunan/Pengumpulan Bank Data Keuangan Daerah	- Tersedianya Bank Data tentang Keuangan Daerah	100%	40,000,000
1.20.23.04, Pembuatan Website BPKD	- Terwujudnya Pembuatan Website BPKD	100%	25,000,000
x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,830,305,345
x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Terlaksananya pengiriman surat menyurat dan pemakaian meterai selama 1 tahun	100%	21,635,000
x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	- Tercukupinya pemakaian kebutuhan akan jasa telepon, listrik dan air selama 1 tahun	100%	570,944,000
x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	- Terlaksananya jasa dalam pengurusan STNK selama 1 tahun	19 R.2, 29 R.4	2,912,000
x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Terselenggaranya jasa pelayanan keuangan selama 1 tahun	100%	209,240,000
x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Terpenuhinya kebersihan kantor selama 1 tahun	100%	337,286,100
x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tercukupinya akan kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun	100%	281,674,605
x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	100%	330,447,300
x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	- Tercukupinya jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor selama 1 tahun	100%	50,023,640
x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Terpenuhinya akan kebutuhan peralatan rumah tangga yang disediakan selama 1 tahun	100%	12,710,000
x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Terpenuhinya langganan surat kabar dan jumlah buku bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli selama 1 tahun	100%	69,316,000
x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tercukupinya akan kebutuhan makanan dan minuman selama 1 tahun	100%	165,555,500
x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Terselenggaranya dalam melaksanakan rapat-rapat organisasi, menghadiri undangan dan konsultasi keluar daerah	100%	735,142,000
x.xx.01.29, Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	- Terlaksananya keamanan kantor oleh PTT selama 1 tahun	4 orang	43,419,200
x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			9,810,778,885
x.xx.02.03, Pembangunan gedung kantor	- Terlaksananya pembangunan gedung kantor	3 unit	5,350,000,000
x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor	- Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor selama 1 tahun	100%	446,900,000
x.xx.02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor	- Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor selama 1 tahun	100%	428,522,110
x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur	- Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor selama 1 tahun	100%	162,628,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Terpeliharanya gedung kantor selama 1 tahun	100%	395,884,000
x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun	48 KBM	483,766,000
x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	- Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun	100%	118,550,000
x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- Terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 1 tahun	100%	696,598,000
x.xx.02.41, Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	- Terpeliharanya rumah dinas Provinsi DIY yang dapat dioptimalkan	9 unit	320,750,000
x.xx.02.42, Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	- Terlaksananya rehabilitasi sedang gedung kantor	2 unit	189,364,000
x.xx.02.48, Pemeliharaan Rutin/Berkala Program/Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	- Terpeliharanya program/sistem akuntansi keuangan daerah selama 1 tahun	1 paket	33,000,000
x.xx.02.64, Pemeliharaan Rutin/Berkala Program/Sistem Penerbitan SP2D Untuk Belanja Non Gaji	- Terpeliharanya program/sistem penerbitan SP2D untuk non belanja gaji selama 1 tahun	1 paket	291,660,150
x.xx.02.65, Pemeliharaan Rutin/Berkala Program/Sistem Penatausahaan dan Pelaporan APBD	- Terpeliharanya program/sistem penganggaran belanja selama 1 tahun	1 paket	400,000,000
x.xx.02.66, Pemeliharaan Arsip Kendaraan Bermotor	- Terselenggaranya pemeliharaan dan penataan arsip kendaraan bermotor se Provinsi DIY selama 1 tahun	264000 berkas	198,400,000
x.xx.02.67, Pemeliharaan Arsip Keuangan	- Terselenggaranya pemeliharaan dan penataan arsip keuangan selama 1 tahun	17250 berkas	175,881,950
x.xx.02.68, Pemeliharaan Rutin/Berkala Program Sistem Gaji Pegawai Daerah	- Terpeliharanya program/sistem gaji pegawai daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama 1 tahun	1 paket	118,874,675
x.xx.05, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			121,500,000
x.xx.05.02, Sosialisasi peraturan perundang-undangan	- Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	54,500,000
x.xx.05.03, Bimbingan teknis implementasi peraturan Per-UU-an	- Terselenggaranya Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Per-UU-an	100%	67,000,000
x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			714,268,200
x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Tersusunnya laporan apaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja selama 1 tahun	50 buku	51,309,700
x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran	- Tersusunnya laporan keuangan smesteran dan prognosis realisasi anggaran BPKD dan seluruh SKPD	170 buku	99,822,000
x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun BPKD dan seluruh SKPD	170 buku	299,386,000
x.xx.06.05, Penyusunan Cash Budget	- Tersedianya acuan rencana penerimaan dan pengeluaran kas	1 set	133,750,500
x.xx.06.09, Penyusunan Laporan Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi DIY	- Tersusunnya laporan pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi DIY selama 1 tahun	1 set	130,000,000
BAWASDA			10,971,084,348
BELANJA TIDAK LANGSUNG			3,702,808,400
BELANJA LANGSUNG			7,268,275,948

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.20.20, Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			2,736,815,770
1.20.20.01, Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	- Terlaksananya pengawasan internal secara berkala	100%	1,832,049,920
1.20.20.02, Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah	- Terlaksananya penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah	100%	431,465,250
1.20.20.03, Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	- Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	100%	47,523,000
1.20.20.05, Inventarisasi temuan pengawasan	- Terlaksananya inventarisasi temuan pengawasan	100%	40,374,000
1.20.20.06, Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	- Terlaksananya gelar pengawasan daerah, monitoring dan tindak lanjut hasil temuan pengawasan, terselenggaranya pemutakhiran data tindak lanjut hasil temuan pengawasan	100%	203,110,100
1.20.20.07, Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	- Terlaksananya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	100%	74,933,500
1.20.20.08, Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	- Terlaksananya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	107,360,000
1.20.21, Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan			154,553,000
1.20.21.01, Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	- Terlaksananya pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	100%	154,553,000
1.20.22, Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			49,139,000
1.20.22.02, Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	- Terlaksananya penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	100%	49,139,000
1.20.23, Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			10,129,000
1.20.23.01, Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	- Terlaksananya penyempurnaan SIM-HP	100%	10,129,000
x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			730,249,500
x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Tersedianya jasa surat - menyurat	100%	5,400,000
x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	- Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	129,600,000
x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	- Terlaksananya perpanjangan STNK Kendaraan Dinas/Operasional	100%	2,294,000
x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Terlaksananya administrasi keuangan	100%	21,060,000
x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Terlaksananya pelayanan kebersihan kantor	100%	44,142,000
x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya alat tulis kantor	100%	40,270,500
x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Tersedianya barang cetak dan penggandaan	100%	23,268,000
x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	- Tersedianya pelayanan listrik/penerangan bangunan kantor	100%	4,435,000
x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Tersedianya peralatan kebersihan	100%	6,900,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an	- Tersedianya surat kabar, referensi dan peraturan Per-UU-an	100%	24,660,000
x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya makanan dan minuman rapat, jamuan tamu	100%	14,165,000
x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Terpenuhinya mengikuti rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah dan koordinasi/konsultasi keluar daerah	100%	365,855,000
x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	- Tersedianya jasa petugas keamanan kantor	100%	48,200,000
x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			3,019,185,678
x.xx.02.03, Pembangunan gedung kantor	- Terlaksananya pembangunan gedung kantor	100%	629,918,678
x.xx.02.05, Pengadaan kendaraan dinas/operasional	- Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	100%	1,895,440,000
x.xx.02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor	- Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	100%	103,144,000
x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	27,000,000
x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	328,833,000
x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	100%	34,850,000
x.xx.05, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			553,860,000
x.xx.05.02, Sosialisasi peraturan perundang-undangan	- Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait bidang pengawasan	100%	69,560,000
x.xx.05.03, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	- Terkirimnya auditor/pegawai Bawasda Provinsi DIY mengikuti bimbingan teknis, seminar, semiloka, workshop	100%	484,300,000
x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			14,344,000
x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Terlaksananya penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	3,586,000
x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran	- Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semesteran	100%	3,586,000
x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	- Terlaksananya penyusunan prognosis realisasi anggaran	100%	3,586,000
x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100%	3,586,000
KANTOR PERWAKILAN DAERAH			5,375,820,812
BELANJA TIDAK LANGSUNG			1,159,762,000
BELANJA LANGSUNG			4,216,058,812
1.17.15, Program pengembangan nilai budaya			992,525,000
1.17.15.01, Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	- KAPERDA	100%	992,525,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.17.16, Program pengelolaan kekayaan budaya			217,180,000
1.17.16.01, Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	- KAPERDA	100%	217,180,000
1.20.25, Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah			114,196,000
1.20.25.01, Fasilitasi /pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	- KAPERDA	100%	114,196,000
1.25.18, Program kerjasama informasi dan Media Massa			940,089,000
1.25.18.01, Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	- Pengrajin Yogyakarta	100%	940,089,000
x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,390,139,475
x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- KAPERDA	100%	11,350,000
x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	- KAPERDA	100%	171,480,000
x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	- KAPERDA	100%	1,000,000
x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- KAPERDA	100%	13,200,000
x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- KAPERDA	100%	214,884,850
x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	- KAPERDA	100%	20,448,125
x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- KAPERDA	100%	35,908,300
x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	- KAPERDA	100%	21,077,800
x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- KAPERDA	100%	104,014,600
x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an	- KAPERDA	100%	13,434,000
x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	- KAPERDA	100%	45,360,000
x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- KAPERDA	100%	310,900,000
x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	- KAPERDA	100%	427,081,800
x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			549,929,337
x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor	- KAPERDA	100%	87,575,000
x.xx.02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor	- KAPERDA	100%	76,000,000
x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- KAPERDA	100%	33,750,000
x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- KAPERDA	100%	127,577,000
x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	- KAPERDA	100%	65,100,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
x.xx.02.42, Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	- KAPERDA	100%	159,927,337
x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			12,000,000
x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- KAPERDA	100%	12,000,000
BADAN DIKLAT			7,264,560,870
BELANJA TIDAK LANGSUNG			2,898,001,000
BELANJA LANGSUNG			4,366,559,870
1.21.15, Program pendidikan kedinasan			1,376,339,640
1.21.15.01, Pendidikan dan pelatihan teknis	- Terlaksananya diklat teknis bagi pejabat dan jabatan fungsional umum	610 orang	988,633,150
1.21.15.03, Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan	- Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan melalui evaluasi pasca diklat	4 jenis diklat	65,849,200
1.21.15.04, Pembuatan buku juknis /juklak	- Terlaksananya pembuatan buku juknis/juklak	Buku Pedoman Perencanaan 2 paket d	88,866,700
1.21.15.05, Pengembangan kurikulum Diklat	- Terlaksananya penyusunan kurikulum diklat	4 jenis diklat	77,289,290
1.21.15.06, Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	- Terlaksananya peningk. ketrampilan dan profesionalisme WI dan Staf serta penilaian angka kredit WI	15 WI dan 10 Staf	155,701,300
1.21.16, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			1,095,087,150
1.21.16.01, Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah	- Terlaksananya diklat prajabatan bagi CPNS Golongan I dan II	300 orang	759,462,150
1.21.16.02, Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah	- Terlaksananya diklat struktural bagi PNS Daerah melalui diklat kepemimpinan tingkat IV bagi calon pejabat eselon IV	30 orang	261,000,000
1.21.16.04, Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah	- Terlaksananya diklat fungsional bagi PNS daerah melalui diklat pranata komputer dan diklat pengelolaan kearsipan berbasis TI	80 orang	74,625,000
x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			584,557,400
x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat dan arsip kantor	5000 buah	14,100,000
x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	- Terlayannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kegiatan Badan Diklat	31 kegiatan	209,340,000
x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Terlayannya administrasi keuangan kegiatan di Badan Diklat	31 kegiatan	35,200,000
x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	1 orang	7,800,000
x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya alat tulis umum kegiatan kantor	31 kegiatan	24,550,000
x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Terlayannya pencetakan dan penggandaan umum kegiatan Diklat	31 kegiatan	40,147,400
x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Terlayannya peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	49,976,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an	- Tersedianya bahan bacaan berupa koran dan majalah	10 bahan bacaan	14,094,000
x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	- Terlayannya rapat-rapat kegiatan kantor	1800 orang sidang	13,500,000
x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar instansi	206 orang hari	135,050,000
x.xx.01.29, Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	- Terlaksananya pengamanan gedung kantor	4 orang	40,800,000
x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1,286,725,680
x.xx.02.03, Pembangunan gedung kantor	- Terlaksananya pembangunan gedung kantor berupa pembangunan tempat parkir peserta diklat roda 2 dan doorloop asrama-ruang makan-kelas	tempat parkir 250 m2, doorloop 220 m	490,068,000
x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor	- Tersedianya perlengkapan kantor	5 Jenis	320,249,930
x.xx.02.21, Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	- Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas, asrama dan menza	4 unit gedung	103,686,000
x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan kelas	4 unit gedung	82,462,000
x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	9 kendaraan	136,971,000
x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	4 jenis pemeliharaan	39,100,000
x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	- Terlaksananya pemeliharaan mebeleur	66 unit	6,500,000
x.xx.02.46, Rehabilitasi Pagar Lingkungan	- Terlaksananya rehabilitasi pagar lingkungan	300 m2	107,688,750
x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			23,850,000
x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja	31 kegiatan	8,060,200
x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	- Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran	2 kali pelaporan	6,169,000
x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	- Tersusunnya Prognosis Realisasi Anggaran	31 kegiatan	4,920,800
x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	1 laporan	4,700,000
KANTOR ARSIP DAERAH			4,448,862,500
BELANJA TIDAK LANGSUNG			1,873,739,000
BELANJA LANGSUNG			2,575,123,500
1.24.15, Program perbaikan sistem administrasi kearsipan			600,000,000
1.24.15.06, Kajian sistem administrasi kearsipan	- kajian/penelitian sistem administrasi kearsipan	buku laporan	80,000,000
1.24.15.09, Penyusutan Arsip Tekstual	- arsip umum, arsip kepegawaian, arsip keuangan	16 instansi	30,000,000
1.24.15.10, Penilaian Arsip Inaktif	- arsip umum, arsip kepegawaian, arsip keuangan	14 instansi	80,000,000
1.24.15.13, Penanganan Arsip INAKTIF (arsip tekstual dinamis)	- 8 instansi	10.000 berkas	100,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.24.15.14, Perlindungan arsip vital provinsi diy	- perlindungan di BPKD, Sekda, UPT-UPT	22 instansi	80,000,000
1.24.15.15, Digitalisasi arsip elektronik untuk media akses	- arsip tekstual 5000, arsip foto 2000, arsip kartografi 1000	8.000 berkas	75,000,000
1.24.15.16, Penilaian Arsip Foto	- 2 instansi	5.105 arsip foto	75,000,000
1.24.15.17, Penyusunan Rancangan Pedoman Pengolahan Arsip Statis	- Rancangan Keputusan Kepala Kantor tentang pedoman pengolahan arsip statis	tersusunnya pedoman pengolahan arsip	35,000,000
1.24.15.18, Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Umum	- Rapergub tentang JRA	tersusunnya JRA	45,000,000
1.24.16, Program penyelamatan dan pelestarian dokumen /arsip daerah			220,000,000
1.24.16.05, Penanganan Arsip Foto	- 2 instansi	4.000 arsip foto, 2 buku DPA	50,000,000
1.24.16.07, Pengolahan Arsip Statis	- arsip JPU, arsip foto, arsipSetwilda, arsip pengangkatan Gubernur dan wakil Gubernur periode 2003-2008, arsip Kraton, arsip Puro Pakualaman	3.300 berkas, 500 foto	75,000,000
1.24.16.09, Perawatan Arsip Statis	- membersihkan arsip, kamperisasi	3.900 boks	20,000,000
1.24.16.10, Alih Media Arsip Statis	- alih media arsip tekstual dan arsip foto ke digital	tekstual 1.500, foto 1.000	50,000,000
1.24.16.13, Pengambilan Kembali Arsip Jogja Yang Ada di BAD Prov. Jateng (eks ANRIWIL)	- terambilnya kembali arsip Jogja yang ada di BAD Jateng.	terambilnya arsip Jogja	25,000,000
1.24.17, Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan			45,000,000
1.24.17.03, Monitoring, evaluasi Pelaksanaan Sistem SKPD	- terlaksananya monitoring pelaksanaan SKPD	40 instansi	45,000,000
1.24.18, Program peningkatan kualitas pelayanan informasi			810,000,000
1.24.18.06, Pengembangan Khasanah Arsip Digital	- diskripsi arsip pada portal KAD	arsip tekstual 5.000 entry, arsip foto 1	60,000,000
1.24.18.07, Promosi dan Sosialisasi Kearsipan	- pameran kearsipan	1 kali	55,000,000
1.24.18.12, Pengelolaan Portal Kearsipan	- penambahan halaman berita dan artikel	berita 20, artikel 40 halaman web 60	45,000,000
1.24.18.13, Alih Tulisan dan Alih Bahasa Arsip Bertuliskan dan Berbahasa Jawa	- arsip bertulisan huruf Jawa dan berbahasa Jawa	1.200 lembar	35,000,000
1.24.18.14, Penyusunan Naskah Sumber Arsip	- naskah sumber arsip pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 1998-2003	tersusunnya naskah sumber arsip	40,000,000
1.24.18.15, Penyusunan Rancangan Pedoman Layanan Arsip Statis	- Rapergub tentang pedoman layanan arsip statis	tersusunnya Rapergub	35,000,000
1.24.18.16, Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kearsipan di SKPD	- petugas kearsipan di SKPD	120 orang	90,000,000
1.24.18.17, Pembuatan Profil Sistem Kearsipan	- visualisasi proses sistem kearsipan	dokumen visual	75,000,000
1.24.18.18, Kearsipan Berbasis Masyarakat	- sarasehan dan pameran kearsipan	1 kali	375,000,000
x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			652,373,500
x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- terselenggaranya jasa surat menyurat	100%	13,500,000
x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	- terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100%	25,500,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
x.xx.01.03, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- terselenggaranya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	30,000,000
x.xx.01.04, Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	- terselenggaranya penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan PNS	100%	23,800,000
x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	- terselenggaranya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	700,000
x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- terselenggaranya penyediaan jasa administrasi keuangan	100%	17,160,000
x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- terselenggaranya penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	42,000,000
x.xx.01.09, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- terselenggaranya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100%	26,700,000
x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	- terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor	100%	65,500,000
x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan pengadaan	100%	27,000,000
x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	- terselenggaranya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	6,000,000
x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- terselenggaranya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	65,000,000
x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- terselenggaranya penyediaan peralatan rumah tangga	100%	74,496,000
x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an	- terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan peraturan Per-UU-an	100%	15,240,000
x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	- terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman	100%	101,497,500
x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	96,380,000
x.xx.01.29, Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	- terselenggaranya penyediaan jasa keamanan kantor	100%	21,900,000
x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			184,750,000
x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	45,000,000
x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	75,000,000
x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	- terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	100%	14,000,000
x.xx.02.30, Pemeliharaan rutin/berkala fumigasi	- terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala fumigasi	100%	50,750,000
x.xx.05, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			45,000,000
x.xx.05.08, Pembinaan, Pengembangan dan Penilaian Angka Kredit Arsiparis	- terselenggaranya pembinaan, pengembangan dan penilaian angka kredit arsiparis	100%	45,000,000
x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			18,000,000
x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- terselenggaranya penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	6,000,000
x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran	- terselenggaranya penyusunan laporan keuangan semesteran	100%	6,000,000
x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- terselenggaranya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100%	6,000,000
BADAN INFORMASI DAERAH			12,553,507,000
BELANJA TIDAK LANGSUNG			4,983,825,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
BELANJA LANGSUNG			7,569,682,000
1.25.15, Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa			923,750,000
1.25.15.02, Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	- Terlaksananya: 1 Forkom FK Metra, 1 Forkom KIM, 500 eks Pkt Info, 4 kegiatan pemodelan KIM, 1 Festival Metra, 4 Sosialisasi Kebijakan Ke KIM Kab, 25 Siaran keliling, 2 diseminasi info.	100%	150,000,000
1.25.15.03, Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi	- Terlaksananya pelayanan informasi kepada masyarakat melalui Plaza Informasi (12 bulan pelayanan, 1 pengembangan informasi, 12 kali sosialisasi TI/DGS melalui MCAP)	80%	321,700,000
1.25.15.05, Pengadaan alat studio dan komunikasi	- Terlaksananya penambahan sambungan 1 titik interkoneksi	85%	142,800,000
1.25.15.06, Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	- Terlaksananya 2 sistem aplikasi (bidang Transportasi dan Olah Raga), 1 buah SOP (server Pemprov), dan 12 bulan layanan jaringan komputer Pemprov. DIY	80%	309,250,000
1.25.16, Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi			188,100,000
1.25.16.01, Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	- Terlaksananya kajian informasi media masa (6 kajian) dan layanan informasi (2 materi)	80%	41,600,000
1.25.16.02, Penyerapan aspirasi masyarakat dan pengembangan layanan informasi	- Terlaksananya penyerapan aspirasi melalui media surat kabar dan tatap muka (6 Forkom Layanan Informasi Publik, 24 Jurnal Aspirasi, 24 Jurnal Opini, 110 bendel kliping pers, 1 layanan informasi melalui Forum Ide Warga)	80%	146,500,000
1.25.17, Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi			52,315,000
1.25.17.01, Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	- Terlaksananya pelatihan SDM bidang informasi dan komunikasi untuk peningkatan kemampuan sebagai administrator data base dan pengelola keamanan jaringan (12 orang latihan, 2 orang seminar)	80%	35,215,000
1.25.17.02, Bimtek calon operator internet/intranet	- Terlaksananya Bimtek SDM sebagai operator internet/intranet (40 orang latihan)	85%	17,100,000
1.25.18, Program kerjasama informasi dan Media Massa			2,596,850,000
1.25.18.01, Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	- Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui Pameran Sekaten (41 hari) dan Pameran Pembangunan (5 hari).	100%	646,350,000
1.25.18.02, Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	- Terlaksananya liputan kegiatan Pemda untuk media masa (150 liputan, 63 publikasi)	90%	269,300,000
1.25.18.04, Penyiaran Dialog Isu Aktual Melalui Media Massa	- Terlaksananya penyiaran dialog isu aktual melalui media masa (229 paket, 6 publikasi, 2 Forum)	90%	220,530,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1.25.18.05, Penyelenggaraan Kemitraan Dengan PERS	- Terlaksananya kemitraan dengan pers (2 kegiatan/ fasilitasi pemberitaan)	80%	143,420,000
1.25.18.06, Penyusunan Sambutan Gubernur	- Tersusunnya naskah sambutan Gubernur/Wakil Gubernur/ Sekretaris Daerah/Asisten Sekda (830 naskah, 250 buku)	100%	83,750,000
1.25.18.07, Penerbitan Kebijakan dan Kinerja Pembangunan	- Terlaksananya penerbitan kebijakan dan kinerja pembangunan melalui media cetak (Buletin SPD Provinsi DIY Jogjawara, edisi bulanan 12.000 eks dan edisi khusus 1.000 eks serta pembuatan buku kerja tahun 2010 sebanyak 1.200 eks)	100%	261,855,000
1.25.18.09, Dokumentasi Kegiatan dan kebijakan Pemerintah Daerah	- Terlaksananya dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah (4.320 buah foto dan 100 keping VCD)	100%	84,825,000
1.25.18.10, Kerjasama Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Anggota MPU	- Terlaksananya kerjasama bidang informasi dan komunikasi anggota MPU (siaran langsung media elektronik 1 kali, mengikuti festival PERTUNRA 1 kali)	80%	42,750,000
1.25.18.11, Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah	- Terlaksananya promosi daerah melalui Pameran PRJ 2009 (32 hari), Invesda Expo (4 hari), Richtech Expo/PPI (9 hari), Batam Expo (10 hari) dan Jabar Expo (8 hari)	100%	844,070,000
1.25.19, Program Fasilitasi, Pembinaan, Pengendalian Pos Telekomunikasi dan Frekuensi			1,412,170,000
1.25.19.01, Pembinaan dan Pendataan Pengusaha Jasa Titipan	- Terlaksananya pembinaan dan pengusahaan jasa titipan (20 perjastip)	100%	20,000,000
1.25.19.02, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Komunikasi	- Terselenggaranya kegiatan pembinaan IKRAP, IKRA, amatir radio, ujian amatir radio, penyuluhan penggunaan frekuensi radio, pendataan IKR dan update data anggota RAPI/ORARI	100%	70,000,000
1.25.19.03, Fasilitasi Kegiatan KPID (Bantuan Gubernur ke KPID)	- Fasilitasi empat kegiatan KPID	100%	1,322,170,000
x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,902,982,000
x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Tersedianya jasa surat menyurat (1750 surat)	100%	3,000,000
x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	- Tersedianya jasa pemakaian telepon (7 samb. telepon) , listrik (2 samb. listrik), dan internet (6 langganan bandwidth)	100%	1,526,192,000
x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	- Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional (24 roda 2 dan 10 roda 4)	100%	2,560,000
x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Tersedianya jasa administrasi keuangan (11 orang, 144 OB)	100%	20,160,000
x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Terlaksananya jasa kebersihan kantor (3 kantor)	100%	90,000,000
x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya alat tulis kantor (4 bidang , 1 sekretariat)	100%	35,000,000
x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (2 jenis barang cetakan dan penggandaan)	100%	17,000,000
x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	- Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	100%	7,750,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
/Penerangan Bangunan Kantor	kantor (4 bidang , 1 sekretariat)		
x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Tersedianya peralatan rumah tangga (24 jenis)	100%	5,500,000
x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan (8 langganan SKH/majalah, 38 buku)	100%	7,700,000
x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat, tamu (1440 OS dan 1692 OL)	100%	25,920,000
x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi (11 kali koordinasi/konsultasi)	100%	110,000,000
x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	- Tersedianya jasa keamanan kantor (1 unit kantor)	100%	52,200,000
x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			435,595,000
x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (24 roda 2 dan 10 roda 4)	100%	292,795,000
x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	- Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (56 buah/unit)	100%	25,000,000
x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- Terpeliharanya peralatan gedung kantor (98 buah/unit)	100%	117,800,000
x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			57,920,000
x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja (7 laporan, 337 buku)	100%	45,420,000
x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	- Tersusunnya laporan Prognosis Realisasi Anggaran (1 laporan, 50 buku)	100%	7,100,000
x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun (1 laporan, 25 buku)	100%	5,400,000
DINAS PERTANIAN			68,632,758,880
BELANJA TIDAK LANGSUNG			18,608,133,000
BELANJA LANGSUNG			50,024,625,880
2.01.15, Program peningkatan kesejahteraan petani			9,532,620,000
2.01.15.01, Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	- Kelompok tani	19 sub kegiatan	1,206,900,000
	- Terlaksananya pelatihan petani dan pelaku agribisnis	kelompok tani	106,000,000
2.01.15.02, Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	- Terlaksananya kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani/pelaku agribisnis	4 paket	7,214,720,000
2.01.15.03, Peningkatan kemampuan lembaga petani	- Terlaksananya kegiatan fasilitasi kelembagaan	8 paket	1,005,000,000
2.01.16, Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian			9,150,879,630

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
/perkebunan)			
2.01.16.01, Penanganan daerah rawan pangan	- Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan	170 kelompok	1,353,444,000
2.01.16.05, Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	- Terlaksananya laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	BKPP	26,500,000
2.01.16.09, Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	- Terlaksananya pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan sebanyak 25 kelompok	25 kelompok	275,000,000
2.01.16.10, Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	- Terlaksananya pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	30 kelompok	708,400,000
	- Terlaksananya pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan masyarakat	30 kelompok	358,402,000
2.01.16.12, Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	- Terlaksananya pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	7 sub kegiatan	835,000,000
	- Terlaksananya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	6 kelompok	35,581,000
2.01.16.14, Pengembangan desa mandiri pangan	- Terlaksananya Pengembangan Desa Mandiri Pangan	3 desa	517,181,000
2.01.16.17, Pengembangan pertanian pada lahan kering	- Terlaksananya pengembangan pertanian pada lahan kering	4 sub kegiatan	560,000,000
2.01.16.20, Pengembangan perbenihan / pembibitan	- Terlaksananya pengembangan perbenihan/perbibitan	13 sub kegiatan	1,325,822,130
2.01.16.21, Pengembangan sistem informasi pasar	- Terlaksananya pengembangan sistem informasi pasar	1 tahun	30,000,000
2.01.16.22, Peningkatan mutu dan keamanan pangan	- Terlaksananya peningkatan mutu dan keamanan pangan	3 sub kegiatan	415,500,000
	- Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	30 kelp	342,000,000
2.01.16.25, Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian	- Terlaksananya penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian	3 sub kegiatan	232,400,000
2.01.16.29, Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	- Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian	3 sub kegiatan	725,000,000
	- Terlaksananya pengamanan produk pertanian TPH	10 sub kegiatan	1,410,649,500
2.01.17, Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan			1,081,158,000
2.01.17.01, Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan	- Terlaksananya penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	6 kelompok	250,000,000
2.01.17.02, Fasilitasi kerjasama regional /nasiona penyediaan hasil produksi pertanian /perkebunan komplementer	- Terfasilitasinya kerjasama regional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan	3 paket	30,000,000
2.01.17.07, Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	- Terlaksananya promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	10 sub kegiatan	761,158,000
	- Terlaksananya Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggul Daerah	Produk, Petani	40,000,000
2.01.18, Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan			100,000,000
2.01.18.04, kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	- Terlaksananya Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	1 Paket	20,000,000
2.01.18.05, Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian /perkebunan tepat guna	- Terlaksananya Pelatihan dan Bimbingan pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	1 Paket	20,000,000
	- Terlaksananya Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	2 Paket	60,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
2.01.19, Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan			6,457,300,000
2.01.19.02, Penyediaan sarana produksi pertanian /perkebunan	- Terlaksananya Sarana Produksi Pertanian/Peternakan	9 sub kegiatan	5,332,300,000
2.01.19.03, Pengembangan bibit unggul pertanian /perkebunan	- Terlaksananya Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	7 sub kegiatan	483,000,000
2.01.19.06, Monitoring,evaluasi dan pelaporan	- Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	4 sub kegiatan Kelp.Program	515,000,000 127,000,000
2.01.20, Program pemberdayaan penyuluh pertanian /perkebunan lapangan			339,071,000
2.01.20.02, Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian /perkebunan	- Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan	Penyuluh	339,071,000
2.01.21, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak			1,315,481,000
2.01.21.06, Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	- Terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	4 sub kegiatan	1,315,481,000
2.01.22, Program peningkatan produksi hasil peternakan			6,018,950,000
2.01.22.01, Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	- Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pembibitan Ternak	12 unit	695,000,000
2.01.22.02, Pembibitan dan perawatan ternak	- Terlaksananya Pembibitan dan Perawatan Ternak	6000 dosis	100,000,000
2.01.22.05, Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak	- Terlaksananya Penelitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak	550864 kg	355,000,000
2.01.22.08, Pengembangan agribisnis peternakan	- Terlaksananya Pengembangan Agribisnis Peternakan	14 sub kegiatan	4,868,950,000
x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,550,715,000
x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	6,000,000
	- Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Baik	12 bulan	3,930,000
x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	- Terlaksananya penyedia jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	12 bulan	250,000,000
x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	- Terlaksananya Penyediaan jasa dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - Terlaksananya penyediaan jasa dan perizinan kendaraan dinas / operasional	12 bulan 12 bulan	10,758,000 5,000,000
x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Terlaksananya Pembayaran Tunjangan bendahara dan Pemegang Barang	12 bulan	90,020,000
	- Terlaksananya pembayaran tunjangan bendahara dan pemegang barang	12 bulan	
x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	300,400,000
	- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	150,000,000
x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Terlaksananya Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	12 bulan	99,750,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Terlaksananya penyedia jasa alat tulis kantor	12 bulan	30,000,000
	- Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	102,700,000
	- Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	50,000,000
x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Terlaksananya Penyediaan Barang Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	36,910,000
	- Terlaksananya penyediaan barang komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	6,000,000
x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	295,423,000
	- Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	5,000,000
x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kantor dan Peralatan RT	12 bulan	34,400,000
	- Terlaksananya penyediaan peralatan kantor dan peralatan RT	12 bulan	5,000,000
x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan per-UU-an	- Terlaksananya Penyediaan Bahan-bahan bacaan dan peraturan per-UU-an	12 bulan	30,188,000
	- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan Per-UU-an	12 bulan	10,000,000
x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	- Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Rapat Dinas	12 bulan	104,400,000
	- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dinas	12 bulan	16,000,000
x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Terlaksananya Undangan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 bulan	493,760,000
	- Terlaksananya undangan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	150,000,000
x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	- Terlaksananya Pembayaran jasa Keamanan dan PTT	12 bulan	265,076,000
x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			13,183,091,250
x.xx.02.03, Pembangunan gedung kantor	- Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor di Dinas PertanianProv. DIY	12 bulan	933,243,750
x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor	- Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor	12 bulan	393,120,000
	- Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor	12 bulan	49,500,000
x.xx.02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor	- Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor di Induk dan UPTD	12 bulan	103,600,000
	- Terlaksananya pengadaan peralatan kantor	12 bulan	49,000,000
x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur	- Terlaksananya pengadaan mebeleur	12 bulan	49,000,000
	- Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	12 bulan	173,780,000
x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor di Induk dan UPTD	12 bulan	240,500,000
	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	15,000,000
	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	15,000,000
x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional di Induk dan UPTD	12 bulan	10,266,761,000
	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	12 bulan	17,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	dinas/operasional - Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor di Induk dan UPTD	12 bulan	76,707,500
x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	12 bulan 12 bulan	51,650,000 6,500,000
x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor - Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	12 bulan 12 bulan	6,500,000 33,350,000
x.xx.02.42, Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor di Induk dan UPTD	12 bulan 12 bulan	2,000,000 700,879,000
x.xx.05, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			261,860,000
x.xx.05.03, Bimbingan teknis implementasi peraturan per-UU-an	- Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pertanian - Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan per-UU-an	12 bulan 1 kegiatan	227,760,000 34,100,000
x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			33,500,000
x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi KinerjaSKPD	12 bulan	33,500,000
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN			20,839,516,418
BELANJA TIDAK LANGSUNG			13,244,124,000
BELANJA LANGSUNG			7,595,392,418
2.01.15, Program peningkatan kesejahteraan petani			40,000,000
2.01.15.01, Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	- Pelatihan pengolahan hasil komoditas perkebunan 4 angk 2 hari (Jarak, kelepa, mete, kakao)	120	40,000,000
2.01.16, Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian /perkebunan)			99,083,760
2.01.16.17, Pengembangan pertanian pada lahan kering	- 1 sub keg	2%	99,083,760
2.01.17, Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan			150,000,000
2.01.17.07, Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	- 1 keg	2%	150,000,000
2.02.15, Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan			1,914,535,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
2.02.15.01, Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi	- inventarisasi pal batas kawasan hutan 120 km	1 keg	94,000,000
	- 1 keg	120 km	94,000,000
2.02.15.06, Pengelolaan dan pemanfaatan hutan	- 2 keg	2 keg	130,000,000
2.02.15.07, Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan	- 5 keg	5 keg	1,521,535,000
2.02.15.08, Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan	- 1 Keg	1 Keg	75,000,000
2.02.16, Program rehabilitasi hutan dan lahan			395,625,000
2.02.16.02, Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	- 3 Keg	3 Keg	395,625,000
x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,416,860,800
x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kantor induk dan 3 uptd	100%	17,160,000
x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	- Kantor induk dan UPTD	100%	354,400,800
x.xx.01.03, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- 1 dinas 3 UPTD	100%	354,400,800
x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			
x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	- 1 dinas 4 UPTD	100%	69,454,000
x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- 1 dinas 4 UPTD	100%	522,695,200
x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	- 1 dinas 4 UPTD	100%	98,750,000
x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			3,579,287,858
x.xx.02.03, Pembangunan gedung kantor	- 1 dinas 4 UPTD	100%	3,579,287,858
BADAN PARIWISATA DAERAH			15,917,587,000
BELANJA TIDAK LANGSUNG			3,238,327,000
BELANJA LANGSUNG			12,679,260,000
2.04.15, Program pengembangan pemasaran pariwisata			7,075,000,000
2.04.15.01, Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	- Wisatawan Nusantara, Wisatawan Mancanegara, Pelaku Pariwisata, Pers, Instansi Pemerintah dan Masyarakat	100%	915,000,000
2.04.15.02, Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	- Stake Holders Pariwisata, Instansi dan Masyarakat	100%	150,000,000
2.04.15.03, Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	- Terlaksananya jaringan kerjasama promosi pariwisata	100%	175,000,000
2.04.15.04, Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	- Terlaksananya koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	100%	200,000,000
2.04.15.05, Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	- Terlaksananya Promosi pariwisata Nusantara di dalam dan luar negeri	100%	4,385,000,000
2.04.15.06, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata	- Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata	100%	15,000,000
2.04.15.07, Pengembangan statistik kepariwisataan	- Terlaksananya statistik kepariwisataan	100%	45,000,000
2.04.15.08, Pelatihan pemandu wisata terpadu	- Terlaksananya pelatihan pemandu wisata terpadu	100%	90,000,000
2.04.15.09, Pembuatan Bahan-bahan Promosi Kepariwisata	- Terlaksananya pembuatan Bahan-bahan promosi pariwisata	100%	750,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
2.04.15.10, Penerbitan Tabloid Pariwisata "Exploring Jogja"	- Terlaksanakan penerbitan Tabloid Pariwisata "Exploring Jogja"	100%	150,000,000
2.04.15.11, Penyelenggaraan Fam Tour	- Terselenggaranya Fam Tour	100%	200,000,000
2.04.16, program pengembangan destinasi pariwisata			1,720,000,000
2.04.16.01, Pengembangan objek pariwisata unggulan	- Terlaksananya pengembangan obyek pariwisata unggulan	100%	250,000,000
2.04.16.02, Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	- Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	100%	225,000,000
2.04.16.03, Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	- Terlaksananya pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	100%	100,000,000
2.04.16.04, Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga /dunia usaha	- Terlaksananya koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga,dunia usaha lainnya	100%	100,000,000
2.04.16.05, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata	- Terlaksananya pemantauan dan evaluasi program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata	100%	20,000,000
2.04.16.06, Pengembangan daerah tujuan wisata	- Terlaksananya pengembangan daerah tujuan wisata	100%	400,000,000
2.04.16.07, Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi	- Terlaksananya pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi	100%	100,000,000
2.04.16.08, Pemberdayaan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kawasan Wisata	- Terlaksananya pemberdayaan pariwisata berbasis masyarakat di kawasan wisata	100%	100,000,000
2.04.16.09, Pengembangan Desa Wisata	- Terlaksananya pengembangan desa wisata	100%	150,000,000
2.04.16.10, Peningkatan Kualitas Masyarakat Obyek Wisata Unggulan	- Terlaksananya Peningkatan kualitas masyarakat obyek wisata unggulan	100%	100,000,000
2.04.16.11, Pemberdayaan Masyarakat Sadar Wisata dan Kampanye Sapta Pesona	- Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sadar wisata dan kampanye sapta pesona	100%	175,000,000
2.04.17, Program pengembangan kemitraan			1,885,000,000
2.04.17.01, Pengembangan dan penguatan informasi dan database	- Terlaksananya pengembangan dan penguatan informasi dan database	100%	45,000,000
2.04.17.02, Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata	- Terlaksananya pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata	100%	175,000,000
2.04.17.03, Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	- Terlaksananya pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata dengan lembaga lainnya	100%	150,000,000
2.04.17.05, Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	- Terlaksananya koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	100%	300,000,000
2.04.17.06, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan	- Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan	100%	15,000,000
2.04.17.07, Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	- Terlaksananya pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	100%	150,000,000
2.04.17.08, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	- Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	100%	150,000,000
2.04.17.10, Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya	- Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	100%	150,000,000
2.04.17.11, Peningkatan Penyelenggaraan dan Fasilitasi Event-event Kepariwisataaan	- Terlaksananya peningkatan penyelenggaraan dan fasilitasi event-event kepariwisataaan	100%	750,000,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,009,260,000
x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	10,000,000
x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	145,000,000
x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	- Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	5,000,000
x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100%	19,260,000
x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100%	45,000,000
x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	30,000,000
x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	35,000,000
x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	100%	10,000,000
x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100,000,000
x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an	- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan dan Per-UU-an	100%	50,000,000
x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya Makanan dan Minuman	100%	75,000,000
x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	400,000,000
x.xx.01.29, Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	- Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	100%	40,000,000
x.xx.01.40, Penyediaan Jasa Petugas Penjaga Malam	- Tersedianya Jasa Petugas Penjaga Malam	100%	45,000,000
x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			892,500,000
x.xx.02.05, Pengadaan kendaraan dinas/operasional	- Tersedianya Kendaraan Dinas/operasional	100%	500,000,000
x.xx.02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor	- Tersedianya peralatan gedung kantor	100%	50,000,000
x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur	- Tersedianya meubeler	100%	35,000,000
x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	75,000,000
x.xx.02.23, Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	- Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	100%	20,000,000
x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	150,000,000
x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	- Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100%	30,000,000
x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100%	20,000,000
x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	- Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	100%	12,500,000
x.xx.05, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			75,000,000
x.xx.05.12, Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi	- Terlaksananya penyusunan dan pengumpulan Data/informasi	100%	75,000,000
x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			22,500,000
x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	7,500,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran	- Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	100%	7,500,000
x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	7,500,000
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN			54,889,098,685
BELANJA TIDAK LANGSUNG			5,104,128,000
BELANJA LANGSUNG			49,784,970,685
2.05.15, Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir			654,120,600
2.05.15.01, Pembinaan kelompok ekonomi masy. pesisir	- Terlaksananya Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	10%	654,120,600
2.05.16, Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan			90,581,500
2.05.16.01, Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan	- Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	10%	90,581,500
2.05.18, Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut			128,155,000
2.05.18.02, Mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	- meningkatnya Mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	10%	128,155,000
2.05.19, Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat			203,893,450
2.05.19.01, Penyuluhan budaya kelautan	- meningkatnya kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	5%	203,893,450
2.05.20, Program Pengembangan Budidaya Perikanan			3,002,639,120
2.05.20.01, Pengembangan bibit ikan unggul	- Terlaksananya pengembangan bibit ikan unggul	50%	1,115,364,700
2.05.20.03, Pembinaan dan pengembangan perikanan	- Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya	2%	1,887,274,420
2.05.21, Program pengembangan perikanan tangkap			29,726,609,750
2.05.21.01, Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	- Terlaksananya pengembangan Perikanan tangkap	2%	880,903,200
2.05.21.03, Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan	- Terpeliharanya PPP Sadeng	5%	38,692,000
2.05.21.06, Pengembangan pelabuhan perikanan	- Tercapainya pengembangan pelabuhan perikanan	turap 1000m,lt dermaga 960m,galian	28,807,014,550
2.05.22, Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan			37,650,000
2.05.22.03, Pengembangan sistem penyuluhan perikanan dan	- Terlaksananya Pengembangan Sistem penyuluhan	50%	37,650,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
kelautan			
2.05.23, Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan			679,305,715
2.05.23.02, Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	- Terlaksananya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	10%	679,305,715
2.05.24, Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar			342,779,500
2.05.24.01, Kajian kawasan budidaya laut ,air payau dan air tawar	- Tercapainya kajian kawasan budidaya laut,air payau dan air tawar	60%	88,820,000
2.05.24.02, Pengelolaan dan pengembangan BAL, BAP, BAT	- Terlaksananya pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	50%	253,959,500
x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			967,285,190
x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Terlaksananya administrasi persuratan	100%	12,260,000
x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	- Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	100%	227,950,000
x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	- Tersedianya jasa dan perizinan kendaraan dinas / operasional	100%	5,710,000
x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Terlaksananya Administrasi Keuangan	100%	32,400,000
x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- tersedianya jasa kebersihan kantor	100%	44,500,000
x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	64,395,940
x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Tersedianya barang cetak dan penggandaan	100%	73,388,150
x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	100%	23,059,100
x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	76,600,000
x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Tersedianya peralatan Rumah tangga	100%	36,562,000
x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an	- Tersedianya bacaan can peraturan perundang-undangan	100%	9,580,000
x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	- tersedianya makanan dan minuman	100%	33,000,000
x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	100%	229,546,000
x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	- Tersedianya jasa Keamanan kantor	100%	98,334,000
x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			13,069,298,960
x.xx.02.03, Pembangunan gedung kantor	- Tersedianya Gedung kantor yang baik	100%	11,727,272,260
x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor	- Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100%	15,000,000
x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur	- Tersedianya Meubeller	100%	122,850,700
x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- terpeliharanya gendung kantor	100%	156,545,000
x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	100%	355,990,000
x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	- Terpeliharanya Perlengkapan Gedung kantor	100%	62,230,000

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	USULAN (Rp)
1	2	3	4
x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	100%	10,500,000
x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	- Terpeliharanya mebeller	100%	7,200,000
x.xx.02.42, Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	- Terehabnya Gedung Kantor Dinas	100%	611,711,000
x.xx.05, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			846,500,100
x.xx.05.02, Sosialisasi peraturan perundang-undangan	- Tersosialisasikannya Peraturan perundang-undangan perikanan dan kelautan	100%	35,000,000
x.xx.05.04, Perencanaan Program dan Peningkatan Kualitas Layanan Data	- Tersusunya Perencanaan Program/Kegiatan Perikanan dan Kelautan serta terkumpulnya data yang akurat	100%	145,000,000
x.xx.05.12, Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi	- Terkumpulnya Data / Informasi yang akurat	100%	150,000,000
x.xx.05.14, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	- tersusunya monitoring dan evaluasi	100%	46,000,000
x.xx.05.17, Penyusunan D G S	- Tersusunya parameter pelaksanaan DGS	100%	470,500,100
x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			36,151,800
x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	12,175,300
x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran	- Tersusunnya Laporan keuangan Semesteran	100%	4,135,500
x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	- Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	100%	9,541,000
x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	100%	10,300,000
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG			576,833,758,040
JUMLAH BELANJA LANGSUNG			1,154,777,469,231
TOTAL USULAN RKPd PROPINSI DIY TAHUN 2009			1,731,611,227,271

**C. Pagu Indikatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)
Provinsi DIY Tahun 2009 (Hasil Musrenbang Nasional Tahun 2008)**

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp juta)
1	2	3
6	KEJAKSAAN AGUNG	40,627.00
01.01.09	Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	32,790.70
1	Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	25,264.80
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	7,525.90
03.03.03	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	425.00
27	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	24.00
402	Penyuluhan Hukum	401.00
03.03.05	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya	4,000.00
24	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	4,000.00
03.03.06	Program Penegakan Hukum dan HAM	3,411.30
27	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	300.00
408	Penanganan Perkara Pidana Khusus	116.50
409	Penanganan Perkara Pidana Umum	1,542.20
410	Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	117.40
412	Penanganan/Penyelidikan Kasus Intelejen	233.70
7654	Penindakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi	1,101.50
7	SEKRETARIAT NEGARA	14,293.50
01.01.13	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	76.50
67	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara	76.50
01.01.17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	4,010.00
24	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	4,010.00
01.01.19	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan	9,344.00
1	Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	3,851.90
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	5,342.10
27	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	150.00
08.01.02	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	438.00
505	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	438.00
08.03.01	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	425.00
94	Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem, Data, Statistik dan Informasi	425.00
10	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	31,906.70
01.01.09	Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	11,162.80
1	Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	7,010.00
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	3,252.80
27	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	125.00
35	Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran	232.00
36	Penatausahaan Anggaran, Penyelenggaraan Perbendaharaan	50.00
37	Pendayagunaan/Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan	48.00
51	Pengembangan SDM dan Administrasi Kepegawaian	120.00
62	Penyelenggaraan dan Pengkoordinasian Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri	100.00
71	Penyusunan Rencana dan Program Strategis	195.00
107	Pengadaan/Pengiriman Buku-Buku dan Bahan Cetak	30.00
01.01.10	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	1,324.80
733	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem, Struktur Kelembagaan dan Prosedur Pengawasan	1,324.80
01.01.17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	8,000.00
79	Pembangunan Gedung	7,000.00
89	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung	380.00
100	Rehabilitasi/Peningkatan/Renovasi Gedung/Laboratorium/Perpustakaan	620.00
01.06.04	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	200.00
642	Fasilitasi Peningkatan Peran Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Dalam Rangka Kerja Sama Pembinaan Wilayah	200.00
01.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	4,799.10
21	Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	400.00
24	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	1,000.00
82	Pemberdayaan Lembaga	49.10
645	Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi (Scbd)	1,500.00

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp juta)
1	2	3
647	Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (Ilgr)	1,650.00
817	Pembinaan/Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah	200.00
01.06.08	Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah	2,570.00
67	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara	2,000.00
77	Pengembangan Kapasitas/Kualitas SDM Aparatur	250.00
752	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Usaha Mitigasi Bencana dan Bahaya Kebakaran	320.00
03.01.05	Program Pemeliharaan Kamtibmas	200.00
669	Fasilitasi Pembinaan dan Pembimbingan, Satuan Perlindungan Masyarakat	200.00
06.90.02	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	350.00
823	Pengembangan Kebijakan, Strategi, Nspm, dan Permodelan Dlm Pelaks. Pembangunan Di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	350.00
06.90.09	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	3,300.00
31	Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Pendidikan dan Pelatihan	2,445.50
33	Penyelenggaraan/Pembinaan Informasi Publik	99.70
34	Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi	454.90
716	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit Pengaduan Masyarakat	300.00
13	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	71,066.20
01.01.09	Program Penerapan Pemerintahan yang Baik	43,093.80
1	Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	36,960.40
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	6,133.40
03.03.02	Program Pembentukan Hukum	128.10
1254	Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Hukum	128.10
03.03.03	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	76.90
1256	Penyuluhan Hukum dan Koordinasi Ranham	76.90
03.03.04	Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum	2,534.30
1259	Pembinaan / Penyelenggaraan Keimigrasian	2,534.30
03.03.05	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya	14,942.80
24	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	14,942.80
03.03.06	Program Penegakan Hukum dan HAM	9,749.30
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	9,205.50
378	Penegakan Hukum dan Ham	543.80
03.03.07	Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum	541.00
67	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara	541.00
15	DEPARTEMEN KEUANGAN	74,564.90
01.01.09	Program Penerapan Pemerintahan yang Baik	51,155.60
1	Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	31,187.60
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	19,531.00
27	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	343.00
55	Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan Operasional	40.00
65	Penyelenggaraan Pembinaan Teknis Administrasi	54.00
01.01.13	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	1,437.60
67	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara	1,437.60
01.01.17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	6,402.10
24	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	4,471.20
80	Pengadaan Tanah	256.90
89	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung	959.80
111	Perawatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	714.30
01.01.20	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara	15,569.70
24	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	15,000.00
1410	Modernisasi Administrasi Kepabeanan dan Cukai	569.70
18	DEPARTEMEN PERTANIAN	83,997.60
01.01.09	Program Penerapan Pemerintahan yang Baik	11,998.60
1	Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	9,362.00
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	1,886.60
70	Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pembangunan	750.00
04.03.03	Program Pengembangan Agribisnis	8,279.10
1552	Pengembangan Agroindustri Terpadu	1,482.00
1553	Integrasi Tanaman-Ternak, Kompos, dan Biogas	786.80
1554	Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat	1,765.10

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp juta)
1	2	3
1558	Pengembangan Pertanian Organik dan Pertanian Berkelanjutan	1,964.80
1562	Peningkatan Kegiatan Eksibisi, Perlombaan, dan Penghargaan Kepada Petani/Pelaku Agribisnis	2,042.50
1566	Bantuan Benih/Bibit Kepada Petani (TP)	
1583	Pengembangan Agroindustri Terpadu (Tp)	237.90
04.03.04	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	54,505.60
1519	Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian	7,773.70
1531	Pembinaan dan Pengembangan Distribusi dan Akses Pangan	1,491.00
1534	Stabilisasi Harga Pangan Strategis	5,525.00
1535	Pemantapan Kelembagaan Ketahanan Pangan	950.00
1564	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (Opt), Penyakit Hewan, Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan	8,645.80
1565	Pengembangan Pembibitan Sapi	373.10
1566	Bantuan Benih/Bibit Kepada Petani (TP)	14,915.20
1567	Peningkatan Pasca Panen dan Pemasaran Komoditas Pertanian (TP)	1,908.00
1568	Penanganan dan Pengendalian Wabah Virus Flu Burung Pada Hewan dan Restrukturisasi Perunggasan (TP)	1,550.00
1569	Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen	1,341.80
1570	Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Pertanian, Serta Pengembangan Kawasan (TP)	5,358.10
1571	Penelitian dan Diseminasi Inovasi Pertanian (Primatani dan SL-PTT) (TP)	1,004.70
1589	Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Pertanian, Serta Pengembangan Kawasan (Tp)	1,394.40
1592	Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Penanganan Daerah Rawan Pangan, dan Diversifikasi Pangan	2,275.00
04.03.08	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	9,214.30
1574	Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan melalui LM3	640.00
1576	Peningkatan Sistem Penyuluhan, Sumberdaya Manusia Pertanian dan Pengembangan Kelompok Tani	232.30
1579	Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam, Daerah Tertinggal dan Perbatasan, Pendampingan PHLN, Pelaksanaan Inpres Terkait, dan Pengarusutamaan Gender	1,760.60
1594	Pengembangan Magang Sekolah Lapang (Tp)	6,581.40
19	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	57,034.20
01.01.13	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	21,008.50
1	Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	7,755.50
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	2,204.00
2003	Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan SDM Dunia Usaha	9,145.00
2004	Penyelenggaraan Diklat Perindustrian	1,904.00
04.07.02	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1,350.00
2013	Pemberdayaan Ikm (Dekonsentrasi)	950.00
2014	Pembantuan Pembinaan Ikm (Tugas Pembantuan)	400.00
04.07.03	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	34,675.70
1	Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	15,074.00
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	2,633.10
24	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	560.20
2015	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	16,408.40
20	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	17,930.00
04.05.01	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	16,430.00
2137	Listrik Perdesaan	16,430.00
04.05.05	Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi	750.00
2103	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	750.00
04.06.01	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	750.00
2128	Pembinaan dan Pengusahaan Kegiatan Pertambangan	750.00
22	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	79,611.10
01.01.09	Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	702.70
1	Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	74.00
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	270.80
24	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	206.00

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp juta)
1	2	3
27	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	152.00
04.08.03	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	14,287.90
2202	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ	10,801.00
2203	Pembangunan/Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	2,432.10
2211	Penataan dan Manajemen Rekayasa LLAJ	1,054.80
04.08.07	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api	52,633.10
2225	Peningkatan Jalan dan Prasarana Kereta Api	21,937.00
2226	Peningkatan Jembatan Ka	5,796.10
2227	Pembangunan Jalan Kereta Api	24,500.00
2236	Rehabilitasi Peralatan Sintelis Ka	400.00
04.08.08	Program Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Kereta Api	10,965.50
2237	Rehabilitasi Jalan Ka	10,965.50
04.08.10	Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Prasarana LLAJ	831.70
90	Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/Workshop/Publikasi	131.70
109	Survey / Studi Kelayakan / Penyusunan Master Plan / D E D / S I D	700.00
04.08.15	Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	190.10
24	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	190.10
23	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	589,275.90
10.01.01	Program Pendidikan Anak Usia Dini	12,367.80
2304	Perluasan dan Peningkatan Mutu Tk	1,077.00
2587	Penyelenggaraan Paud Rintisan	11,290.80
10.02.01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	392,897.30
108	Pengadaan Peralatan Laboratorium	14,652.30
2323	Bantuan Operasional Sekolah (Bos)	132,662.60
2325	Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP	3,223.80
2331	Perluasan dan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar	883.10
2336	Perluasan dan Peningkatan Mutu Pend. Khusus dan Pend. Layanan Khusus (Tingkat Dasar)	4,671.10
2563	Perencanaan dan Pengendalian Dikdasmen	851.90
2570	Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non Pns	28,719.00
2571	Subsidi Tunjangan Profesi Guru	142,933.00
2573	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	376.30
2574	Percepatan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik	10,866.00
2581	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SMP	6,930.00
2582	Pembangunan SD-SMP Satu Atap	-
2589	Penyediaan Beasiswa Bagi Siswa Miskin Jenjang SMP	8,153.30
2590	Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Jenjang Pendidikan Dasar	18,000.00
2600	Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru Di Daerah Terpencil, Terbelakang, Pedalaman, Bencana	6,286.00
2645	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	13,688.90
10.03.01	Program Pendidikan Menengah	48,991.60
2356	Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA	4,209.90
2358	Perencanaan Peningkatan Mutu dan Evaluasi SMK	349.20
2394	Peningkatan Mutu dan Profesionalisme Guru (Program Pmptk)	5,516.00
2570	Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non Pns	12,729.00
2574	Percepatan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik	434.00
2585	Beasiswa Untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah	16,437.80
2594	Bantuan Operasional Manajemen Mutu (Bomm) SMA (Sekolah)	2,050.00
2595	Bantuan Operasional Manajemen Mutu (Bomm) SMK (Siswa)	4,994.70
3400	Pembangunan Gedung Pendidikan	2,271.00
10.04.01	Program Pendidikan Non Formal	11,999.40
17	Peningkatan/Pengkajian Kapasitas Kelembagaan	495.90
2588	Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Paket C)	1,118.10
3409	Penyelenggaraan Kursus dan Magang	7,043.90
3472	Pendidikan Keaksaraan Fungsional	3,341.60
10.07.01	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	117,566.90
1	Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	21,049.00
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	8,290.00
2394	Peningkatan Mutu dan Profesionalisme Guru (Program Pmptk)	14,843.40
2395	Pengembangan dan Peningkatan Institusi Penjamin Mutu Pendidikan (Program Pmptk)	6,335.00
2396	Pengembangan dan Peningkatan Mutu Institusi Pengembang Penataran Guru Pendidikan Menengah (Program Pmptk)	5,810.00
2571	Subsidi Tunjangan Profesi Guru	44,620.00

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp juta)
1	2	3
2572	Subsidi Tunjangan Guru Bantu	3,698.00
2574	Percepatan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik	1,605.50
2575	Percepatan Sertifikasi Akademik Pendidik	11,316.00
10.07.02	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	338.40
2417	Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Di Daerah	338.40
10.07.03	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	5,114.50
1	Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	1,171.00
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	561.30
2425	Pengembangan Media Radio Pendidikan	2,813.70
2430	Penyelenggaraan Efisiensi Perencanaan Pendidikan (Dekonsentrasi)	568.50
24	DEPARTEMEN KESEHATAN	12,163.90
06.02.01	Program Lingkungan Sehat	200.00
2803	Pengembangan Wilayah Sehat	25.00
2804	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Masyarakat Miskin	75.00
2805	Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan	50.00
2806	Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan	30.00
2855	Pelayanan Dukungan Administrasi dan Manajemen (Ls)	20.00
07.03.02	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	773.00
2817	Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat	773.00
07.03.03	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	7,434.00
2822	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar	2,743.00
2846	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu	4,691.00
07.03.04	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	1,250.00
2837	Pencegahan dan Penanggulangan Flu Burung/Penyakit Lainnya (Program P2P)	250.00
2904	Penanggulangan Penyakit Menular	1,000.00
07.03.05	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1,485.00
2902	Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Gizi Buruk Pada Ibu Hamil dan Menyusui, Bayi dan Anak Balita	1,485.00
07.90.02	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	1,021.90
35	Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran	1,021.90
26	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	36,028.80
04.02.01	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	6,986.00
90	Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/Workshop/Publikasi	2,589.00
3505	Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat	606.00
3507	Penyelenggaraan Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri	1,360.00
3621	Peningkatan Fungsi dan Revitalisasi Blk Menjadi Lembaga Pelatihan Berbasis Kompetensi	2,418.00
3627	Percepatan Pengakuan/Rekognisi Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional	13.00
04.02.03	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	1,110.00
3522	Pemberian Dorongan dan Penyempurnaan Pelaksanaan Negosiasi Bipartit	1,110.00
04.02.04	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	22,700.00
3534	Konsolidasi Program-Program Perluasan Kesempatan Kerja	700.00
3535	Fasilitasi Pendukung Pasar Kerja, Melalui Penguatan Kelemb., Peningk. Info., Penyel. Bursa Kerja	2,000.00
3547	Penyelenggaraan Padat Karya Produktif	20,000.00
06.90.02	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1,000.00
3569	Fasilitasi Dukungan Manajemen Ketransmigrasian Di Wilayah Cepat Tumbuh	1,000.00
06.90.03	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal	4,232.80
3594	Fasilitasi Dukungan Manajemen Ketransmigrasian Di Wilayah Tertinggal	220.10
3597	Perencanaan Teknis Permukiman dan Perpindahan Di Wilayah Tertinggal	436.00
3599	Pembinaan Promosi, Investasi dan Kemitraan Di Wilayah Tertinggal	448.70
3603	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Di Wilayah Tertinggal	3,128.00
27	DEPARTEMEN SOSIAL	49,262.70
01.01.09	Program Penerapan Pemerintahan yang Baik	13,896.50
1	Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	9,389.50
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	1,805.60
16	Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi	5.40
20	Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dan Strategi	90.40
21	Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	148.30
27	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	138.90

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp juta)
1	2	3
29	Pembinaan dan Pelaksanaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Perlengkapan Departemen	376.50
30	Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Data dan Informasi	216.20
33	Penyelenggaraan/Pembinaan Informasi Publik	95.40
35	Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran	1,097.90
49	Penyelenggaraan/Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia	188.90
70	Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pembangunan	247.60
94	Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem, Data, Statistik dan Informasi	83.20
107	Pengadaan/Pengiriman Buku-Buku dan Bahan Cetak	12.70
01.01.13	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	4,075.40
49	Penyelenggaraan/Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia	678.90
67	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara	3,090.90
77	Pengembangan Kapasitas/Kualitas SDM Aparatur	305.60
01.01.17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	1,407.60
24	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	203.20
89	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung	614.90
100	Rehabilitasi/Peningkatan/Renovasi Gedung/Laboratorium/Perpustakaan	544.50
107	Pengadaan/Pengiriman Buku-Buku dan Bahan Cetak	45.00
11.04.01	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	13,065.00
6303	Pemberdayaan Sosial Keluarga, Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Pmks Lainnya	11,980.00
7202	Pemberdayaan Sosial Keluarga Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Pmks Lainnya (Pemberdayaan Ke	1,085.00
11.06.01	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	6,189.70
7205	Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak, Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi Tuna Sosial)	383.00
7206	Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak, Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Penyalahgunaan Napza)	330.00
7207	Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak, Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat)	720.80
7208	Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak, Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia)	885.00
7209	Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak, Lansia dan Penyandang Cacat (Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak)	2,013.30
7210	Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak, Lansia dan Penyandang Cacat (Pembinaan dan Rehabilitasi Anak Jalanan)	991.50
7212	Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak, Lansia dan Penyandang Cacat (Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Cacat)	454.60
7229	Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak, Lansia dan Penyandang Cacat (Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal)	411.40
11.08.01	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	4,497.30
7214	Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Pemberdayaan Sosial Korban Bencana Sosial)	633.00
7215	Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Perlindungan Sosial Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran)	500.00
7216	Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Pendayagunaan Sumber Dana Sosial)	435.00
7217	Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Akses Jaminan Sosial)	729.30
7235	Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Penyelenggaraan Pencarian Penyelamatan Musibah Bencana Alam dan Bencana Lainnya)	2,200.00
11.09.01	Program Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	4,273.00
39	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan	3,042.00
90	Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/Workshop/Publikasi	1,231.00
11.90.02	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1,858.30
7222	Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat	1,380.00
7225	Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	478.30
29	DEPARTEMEN KEHUTANAN	33,230.40
01.01.09	Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	12,854.00
1	Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	11,306.50
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	1,547.50
01.04.01	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	6,950.00

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp juta)
1	2	3
4035	Sistem Penunjang Kelitbangan dan Penerapan Hasil Litbang Kehutanan	4,750.00
4043	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	2,200.00
03.01.09	Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri	612.50
4055	Pengamanan Kawasan Hutan	612.50
04.03.02	Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	386.60
4052	Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan	386.60
05.04.01	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	3,961.30
4014	Pengendalian Kebakaran Hutan	329.90
4015	Pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Lainnya (Ksa/Kpa/Tb) dan Hutan Lindung	2,687.40
4016	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya	600.00
4017	Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	125.00
4018	Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi	219.00
05.04.02	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	7,183.00
4019	Rehabilitasi Lahan Kritis Das Prioritas	1,986.00
4039	Pengelolaan Das	1,900.00
4040	Perencanaan, Pembangunan dan Kelembagaan Hutan Rakyat	1,316.00
4041	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	736.00
4042	Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan	1,245.00
05.04.03	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan LH	1,283.00
4024	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sdah dan Ekosistemnya	1,283.00
32	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	21,323.90
04.03.05	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	3,055.00
4102	Mitigasi Bencana Lingkungan Laut dan Pesisir	500.00
4103	Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	500.00
4105	Perencanaan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Serta Pengelolaan Batas Wilayah Laut	813.00
4107	Pengembangan & Pengelolaan Terpadu Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	1,242.00
04.03.06	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	17,251.00
21	Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	250.00
35	Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran	250.00
51	Pengembangan SDM dan Administrasi Kepegawaian	176.80
4108	Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir	4,538.40
4109	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan	630.50
4110	Pengembangan dan Penyelenggaraan Karantina Perikanan dan Sistem Pengelolaan Kesehatan Ikan	350.00
4113	Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri dan Ekspor Hasil Perikanan	600.00
4114	Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Serta Input Produksi Lainnya	6,981.00
4115	Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan	1,800.00
4116	Penyelenggaraan Revitalisasi Perikanan	1,179.50
4118	Pengelolaan Sumberdaya Ikan Secara Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	494.70
04.09.03	Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	417.90
94	Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem, Data, Statistik dan Informasi	300.00
95	Penyelenggaraan/Peningkatan Akuntansi Pemerintah dan Kekayaan Milik Negara	117.90
05.04.01	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	600.00
4119	Pengembangan Pengelolaan Konservasi Laut dan Perairan	600.00
33	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	407,644.80
01.01.09	Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	14,002.00
1	Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	10,974.90
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	3,027.20
01.06.07	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	1,800.00
4241	Pengembangan Prasarana dan Sarana Kawasan Agropolitan	1,800.00
04.04.01	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber air Lainnya	5,000.00
4417	Pembangunan Waduk, Embung, Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya	5,000.00
04.04.03	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	6,348.00
4422	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi	2,160.00
4424	Pembangunan/Peningkatan Prasarana Irigasi dan Air Tanah	2,488.00

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp juta)
1	2	3
4429	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	200.00
4431	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	1,500.00
04.08.01	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	47,426.60
4326	Rehabilitasi Jalan Nasional	1,673.80
4327	Pemeliharaan Jalan Nasional	25,194.10
4328	Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan Nasional	11,810.90
4329	Pemeliharaan Jembatan Ruas Jalan Nasional	8,747.80
04.08.02	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	90,790.30
4346	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	6,164.40
4626	Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas	24,638.00
4627	Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Non Lintas	23,574.00
4644	Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa	20,485.30
4655	Pembangunan Jalan Baru dan Peningkatan Jalan Strategis	15,928.60
05.01.01	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase	12,500.00
4474	Bantuan Teknis Bidang Plp	500.00
4625	Peningkatan Pengelolaan Tpa/Sanitary Landfill/Sistem Regional	12,000.00
05.04.04	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	77,208.00
4432	Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendali Banjir	16,982.00
4433	Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Pantai	20,650.00
4435	Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Lahar Gunung Berapi	22,376.00
4436	Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pengendali Banjir	12,300.00
4439	Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengendalian Banjir	4,900.00
05.05.01	Program Penataan Ruang	1,000.00
4268	Pembinaan Manajemen Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,000.00
06.01.01	Program Pengembangan Perumahan	36,336.00
4270	Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa	28,000.00
4271	Penataan dan Revitalisasi Kawasan	2,438.00
4277	Penataan Lingkungan Permukiman	760.00
4279	Pembinaan Teknis Bangunan Gedung	1,638.00
4628	Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar Untuk Rsh/S dan Rumah Susun	1,500.00
9262	Penyediaan Infrastruktur Primer Perkotaan (Kawasan Rsh)	2,000.00
06.02.02	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	45,675.80
4277	Penataan Lingkungan Permukiman	4,670.00
4280	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2Kp)	38,505.80
4471	Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan	2,500.00
06.03.01	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	10,258.00
4442	Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku	10,258.00
06.03.02	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	43,800.00
4472	Bantuan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum	3,000.00
4473	Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum	8,500.00
4577	Pembinaan Teknis Air Limbah	400.00
4611	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah	500.00
4617	Pembuangan Air Limbah Sistem Terpusat	7,200.00
4629	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah	11,600.00
4630	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Pada Kawasan Strategis Nasional	12,600.00
06.90.02	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	3,000.00
4562	Pembinaan Pengembangan Permukiman Baru	3,000.00
06.90.07	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan	12,500.00
4312	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	12,500.00
40	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	14,026.20
01.01.09	Program Penerapan Pemerintahan yang Baik	5,605.20
1	Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	5,224.30
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	380.90
08.01.01	Program Pengembangan Nilai Budaya	1,839.20
4864	Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Nilai Budaya	1,839.20
08.01.02	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	6,581.80
4871	Pengembangan Pemahaman Kekayaan Budaya Daerah	5,347.30
4900	Pengembangan Arkeologi Nasional	1,234.50
43	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	13,088.20
01.01.09	Program Penerapan Pemerintahan yang Baik	2,256.20
1	Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	806.20

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp juta)
1	2	3
89	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung	1,450.00
05.03.02	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3,280.00
5068	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	2,460.00
5069	Pengendalian Kerusakan Lingkungan	820.00
05.04.03	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	7,552.00
5072	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	7,552.00
44	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	2,585.50
04.01.09	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	2,585.50
35	Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran	2,585.50
54	BADAN PUSAT STATISTIK	21,309.30
01.01.09	Program Penerapan Pemerintahan yang Baik	12,337.60
1	Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	10,450.00
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	1,887.60
01.01.17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	1,249.30
24	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	193.50
27	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	-
79	Pembangunan Gedung	219.50
80	Pengadaan Tanah	483.50
81	Pengadaan Kendaraan	-
89	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung	352.80
100	Rehabilitasi/Peningkatan/Renovasi Gedung/Laboratorium/Perpustakaan	-
111	Perawatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	-
01.01.27	Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik	7,722.40
27	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1,000.60
35	Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran	202.10
54	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	12.90
67	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara	25.70
92	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian/Lembaga	-
94	Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem, Data, Statistik dan Informasi	4,552.00
5551	Pembinaan Statistik dan Sensus	1,929.10
56	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	67,508.80
01.01.09	Program Penerapan Pemerintahan yang Baik	33,589.40
1	Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	27,842.90
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	5,746.60
01.01.17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	5,005.00
79	Pembangunan Gedung	5,000.00
89	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung	5.00
05.05.03	Program Pengelolaan Pertanahan	24,944.30
5654	Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	132.00
5656	Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan	298.30
5657	Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah	15,655.60
5658	Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	2,437.50
5659	Pelayanan Konsolidasi Tanah Swadaya	102.00
5661	Pelayanan Pemeriksaan Tanah	182.00
5662	Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah	3,234.50
5663	Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali	398.90
5664	Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah	1,260.50
5665	Pelayanan Informasi Pertanahan	1,055.00
5676	Pengendalian dan Pemberdayaan Kepemilikan Tanah	188.00
10.05.01	Program Pendidikan Kedinasan	3,970.10
5666	Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional	3,970.10
57	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	2,725.00
10.07.02	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	2,725.00
5714	Supervisi/Pembinaan/Stimulasi Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah	2,725.00
67	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	6,318.00
01.06.07	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	3,200.00

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp juta)
1	2	3
21	Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1,200.00
6262	Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2Kpdt)	2,000.00
06.90.07	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan	3,118.00
6258	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	3,118.00
68	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	14,603.80
01.01.09	Program Penerapan Pemerintahan yang Baik	7,939.00
1	Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	5,392.00
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	1,932.00
55	Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan Operasional	615.00
01.01.13	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	875.00
62	Penyelenggaraan dan Pengkoordinasian Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri	-
6352	Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Program Kb Nasional	100.00
6374	Peningkatan Kompetensi Petugas dan Pengelola Program Kb	775.00
01.01.17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	288.00
24	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	288.00
07.04.01	Program Keluarga Berencana	1,340.10
6369	Jaminan Pelayanan Kb Berkualitas Bagi Rakyat Miskin	1,000.10
6373	Peningkatan Jejaring Pelayanan Kb Pemerintah dan Swasta/Non Pemerintah	340.00
07.04.02	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	408.50
6359	Advokasi dan Kie Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (Krr)	20.00
6360	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Krr	17.50
6370	Pembentukan, Pengembangan, Pengelolaan dan Pelayanan Pik-Krr	371.00
07.04.03	Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	2,386.00
6362	Pengembangan Jaringan dan Peningkatan Kie-Advokasi Program Kb Nasional	-
6363	Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Penyediaan Data Informasi Program Kb Nasional	-
6371	Pendataan Keluarga dan Individu Dalam Keluarga	404.00
6372	Penguatan Jejaring Operasional Lini Lapangan Yang Berbasis Masyarakat	1,982.00
11.04.05	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	1,367.20
6365	Intensifikasi Advokasi dan Kie Program Kb Nasional	507.50
6367	Peningkatan Akses Informasi dan Pelayanan Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	809.70
6368	Peningkatan Akses Informasi, Pembinaan Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	50.00
80	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	40,310.30
01.01.09	Program Penerapan Pemerintahan yang Baik	32,354.80
1	Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	25,351.80
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	6,804.30
43	Pengelolaan dan Pengendalian Anggaran	198.80
01.01.17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	330.00
24	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	330.00
01.04.01	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	3,948.00
6931	Pengembangan Teknologi Akselerator dan Proses Bahan	3,948.00
01.04.02	Program Difusi dan Pemanfaatan Iptek	1,861.50
6916	Layanan Pemanfaatan Iptek Nuklir Bagi Masyarakat	1,861.50
01.04.03	Program Penguatan Kelembagaan Iptek	509.00
6921	Revitalisasi dan Pendayagunaan Reaktor, Instalasi dan Fasilitas Nuklir	509.00
05.03.02	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	657.00
6928	Pemantauan dan Evaluasi Radioaktivitas Lingkungan	657.00
10.05.01	Program Pendidikan Kedinasan	650.00
6925	Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir	650.00
83	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	809.70
01.01.17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	809.70
24	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	809.70
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI (BNP2TKI)	6,935.40
01.01.09	Program Penerapan Pemerintahan yang Baik	1,500.00
1	Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	1,200.00
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	300.00
04.02.04	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	5,435.40
3622	Peningkatan Pelayanan Tki Ke Luar Negeri	1,067.90
3624	Penguatan Kelembagaan Badan Penyelenggara Tki	4,367.50

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp juta)
1	2	3
	TOTAL	1,810,181.80

**D. Pagu Indikatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RAPBD Provinsi DIY Tahun 2009 (Pasca Musrenbang RKPD Tahun 2008)**

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
1	URUSAN WAJIB	1,278,192,331,024
1.01	PENDIDIKAN	157,782,333,000
1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	149,222,444,000
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	43,722,444,000
	Belanja Pegawai	
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	43,722,444,000
	BELANJA LANGSUNG	105,500,000,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,596,000,000
	x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40,000,000
	x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	1,120,000,000
	x.xx.01.03, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000,000
	x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	5,000,000
	x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	120,000,000
	x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	350,000,000
	x.xx.01.09, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	58,000,000
	x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	180,000,000
	x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	900,000,000
	x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	50,000,000
	x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35,000,000
	x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20,000,000
	x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	188,000,000
	x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	350,000,000
	x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	150,000,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,000,000,000
	x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor	210,000,000
	x.xx.02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor	230,000,000
	x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur	150,000,000
	x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	300,000,000
	x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	425,000,000
	x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	100,000,000
	x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100,000,000
	x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	85,000,000
	x.xx.02.35, Rehabilitasi Sedang/Berat Gudang Kantor	400,000,000
3	Program peningkatan disiplin aparatur	95,000,000
	x.xx.03.05, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	95,000,000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	45,000,000
	x.xx.05.03, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	45,000,000
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	40,000,000
	x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20,000,000
	x.xx.06.xx, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	10,000,000
	x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10,000,000
6	Program pendidikan anak usia dini	2,744,000,000
	1.01.15.15, Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	121,000,000
	1.01.15.18, Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	622,000,000
	1.01.15.42, Rehab sedang/berat bangunan sekolah	520,000,000
	1.01.15.58, Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	425,000,000
	1.01.15.59, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	445,000,000
	1.01.15.62, Pengembangan kurikulum,bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	371,000,000
	1.01.15.63, Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	240,000,000
7	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	7,467,479,000
	1.01.16.58, Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	60,000,000
	1.01.16.61, Pembinaan SMP Terbuka	18,000,000
	1.01.16.66, Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS	4,380,000,000
	1.01.16.67, Penyelenggaraan paket A setara SD	110,000,000
	1.01.16.68, Penyelenggaraan paket B setara SMP	902,979,000
	1.01.16.70, Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	862,500,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
	1.01.16.74, Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah	1,134,000,000
8	Program Pendidikan Menengah	<u>12,130,000,000</u>
	1.01.17.15, Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	700,000,000
	1.01.17.18, Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (SMA, SMK)	750,000,000
	1.01.17.46, Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah	197,000,000
	1.01.17.61, Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)	500,000,000
	1.01.17.62, Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu	5,000,000,000
	1.01.17.63, Penyelenggaraan paket C setara SMU	620,000,000
	1.01.17.64, Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	485,000,000
	1.01.17.66, Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri	100,000,000
	1.01.17.68, Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah	300,000,000
	1.01.17.70, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	3,478,000,000
9	Program Pendidikan Non Formal	<u>4,833,597,000</u>
	1.01.18.03, Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	445,000,000
	1.01.18.04, Pengembangan pendidikan keaksaraan	2,733,420,000
	1.01.18.05, Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	625,000,000
	1.01.18.06, Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	487,900,000
	1.01.18.08, Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	176,277,000
	1.01.18.09, Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	366,000,000
10	Program Pendidikan Luar Biasa	<u>6,696,000,000</u>
	1.01.19.01, Pembangunan gedung sekolah	450,000,000
	1.01.19.15, Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	200,000,000
	1.01.19.17, Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	300,000,000
	1.01.19.18, Pengadaan mebeluer sekolah	300,000,000
	1.01.19.19, Pengadaan perlengkapan Sekolah	350,000,000
	1.01.19.20, Pengadaan alat rumah tangga Sekolah	200,000,000
	1.01.19.30, Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah	360,000,000
	1.01.19.41, Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	1,000,000,000
	1.01.19.56, Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	660,000,000
	1.01.19.57, Pelatihan penyusunan kurikulum	60,000,000
	1.01.19.58, Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan	100,000,000
	1.01.19.60, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1,436,000,000
	1.01.19.61, Bantuan Operasional Sekolah	1,280,000,000
11	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<u>5,282,170,000</u>
	1.01.20.01, Pelaksanaan sertifikasi pendidik	120,000,000
	1.01.20.02, Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	400,000,000
	1.01.20.03, Pelatihan bagi penyidik untuk memenuhi standar kompetensi	640,000,000
	1.01.20.04, Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	120,000,000
	1.01.20.07, Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	188,715,000
	1.01.20.08, Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	3,753,455,000
	1.01.20.09, Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	60,000,000
12	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	<u>15,264,166,000</u>
	1.01.22.01, Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	4,847,250,000
	1.01.22.02, Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	2,683,000,000
	1.01.22.07, Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	7,683,916,000
	1.01.22.09, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	50,000,000
13	Program Pendidikan Tinggi	<u>3,390,000,000</u>
	1.01.23.01, Promosi Pendiidkan Tinggi	1,290,000,000
	1.01.23.02, Peningkatan Kualitas Pengeolaan LPM Bidang Kewirausahaan dan Sibertimas	125,000,000
	1.01.23.03, Sinergi Pemberdayaan Potensi Pendidikan Tinggi dan Masyarakat (SIBERTIMAS) dan KKN	300,000,000
	1.01.23.04, Pembinaan minat, Bakat dan kreativitas mahasiswa	500,000,000
	1.01.23.05, Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa	1,000,000,000
	1.01.23.06, Pemberdayaan IKPM se Indonesia di Yogyakarta	75,000,000
	1.01.23.07, Evaluasi pendirian/pembukaan penutupan perguruan tinggi	40,000,000
	1.01.23.08, Pemetaan pemukiman mahasiswa	60,000,000
14	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	<u>824,000,000</u>
	1.18.16.01, Pembinaan organisasi kepemudaan	629,000,000
	1.18.16.02, Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	120,000,000
	1.18.16.05, Penyuluhan Pencegahan Penggunaan NARKOBA di Kalangan Generasi Pemuda	75,000,000
15	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	<u>565,000,000</u>

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
	1.18.17.01, Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	565,000,000
16	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	20,027,588,000
	1.18.20.01, Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga	138,490,000
	1.18.20.03, Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	1,060,000,000
	1.18.20.05, Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	90,000,000
	1.18.20.06, Penyelenggaraan kompetisi olahraga	18,739,098,000
17	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	20,500,000,000
	1.18.21.02, Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	20,000,000,000
	1.18.21.07, Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	500,000,000
1.01.02	BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH	8,559,889,000
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,092,389,000
	Belanja Pegawai	
	Gaji dan tunjangan	4,092,389,000
	BELANJA LANGSUNG	4,467,500,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	925,000,000
	x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000
	x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	250,000,000
	x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	30,000,000
	x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	110,000,000
	x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	35,000,000
	x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30,000,000
	x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000
	x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60,000,000
	x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17,500,000
	x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	140,000,000
	x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	115,000,000
	x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	120,000,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,195,000,000
	x.xx.02.03, Pembangunan gedung kantor	500,000,000
	x.xx.02.05, Pengadaan kendaraan dinas/operasional	220,000,000
	x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor	69,300,000
	x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100,000,000
	x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	230,000,000
	x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	25,700,000
	x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	50,000,000
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	37,500,000
	x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20,000,000
	x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	7,500,000
	x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10,000,000
4	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	2,310,000,000
	1.01.21.xx, Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	320,000,000
	1.01.21.02, Pengembangan minat dan budaya baca	220,000,000
	1.01.21.03, Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	350,000,000
	1.01.21.04, Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan	338,000,000
	1.01.21.06, Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca	40,000,000
	1.01.21.07, Perencanaan dan penyusunan program budaya baca	170,000,000
	1.01.21.08, Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	105,000,000
	1.01.21.09, Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	742,000,000
	1.01.21.10, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	25,000,000
1.02	KESEHATAN	65,829,836,000
1.02.01	DINAS KESEHATAN	51,127,244,000
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17,827,244,000
	Belanja Pegawai	
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	17,827,244,000
	BELANJA LANGSUNG	33,300,000,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<u>3,579,831,450</u>
	x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,000,000
	x.xx.01.xx, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	683,525,540
	x.xx.01.04, Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	22,000,000
	x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	11,246,875
	x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	80,752,000
	x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	295,469,960
	x.xx.01.09, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	56,600,000
	x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	100,000,000
	x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	455,362,125
	x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	80,000,000
	x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40,410,000
	x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45,801,750
	x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20,000,000
	x.xx.01.16, Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,000,000
	x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	400,000,000
	x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	290,726,200
	x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	168,130,000
	x.xx.01.20, Penyediaan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	764,807,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<u>1,339,883,500</u>
	x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor	500,000,000
	x.xx.02.xx, Pengadaan Peralatan Kantor	9,837,500
	x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur	50,000,000
	x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	320,000,000
	x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	390,000,000
	x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	50,046,000
	x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	20,000,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	<u>892,136,650</u>
	x.xx.05.01, Pendidikan dan pelatihan formal	188,160,000
	x.xx.05.02, Sosialisasi peraturan perundang-undangan	41,032,350
	x.xx.05.04, Perencanaan Program dan Peningkatan Kualitas Layanan Data	139,000,000
	x.xx.05.12, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	165,000,000
	x.xx.05.14, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	118,944,300
	x.xx.05.17, Penyusunan D G S	180,000,000
	x.xx.05.18, Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	60,000,000
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<u>24,626,000</u>
	x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3,831,000
	x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	5,000,000
	x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	12,000,000
	x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3,795,000
5	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	<u>101,500,000</u>
	1.02.15.02, Peningkatan Pemerataan obat dan Perbekes	20,000,000
	1.02.15.04, Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	46,500,000
	1.02.15.05, Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	35,000,000
6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	<u>1,619,612,000</u>
	1.02.16.01, Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya	100,000,000
	1.02.16.02, Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	984,750,000
	1.02.16.09, Peningkatan kesehatan masyarakat	322,562,000
	1.02.16.11, Peningkatan Yankes bagi Pengungsi Korban Bencana	40,000,000
	1.02.16.12, Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	95,000,000
	1.02.16.17, Pelayanan Kesehatan Remaja	77,300,000
7	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	<u>269,000,000</u>
	1.02.19.01, Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	150,000,000
	1.02.19.02, Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	99,000,000
	1.02.19.04, Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan	20,000,000
8	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	<u>1,799,332,000</u>
	1.02.20.02, Pemberian tambahan makanan dan vitamin	1,679,000,000
	1.02.20.03, Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi ,Gangguan akibat kurang yodium (GAKY),kurang vitamin A,dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	70,332,000
	1.02.20.04, Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi	20,000,000
	1.02.20.06, Monitoring,evaluasi dan pelaporan	30,000,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
9	Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.02.21.01, Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1.02.21.02, Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1.02.21.03, Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 1.02.21.04, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	445,000,000 165,000,000 220,000,000 40,000,000 20,000,000
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.02.22.05, Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.02.22.06, Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 1.02.22.08, Peningkatan imunisasi 1.02.22.09, peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	2,290,891,500 1,503,400,000 431,601,500 140,890,000 215,000,000
11	Program standarisasi pelayanan kesehatan 1.02.23.02, Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	337,856,000 337,856,000
12	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 1.02.24.12, Bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin	16,000,000,000 16,000,000,000
13	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata 1.02.26.17, Rehabilitasi bangunan rumah sakit 1.02.26.18, Pengadaan alat-alat rumah sakit 1.02.26.19, Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.02.26.21, Pengadaan mebeuleur rumah sakit 1.02.26.22, Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain -lain) 1.02.26.23, Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1.02.26.24, Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit	3,363,503,000 75,000,000 1,763,275,000 825,228,000 100,000,000 50,000,000 500,000,000 50,000,000
14	Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata 1.02.27.01, Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 1.02.27.10, Pemeliharaan rutin /berkala ruang bersalin 1.02.27.16, Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah RS 1.02.27.17, Pemeliharaan rutin/berkala alat2 kesehatan RS 1.02.27.20, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan RS 1.02.27.22, Pemeliharaan rutin/berkala hewan percobaan	279,636,900 50,000,000 2,400,000 59,236,900 130,000,000 20,000,000 18,000,000
15	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.02.28.05, Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	115,000,000 115,000,000
16	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.02.29.01, Penyuluhan kesehatan Anak Balita 1.02.29.04, Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 1.02.29.05, Pembangunan sarana dan prasarana Khusus Pelayanan Perawatan anak Balita 1.02.29.07, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02.29.08, Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Anak Balita	319,191,000 30,000,000 142,561,000 20,000,000 20,000,000 106,630,000
17	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.02.30.01, Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.02.30.03, Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan 1.02.30.06, Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.02.30.07, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	175,000,000 50,000,000 65,000,000 30,000,000 30,000,000
18	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.02.32.01, Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1.02.32.02, Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu 1.02.32.03, Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu 1.02.32.05, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	348,000,000 112,000,000 156,000,000 60,000,000 20,000,000
1.02.02	RS GRHASIA	14,702,592,000
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,986,092,000
	Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai	7,986,092,000
	BELANJA LANGSUNG	6,716,500,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2,917,019,120 6,807,320 250,000,000 2,500,000 34,020,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
	x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	147,400,000
	x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	80,000,000
	x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,000,000
	x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	33,000,000
	x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60,000,000
	x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,000,000
	x.xx.01.16, Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135,500,000
	x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	22,500,000
	x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	145,820,000
	x.xx.01.xx, Penyediaan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	1,893,471,800
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<u>243,458,880</u>
	x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20,000,000
	x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	163,458,880
	x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	20,000,000
	x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	25,000,000
	x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	15,000,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	<u>70,000,000</u>
	x.xx.05.01, Pendidikan dan pelatihan formal	50,000,000
	x.xx.05.03, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	20,000,000
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<u>50,000,000</u>
	x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15,000,000
	x.xx.06.xx, Penyusunan RKA SKPD	20,000,000
	x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	15,000,000
5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	<u>95,000,000</u>
	1.02.16.02, Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	65,000,000
	1.02.16.xx, Penampungan Pasien NAPZA/HIV	30,000,000
6	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	<u>30,000,000</u>
	1.02.19.xx, Pengembangan Media Promosi RS	30,000,000
7	Program standarisasi pelayanan kesehatan	<u>160,000,000</u>
	1.02.23.xx, Penyusunan standar pelayanan kesehatan	160,000,000
8	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata	<u>2,971,022,000</u>
	1.02.26.17, Rehabilitasi bangunan rumah sakit	641,130,000
	1.02.26.18, Pengadaan alat-alat kedokteran rumah sakit	100,000,000
	1.02.26.19, Pengadaan obat-obatan rumah sakit	600,000,000
	1.02.26.21, Pengadaan mebeleur rumah sakit	60,000,000
	1.02.26.22, Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)	100,000,000
	1.02.26.23, Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	1,374,892,000
	1.02.26.24, Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit	50,000,000
	1.02.26.26, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20,000,000
	1.02.26.xx, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	25,000,000
9	Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata	<u>180,000,000</u>
	1.02.27.01, Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	120,000,000
	1.02.27.16, Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah RS	40,000,000
	1.02.27.17, Pemeliharaan rutin/berkala alat2 kesehatan RS	20,000,000
1.03	PEKERJAAN UMUM	<u>133,028,541,000</u>
1.03.01	DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH	<u>133,028,541,000</u>
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	<u>22,728,541,000</u>
	Belanja Pegawai	
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	22,728,541,000
	BELANJA LANGSUNG	<u>110,300,000,000</u>
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<u>1,723,650,000</u>
	x.xx.01.01, Penyediaan Jasa surat menyurat	10,000,000
	x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	400,000,000
	x.xx.01.05, Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	11,000,000
	x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	9,900,000
	x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100,000,000
	x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100,000,000
	x.xx.01.09, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	150,000,000
	x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	190,000,000
	x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
	x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250,000,000
	x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,750,000
	x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,000,000
	x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	75,000,000
	x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	400,000,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<u>1,150,000,000</u>
	x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor	50,000,000
	x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	200,000,000
	x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	750,000,000
	x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	50,000,000
	x.xx.02.52, Pengadaan Sistem Pengukuran Dan Penilaian Aset/Barang Daerah	100,000,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	<u>450,000,000</u>
	x.xx.05.04, Perencanaan Program dan Peningkatan Kualitas Layanan Data	250,000,000
	x.xx.05.12, Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi (2)	100,000,000
	x.xx.05.13, Inventarisasi, Integrasi dan Pengelolaan Barang	100,000,000
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<u>45,000,000</u>
	x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20,000,000
	x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran	15,000,000
	x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10,000,000
5	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	<u>38,695,500,000</u>
	1.03.15.01, Perencanaan pembangunan jalan	310,000,000
	1.03.15.03, Pembangunan jalan	25,135,000,000
	1.03.15.04, Perencanaan pembangunan jembatan	95,000,000
	1.03.15.05, Pembangunan jembatan	12,275,500,000
	1.03.15.06, Monitoring dan evaluasi	30,000,000
	1.03.15.07, Pengawasan teknik peningkatan jalan dan jembatan	850,000,000
6	Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	<u>1,790,000,000</u>
	1.03.16.01, Perencanaan pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	100,000,000
	1.03.16.03, Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1,600,000,000
	1.03.16.05, Pengawasan Teknik	90,000,000
7	Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan	<u>26,137,400,000</u>
	1.03.18.02, Perencanaan Rehabitasi /pemeliharaan jembatan	200,000,000
	1.03.18.03, Rehabitasi /pemeliharaan jalan	10,250,000,000
	1.03.18.04, Rehabilitasi /pemeliharaan jembatan	2,983,650,000
	1.03.18.05, Monitoring dan evaluasi	50,000,000
	1.03.18.06, Pengawasan Teknik	600,000,000
	1.03.18.xx, Pemeliharaan Rutin Jalan	9,828,750,000
	1.03.18.xx, Pemeliharaan Rutin Jembatan	2,225,000,000
8	Program inspeksi kondiasi jalan dan jembatan	<u>519,500,000</u>
	1.03.20.01, Inspeksi kondisi jalan	241,500,000
	1.03.20.02, Inspeksi kondisi jembatan	278,000,000
9	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	<u>7,990,000,000</u>
	1.03.24.01, Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	500,000,000
	1.03.24.05, Perencanaan normalisasi saluran sungai	120,000,000
	1.03.24.10, Rehabilitasi /pemeliharaan jaringan irigasi	3,750,000,000
	1.03.24.15, Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	1,300,000,000
	1.03.24.17, Monitoring,evaluasi dan pelapran	50,000,000
	1.03.24.18, Pendampingan WISMP I	750,000,000
	1.03.24.xx, Survey kondisi bangunan prasarana irigasi	20,000,000
	1.03.24.xx, Rehabilitasi/pemeliharaan bangunan prasarana sungai	1,500,000,000
10	Program penyediaan dan pengelolaan air baku	<u>3,253,000,000</u>
	1.03.25.01, Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	3,000,000,000
	1.03.25.07, Monitoring,evaluasi dan pelaporan	20,000,000
	1.03.25.08, Pengawasan Teknik	150,000,000
	1.03.25.xx, Perencanaan dan pengembangan alokasi air	83,000,000
11	Program pengembangan,pengelolaan,dan konservasi sungai,danau,dan sumber daya air lainnya	<u>8,710,350,000</u>
	1.03.26.01, Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	5,500,000,000
	1.03.26.02, Pemeliharaan dan rehabilitasi embung,dan bangunan penampung air lainnya	1,200,000,000
	1.03.26.05, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumberdaya air lainnya	571,000,000
	1.03.26.07, Monitoring,evaluasi dan pelaporan	20,000,000
	1.03.26.08, Pemeliharaan Hidrologi	110,000,000
	1.03.26.09, Pengawasan Teknik	320,850,000
	1.03.26.xx, Perencanaan pembangunan embung	400,000,000
	1.03.26.xx, Survey kondisi bangunan prasarana sungai/embung/telaga	20,000,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
	1.03.26.xx, Pemantauan kualitas air dan sosialisasi ke masyarakat	261,000,000
	1.03.26.xx, Koordinasi Kelembagaan Sumber Daya Air	207,500,000
	1.03.26.xx, Fasilitasi Kelembagaan P3A/GP3A/IP3A	100,000,000
12	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	3,270,000,000
	1.03.27.02, Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	2,000,000,000
	1.03.27.05, Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum	50,000,000
	1.03.27.08, Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah	1,200,000,000
	1.03.27.09, Montoring, evaluasi dan pelaporan	20,000,000
13	Program pengendalian banjir	6,022,400,000
	1.03.28.03, Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran Sungai	5,000,000,000
	1.03.28.11, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20,000,000
	1.03.28.12, Pengawasan Teknik	250,000,000
	1.03.28.xx, Pengendalian banjir dan pemantauan kekeringan	752,400,000
14	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	300,000,000
	1.03.29.01, Perencanaan pengembangan infastuktur	50,000,000
	1.03.29.02, Pembangunan peningkatan infrastuktur	250,000,000
15	Program pengembangan infrastruktur perdesaan	1,500,000,000
	1.03.30.02, Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	1,500,000,000
16	Program pengembangan dan pengelolaan data dan Informasi sda	629,200,000
	1.03.31.01, Pengelolaan Data dan Informasi SDA	129,200,000
	1.03.31.xx, Perencanaan potensi air daerah	500,000,000
17	Program pelayanan jasa pengujian	1,035,000,000
	1.03.32.01, Peningkatan kualitas pelayanan publik	775,000,000
	1.03.32.xx, Pelayanan jasa Laboratorium Pengujian	260,000,000
18	Program pengaturan jasa konstruksi	350,000,000
	1.03.33.01, Sosialisasi dan diseminasi peraturan per-UU-an Jasa Konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait	250,000,000
	1.03.33.xx, Sistem database jasa konstruksi	100,000,000
19	Program pemberdayaan jasa konstruksi	500,000,000
	1.03.34.01, Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi	200,000,000
	1.03.34.02, Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi	200,000,000
	1.03.34.03, Pemberdayaan jasa konstruksi kepada masyarakat (forum jasa konstruksi daerah)	100,000,000
20	Program pengawasan jasa konstruksi	575,000,000
	1.03.35.01, Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	100,000,000
	1.03.35.02, Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	125,000,000
	1.03.35.03, Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	150,000,000
	1.03.35.04, Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan jasa konstruksi	100,000,000
	1.03.35.05, Pengawasan terhadap K-3	100,000,000
21	Program pengembangan perumahan	1,079,000,000
	1.04.15.01, Penetapan kebijakan ,strategi dan program perumahan (2)	410,000,000
	1.04.15.02, Penyusunan norma,standar,prosedur dan manual (NSPM)	100,000,000
	1.04.15.06, Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	175,000,000
	1.04.15.08, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	14,000,000
	1.04.15.xx, Pengembangan lingkungan sehat perumahan	230,000,000
	1.04.15.xx, Pemberdayaan komunitas perumahan	150,000,000
22	Program Perencanaan Tata Ruang	730,000,000
	1.05.15.05, Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	500,000,000
	1.05.15.08, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW	230,000,000
23	Program pemanfaatan ruang	900,000,000
	1.05.16.02, Penyusunan norma,standar,dan kriteria pemanfaatan ruang	200,000,000
	1.05.16.05, Survei dan Pemetaan (Mikro Zonasi Rawan Gempa)	700,000,000
24	Program pengendalian pemanfaatan ruang	680,000,000
	1.05.17.01, Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	500,000,000
	1.05.17.05, Pengawasan pemanfaatan ruang	80,000,000
	1.05.17.06, Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten /kota	100,000,000
25	Program pengelolaan persampahan	700,000,000
	1.05.17.xx, Perencanaan pengembangan sistem pengelolaan persampahan	500,000,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
	1.05.17.xx, Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	200,000,000
26	Program perencanaan tata bangunan dan lingkungan	1,000,000,000
	1.05.17.xx, Penataan permukiman sesuai tata bangunan dan lingkungan	1,000,000,000
27	Program Pengembangan Manajemen Laboratorium	266,000,000
	1.xx.xx, Peningkatan Sumber Daya Laboratorium Pengujian	86,750,000
	1.xx.xx, Peningkatan Manajemen Laboratorium Pengujian	179,250,000
28	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Ke PU-an	299,000,000
	1.xx.xx, Pengkajian Potensi sumber daya alam	162,950,000
	1.xx.xx, Penerapan Teknologi ke PU-an	136,050,000
1.06	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	14,442,156,000
1.06.01	BADAN PERENCANAAN DAERAH	14,442,156,000
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,510,156,000
	Belanja Pegawai	
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	4,510,156,000
	BELANJA LANGSUNG	9,932,000,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,142,400,000
	x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11,200,000
	x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	82,400,000
	x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	3,200,000
	x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	19,200,000
	x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	56,800,000
	x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,400,000
	x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28,000,000
	x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	6,400,000
	x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65,600,000
	x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,600,000
	x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13,600,000
	x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	87,200,000
	x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	700,800,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	339,200,000
	x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor	24,000,000
	x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur	32,000,000
	x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20,000,000
	x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	221,600,000
	x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	13,600,000
	x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	14,400,000
	x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	8,000,000
	x.xx.02.44, Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas /operasional	5,600,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	47,200,000
	x.xx.05.01, Pendidikan dan pelatihan formal	29,600,000
	x.xx.05.02, Sosialisasi peraturan perundang-undangan	17,600,000
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	84,800,000
	x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	64,000,000
	x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran	4,000,000
	x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	16,800,000
5	Program pengembangan data /informasi	775,800,000
	1.06.15.01, Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	15,000,000
	1.06.15.02, Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	138,000,000
	1.06.15.05, Penyusunan profile daerah	72,600,000
	1.06.15.06, Pengembangan Website	60,000,000
	1.06.15.07, Pengelolaan Sistem Pendukung Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan	54,000,000
	1.06.15.08, Penyempurnaan dan pengembangan sistem aplikasi pengendalian pelaksanaan program/kegiatan	79,800,000
	1.06.15.12, Pengembangan Data Base Spacial GIS	147,000,000
	1.06.15.13, Upgrade Sistem Aplikasi Monev	33,000,000
	1.06.15.14, Entry Data APBD dan Non APBD	15,000,000
	1.06.15.15, Pemetaan Data Pelaksanaan Pembangunan Transportasi dan Sarpras	54,000,000
	1.06.15.16, Pengembangan Metadata Sistem Informasi Spasial Daerah	84,000,000
	1.06.15.17, Update CD Interaktif Pembangunan Daerah	23,400,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
6	Program kerjasama pembangunan	<u>115,200,000</u>
	1.06.16.01, Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan	24,000,000
	1.06.16.02, Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	45,000,000
	1.06.16.04, Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	46,200,000
7	Program pengembangan wilayah perbatasan	<u>13,200,000</u>
	1.06.17.10, Koordinasi Perencanaan Transportasi di Perbatasan	13,200,000
8	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	<u>172,200,000</u>
	1.06.18.06, Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis, Cepat Tumbuh dan Perdesaan	33,000,000
	1.06.18.07, Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Transportasi Kawasan Perkotaan	139,200,000
9	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	<u>192,600,000</u>
	1.06.19.02, Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	8,400,000
	1.06.19.07, Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	15,000,000
	1.06.19.08, koordinasi perencanaan penanganan parkir	30,000,000
	1.06.19.14, Koordinasi Perencanaan Penanganan Infrastruktur Perkotaan	28,200,000
	1.06.19.15, Fasilitasi dan Sinkronisasi Perencanaan Prasarana Wilayah	41,400,000
	1.06.19.16, Fasilitasi dan Koordinasi Penataan Transportasi Antar Wilayah yang Berkelanjutan (Sustainable Transport)	57,000,000
	1.06.19.17, Fasilitasi Infra dan Inter Moda Transportasi	12,600,000
10	Program perencanaan pembangunan daerah	<u>2,463,000,000</u>
	1.06.21.07, Penetapan RPJMD	180,000,000
	1.06.21.08, Penyusunan rancangan RKPD	120,000,000
	1.06.21.09, Penyelenggaraan musrenbang RKPD	165,000,000
	1.06.21.10, Penetapan RKPD	90,000,000
	1.06.21.16, Fasilitasi dan Koordinasi Penelitian	126,000,000
	1.06.21.17, Inventarisasi Hasil Penelitian Tahunan	54,000,000
	1.06.21.19, Forum hasil pelaksanaan program/kegiatan	36,000,000
	1.06.21.21, Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	54,000,000
	1.06.21.22, Penyusunan KUA dan PPA	150,000,000
	1.06.21.23, Penyusunan KUA dan PPA Perubahan	120,000,000
	1.06.21.24, Sinkronisasi dan koordinasi program pembangunan	300,000,000
	1.06.21.25, Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan	66,000,000
	1.06.21.27, Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, RKT dan Penetapan Kinerja	78,000,000
	1.06.21.28, Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan	15,000,000
	1.06.21.29, Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program / kegiatan Setda dan Setwan	60,000,000
	1.06.21.30, Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program / kegiatan Lembaga Teknis Daerah	60,000,000
	1.06.21.31, Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program / kegiatan Dinas Daerah	120,000,000
	1.06.21.32, Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan	30,000,000
	1.06.21.33, Penelitian tentang Isu-Isu Strategis	60,000,000
	1.06.21.34, Penyusunan Dokumen Informasi dan Sosialisasi Hasil Litbang	24,000,000
	1.06.21.35, Evaluasi dan Analisis Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	120,000,000
	1.06.21.36, Evaluasi dan Analisis Kebijakan Pembangunan Bidang Transportasi dan Prasarana Wilayah	120,000,000
	1.06.21.37, Penyusunan Analisis Kebijakan Pelaksanaan Program sesuai dengan Visi Pemerintah Daerah	120,000,000
	1.06.21.38, Koordinasi Penanganan Dana DAK	39,000,000
	1.06.21.39, Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bidang Prasarana Wilayah	66,000,000
	1.06.21.40, Fasilitasi, Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan IDP3	90,000,000
11	Program perencanaan pembangunan ekonomi	<u>1,868,400,000</u>
	1.06.22.02, Penyusunan indikator ekonomi daerah	56,400,000
	1.06.22.12, Penyusunan Analisis PDRB	54,600,000
	1.06.22.13, Fasilitasi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi (P-KSP)	60,600,000
	1.06.22.14, Penyusunan Perencanaan Makro Ekonomi Tahunan	74,400,000
	1.06.22.22, Koordinasi rural community development (pembangunan masyarakat pedesaan)	105,000,000
	1.06.22.23, Fasilitasi forum jogja seed center	90,000,000
	1.06.22.24, Koordinasi pengelolaan plasma nutfah/sumberdaya genetik	105,000,000
	1.06.22.26, Koordinasi perencanaan penanganan pengangguran	51,000,000
	1.06.22.29, Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	135,000,000
	1.06.22.30, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas	90,000,000
	1.06.22.31, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Program Indagkop dan ESDM	158,400,000
	1.06.22.32, Penyusunan Masterplan Pengembangan UKM	73,800,000
	1.06.22.33, Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	123,600,000
	1.06.22.34, Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi dan UKM	117,600,000
	1.06.22.35, Penyusunan Kebijakan Bidang ESDM	120,600,000
	1.06.22.36, Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian, dan Keduniasah	105,000,000
	1.06.22.37, Penyusunan Kajian Perencanaan Kebijakan Kependudukan	90,000,000
	1.06.22.38, Koordinasi Perencanaan Program Pariwisata Alam	43,200,000
	1.06.22.39, Koordinasi Perencanaan Program Pariwisata Pendidikan	42,000,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
	1.06.22.40, Koordinasi Perencanaan Program Pariwisata Budaya	43,200,000
	1.06.22.41, Penyusunan Perencanaan Pengembangan Pariwisata Pantai	129,000,000
12	Program perencanaan sosial dan budaya	<u>1,302,600,000</u>
	1.06.23.02, Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan	54,000,000
	1.06.23.05, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	51,000,000
	1.06.23.06, Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	52,200,000
	1.06.23.07, Koordinasi perencanaan pembangunan bidang budaya	38,400,000
	1.06.23.08, Koordinasi pengembangan minat baca dan perpustakaan	34,800,000
	1.06.23.09, Koordinasi Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah	52,800,000
	1.06.23.10, Koordinasi pengembangan Pendidikan Tinggi	34,800,000
	1.06.23.11, Koordinasi Pengembangan PAUD dan Non Formal	49,800,000
	1.06.23.12, Koordinasi Pengembangan Pemuda dan Olah Raga	48,600,000
	1.06.23.18, Koordinasi perencanaan program pemberdayaan masyarakat	51,000,000
	1.06.23.20, Koordinasi Perencanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	48,000,000
	1.06.23.21, Koordinasi Perencanaan Program Ketentraman dan Ketertiban	45,000,000
	1.06.23.22, Penyusunan Analisis Data Pendudukan Miskin	180,000,000
	1.06.23.23, Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat	48,000,000
	1.06.23.24, Fasilitasi Perencanaan Program Keluarga Harapan	36,000,000
	1.06.23.25, Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	36,000,000
	1.06.23.26, Koordinasi Pengembangan Cluster Pendidikan	140,400,000
	1.06.23.27, Koordinasi Pengembangan Daya Saing Aparatur	52,800,000
	1.06.23.28, Penyusunan Analisis Kontribusi Budaya Lokal terhadap Budaya Nasional	142,800,000
	1.06.23.29, Penyusunan Perencanaan Program Pengembangan SDM di Bidang Kesenian	106,200,000
13	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	<u>141,000,000</u>
	1.06.24.09, Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	72,000,000
	1.06.24.10, Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam	15,000,000
	1.06.24.11, Fasilitasi dan Koordinasi Sumber Daya Air	12,600,000
	1.06.24.12, Fasilitasi dan Koordinasi Kelembagaan Pengelola Irigasi	41,400,000
14	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah	<u>150,000,000</u>
	1.06.28.01, Penguatan Kelembagaan Sumber Daya Air	150,000,000
15	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	<u>36,000,000</u>
	1.06.29.01, Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Daerah Tertinggal	36,000,000
16	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	<u>697,200,000</u>
	1.16.15.01, Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah	30,000,000
	1.16.15.02, Pengembangan potensi unggulan daerah	120,600,000
	1.16.15.03, Fasilitasi dan Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT)	25,800,000
	1.16.15.04, koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	57,000,000
	1.16.15.05, Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	73,200,000
	1.16.15.06, Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia	30,000,000
	1.16.15.08, Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	62,400,000
	1.16.15.09, Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	18,000,000
	1.16.15.10, Penyelenggaraan Pameran Investasi	270,000,000
	1.16.15.11, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	10,200,000
17	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	<u>181,800,000</u>
	1.16.16.03, Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	57,600,000
	1.16.16.04, Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	32,400,000
	1.16.16.09, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	9,000,000
	1.16.16.12, Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi	37,800,000
	1.16.16.13, Penyusunan Data Base Potensi Investasi	45,000,000
18	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	<u>43,200,000</u>
	1.16.17.01, Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	43,200,000
19	Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah	<u>166,200,000</u>
	1.23.15.02, Pengolahan, updating dana analisis datadan statistik daerah	105,600,000
	1.23.15.04, Pengolahan, upadating dan analisis data PDRB	60,600,000
1.07	PERHUBUNGAN	<u>74,959,774,000</u>
1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN	<u>74,959,774,000</u>
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	<u>8,061,474,000</u>
	Belanja Pegawai	
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	8,061,474,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
	BELANJA LANGSUNG	66,898,300,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,418,982,000
	x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000
	x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	212,540,000
	x.xx.01.03, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,895,000
	x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	11,205,000
	x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	35,100,000
	x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	202,442,000
	x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	129,000,000
	x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	109,000,000
	x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	16,005,000
	x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125,280,000
	x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,261,000
	x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,640,000
	x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	26,000,000
	x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	500,000,000
	x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	31,614,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,102,320,000
	x.xx.02.06, Pengadaan perlengkapan rumah jabatan /dinas	3,740,000
	x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	305,300,000
	x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	689,234,000
	x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	20,000,000
	x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	47,600,000
	x.xx.02.60, Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi	36,446,000
3	Program peningkatan disiplin aparatur	107,100,000
	x.xx.03.02, Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya	107,100,000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	40,000,000
	x.xx.05.01, Pendidikan dan pelatihan formal	40,000,000
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	44,063,000
	x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	30,000,000
	x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran	7,610,000
	x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6,453,000
6	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	491,240,000
	1.07.15.01, Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	68,000,000
	1.07.15.03, Koordinasi dalam pembangunan prasaana dan fasilitas perhubungan	40,000,000
	1.07.15.06, Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai,danau,dan penyeberangan	21,800,000
	1.07.15.09, Survei Lalu Lintas	56,920,000
	1.07.15.10, Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang dan Jalan Kereta Api	46,000,000
	1.07.15.13, Perencanaan jaringan transportasi	135,000,000
	1.07.15.xx, Manajemen Lalu Lintas	123,520,000
7	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	1,039,100,000
	1.07.16.05, Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	664,000,000
	1.07.16.06, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laut dan ASDP	194,100,000
	1.07.16.06, Pemeliharaan Sarana dan prasarana Jembatan Timbang	181,000,000
8	Program peningkatan pelayanan angkutan	38,484,176,000
	1.07.17.01, kegiatan penyuluhan bagi para sopir /juru mudik untuk peningkatan keselamatan penumpang	85,858,000
	1.07.17.05, Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan angkutan umum di jalan raya	750,000,000
	1.07.17.10, Kegiatan penciptaan pelayanana cepat,tepat,murah dan mudah	200,000,000
	1.07.17.12, Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	36,843,834,000
	1.07.17.13, Fasilitasi kebijakan dibidang perhubungan	52,000,000
	1.07.17.18, Penegakan Hukum Kelebihan Muatan Barang	482,500,000
	1.07.17.19, Sosialisasi Prakiraan Musim dan Hujan	69,984,000
9	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	21,700,000,000
	1.07.18.02, Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	4,500,000,000
	1.07.18.04, Pembangunan Poswaskespel	200,000,000
	1.07.18.05, Pengembangan Bandara	3,000,000,000
	1.07.18.06, Pengadaan tanah (ruislag)	11,000,000,000
	1.07.18.xx, Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang	3,000,000,000
10	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	2,406,319,000
	1.07.19.01, Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	400,000,000
	1.07.19.03, Pengadaan pagar pengaman jalan	400,000,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
	1.07.19.04, Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan	500,000,000
	1.07.19.05, Pos Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perhubungan Udara	100,000,000
	1.07.19.06, Pengaturan dan Pengamanan Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru	230,000,000
	1.07.19.08, Penjagaan pintu perlintasan sebidang bandara Adi Sucipto	99,466,700
	1.07.19.09, Patroli Keselamatan Pelayaran	128,000,000
	1.07.19.xx, Pengadaan dan Pemasangan APILL	280,000,000
	1.07.19.xx, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan KA	268,852,300
11	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	65,000,000
	1.07.20.04, Pelaksanaan Registrasi Uji Tipe Rancang Bangun dan Penilaian Fisik Penghapusan Kendaraan Bermotor	35,000,000
	1.07.20.05, Pengendalian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	30,000,000
1.08	LINGKUNGAN HIDUP	9,966,598,000
1.08.02	BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH	9,966,598,000
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,629,598,000
	Belanja Pegawai	
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	2,629,598,000
	BELANJA LANGSUNG	7,337,000,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	606,000,000
	x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000
	x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	28,000,000
	x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	10,000,000
	x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	25,000,000
	x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	48,000,000
	x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	30,000,000
	x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40,000,000
	x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	9,000,000
	x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95,000,000
	x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15,000,000
	x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,000,000
	x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	15,000,000
	x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	250,000,000
	x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	25,000,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	940,000,000
	x.xx.02.05, Pengadaan kendaraan dinas/operasional	240,000,000
	x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur	20,000,000
	x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	70,000,000
	x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	185,000,000
	x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	25,000,000
	x.xx.02.42, Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	400,000,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	20,000,000
	x.xx.05.01, Pendidikan dan pelatihan formal	15,000,000
	x.xx.05.03, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5,000,000
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	35,000,000
	x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15,000,000
	x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran	10,000,000
	x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10,000,000
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	175,000,000
	1.08.15.05, Pengembangan teknoogi pengolahan persampahan	100,000,000
	1.08.15.06, Bimbingan teknis persampahan	75,000,000
6	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	2,459,000,000
	1.08.16.01, Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	130,000,000
	1.08.16.02, Koordinasi penilaian langit biru	44,000,000
	1.08.16.03, Pemantauan kualitas lingkungan	300,000,000
	1.08.16.04, Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	50,000,000
	1.08.16.06, Pengelolaan B3 dan Limbah B3	150,000,000
	1.08.16.07, Pengkajian dampak lingkungan	150,000,000
	1.08.16.10, Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	250,000,000
	1.08.16.11, Pengembangan produksi ramah lingkungan	120,000,000
	1.08.16.12, Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	100,000,000
	1.08.16.14, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	150,000,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
	1.08.16.16, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	45,000,000
	1.08.16.19, Sinkronisasi program pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi DIY	80,000,000
	1.08.16.20, Pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup kawasan sungai	100,000,000
	1.08.16.27, Pembinaan teknis pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, dan DPL	50,000,000
	1.08.16.28, Pemantapan program adiwiyata	150,000,000
	1.08.16.29, Pondok pesantren berwawasan lingkungan hidup	60,000,000
	1.08.16.32, Peningkatan kapasitas laboratorium pengujian kualitas lingkungan	130,000,000
	1.08.16.33, Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium Bapedalda	250,000,000
	1.08.16.34, Penyelesaian sengketa lingkungan hidup	100,000,000
	1.08.16.35, Sosialisasi pedoman pengelolaan limbah laboratorium	50,000,000
7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1,357,000,000
	1.08.17.01, Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	600,000,000
	1.08.17.02, Pantai dan laut lestari	132,000,000
	1.08.17.06, Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	90,000,000
	1.08.17.07, Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	130,000,000
	1.08.17.08, Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA	150,000,000
	1.08.17.09, Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	75,000,000
	1.08.17.10, Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	80,000,000
	1.08.17.14, Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	100,000,000
8	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	325,000,000
	1.08.18.02, Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	75,000,000
	1.08.18.03, Rehabilitasi hutan dan lahan	150,000,000
	1.08.18.07, Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	100,000,000
9	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	650,000,000
	1.08.19.01, Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	100,000,000
	1.08.19.02, Pengembangan data dan informasi lingkungan	50,000,000
	1.08.19.04, Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah	50,000,000
	1.08.19.12, Penyusunan dan Penertiban Buletin KALPATARU	50,000,000
	1.08.19.13, Penyusunan Dilaporan Status Lingkungan Hidup Daerah	75,000,000
	1.08.19.14, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Dana Kegiatan Bidang LH	25,000,000
	1.08.19.15, Penyusunan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Strategis Provinsi DIY	300,000,000
10	Program peningkatan pengendalian polusi	270,000,000
	1.08.20.01, Pengujian emisi kendaraan bermotor	50,000,000
	1.08.20.02, Pengujian emisi /polusi udara akibat aktivitas produksi	50,000,000
	1.08.20.03, Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	70,000,000
	1.08.20.05, Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	100,000,000
11	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	500,000,000
	1.08.24.05, Penataan RTH	500,000,000
1.11	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	6,232,272,000
1.11.01	KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	6,232,272,000
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,232,272,000
	Belanja Pegawai	
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	1,232,272,000
	BELANJA LANGSUNG	5,000,000,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	418,040,000
	x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,400,000
	x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	40,000,000
	x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	300,000
	x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	18,000,000
	x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	35,750,000
	x.xx.01.09, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9,000,000
	x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	25,000,000
	x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25,000,000
	x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000
	x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,500,000
	x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	200,000,000
	x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	51,090,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	106,400,000
	x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50,000,000
	x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	47,500,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
	x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	3,900,000
	x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5,000,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	20,000,000
	x.xx.05.01, Pendidikan dan pelatihan formal	10,000,000
	x.xx.05.xx, Penyusunan Lakip & Renstra	10,000,000
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10,000,000
	x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10,000,000
5	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	200,000,000
	1.11.15.03, Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan	50,000,000
	1.11.15.xx, Pembentukan Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri)	150,000,000
6	Program penguatan kelembagaan pengarusutaman gender dan anak	515,000,000
	1.11.16.02, Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	200,000,000
	1.11.16.04, Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	25,000,000
	1.11.16.05, Penguatan kelembagaan pengarusutaman gender	80,000,000
	1.11.16.06, Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	50,000,000
	1.11.16.08, Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	20,000,000
	1.11.16.15, Pemetaan Wilayah Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (TESA) 129	50,000,000
	1.11.16.xx, Pemetaan Daerah Rawan Ketidakadilan Gender bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi	75,000,000
	1.11.16.xx, Pembuatan Pedoman Evaluasi PUG	15,000,000
7	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	514,000,000
	1.11.17.02, Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan korban KDRT	150,000,000
	1.11.17.08, Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	300,000,000
	1.11.17.10, Penyelenggaraan Gerakan Sayang Ibu	64,000,000
8	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	915,500,000
	1.11.18.01, Pembinaan organisasi perempuan	50,000,000
	1.11.18.02, Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	90,000,000
	1.11.18.04, Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	250,000,000
	1.11.18.05, Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan	120,500,000
	1.11.18.07, Sarasehan Hari Ibu, Kartini dan Peringatan Hari Kartini	80,000,000
	1.11.18.09, Pelatihan dan Pendidikan Politik Berwawasan Gender	100,000,000
	1.11.18.11, Pelatihan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Ibu Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Ekonomi dan Pendapatan Keluarga	225,000,000
9	Program keluarga Berencana	175,000,000
	1.12.15.02, Pelayanan KIE	50,000,000
	1.12.15.03, Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	25,000,000
	1.12.15.04, Promosi Pelayanan KHIBA	75,000,000
	1.12.15.05, Pembinaan keluarga berencana	25,000,000
10	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	100,000,000
	1.12.16.01, Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	50,000,000
	1.12.16.02, Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat	50,000,000
11	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	50,000,000
	1.12.18.01, Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	50,000,000
12	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	75,000,000
	1.12.19.01, Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	75,000,000
13	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	25,000,000
	1.12.20.02, Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	25,000,000
14	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu -PADU	75,000,000
	1.12.xx.xx, Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan	75,000,000
15	Program peningkayan keberdayaan masyarakat perdesaan	1,054,234,000
	1.22.15.01, Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	811,695,000
	1.22.15.02, Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat	100,000,000
	1.22.15.03, Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa	142,539,000
16	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	746,826,000
	1.22.17.02, Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	746,826,000
1.13	SOSIAL	35,573,115,000
1.13.01	DINAS SOSIAL	35,573,115,000
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12,586,815,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
	Belanja Pegawai	
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	12,586,815,000
	BELANJA LANGSUNG	22,986,300,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,492,236,425
	x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,807,500
	x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	595,935,600
	x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	10,040,000
	x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	99,000,000
	x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	231,413,600
	x.xx.01.09, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	51,962,000
	x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	141,299,500
	x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	147,559,770
	x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	90,522,050
	x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	195,719,860
	x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25,147,200
	x.xx.01.16, Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2,991,186,630
	x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	160,660,000
	x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	281,586,715
	x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	229,160,000
	x.xx.01.20, Penyediaan Jasa Paramedis	195,236,000
	x.xx.01.21, Pemulangan dan Pemakaman Orang Terlantar	35,000,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,827,248,400
	x.xx.02.03, Pembangunan gedung kantor	1,123,618,400
	x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor	204,109,560
	x.xx.02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor	40,517,600
	x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur	14,000,000
	x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	259,820,900
	x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	630,548,000
	x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	23,250,340
	x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	16,030,000
	x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	20,030,000
	x.xx.02.42, Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	495,323,600
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	107,451,000
	x.xx.05.01, Pendidikan dan pelatihan formal	61,508,000
	x.xx.05.03, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	45,943,000
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	16,000,000
	x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6,000,000
	x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10,000,000
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	3,089,200,000
	1.13.15.02, Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	2,889,200,000
	1.13.15.05, Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	200,000,000
6	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	4,206,188,000
	1.13.16.03, Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	124,925,000
	1.13.16.05, Pelayanan psikologi bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	153,000,000
	1.13.16.07, Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	3,022,928,000
	1.13.16.08, Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS dan Kesos	458,000,000
	1.13.16.09, Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	40,100,000
	1.13.16.10, Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	405,235,000
	1.13.16.11, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	2,000,000
7	Program Pembinaan Anak Terlantar	302,000,000
	1.13.17.02, Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	300,000,000
	1.13.17.06, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	2,000,000
8	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	324,462,500
	1.13.18.03, Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	164,280,000
	1.13.18.04, Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	158,182,500
	1.13.18.10, Monitoring dan Evaluasi Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	2,000,000
9	Program pembinaan panti asuhan / panti jompo	3,162,564,675

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
	1.13.19.xx, Pembangunan sarana dan prasarana	9,850,000
	1.13.19.04, Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan /jompo	3,152,714,675
10	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	802,375,000
	1.13.20.01, Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi eks Penyandang Penyakit Sosial	800,375,000
	1.13.20.05, Monitoring dan Evaluasi Program Pembinaan Eks Penyandang Cacat Sosial	2,000,000
11	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	1,056,429,500
	1.13.21.01, Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	258,937,000
	1.13.21.02, Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	765,067,500
	1.13.21.04, Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	32,425,000
12	Program pengembangan kehidupan beragama	1,600,144,500
	1.13.22.01, Fasilitasi Penyelenggaraan STQ DIY dan Pengiriman Kafilah STQ Tk. Nasional Provinsi DIY	365,412,000
	1.13.22.xx, Penyelenggaraan Pembinaan Iman PNS/TNI/Polri Prop. DIY (Pembinaan Mental agama)	37,300,000
	1.13.22.04, Fasilitasi Pembinaan Mental Rohani Agama	140,000,000
	1.13.22.05, Peringatan penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan	58,950,000
	1.13.22.06, Fasilitasi Gerakan Pemahaman Isi Kandungan Al-Quran	87,455,000
	1.13.22.07, Forum Komunikasi Antar Paroki se Propinsi DIY	49,426,000
	1.13.22.11, Fasilitasi Pembinaan Iman Anak, Remaja dan Pengembangan Musik Gerejani	65,000,000
	1.13.22.12, Fasilitasi Pengiriman Kontingen Festival Maulud Nusantara	52,601,500
	1.13.22.13, Forum Komunikasi Antar Pimpinan Dinominasi dan Pembinaan Iman Agama Kristen	20,000,000
	1.13.22.14, Fasilitasi Forum Musyawarah Intern Majelis dan Pendalaman Agama Budha	22,000,000
	1.13.22.15, Fasilitasi Penyelenggaraan Peswarawi Prov. DIY dan Pengiriman Kontingen Peswarawi TK Nasional Tahun 2009 di Samarinda	183,500,000
	1.13.22.16, Fasilitasi Pengiriman Kontingen Festival Masjid Bersejarah dan Keraton Nusantara	140,000,000
	1.13.22.17, Fasilitasi Penyelenggaraan Karya Bakti Sosial Keagamaan Tk. Prov. DIY	96,000,000
	1.13.22.18, Fasilitasi Penyelenggaraan Optimalisasi Pemberdayaan Pekerja Sosial Kemasyarakatan	80,000,000
	1.13.22.19, Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Seni Baca Tripitaka	142,500,000
	1.13.22.xx, Fasilitasi Forum Musyawarah Intern Majelis dan Pendalaman Agama Hindu & Pembinaan Generasi Muda Hindu	60,000,000
1.14	TENAGA KERJA	43,273,176,000
1.14.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	43,273,176,000
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14,648,676,000
	Belanja Pegawai	
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	14,648,676,000
	BELANJA LANGSUNG	28,624,500,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,705,000,000
	x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18,000,000
	x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	500,000,000
	x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	9,000,000
	x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	95,000,000
	x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	249,730,000
	x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	125,000,000
	x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,000,000
	x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	36,000,000
	x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,000,000
	x.xx.01.16, Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11,000,000
	x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	46,000,000
	x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	350,000,000
	x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	150,270,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,907,000,000
	x.xx.02.05, Pengadaan kendaraan dinas/operasional	225,000,000
	x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor	250,000,000
	x.xx.02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor	750,000,000
	x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur	250,000,000
	x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	250,000,000
	x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	742,000,000
	x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	40,000,000
	x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100,000,000
	x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	25,000,000
	x.xx.02.42, Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	275,000,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	315,000,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
	x.xx.05.01, Pendidikan dan pelatihan formal	275,000,000
	x.xx.05.18, Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	40,000,000
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<u>70,000,000</u>
	x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	25,000,000
	x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	20,000,000
	x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	25,000,000
5	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	<u>7,755,000,000</u>
	1.14.15.09, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	40,000,000
	1.14.15.11, Fasilitasi untuk kelompok kerja produktif (KKP)	100,000,000
	1.14.15.12, Fasilitasi peserta pemagangan ke jepang	440,000,000
	1.14.15.13, Fasilitasi peserta pemagangan ke perusahaan untuk Alumni pelatihan BLK/LPK/LLK	600,000,000
	1.14.15.15, Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	240,000,000
	1.14.15.16, Pengembangan produktivitas melalui pelatihan kewirausahaan	750,000,000
	1.14.15.17, Pengukuran produktivitas kerja	50,000,000
	1.14.15.18, Pelatihan Ketrampilan Untuk Penempatan	630,000,000
	1.14.15.19, Pelatihan Ketrampilan Untuk Tenaga Kerja Mandiri	540,000,000
	1.14.15.21, Pelatihan ketrampilan swadaya	400,000,000
	1.14.15.23, Pelatihan ketrampilan keliling mobil training unit	625,000,000
	1.14.15.24, Training Need Assesment	50,000,000
	1.14.15.27, Sosialisasi program pemagangan ke Jepang	60,000,000
	1.14.15.29, Sosialisasi program pemagangan di perusahaan (untuk perusahaan tempat magang)	40,000,000
	1.14.15.30, Pengembangan jejaring pemagangan	20,000,000
	1.14.15.31, Pemberdayaan alumni program pemagangan ke Jepang	100,000,000
	1.14.15.33, Sertifikasi tenaga kerja	200,000,000
	1.14.15.34, Sosialisasi program 3 in 1	100,000,000
	1.14.15.35, Bimtek akreditasi LKP	60,000,000
	1.14.15.37, Akreditasi LKP	150,000,000
	1.14.15.38, Fasilitasi rakor/munas DPD HILSI dan AISI	75,000,000
	1.14.15.39, Sertifikasi uji kompetensi tenaga kerja di bidang otomotif, pariwisata dan listrik	150,000,000
	1.14.15.40, Pelatihan keterampilan institusional bagi pencari kerja	200,000,000
	1.14.15.41, Pelatihan keterampilan teknologi tepat guna untuk usaha mandiri	400,000,000
	1.14.15.43, Pelatihan keterampilan bidang teknis hape bagi pencari kerja	250,000,000
	1.14.15.44, Fasilitasi OJT ke perusahaan bagi siswa pelatihan BLK	150,000,000
	1.14.15.45, Forum komunikasi informasi edukasi pengembangan jejaring sistem informasi manajemen pemasaran pelatihan dan penempatan tenaga kerja ihan BLK	50,000,000
	1.14.15.47, Pengembangan Produktivitas melalui Pemberdayaan Asosiasi Produktivitas Nasional Indonesia (APNI)	50,000,000
	1.14.15.53, Pelatihan Manajemen Partisipatori melalui Peningkatan Produktivitas bagi Perangkat Desa di Desa Produktif	50,000,000
	1.14.15.54, Pelatihan Manajemen Usaha dan Produktivitas bagi UKM di Pedesaan	200,000,000
	1.14.15.55, Pelatihan Produktivitas kerja bagi Pengembangan Usaha Swadaya Masyarakat	800,000,000
	1.14.15.57, Koordinasi kebutuhan tenaga ahli dan tenaga kerja terampil di kota industri	75,000,000
	1.14.15.58, Pelatihan keterampilan usaha mandiri dibidang teknologi pertanian / peternakan	110,000,000
6	Program peningkatan kesempatan kerja	<u>7,657,500,000</u>
	1.14.16.07, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	40,000,000
	1.14.16.08, Pembentukan kelompok usaha melalui perluasan kerja sistem padat karya (PKSPK) dan pendampingan	870,000,000
	1.14.16.09, Bimbingan usaha bagi Pencaker lulusan SMK	825,000,000
	1.14.16.10, Pembentukan wirausaha baru melalui pendayagunaan tenaga kerja pemuda mandiri profesional (TKPMP) dan pendampingan	700,000,000
	1.14.16.11, Pembentukan wirausaha baru melalui pendayagunaan tenaga kerja mandiri	800,000,000
	1.14.16.13, Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja mandiri sektor informal (TKMSI)	700,000,000
	1.14.16.14, Perluasan kesempatan kerja bagi wanita pelaku usaha kecil sektor informal (Grameen Bank)	762,500,000
	1.14.16.18, Penyelenggaraan bursa kerja terbuka	400,000,000
	1.14.16.24, UP dating data ketenagakerjaan dan transmigrasi	175,000,000
	1.14.16.25, Operasional bursa tenaga kerja on-line	30,000,000
	1.14.16.26, Fasilitasi purna tenaga kerja Indonesia Wanita (TKI Wanita) Usaha Mandiri	150,000,000
	1.14.16.27, Pemberdayaan Tenaga Kerja akibat PHK	420,000,000
	1.14.16.28, Pembinaan usaha mandiri purna magang Jepang	60,000,000
	1.14.16.30, Fasilitasi KKPBI (Kelompok Kerja Produksi Buruh Informal)	100,000,000
	1.14.16.34, Evaluasi Kinerja Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	50,000,000
	1.14.16.36, Kerjasama dan Koordinasi Antar Stake Holders dan Institusi terkait	75,000,000
	1.14.16.38, Pembentukan Wira Usaha Baru (WUB) Purna Penambang Pasir dan Pendampingan	300,000,000
	1.14.16.39, Pembinaan dan Fasilitasi Sektor Informal Buruh Gendong dan Kuli Angkut Pasar	150,000,000
	1.14.16.40, Pembuatan data Base Purna kerja dan UMSI (Usaha Mandiri Sektor Informal) di Provinsi DIY	50,000,000
	1.14.16.41, Operasi Layanan KK Berbasis TI (DGS)	175,000,000
	1.14.16.44, Bimbingan usaha bagi penyandang cacat	250,000,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
	1.14.16.45, Pembinaan lembaga penempatan swasta	150,000,000
	1.14.16.46, Penyebaran informasi pasar kerja	100,000,000
	1.14.16.47, Penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah (PTKD)	250,000,000
	1.14.16.49, Koordinasi perencanaan pengurangan pengangguran	75,000,000
7	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	4,455,000,000
	1.14.17.08, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	25,000,000
	1.14.17.13, Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Norma Ketenagakerjaan dan K3	160,000,000
	1.14.17.14, BIMTEK Calon Ahli K3	70,000,000
	1.14.17.15, Pelatihan Sistem Manajemen K3	70,000,000
	1.14.17.16, Pelatihan HIPERKES dan KK Bagi Dokter Perusahaan	325,000,000
	1.14.17.17, Pelatihan HIPERKES dan KK Bagi Teknisi Perusahaan	215,000,000
	1.14.17.18, Pelatihan Hiperkes dan KK Bagi Mahasiswa	150,000,000
	1.14.17.19, Pelatihan Hiperkes dan KK Bagi Tenaga Kerja UKM Rawan Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja	120,000,000
	1.14.17.20, Pelatihan Hiperkes dan KK Bagi Paramedis	60,000,000
	1.14.17.22, Penilaian Nihil Kecelakaan Kerja	70,000,000
	1.14.17.23, Pemeriksaan dan Pengujian alat-alat K3	60,000,000
	1.14.17.25, Akreditasi Internal Lanjut/Penambahan Parameter	70,000,000
	1.14.17.30, Monitoring Perusahaan Rawan Perselisihan Hubungan Industrial	75,000,000
	1.14.17.31, Pelatihan Usaha Produktif Dan Pemberdayaan Bagi Buruh Penghasilan Rendah (Miskin)	175,000,000
	1.14.17.33, Pembinaan Buruh Wanita	250,000,000
	1.14.17.34, Pembinaan Penghuni RUSUNAWA Asrama Ledok Code	125,000,000
	1.14.17.36, Pengujian Lingkungan Kerja dan Pemeriksaan Kesehatan Kerja di Sektor UKM dan Pihak Kerja (di Perusahaan menengah dan besar)	415,000,000
	1.14.17.38, Penyuluhan Pembuatan PK, PP Bagi Perusahaan Penyedia Jasa	75,000,000
	1.14.17.39, Pencegahan PHI melalui Penyuluhan KB Bagi SP/SB	150,000,000
	1.14.17.42, Sosialisasi Perlindungan Hak dan Kewajiban Bagi Tenaga Kerja Wanita	60,000,000
	1.14.17.43, Workshop Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Pekerjaan Terburuk Bagi Anak	50,000,000
	1.14.17.45, Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri	50,000,000
	1.14.17.47, Pembinaan dan Pengembangan Serikat Pekerja (SP)	100,000,000
	1.14.17.49, Pelaksanaan Survey KHL dan Penyusunan UMP DIY Tahun 2010	450,000,000
	1.14.17.50, Identifikasi Penanggulangan UMP Tahun 2010	29,000,000
	1.14.17.52, Pembinaan dan Perlindungan Hubungan Industrial dan Pengawasan Norma Kerja	506,000,000
	1.14.17.62, Pembentukan P2K3 dan pemberdayaan P2K3	75,000,000
	1.14.17.65, Pembinaan dan fasilitasi bagi UMKM	150,000,000
	1.14.17.66, Pelatihan dan fasilitasi alat keselamatan kerja bagi kelompok penderes kelapa Kulon Progo	250,000,000
	1.14.17.68, Penelitian pengaruh paparan debu kayu pada perusahaan furniture	75,000,000
8	Program pengembangan wilayah transmigrasi	2,840,000,000
	2.08.15.02, Peningkatan kerjasama antar wilayah ,antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	165,000,000
	2.08.15.03, Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	750,000,000
	2.08.15.05, Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhanSDM	1,725,000,000
	2.08.15.06, Monitoring evaluasi dan pelaporan	15,000,000
	2.08.15.07, Promosi program transmigrasi	60,000,000
	2.08.15.08, Rintisan dan program pengembangan wilayah transmigrasi	125,000,000
9	Program transmigrasi lokal	260,000,000
	2.08.16.03, Perbaikan/pembangunan talud di lokasi tranmigrasi lokal	260,000,000
10	Program transmigrasi regional	660,000,000
	2.08.17.02, Pelatihan transmigrasi regional	660,000,000
1.15	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	22,680,219,500
1.15.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI	22,680,219,500
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11,607,464,000
	Belanja Pegawai	
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	11,607,464,000
	BELANJA LANGSUNG	11,072,755,500
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,284,499,500
	x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,358,000
	x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	799,710,000
	x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	7,370,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
	x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	62,370,000
	x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	254,072,500
	x.xx.01.09, Penyediaan Retribusi Sampah	1,703,000
	x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	145,450,000
	x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	117,837,000
	x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	31,729,000
	x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82,225,000
	x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24,095,000
	x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16,890,000
	x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	83,160,000
	x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	433,370,000
	x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	209,377,000
	x.xx.01.41, Penyediaan Jasa Administrasi kepegawaian	8,783,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	843,345,000
	x.xx.02.07, Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	19,800,000
	x.xx.02.08, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3,743,000
	x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur	57,200,000
	x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	251,537,000
	x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	437,673,000
	x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	17,600,000
	x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	55,792,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	48,255,000
	x.xx.05.01, Pendidikan dan pelatihan formal	26,400,000
	x.xx.05.02, Monitoring dan Evaluasi	16,355,000
	x.xx.05.03, Penyusunan Renstra Dinas Perindagkop. Propinsi DIY	5,500,000
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	115,727,000
	x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	8,888,000
	x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	5,115,000
	x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10,538,000
	x.xx.06.05, Penyusunan Laporan Triwulan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Tahunan	53,216,000
	x.xx.06.08, Penyusunan program indagkoptamben 2010	30,642,000
	x.xx.06.xx, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2008	7,328,000
5	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	396,920,000
	1.15.15.12, Diklat Administrasi Pembukuan Usaha Kecil	33,887,000
	1.15.15.15, Pendampingan Pengendalian Dana Bergulir Syariah	14,412,000
	1.15.15.16, Bintek Penyaluran Dana PKBL-BUMN dan Akses Kepada Perbankan Bagi KUKM/IKM	14,819,000
	1.15.15.20, Fasilitasi Sarjana Prospek Mandiri Berbasis Koperasi	226,422,000
	1.15.15.29, Penyelesaian kredit bermasalah UMKM pasca gempa di DIY	107,380,000
7	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	125,195,500
	1.15.18.10, Bintek Pengembangan Koperasi Siswa dan Koperasi Mahasiswa	16,324,000
	1.15.18.12, Sosialisasi Penjaminan Kredit Bagi KUKM	14,134,000
	1.15.18.13, Lomba Tangkas Trampil Koperasi Siswa	29,703,000
	1.15.18.17, Diklat Perekonomian Syariah	34,853,500
	1.15.18.21, Bintek Perkoperasian	15,338,000
	1.15.18.xx, Bintek Pengembangan Kelompok Usaha Koperasi Perempuan	14,843,000
8	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	258,821,000
	2.03.15.13, Survei dan Pemasangan Titik Kontrol Pengawasan Tambang	96,570,000
	2.03.15.xx, Pelatihan penambang batu	162,251,000
9	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	684,931,000
	2.03.16.04, Konservasi air tanah	83,646,000
	2.03.16.11, Penelitian, Penyelidikan, Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Geologi	219,339,000
	2.03.16.xx, Pembangunan sarana pemantauan Air Tanah	381,946,000
10	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	2,025,202,000
	2.03.17.02, Penyusunan desain detail jaringan listrik pedesaan	166,344,000
	2.03.17.13, Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah	187,950,000
	2.03.17.15, Penyusunan DED Pemanfaatan Energi Angin	133,828,000
	2.03.17.xx, Perbaikan dan Pemeliharaan PLTMH dan Jaringan Distribusi	86,242,000
	2.03.17.xx, Pembangunan jaringan listrik Desa terpencil	1,306,906,000
	2.03.17.xx, Perbaikan dan pemindahan PLTS	53,922,000
	2.03.17.xx, Implementasi Hemat Energi	16,370,000
	2.03.17.xx, Pembangunan sarana dan prasarana pemanfaatan Bio Gas untuk Masyarakat Perdesaan	73,640,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
11	Program pengembangan bahan bakar dan energi 2.03.18.02, Pengawasan DO BBMT ditingkat Pangkalan di Provinsi DIY 2.03.18.06, Pembuatan Demplot/Percontohan Pemanfaatn Briket Batu Bara Untuk IKM 2.03.18.xx, Workshop Energi Daerah 2.03.18.xx, Pelatihan Pemanfaatan BioFuel	255,178,000 43,461,000 114,552,000 32,685,000 64,480,000
12	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 2.06.15.03, Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 2.06.15.05, Workshop peningkatan kinerja distributor komoditi pokok penting dan strategis di DIY 2.06.15.07, Operasional dan pengembangan UPT kemetrollogian daerah , tera dan tera ulang 2.06.15.08, Pemantauan pengadaan , penyaluran dan stock kebutuhan pokok penting dan strategis di DIY	260,256,000 14,699,000 16,463,000 199,659,000 29,435,000
13	Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional 2.06.16.08, Forum Hasil-hasil Kesepakatan Perundingan Internasional	18,474,500 18,474,500
14	Program peningkatan Pengembang Ekspor 2.06.17.13, Pendidikan dan pelatihan Teknis Bagi UKM Ekspor 2.06.17.xx, Sosialisasi Aplikasi Pelaksanaan SKA Otomasi 2.06.17.xx, Promosi Perdagangan Luar Negeri	854,678,000 60,592,000 25,953,000 768,133,000
15	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 2.06.18.08, Partisipasi Pameran Dalam Negeri 2.06.18.12, Pelayanan Publikasi dan informasi desain fashion (Jogya fashion Week) 2008 2.06.18.15, Pelatihan IT bagi UMKK 2.06.18.17, Pengelolaan JBSC 2.06.18.xx, Workshop Pengembangan Pedagang dan Pengelola Pasar Tradisional di Provinsi DIY 2.06.18.xx, Pameran Tetap 2.06.18.xx, Penyusunan Profile Kerajinan Kayu dan Mebel dalam bentuk CD 2.06.18.xx, Lomba Desain Kerajinan	1,248,329,000 828,437,500 150,076,000 20,630,000 25,013,000 25,624,500 109,616,000 45,517,000 43,415,000
16	Program persaingan usaha 2.06.20.01, Penyelenggaraan Pasar Lelang 2.06.20.05, Pelayanan Konsultasi Bisnis 2.06.20.14, Pelatihan Entry Sistem informasi dan Operasional Transaksi (SIOT) 2.06.20.15, Pelatihan manajemen pengelolaan usaha bagi Wanita Pengusaha	127,426,000 27,723,000 70,099,000 17,563,000 12,041,000
17	Program pengembangan industri kecil dan menengah 2.07.16.14, Pelatihan manajemen bagi pengelola CF-SMI 2.07.16.19, Pengembangan desain IKM konveksi 2.07.16.xx, Pelatihan Peningkatan Mutu Produk bagi IKM Pangan 2.07.16.xx, Pelatihan Pemakaian zat pewarna alam untuk batik	122,665,000 21,419,000 48,487,000 17,413,000 35,346,000
18	Program peningkatan kemampuan teknologi industri 2.07.17.07, Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Tepat Guna 2.07.17.08, Pengelolaan Bengkel alat tepat guna (ATG) 2.07.17.09, Promosi Teknologi Tepat Guna 2.07.17.20, Peningkatan kemampuan rekayasa dan ketrampilan pengelolaan bengkel 2.07.17.36, Fasilitas peningkatan mutu produk alat rumah tangga 2.07.17.37, Fasilitas pembuatan aluminium Die casting (ADC) 12 2.07.17.xx, Pelatihan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Rekayasa 2.07.17.xx, Bimbingan dan Penyuluhan Desain Kerajinan bambu	1,045,721,500 265,402,000 78,100,000 158,891,000 49,435,000 164,467,000 265,006,500 48,555,000 15,865,000
19	Program pembinaan industri rumah tangga (IRT), industri kecil dan menengah (IKM) 2.07.20.03, Diklat Manajemen Produksi KUB 2.07.20.04, Festival Makanan Tradisional 2.07.20.12, Pelatihan Desain Produk Industri Kecil Mebel bambu 2.07.20.13, Peningkatan teknologi proses minyak kelapa (krengsengan) 2.07.20.14, Peningkatan teknologi proses tenun ATBM jaguard 2.07.20.17, Sosialisasi dan fasilitas sertifikasi produk pangan 2.07.20.19, Pelatihan dan bantuan alat IK konveksi di Pondok Pesantren	357,131,500 16,697,000 102,188,000 78,207,000 57,018,500 60,926,000 21,196,000 20,899,000
1.17	KEBUDAYAAN	29,107,685,000
1.17.01	DINAS KEBUDAYAAN	29,107,685,000
	BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan	7,387,509,000 7,387,509,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
	BELANJA LANGSUNG	21,720,176,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,557,676,000
	x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000
	x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	400,000,000
	x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	2,500,000
	x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	41,580,000
	x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	400,000,000
	x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	60,000,000
	x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50,000,000
	x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	50,000,000
	x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,200,000
	x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	70,000,000
	x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	250,000,000
	x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	220,396,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,630,000,000
	x.xx.02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor	2,000,000,000
	x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100,000,000
	x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	210,000,000
	x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	50,000,000
	x.xx.02.xx, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	175,000,000
	x.xx.02.42, Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	95,000,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100,000,000
	x.xx.05.07, Pendidikan dan Pelatihan Lain-lain	100,000,000
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	87,500,000
	x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	12,500,000
	x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	7,500,000
	x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	12,500,000
	x.xx.06.07, Penyusunan Realisasi Kegiatan Instansi	20,000,000
	x.xx.06.08, Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program	35,000,000
5	Program pengembangan nilai budaya	3,025,000,000
	1.17.15.01, Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	2,685,000,000
	1.17.15.03, Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah	105,000,000
	1.17.15.04, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	20,000,000
	1.17.15.05, Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang budaya	215,000,000
6	Program pengelolaan kekayaan budaya	11,125,000,000
	1.17.16.01, Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	825,000,000
	1.17.16.02, Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	625,000,000
	1.17.16.04, Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	1,280,000,000
	1.17.16.05, Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	4,980,000,000
	1.17.16.09, Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala	80,000,000
	1.17.16.10, Pengawasan,Monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya	15,000,000
	1.17.16.11, Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	2,935,000,000
	1.17.16.12, Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	335,000,000
	1.17.16.13, Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala	50,000,000
7	Program pengelolaan keragaman budaya	3,045,000,000
	1.17.17.01, Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	2,060,000,000
	1.17.17.02, penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan	705,000,000
	1.17.17.03, Penyelenggaraan dialog kebudayaan	265,000,000
	1.17.17.07, Monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya	15,000,000
8	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	150,000,000
	1.17.18.03, Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	150,000,000
1.19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	13,922,237,000
1.19.02	DINAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13,922,237,000
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,222,237,000
	Belanja Pegawai	
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	8,222,237,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
	BELANJA LANGSUNG	5,700,000,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	764,100,000
	x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000
	x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	109,600,000
	x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	4,975,000
	x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	22,140,000
	x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30,000,000
	x.xx.01.09, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100,000,000
	x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	106,000,000
	x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35,000,000
	x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	18,000,000
	x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,625,000
	x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	23,500,000
	x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	160,000,000
	x.xx.01.29, Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	141,260,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	528,000,000
	x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	338,000,000
	x.xx.02.26, Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	40,000,000
	x.xx.02.62, Pembuatan talud pengamanan tower repiter dan perlengkapannya	150,000,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	482,000,000
	x.xx.05.06, Pelatihan Penyegaran Korsik Pemda DIY	66,000,000
	x.xx.05.14, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	29,000,000
	x.xx.05.16, Pelatihan Ketahanan Fisik dan Mental Bagi Aparat	55,000,000
	x.xx.05.20, Bintek operasional PPNS	47,000,000
	x.xx.05.21, Pembinaan Fisik Pol PP	65,000,000
	x.xx.05.22, Rakerda pengembangan program	175,000,000
	x.xx.05.24, Forkom pengembangan program antar anggota MPU	45,000,000
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	96,000,000
	x.xx.06.01, Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,000,000
	x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	15,000,000
	x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	15,000,000
	x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10,000,000
	x.xx.06.08, Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program	41,000,000
5	Program peningkatan keamaan dan kenyamanan lingkungan	365,000,000
	1.19.15.10, Peningkatan Motivasi Kerja POL PP	35,000,000
	1.19.15.11, Pemantauan Pelaksanaan Perlindungan Hak Sipil (PHS)	35,000,000
	1.19.15.12, Penyelenggaraan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	165,000,000
	1.19.15.14, Rapat Kerja Daerah Jaringan Penanganan Gepeng dan Anjal	60,000,000
	1.19.15.20, Fasilitasi Pengamanan Asset dan Pemberdayaan Mitra Kerja Bidang Pengamanan dan Pengawasan	45,000,000
	1.19.15.22, Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pol PP se Provinsi DIY	25,000,000
6	Program Pemeliharaan Kamtramtibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal	600,750,000
	1.19.16.08, Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Propinsi DIY	65,500,000
	1.19.16.09, Publikasi Media Cetak dan Elektronik	99,000,000
	1.19.16.10, Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi	21,250,000
	1.19.16.14, Operasi Non Yustisi	130,000,000
	1.19.16.15, Operasi Yustisi	125,000,000
	1.19.16.17, Penyuluhan Kepada Masyarakat di Bidang Penegakan Peraturan Per-UU-an	60,000,000
	1.19.16.24, Raker Teknis Pengembangan Jaringan Kerja Lintas Kabupaten/Kota	60,000,000
	1.19.16.25, Forkom Pengembangan Kapasitas Mitra Kerja Bidang Trantib	40,000,000
7	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	355,000,000
	1.19.17.08, Fasilitasi Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Dewan Penasehat FKDM	70,000,000
	1.19.17.09, Fasilitasi kegiatan Kominda	150,000,000
	1.19.17.10, Fasilitasi koordinasi forum komunikasi antar umat beragama	100,000,000
	1.19.17.17, Pembentukan Desk Pemilu dan PilPres 2009	35,000,000
8	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	216,500,000
	1.19.18.06, Forum Komunikasi dan Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	75,000,000
	1.19.18.08, Fasilitasi FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)	60,000,000
	1.19.18.09, Fasilitasi Forum Keluarga Pelajar dan Mahasiswa (FKPM) di DIY	81,500,000
9	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	85,400,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
	1.19.19.04, Pemberdayaan Masyarakat dalam Kerangka Hak Sipil	32,000,000
	1.19.19.07, Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	53,400,000
10	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	270,750,000
	1.19.20.09, Fasilitas Pelaksanaan P4GN	111,750,000
	1.19.20.10, Rakornas/Rakernis BNN, Raker BNP/BNK se DIY	25,000,000
	1.19.20.11, Sosialisasi Operasi P4GN	65,000,000
	1.19.20.12, Operasi P4GN	69,000,000
11	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1,886,500,000
	1.19.22.05, Pelatihan Penyusunan rencana Kontijensi	60,000,000
	1.19.22.07, Kesiapsiagaan Aparat dan Masyarakat dalam Penanganan Bencana (PB)	60,000,000
	1.19.22.09, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana	50,000,000
	1.19.22.11, Pengerahan Potensi Linmas dalam Tugas-tugas Kelinmasan	1,362,500,000
	1.19.22.12, Fasilitas Koordinasi SATKORLAK PBP	100,000,000
	1.19.22.13, Sosialisasi Kesiapsiagaan Peringatan Dini dalam mengantisipasi terjadinya bencana bagi masyarakat	30,000,000
	1.19.22.15, Pelatihan SAR Linmas Propinsi DIY	45,000,000
	1.19.22.24, Penyerahan Anggota Linmas BKO PANGKOLAK PAM Jateng DIY	10,000,000
	1.19.22.26, Penyusunan dan pembuatan data RUPUSDALOPS PB	50,000,000
	1.19.22.27, Pengadaan sarana operasional PB	99,000,000
	1.19.22.32, Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan PB	20,000,000
12	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah	50,000,000
	1.20.16.12, Pengamanan dan Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, dan tamu Daerah	50,000,000
1.20	PEMERINTAHAN UMUM	649,533,968,234
1.20.01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	11,482,285,000
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11,482,285,000
	Belanja Pegawai	
	Gaji dan Tunjangan	11,482,285,000
1.20.02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	1,296,147,000
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,296,147,000
	Belanja Pegawai	
	Gaji dan Tunjangan	1,296,147,000
1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH	64,889,605,765
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16,353,955,000
	BELANJA LANGSUNG	48,535,650,765
	BIRO UMUM	31,255,363,750
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,223,391,000
	Belanja Pegawai	
	Gaji dan Tunjangan	5,223,391,000
	BELANJA LANGSUNG	26,031,972,750
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10,405,500,750
	x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22,500,000
	x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	2,415,000,000
	x.xx.01.03, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,200,000,000
	x.xx.01.05, Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	390,000,000
	x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	20,000,000
	x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	276,000,000
	x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1,236,000,000
	x.xx.01.09, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	578,000,000
	x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	210,000,750
	x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	300,000,000
	x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	371,000,000
	x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	464,000,000
	x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	79,500,000
	x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50,000,000
	x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	1,393,500,000
	x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1,400,000,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.xx.02.03, Pembangunan gedung kantor x.xx.02.05, Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur x.xx.02.20, Pemeliharaan rutin /berkala rumah jabatan x.xx.02.21, Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.xx.02.23, Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.xx.02.30, Pemeliharaan rutin/berkala fumigasi x.xx.02.41, Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas x.xx.02.42, Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.xx.02.54, Sertifikasi Tanah Pemda Provinsi DIY x.xx.02.55, Perubahan Status Hukum Barang Daerah x.xx.02.58, Penyusunan RKBU/RTBU	11,798,302,000 2,526,000,000 1,417,000,000 170,000,000 57,000,000 150,000,000 34,000,000 736,342,000 350,000,000 1,642,000,000 167,000,000 126,500,000 20,000,000 243,460,000 80,000,000 3,820,000,000 84,000,000 150,000,000 25,000,000
3	Program peningkatan disiplin aparatur x.xx.03.02, Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya x.xx.03.03, Pengadaan pakaian kerja lapangan x.xx.03.05, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	169,670,000 110,000,000 47,170,000 12,500,000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.xx.05.02, Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.xx.05.03, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	195,000,000 75,000,000 120,000,000
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.xx.06.07, Penyusunan Realisasi Kegiatan Instansi x.xx.06.xx, Penyusunan Pelaporan Inventarisasi Barang Daerah	228,500,000 7,500,000 11,500,000 24,500,000 125,000,000 60,000,000
6	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah 1.20.16.02, Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen /luar negeri 1.20.16.06, Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 1.20.16.07, Biaya Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH	3,085,000,000 1,760,000,000 1,250,000,000 75,000,000
7	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.20.26.02, Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan perundang-undangan (penyiapan materi Raperda Pengelolaan Barang Daerah)	150,000,000 150,000,000
BIRO TATA PEMERINTAHAN		8,933,664,000
BELANJA TIDAK LANGSUNG		3,728,690,000
Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai		3,728,690,000
BELANJA LANGSUNG		5,204,974,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	495,843,000 4,500,000 2,250,000 20,000,000 70,093,000 75,000,000 23,000,000 12,000,000 8,000,000 50,000,000 220,000,000 11,000,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.xx.02.05, Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.xx.02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor	292,500,000 60,000,000 4,000,000 40,000,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
	x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,500,000
	x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	164,000,000
	x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20,000,000
3	Program peningkatan disiplin aparatur	8,000,000
	x.xx.03.01, pengadaan mesin /kartu absensi	8,000,000
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	8,000,000
	x.xx.04.01, Pemulangan pegawai yang pensiun	8,000,000
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	20,000,000
	x.xx.05.01, Pendidikan dan pelatihan formal	20,000,000
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	23,000,000
	x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8,000,000
	x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran	5,000,000
	x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	5,000,000
	x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5,000,000
7	Program pengembangan wilayah perbatasan	230,000,000
	1.06.17.01, Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	45,000,000
	1.06.17.06, Fasilitasi dan Koordinasi Penegasan Batas Daerah	60,000,000
	1.06.17.07, Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbatasan	80,000,000
	1.06.17.08, Falisitasi Penamaan Unsur-Unsur Geografis	45,000,000
8	Program penataan penguasaan ,pemilikan ,penggunaan dan pemanfaatan tanah	1,270,000,000
	1.09.16.02, Penyuluhan hukum petanahan	55,000,000
	1.09.16.03, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pertanahan	60,000,000
	1.09.16.05, Fasilitasi Sertifikasi Tanah Kas Desa	900,000,000
	1.09.16.06, Inventarisasi Tanah SG dan PAG	215,000,000
	1.09.16.07, Fasilitasi Pengelolaan Tanah SG dan PAG	40,000,000
9	Prograam penyelesaian konflik-konflik pertanahan	120,000,000
	1.09.17.01, Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Masalah Pertanahan	40,000,000
	1.09.17.02, Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan Tanah Kas Desa	80,000,000
10	Program penataan administrasi kependudukan	631,631,000
	1.10.15.03, Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	150,000,000
	1.10.15.05, Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	44,647,000
	1.10.15.06, Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	60,000,000
	1.10.15.09, Pengembangan Database Kependudukan	75,000,000
	1.10.15.10, Penyusunan Kebijakan Kependudukan	25,000,000
	1.10.15.11, Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil	41,984,000
	1.10.15.12, Sosialisasi kebijakan kependudukan	40,000,000
	1.10.15.14, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	50,000,000
	1.10.15.16, Koordinasi Pendataan Orang Asing	35,000,000
	1.10.15.19, Fasilitasi Pelantikan Pejabat P4	15,000,000
	1.10.15.22, Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pencatatan Sipil	35,000,000
	1.10.15.xx, Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	60,000,000
11	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	35,000,000
	1.19.18.04, Fasilitasi dan Koordinasi Pemahaman Tentang Wawasan Kebangsaan	35,000,000
12	Program pendidikan politik masyarkat	75,000,000
	1.19.21.01, Penyuluhan kepada masyarakat	40,000,000
	1.19.21.09, Fasilitasi dan Koordinasi Kepada Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	35,000,000
13	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah	271,000,000
	1.20.16.03, Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	226,000,000
	1.20.16.04, Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	45,000,000
14	Program penataan daerah otonomi baru	505,000,000
	1.20.27.05, Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan P3D	30,000,000
	1.20.27.06, Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	80,000,000
	1.20.27.07, Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	60,000,000
	1.20.27.08, Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	50,000,000
	1.20.27.10, Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah	125,000,000
	1.20.27.11, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah	160,000,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
15	Program optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan 1.20.28.08, Fasilitasi dan Koordinasi Pengangkatan Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum 1.20.28.09, Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Daerah 1.20.28.11, Pembinaan Peran dan Fungsi Camat 1.20.28.12, Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Pusat di Daerah 1.20.28.13, Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah 1.20.28.15, Pembinaan Aparatur Pengelola Kawasan Perkotaan 1.20.28.16, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	730,000,000 285,000,000 60,000,000 75,000,000 40,000,000 60,000,000 60,000,000 150,000,000
16	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1.22.18.05, Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.22.18.06, Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.22.18.07, Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.22.18.08, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.22.18.09, Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.22.18.10, Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBMGR) 1.22.18.11, Perlombaan Desa/Kelurahan 1.22.18.12, Penyuluhan Bagi Desa/Kelurahan Berprestasi	490,000,000 40,000,000 60,000,000 65,000,000 50,000,000 60,000,000 50,000,000 120,000,000 45,000,000
BIRO ORGANISASI		4,619,459,000
BELANJA TIDAK LANGSUNG		1,672,459,000
Belanja Pegawai		
Gaji Pegawai		1,672,459,000
BELANJA LANGSUNG		2,947,000,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	425,461,000 4,000,000 3,500,000 1,000,000 16,000,000 7,500,000 25,961,000 28,000,000 4,500,000 65,000,000 270,000,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.xx.02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	279,200,000 93,200,000 150,000,000 36,000,000
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan smesteran dan prognosis realisasi anggaran x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.xx.06.06, Penyusunan Laporan Tahunan	69,500,000 19,000,000 9,500,000 26,000,000 7,000,000 8,000,000
4	Program peningkatan kapasitas kelembagaan daerah 1.20.30.02, Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 1.20.30.04, Fasilitasi Balance Score Card 1.20.30.10, Menyusun Standarisasi Harga barang dan Jasa 1.20.30.11, Menyusun Standar Pembiayaan Minimal dan Revisi Analisis Standara Belanja (ASB) 1.20.30.12, Asistensi penyusunan Lakip/RKT/PK/IKU/Renstra Instansi 1.20.30.13, Penilaian Kinerja instansi Pelayanan Publik (IKM) 1.20.30.14, Review uraian tugas unit SOTK baru 1.20.30.15, Penyusunan pedoman uraian kegiatan unit 1.20.30.16, Analisis kelembagaan organisasi penanggulangan bencana alam dan sekretariat KPID 1.20.30.18, Penyusunan uraian tugas jabatan lingkup SETDA, SETWAN, LTD dan UPTD dibawah LTD 1.20.30.19, Sosialisasi kualifikasi jabatan fungsional umum dan formasi jabatan fungsional tertentu 1.20.30.23, Penyusunan standarisasi kebutuhan kendaraan bermotor SKPD di lingkungan Pemprov DIY 1.20.30.26, Penyusunan pola koordinasi perangkat daerah 1.20.30.xx, Penyusunan Peta Jabatan 1.20.30.xx, Bimbingan Teknis Aplikasi Intrumen Penilaian Kinerja Aparatur. 1.20.30.xx, Fasilitasi tindak lanjut pakta integritas bidang tata kelola pemerintahan	2,172,839,000 52,300,000 144,000,000 181,239,000 214,000,000 173,000,000 147,000,000 335,200,000 146,300,000 42,200,000 245,000,000 61,000,000 37,500,000 52,600,000 83,500,000 182,500,000 75,500,000
BIRO KEPEGAWAIAN		9,322,030,000
BELANJA TIDAK LANGSUNG		2,778,976,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
	Belanja Pegawai	
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	2,778,976,000
	BELANJA LANGSUNG	6,543,054,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,827,886,261
	x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,000,000
	x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	156,202,200
	x.xx.01.03, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53,291,000
	x.xx.01.04, Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	637,184,720
	x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	1,950,000
	x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	23,040,000
	x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	114,327,000
	x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	30,154,571
	x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50,000,000
	x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	7,906,300
	x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	161,206,520
	x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,703,600
	x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17,737,500
	x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	50,000,000
	x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	403,400,000
	x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	60,690,000
	x.xx.01.22, Pelayanan Taperum	38,092,850
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	550,999,000
	x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor	150,000,000
	x.xx.02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor	11,392,900
	x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur	51,881,100
	x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	97,500,000
	x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	173,250,000
	x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1,375,000
	x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	13,500,000
	x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	17,100,000
	x.xx.02.30, Pemeliharaan rutin/berkala fumigasi	35,000,000
3	Program peningkatan disiplin aparatur	198,335,900
	x.xx.03.01, pengadaan mesin /kartu absensi	186,616,100
	x.xx.03.09, Penyelesaian Pembuatan Karpeg. Karis dan Karsu Bagi PNS Provinsi DIY	11,719,800
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	209,487,145
	x.xx.04.01, Pemulangan pegawai yang pensiun	138,600,000
	x.xx.04.03, Pemindehan tugas PNS	70,887,145
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	64,825,883
	x.xx.05.03, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	64,825,883
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	141,971,100
	x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	60,000,000
	x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran	19,708,100
	x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	22,183,100
	x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	20,079,900
	x.xx.06.06, Penyusunan Laporan Tahunan	20,000,000
7	Program panataan peraturan perundang-undangan	27,342,376
	1.20.26.02, Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	27,342,376
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	517,528,058
	1.21.16.02, Pendidikan dan pelatihan strutural bagi PNS daerah	200,000,000
	1.21.16.03, Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	167,528,058
	1.21.16.04, Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah	150,000,000
9	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	2,933,012,877
	1.21.17.03, Penempatan PNS	250,000,000
	1.21.17.04, Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	279,611,381
	1.21.17.05, Pembangunan /pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	165,515,225
	1.21.17.08, Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	973,476,200
	1.21.17.09, Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	102,895,800
	1.21.17.11, Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	355,003,939
	1.21.17.18, Penyelenggaraan ujian dinas	44,549,200
	1.21.17.19, Penyelesaian penetapan hukum pegawai dan pejabat negara	20,109,929
	1.21.17.20, Pembekalan PNS calon Pensiun	55,540,000
	1.21.17.21, Penanganan Pegawai Tidak Tetap	23,810,379

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
	1.21.17.25, Penyusunan Formasi CPNS	25,200,000
	1.21.17.26, Pengangkatan CPNS	93,400,000
	1.21.17.27, Pemrosesan Ijin Luar Negeri dan Ijin Belajar	27,000,000
	1.21.17.28, Peningkatan Kesejahteraan Jasmani	59,961,000
	1.21.17.31, Pengelolaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)	63,418,600
	1.21.17.32, Fasilitasi Pelaksanaan Pilot Project Penggunaan Nomor Induk Pegawai (NIP) Baru	89,868,500
	1.21.17.34, Pengukuran Kompetensi Bagi Pejabat Struktural Pemerintah Provinsi DIY	195,592,070
	1.21.17.35, Tes Psikologi Bagi PNS Pemerintah Provinsi DIY	85,728,744
	1.21.17.36, Bimbingan Psikologis bagi PNS Pemerintah Provinsi DIY yang Bermasalah	22,331,910
10	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	71,665,400
	1.24.15.01, Pembangunan data base informasi kearsipan	71,665,400
BIRO KERJASAMA		5,211,814,000
BELANJA TIDAK LANGSUNG		1,482,814,000
Belanja Pegawai		
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	1,482,814,000
BELANJA LANGSUNG		3,729,000,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	571,000,000
	x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,500,000
	x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	1,000,000
	x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	14,000,000
	x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,000,000
	x.xx.01.09, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8,000,000
	x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	60,000,000
	x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35,000,000
	x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	6,000,000
	x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51,000,000
	x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,500,000
	x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	85,000,000
	x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	295,000,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98,000,000
	x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	95,000,000
	x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3,000,000
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10,000,000
	x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5,000,000
	x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	1,000,000
	x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	1,000,000
	x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3,000,000
4	Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	3,050,000,000
	1.20.25.01, Fasilitasi /pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	100,000,000
	1.20.25.02, Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi	80,000,000
	1.20.25.05, Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak-Pihak di Dalam Negeri	60,000,000
	1.20.25.06, Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Kerjasama dengan Pihak-Pihak di Dalam Negeri	50,000,000
	1.20.25.07, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak-Pihak Dalam Negeri	150,000,000
	1.20.25.09, Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Kerjasama dengan Pihak-Pihak di Luar Negeri	450,000,000
	1.20.25.10, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama dengan Pihak-Pihak di Luar Negeri	100,000,000
	1.20.25.14, Penanganan Kerjasama DIY dalam Pelaksanaan Mitra Praja Utama	1,250,000,000
	1.20.25.15, Penanganan Kerjasama DIY-Jawa Tengah	100,000,000
	1.20.25.16, Penanganan Kerjasama DIY-Jawa Timur	70,000,000
	1.20.25.17, Penanganan Kerjasama DIY-Kalimantan Timur	90,000,000
	1.20.25.18, Penanganan Kerjasama DIY - Kyoto Perfecture, Jepang	70,000,000
	1.20.25.19, Penanganan Kerjasama DIY - Jerman	165,000,000
	1.20.25.20, Penanganan Kerjasama DIY - Chiangmai, Thailand	35,000,000
	1.20.25.22, Penanganan Kerjasama DIY - Gyensangbukdo, Korea Selatan	70,000,000
	1.20.25.xx, Bintek Implementasi Pelaksanaan Perundang-undangan	60,000,000
	1.20.25.xx, Kajian Daerah Potensi untuk Kerjasama dengan Provinsi DIY	60,000,000
	1.20.25.xx, Potensi DIY yang dapat dikerjasamakan	60,000,000
	1.20.25.xx, Penyusunan Renstra Instansi	30,000,000
BIRO HUKUM		5,547,275,015
BELANJA TIDAK LANGSUNG		1,467,625,000
Belanja Pegawai		
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	1,467,625,000
BELANJA LANGSUNG		4,079,650,015

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.xx.01.09, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.xx.02.30, Pemeliharaan rutin/berkala fumigasi Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relalisasi anggaran x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1.20.23.01, Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Program panataan peraturan perundang-undangan 1.20.26.01, Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 1.20.26.02, Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 1.20.26.03, Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 1.20.26.04, Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.20.26.05, Publikasi peraturan perundang-undangan 1.20.26.06, Kajian peraturan per-UU-an daerah terhadap peraturan per-UU-an yang baru, lebih tinggi dan keserasian peraturan per-UU-an daerah 1.20.26.07, Penyelesaian Permasalahan Hukum 1.20.26.08, Coaching clinic dan pembekalan advokasi hukum 1.20.26.10, Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 1.20.26.11, Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum	<u>442,650,015</u> 4,100,000 1,500,000 15,720,000 19,500,000 35,321,000 33,259,015 8,500,000 40,000,000 15,500,000 33,500,000 235,750,000 <u>161,500,000</u> 9,500,000 4,250,000 110,500,000 37,250,000 <u>10,500,000</u> 2,500,000 2,500,000 5,500,000 <u>23,000,000</u> 23,000,000 <u>3,442,000,000</u> 580,000,000 40,000,000 687,000,000 745,000,000 165,000,000 285,000,000 200,000,000 200,000,000 175,000,000 365,000,000
1.20.04	SEKRETARIAT DPRD	<u>26,299,033,988</u>
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik x.xx.01.04, Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.xx.01.29, Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.xx.02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor x.xx.02.20, Pemeliharaan rutin /berkala rumah jabatan x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.xx.02.42, Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur	4,066,874,000 4,066,874,000 22,232,159,988 <u>4,437,029,100</u> 13,885,000 874,200,000 1,812,187,500 11,200,000 31,920,000 217,910,400 345,114,400 154,424,400 13,968,900 119,524,000 214,362,500 322,580,000 305,752,000 <u>3,219,614,738</u> 81,386,000 890,616,000 36,000,000 102,381,838 911,027,700 222,825,000 156,475,000 818,903,200 <u>845,702,000</u>

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
	x.xx.03.02, Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya	833,268,000
	x.xx.03.03, Pengadaan pakaian kerja lapangan	12,434,000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	199,146,000
	x.xx.05.09, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Kesekretariatan	199,146,000
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	115,132,350
	x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	61,982,100
	x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran	19,530,000
	x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	14,360,000
	x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	19,260,250
6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	13,415,535,800
	1.20.15.01, Pembahasan rancangan Perda, rancangan nota kesepakatan dan rancangan kepwan	3,351,991,000
	1.20.15.02, Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat /tokoh agama	293,258,100
	1.20.15.03, Rapat-rapat alat Kelengkapan Dewan	648,795,000
	1.20.15.04, Rapat-rapat paripurna	155,157,700
	1.20.15.05, Kegiatan reses	398,742,750
	1.20.15.06, Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPR dalam daerah	706,465,000
	1.20.15.07, Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPR	1,017,885,000
	1.20.15.09, Pembahasan LKPJ Gubernur DIY	335,852,250
	1.20.15.11, Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Propinsi DIY ke Luar Daerah	4,940,315,000
	1.20.15.12, Koordinasi dan komunikasi Pimpinan dan Sekretaris DPRD Provinsi DIY	456,176,500
	1.20.15.13, Penyusunan Research Brief	77,800,000
	1.20.15.14, Optimalisasi Pengelolaan Informasi dan Penyelenggaraan Pengkajian	61,300,000
	1.20.15.15, Fasilitasi Pembahasan Raperda Inisiatif, Rancangan Nota Kesepakatan, Rakepwan	130,468,900
	1.20.15.16, Penyelenggaraan Publikasi Kegiatan DPRD	515,567,000
	1.20.15.17, Penerbitan Majalah Mimbar Legislatif, Pembuatan Booklets dan Pembuatan Film Kegiatan Komisi DPRD DIY	83,265,600
	1.20.15.xx, Layanan informasi pendukung kegiatan DPRD melalui Website	68,335,000
	1.20.15.19, Fasilitasi Penyusunan Hasil Kerja DPRD Periode 2004 - 2009	174,161,000
1.20.05	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	530,714,415,685
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	509,573,780,685
	Belanja Pegawai	115,277,399,400
	Belanja Bunga	45,778,400
	Belanja Bantuan Sosial	114,517,708,585
	Belanja Bagi Hasil kpd Provinsi/Kab/Kota dan Desa	182,132,894,300
	Belanja Bantuan Keuangan kpd Prop/Kab/Kota/Desa	80,600,000,000
	Belanja Tidak Terduga	17,000,000,000
	BELANJA LANGSUNG	21,140,635,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,670,635,000
	x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21,635,000
	x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	570,000,000
	x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	3,000,000
	x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	200,000,000
	x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	300,000,000
	x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	280,000,000
	x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	330,000,000
	x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	50,000,000
	x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12,000,000
	x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60,000,000
	x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	100,000,000
	x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	700,000,000
	x.xx.01.29, Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	44,000,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8,525,000,000
	x.xx.02.03, Pembangunan gedung kantor	5,000,000,000
	x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor	400,000,000
	x.xx.02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor	350,000,000
	x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur	160,000,000
	x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	350,000,000
	x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	400,000,000
	x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100,000,000
	x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	500,000,000
	x.xx.02.42, Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	180,000,000
	x.xx.02.48, Pemeliharaan Rutin/Berkala Program/Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	30,000,000
	x.xx.02.64, Pemeliharaan Rutin/Berkala Program/Sistem Penerbitan SP2D Untuk Belanja Non Gaji	290,000,000
	x.xx.02.65, Pemeliharaan Rutin/Berkala Program/Sistem Penatausahaan dan Pelaporan APBD	400,000,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
	x.xx.02.66, Pemeliharaan Arsip Kendaraan Bermotor	100,000,000
	x.xx.02.67, Pemeliharaan Arsip Keuangan	150,000,000
	x.xx.02.68, Pemeliharaan Ritin/Berkala Program Sistem Gaji Pegawai Daerah	115,000,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	55,000,000
	x.xx.05.02, Sosialisasi peraturan perundang-undangan	25,000,000
	x.xx.05.03, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	30,000,000
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	400,000,000
	x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	50,000,000
	x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran	50,000,000
	x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	200,000,000
	x.xx.06.05, Penyusunan Cash Budget	100,000,000
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	9,025,000,000
	1.20.17.06, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	700,000,000
	1.20.17.07, Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	600,000,000
	1.20.17.09, Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	250,000,000
	1.20.17.10, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	300,000,000
	1.20.17.11, Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	50,000,000
	1.20.17.15, Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang Laporan realisasi Anggaran, Penyusunan neraca dan	200,000,000
	1.20.17.16, Peningkatan manajemen aset/barang daerah	400,000,000
	1.20.17.19, Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	500,000,000
	1.20.17.20, Pengelolaan gaji dan Pengendalian Gaji	400,000,000
	1.20.17.23, Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD	300,000,000
	1.20.17.24, Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUMD	400,000,000
	1.20.17.25, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan di KPPD Kota Yogyakarta	800,000,000
	1.20.17.26, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan di KPPD Bantul	650,000,000
	1.20.17.27, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan di KPPD Kulon Progo	350,000,000
	1.20.17.28, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan di KPPD gunung Kidul	400,000,000
	1.20.17.29, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan di KPPD Sleman	1,400,000,000
	1.20.17.30, Pemungutan Pajak daerah	200,000,000
	1.20.17.31, Pembinaan Teknis Pengelolaan PKB dan BBNKB	250,000,000
	1.20.17.41, Pemungutan Restribusi Lelang Hasil Hutan	200,000,000
	1.20.17.42, Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2008	125,000,000
	1.20.17.44, Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah	100,000,000
	1.20.17.47, Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	300,000,000
	1.20.17.48, Pembinaan Teknis Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang Sah dan Lain-lain	100,000,000
	1.20.17.xx, Penyusunan revisi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	50,000,000
6	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	240,000,000
	1.20.18.01, Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten /kota	200,000,000
	1.20.18.02, Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD kabupaten /kota	40,000,000
7	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	190,000,000
	1.20.20.03, Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	110,000,000
	1.20.20.04, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	45,000,000
	1.20.20.09, Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP)	35,000,000
8	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	35,000,000
	1.20.23.xx, Penyusunan Bank Data dan Pembuatan Website BPKD	35,000,000
1.20.07	BADAN PENGAWAS DAERAH	10,186,683,971
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,786,967,000
	Belanja Pegawai	
	Gaji dan Tunjangan	3,786,967,000
	BELANJA LANGSUNG	6,399,716,971
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,081,002,643
	x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,400,000
	x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	192,000,000
	x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	2,294,000
	x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	15,180,000
	x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	46,313,643
	x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	51,402,000
	x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19,771,000
	x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	4,705,000
	x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9,000,000
	x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27,825,000
	x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	13,125,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
	x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	652,715,000
	x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	41,272,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<u>1,515,989,678</u>
	x.xx.02.03, Pembangunan gedung kantor	629,918,678
	x.xx.02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor	413,448,000
	x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	48,000,000
	x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	392,073,000
	x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	32,550,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	<u>564,400,000</u>
	x.xx.05.02, Sosialisasi peraturan perundang-undangan	75,100,000
	x.xx.05.03, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	489,300,000
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<u>19,720,000</u>
	x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4,930,000
	x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran	4,930,000
	x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	9,860,000
5	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	<u>3,066,156,900</u>
	1.20.20.01, Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	2,065,113,800
	1.20.20.02, Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah	427,019,000
	1.20.20.03, Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	42,708,000
	1.20.20.05, Inventarisasi temuan pengawasan	195,900,000
	1.20.20.06, Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	134,641,100
	1.20.20.07, Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	90,560,000
	1.20.20.08, Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	110,215,000
6	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	<u>94,469,750</u>
	1.20.21.01, Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	94,469,750
7	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	<u>48,334,000</u>
	1.20.22.02, Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	48,334,000
8	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	<u>9,644,000</u>
	1.20.23.01, Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	9,644,000
1.20.08	KANTOR PERWAKILAN DAERAH	<u>4,665,796,825</u>
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	<u>1,185,440,500</u>
	Belanja Pegawai	
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	1,185,440,500
	BELANJA LANGSUNG	<u>3,480,356,325</u>
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<u>1,353,986,325</u>
	x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11,350,000
	x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	171,480,000
	x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	1,000,000
	x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	13,200,000
	x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	218,879,325
	x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	20,448,125
	x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35,908,300
	x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	17,088,775
	x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119,936,000
	x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13,434,000
	x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	40,140,000
	x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	300,040,000
	x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	391,081,800
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<u>624,756,000</u>
	x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor	98,450,000
	x.xx.02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor	94,000,000
	x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	47,250,000
	x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	159,956,000
	x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	65,100,000
	x.xx.02.42, Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	160,000,000
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<u>12,000,000</u>
	x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4,000,000
	x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	4,000,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
	x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4,000,000
4	Program pengembangan nilai budaya	545,810,000
	1.17.15.01, Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	545,810,000
5	Program pengelolaan kekayaan budaya	177,358,000
	1.17.16.01, Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	177,358,000
6	Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	116,446,000
	1.20.25.01, Fasilitasi /pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	116,446,000
7	Program kerjasama informasi dan Media Massa	650,000,000
	1.25.18.01, Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	650,000,000
1.21	KEPEGAWAIAN	7,038,627,790
1.21.01	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	7,038,627,790
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,898,001,000
	Belanja Pegawai	
	Gaji dan Tunjangan	2,898,001,000
	BELANJA LANGSUNG	4,140,626,790
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	569,507,400
	x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14,100,000
	x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	209,340,000
	x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	35,200,000
	x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,800,000
	x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	24,550,000
	x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40,147,400
	x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49,976,000
	x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14,094,000
	x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	13,500,000
	x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	120,000,000
	x.xx.01.29, Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	40,800,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,166,475,750
	x.xx.02.03, Pembangunan gedung kantor	490,068,000
	x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor	200,000,000
	x.xx.02.21, Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	103,686,000
	x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	82,462,000
	x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	136,971,000
	x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	39,100,000
	x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	6,500,000
	x.xx.02.46, Rehabilitasi Pagar Lingkungan	107,688,750
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	23,850,000
	x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8,060,200
	x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran	6,169,000
	x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	4,920,800
	x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4,700,000
4	Program pendidikan kedinasan	1,285,706,490
	1.21.15.01, Pendidikan dan pelatihan teknis	918,849,200
	1.21.15.03, Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan	45,000,000
	1.21.15.04, Pembuatan buku juknis /juklak	88,866,700
	1.21.15.05, Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan	77,289,290
	1.21.15.06, Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	155,701,300
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1,095,087,150
	1.21.16.01, Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah	759,462,150
	1.21.16.02, Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah	261,000,000
	1.21.16.04, Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah	74,625,000
1.24	KEARSIPAN	4,614,556,500
1.24.01	KANTOR ARSIP DAERAH	4,614,556,500
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,873,739,000
	Belanja Pegawai	
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	1,873,739,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
	BELANJA LANGSUNG	2,740,817,500
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,193,067,500
	x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13,500,000
	x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	25,500,000
	x.xx.01.03, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000,000
	x.xx.01.04, Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	23,800,000
	x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	700,000
	x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	17,160,000
	x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	42,000,000
	x.xx.01.09, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	26,700,000
	x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	65,500,000
	x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27,000,000
	x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	6,000,000
	x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	605,694,000
	x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	74,496,000
	x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,240,000
	x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	101,497,500
	x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	96,380,000
	x.xx.01.29, Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	21,900,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	184,750,000
	x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	45,000,000
	x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	75,000,000
	x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	14,000,000
	x.xx.02.30, Pemeliharaan rutin/berkala fumigasi	50,750,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	45,000,000
	x.xx.05.08, Pembinaan, Pengembangan dan Penilaian Angka Kredit Arsiparis	45,000,000
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	18,000,000
	x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6,000,000
	x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran	6,000,000
	x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6,000,000
5	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	600,000,000
	1.24.15.06, Kajian sistem administrasi kearsipan	80,000,000
	1.24.15.09, Penyusutan Arsip Tekstual	30,000,000
	1.24.15.10, Penilaian Arsip Inaktif	80,000,000
	1.24.15.13, Penanganan Arsip INAKTIF (arsip tekstual dinamis)	100,000,000
	1.24.15.14, Perlindungan arsip vital provinsi diy	80,000,000
	1.24.15.15, Digitalisasi arsip elektronik untuk media akses	75,000,000
	1.24.15.16, Penilaian Arsip Foto	75,000,000
	1.24.15.17, Penyusunan Rancangan Pedoman Pengolahan Arsip Statis	35,000,000
	1.24.15.18, Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Umum	45,000,000
6	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen /arsip daerah	220,000,000
	1.24.16.05, Penanganan Arsip Foto	50,000,000
	1.24.16.07, Pengolahan Arsip Statis	75,000,000
	1.24.16.09, Perawatan Arsip Statis	20,000,000
	1.24.16.10, Alih Media Arsip Statis	50,000,000
	1.24.16.13, Pengambilan Kembali Arsip Jogja Yang Ada di BAD Prov. Jateng (eks ANRIWIL)	25,000,000
7	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	45,000,000
	1.24.17.03, Monitoring, evaluasi Pelaksanaan Sistem SKPD	45,000,000
8	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	435,000,000
	1.24.18.06, Pengembangan Khasanah Arsip Digital	60,000,000
	1.24.18.07, Promosi dan Sosialisasi Kearsipan	55,000,000
	1.24.18.12, Pengelolaan Portal Kearsipan	45,000,000
	1.24.18.13, Alih Tulisan dan Alih Bahasa Arsip Bertuliskan dan Berbahasa Jawa	35,000,000
	1.24.18.14, Penyusunan Naskah Sumber Arsip	40,000,000
	1.24.18.15, Penyusunan Rancangan Pedoman Layanan Arsip Statis	35,000,000
	1.24.18.16, Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kearsipan di SKPD	90,000,000
	1.24.18.17, Pembuatan Profil Sistem Kearsipan	75,000,000
1.25	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10,207,236,000
1.25.01	BADAN INFORMASI DAERAH	10,207,236,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,983,825,000
	Belanja Pegawai	
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	4,983,825,000
	BELANJA LANGSUNG	5,223,411,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,902,913,000
	x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000
	x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	1,526,192,000
	x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	2,560,000
	x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	20,160,000
	x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	90,000,000
	x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	35,000,000
	x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,000,000
	x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	7,750,000
	x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,500,000
	x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,700,000
	x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	25,920,000
	x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	109,931,000
	x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	52,200,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	412,549,500
	x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	269,749,500
	x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	25,000,000
	x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	117,800,000
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	32,500,000
	x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20,000,000
	x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	7,100,000
	x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5,400,000
4	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	688,370,500
	1.25.15.02, Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	122,145,500
	1.25.15.03, Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi	223,425,000
	1.25.15.05, Pengadaan alat studio dan komunikasi	142,800,000
	1.25.15.06, Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	200,000,000
5	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	168,220,000
	1.25.16.01, Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	41,600,000
	1.25.16.02, Penyerapan aspirasi masyarakat dan pengembangan layanan informasi	126,620,000
6	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	52,315,000
	1.25.17.01, Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	35,215,000
	1.25.17.02, Bimtek calon operator internet/intranet	17,100,000
7	Program kerjasama informasi dan Media Massa	1,896,543,000
	1.25.18.01, Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	600,850,000
	1.25.18.02, Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	250,850,000
	1.25.18.04, Penyiaran Dialog Isu Aktual Melalui Media Massa	174,480,000
	1.25.18.05, Penyelenggaraan Kemitraan Dengan PERS	103,200,000
	1.25.18.06, Penyusunan Sambutan Gubernur	83,750,000
	1.25.18.07, Penerbitan Kebijakan dan Kinerja Pembangunan	230,000,000
	1.25.18.09, Dokumentasi Kegiatan dan kebijakan Pemerintah Daerah	54,020,000
	1.25.18.10, Kerjasama Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Anggota MPU	52,000,000
	1.25.18.11, Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah	347,393,000
8	Program Fasilitasi, Pembinaan , Pengendalian Pos Telekomunikasi dan Frekuensi	70,000,000
	1.25.19.01, Pembinaan dan Pendataan Pengusaha Jasa Titipan	15,000,000
	1.25.19.02, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Komunikasi	55,000,000
2	URUSAN PILIHAN	110,169,317,885
2.01	PERTANIAN	52,946,633,000
2.01.01	DINAS PERTANIAN	52,946,633,000
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	18,608,133,000
	Belanja Pegawai	
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	18,608,133,000
	BELANJA LANGSUNG	34,338,500,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,550,032,000
	x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,930,000
	x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	650,000,000
	x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	14,758,000
	x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	90,020,000
	x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	330,400,000
	x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	116,750,000
	x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	122,700,000
	x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	42,910,000
	x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150,000,000
	x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37,400,000
	x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35,188,000
	x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	120,140,000
	x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	568,760,000
	x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	265,076,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,083,671,000
	x.xx.02.03, Pembangunan gedung kantor	510,000,000
	x.xx.02.07, Pengadaan peralatan kantor	25,000,000
	x.xx.02.09, Pengadaan meubelair	15,000,000
	x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	110,000,000
	x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1,076,671,000
	x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	55,000,000
	x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	30,000,000
	x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	12,000,000
	x.xx.02.42, Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	250,000,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	101,000,000
	x.xx.05.03, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	101,000,000
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	43,000,000
	x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	23,500,000
	x.xx.06.02, Penyusunan laporan keuangan semesteran	10,000,000
	x.xx.06.03, Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	9,500,000
5	Program peningkatan kesejahteraan petani	8,404,651,500
	2.01.15.01, Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	551,414,500
	2.01.15.02, Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	6,702,750,000
	2.01.15.03, Peningkatan kemampuan lembaga petani	846,600,000
	2.01.15.xx, Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur	275,000,000
	2.01.15.xx, Fasilitasi pendampingan FEATI	28,887,000
6	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian /perkebunan)	6,509,237,640
	2.01.16.12, Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	925,000,000
	2.01.16.17, Pengembangan pertanian pada lahan kering	560,000,000
	2.01.16.20, Pengembangan perbenihan / pembibitan	1,049,466,350
	2.01.16.21, Pengembangan sistem informasi pasar	24,500,000
	2.01.16.22, Peningkatan mutu dan keamanan pangan	327,968,790
	2.01.16.25, Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian	161,605,500
	2.01.16.29, Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	575,000,000
	2.01.16.xx, Pengamanan Produk Pertanian TPH	560,000,000
	2.01.16.xx, Penanganan daerah rawan pangan	1,053,444,000
	2.01.16.xx, Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	24,500,000
	2.01.16.xx, Optimalisasi pekarangan melalui pemberdayaan wanita	228,400,000
	2.01.16.xx, Gerakan pola pangan beragam bergizi berimbang dan aman	170,000,000
	2.01.16.xx, Fasilitasi pembinaan model keamanan pangan kebun sayur dan buah	274,400,000
	2.01.16.xx, Pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan masyarakat	25,000,000
	2.01.16.xx, Neraca Bahan Makanan	22,602,000
	2.01.16.xx, Pendampingan Usaha Produk Antara	23,351,000
	2.01.16.xx, Pengembangan desa mandiri pangan	425,500,000
	2.01.16.xx, Pemantauan keamanan pangan	28,500,000
	2.01.16.xx, Uji lab sample pangan olahan	23,000,000
	2.01.16.xx, Sosialisasi keamanan pangan	27,000,000
7	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan	838,182,500
	2.01.17.01, Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan	225,000,000
	2.01.17.07, Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	587,532,500
	2.01.17.xx, Promosi produk pertanian dan pameran HPS	25,650,000
8	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	50,000,000
	2.01.18.05, Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian /perkebunan tepat guna	12,000,000
	2.01.18.xx, Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan	38,000,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
9	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2.01.19.02, Penyediaan sarana produksi pertanian /perkebunan 2.01.19.03, Pengembangan bibit unggul pertanian /perkebunan 2.01.19.06, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.01.19.xx, Evaluasi dan fasilitasi pemanfaatan penguatan modal petani 2.01.19.xx, Penyusunan perencanaan pembangunan BKPP 2.01.19.xx, Pengembangan data dan informasi BKPP	5,760,431,150 4,586,567,600 693,763,550 406,500,000 25,500,000 24,500,000 23,600,000
10	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian / Perkebunan Lapangan Peningkatan kapasitas tenaga PPL tanaman pangan / perkebunan Penghargaan penyuluh pertanian	44,521,000 25,300,000 19,221,000
11	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 2.01.21.06, Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	1,393,573,210 1,393,573,210
12	Program peningkatan produksi hasil peternakan 2.01.22.01, Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak 2.01.22.02, Pembibitan dan perawatan ternak 2.01.22.05, Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak 2.01.22.08, Pengembangan agribisnis peternakan	6,560,200,000 145,000,000 53,787,600 246,271,200 6,115,141,200
2.02	KEHUTANAN	29,929,124,000
2.02.01	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	29,929,124,000
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13,244,124,000
	Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai	13,244,124,000
	BELANJA LANGSUNG	16,685,000,000
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.02.01.01.01, Penyedia Jasa Surat Menyurat 2.02.01.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.02.01.01.03, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.02.01.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2.02.01.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.02.01.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.02.01.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.02.01.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 2.02.01.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.02.01.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.02.01.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.02.01.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman 2.02.01.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.02.01.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan	5,568,861,000 11,350,000 300,000,000 20,000,000 8,130,000 60,760,000 184,200,000 100,420,000 80,310,000 24,300,000 4,196,000,000 24,356,000 65,454,000 452,695,000 40,886,000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.02.01.02.03, Pembangunan Gedung Kantor 2.02.01.02.22, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.02.01.02.24, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.02.01.02.28, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2.02.01.02.29, Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair 2.02.01.02.42, Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 2.02.01.02.45, Rehabilitasi Sedang/Berat Jalan Produksi	2,191,529,400 89,898,000 115,262,000 512,735,400 56,284,000 8,500,000 448,850,000 960,000,000
3	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2.02.01.05.01, Pendidikan dan Pelatihan Formal	405,000,000 405,000,000
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.02.01.06.01, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD 2.02.01.06.02, Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.02.01.06.04, Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	70,500,000 50,000,000 11,500,000 9,000,000
5	Peningkatan Kesejahteraan Petani 2.02.02.15.01, Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 2.02.02.15.03, Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	526,253,000 307,000,000 219,253,000
6	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) 2.02.02.16.17, Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering	152,830,000 152,830,000
7	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	200,000,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
	2.02.02.17.07, Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	150,000,000
	2.02.02.17.08, Penyuluhan Pemasaran Produksi Pertanian/Perkebunan Guna Menghindari Tengkulak dan Sistem Ijon	50,000,000
8	Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	1,592,244,000
	2.02.02.19.02, Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan	790,000,000
	2.02.02.19.03, Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan	382,244,000
	2.02.02.19.07, Pengendalian Hama Terpadu Komoditas Perkebunan	420,000,000
9	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	2,608,000,000
	2.02.01.15.01, Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi	50,000,000
	2.02.01.15.02, Pengembangan Hutan Tanaman	465,000,000
	2.02.01.15.03, Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu	198,000,000
	2.02.01.15.04, Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan	110,000,000
	2.02.01.15.06, Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan	50,000,000
	2.02.01.15.07, Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	1,660,000,000
	2.02.01.15.08, Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	75,000,000
10	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2,169,387,000
	2.02.01.16.02, Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	375,072,000
	2.02.01.16.03, Penanaman Pohon pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata	1,113,315,000
	2.02.01.16.05, Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	251,000,000
	2.02.01.16.06, Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	430,000,000
11	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	507,500,000
	2.02.01.17.01, Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	25,000,000
	2.02.01.17.05, Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan	482,500,000
12	Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	160,000,000
	2.02.01.19.06, Sosialisasi Peraturan perundang-undangan Mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan	160,000,000
13	Perencanaan dan Pengembangan Hutan	532,895,600
	2.02.01.20.04, Pengembangan Informasi dan Perencanaan Kehutanan dan Perkebunan	532,895,600
2.04	PARIWISATA	8,322,827,000
2.04.01	BADAN PARIWISATA DAERAH	8,322,827,000
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,238,327,000
	Belanja Pegawai	
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	3,238,327,000
	BELANJA LANGSUNG	5,084,500,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	708,000,000
	x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,500,000
	x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	145,000,000
	x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	2,500,000
	x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	20,000,000
	x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	36,000,000
	x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	25,000,000
	x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25,000,000
	x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000
	x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,000,000
	x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,000,000
	x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	40,000,000
	x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	300,000,000
	x.xx.01.29, Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	40,000,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	249,000,000
	x.xx.02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor	30,000,000
	x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur	25,000,000
	x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40,000,000
	x.xx.02.23, Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	15,000,000
	x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	110,000,000
	x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10,000,000
	x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10,000,000
	x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	9,000,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	75,000,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
	x.xx.05.12, Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi	75,000,000
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	22,500,000
	x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7,500,000
	x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran	7,500,000
	x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7,500,000
5	Program pengembangan pemasaran pariwisata	1,940,000,000
	2.04.15.01, Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	200,000,000
	2.04.15.02, Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	150,000,000
	2.04.15.03, Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	40,000,000
	2.04.15.04, Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	30,000,000
	2.04.15.05, Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	800,000,000
	2.04.15.06, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata	15,000,000
	2.04.15.07, Pengembangan statistik kepariwisataan	30,000,000
	2.04.15.08, Pelatihan pemandu wisata terpadu	75,000,000
	2.04.15.09, Pembuatan Bahan-bahan Promosi Kepariwisataan	400,000,000
	2.04.15.10, Penerbitan Tabloid Pariwisata "Exploring Jogja"	100,000,000
	2.04.15.11, Penyelenggaraan Fam Tour	100,000,000
6	Program pengembangan destinasi pariwisata	1,250,000,000
	2.04.16.01, Pengembangan objek pariwisata unggulan	200,000,000
	2.04.16.02, Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	200,000,000
	2.04.16.03, Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	100,000,000
	2.04.16.04, Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga /dunia usaha	30,000,000
	2.04.16.05, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata	20,000,000
	2.04.16.06, Pengembangan daerah tujuan wisata	125,000,000
	2.04.16.07, Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi	50,000,000
	2.04.16.08, Pemberdayaan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kawasan Wisata	100,000,000
	2.04.16.09, Pengembangan Desa Wisata	150,000,000
	2.04.16.10, Peningkatan Kualitas Masyarakat Obyek Wisata Unggulan	100,000,000
	2.04.16.11, Pemberdayaan Masyarakat Sadar Wisata dan Kampanye Sapta Pesona	175,000,000
7	Program pengembangan kemitraan	840,000,000
	2.04.17.01, Pengembangan dan penguatan informasi dan database	45,000,000
	2.04.17.02, Pengembangan dan penguatan litbang ,kebudayaan dan pariwisata	125,000,000
	2.04.17.05, Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	250,000,000
	2.04.17.06, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan	15,000,000
	2.04.17.07, Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	30,000,000
	2.04.17.10, Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya	75,000,000
	2.04.17.11, Peningkatan Penyelenggaraan dan Fasilitasi Event-event Kepariwisataan	300,000,000
2.05	KELAUTAN DAN PERIKANAN	18,970,733,885
2.05.01	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	18,970,733,885
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,104,128,000
	Belanja Pegawai	
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	5,104,128,000
	BELANJA LANGSUNG	13,866,605,885
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	877,734,000
	x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,000,000
	x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	183,000,000
	x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	5,700,000
	x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	32,400,000
	x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	44,500,000
	x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor	57,000,000
	x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	60,000,000
	x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	20,000,000
	x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75,000,000
	x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20,000,000
	x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,500,000
	x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman	30,800,000
	x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	229,500,000
	x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung	98,334,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,626,000,000
	x.xx.02.03, Pembangunan gedung kantor	197,000,000
	x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000
	x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur	126,000,000

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
	x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	125,000,000
	x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	330,000,000
	x.xx.02.26, Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	20,000,000
	x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10,000,000
	x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3,000,000
	x.xx.02.42, Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	800,000,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	576,000,000
	x.xx.05.02, Sosialisasi peraturan perundang-undangan (perijinan perikanan dan kelautan)	35,000,000
	x.xx.05.04, Perencanaan Program dan Peningkatan Kualitas Layanan Data	145,000,000
	x.xx.05.12, Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi	100,000,000
	x.xx.05.14, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	46,000,000
	x.xx.05.17, Penyusunan D G S Perikanan dan Kelautan	250,000,000
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	36,151,800
	x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12,175,300
	x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran	4,135,500
	x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	9,541,000
	x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10,300,000
5	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	654,120,600
	2.05.15.01, Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	654,120,600
6	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	90,581,500
	2.05.16.01, Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan	90,581,500
7	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	128,155,000
	2.05.18.xx, Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam laut	75,000,000
	2.05.18.xx, Pelatihan Mitigasi Bencana Alam Laut dengan metode CCR	53,155,000
8	Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	203,893,450
	2.05.19.01, Penyuluhan budaya kelautan	203,893,450
9	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	3,099,435,300
	2.05.20.01, Pengembangan bibit ikan unggul	1,212,976,800
	2.05.20.03, Pembinaan dan pengembangan perikanan	1,886,458,500
10	Program pengembangan perikanan tangkap	5,419,595,200
	2.05.21.01, Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	880,903,200
	2.05.21.03, Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan	38,692,000
	2.05.21.06, Pengembangan pelabuhan perikanan	4,500,000,000
11	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	37,650,000
	2.05.22.03, Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan	37,650,000
12	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	774,509,535
	2.05.23.02, Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	774,509,535
13	Program pengembangan kawasan budidaya laut,air payau dan air tawar	342,779,500
	2.05.24.01, Kajian kawasan budidaya laut ,air payau dan air tawar	88,820,000
	2.05.24.02, Pengelolaan dan pengembangan BAL, BAP, BAT	253,959,500
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	764,938,637,185
	BELANJA LANGSUNG	623,423,011,724
	TOTAL BELANJA	1,388,361,648,909

**Rekapitulasi Usulan Belanja Tahun 2009
Per SKPD**

KD Rek	S K P D	USULAN (FORUM SKPD)		PERBAIKAN USULAN		PAGU INDIKATIF		JUMLAH USULAN (Rp)
		BTL	BL	BTL	BL	BTL	BL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.01	Dinas Pendidikan	42,876,444,000	154,753,924,800	42,876,444,000	105,500,000,000	43,722,444,000	105,500,000,000	149,222,444,000
1.01.02	Badan Perpustakaan Daerah	4,092,389,000	11,963,676,500	4,092,389,000	11,963,676,500	4,092,389,000	4,467,500,000	8,559,889,000
1.02.01	Dinas Kesehatan	17,827,244,000	47,043,902,000	17,827,244,000	46,881,902,000			0
1.02.02	Rs Grhasia	7,986,092,000	9,437,710,200	7,805,141,300	9,442,412,300			0
1.03.01	Dinas Kimpraswil	22,728,541,000	298,493,250,675					0
1.06.01	Bapeda	5,394,890,000	15,781,000,000					0
1.07.01	Dinas Perhubungan	8,061,474,000	97,732,823,195	8,061,474,000	73,159,712,350	8,061,474,000	66,898,300,000	74,959,774,000
1.08.02	Bapedalda	2,629,598,000	10,824,500,000	2,629,598,000	7,337,000,000	2,629,598,000	7,337,000,000	9,966,598,000
1.11.01	Kantor Pemberdayaan Perempuan	1,232,272,000	8,408,191,000	1,232,272,000	8,408,191,000			0
1.13.01	Dinas Sosial	12,586,815,000	45,374,110,385	12,586,815,000	38,641,072,665			0
1.14.01	Dinas Nakertrans	14,648,676,000	36,662,920,000	14,272,793,000	38,827,830,000	14,648,676,000	28,624,500,000	43,273,176,000
1.15.01	Dinas Perindagkoptamben	11,607,464,000	19,199,252,500	11,607,464,000	19,305,786,965	11,607,464,000	11,072,755,500	22,680,219,500
1.17.01	Dinas Kebudayaan	7,387,509,000	35,120,277,500	7,387,509,000	35,120,277,500	7,387,509,000	21,720,176,000	29,107,685,000
1.19.02	Dinas Trantib	8,222,237,000	40,411,294,000	10,070,689,928	14,741,294,000			0
1.20.01	DPRD Provinsi DIY	11,482,285,000	0	11,482,285,000	0	11,482,285,000	0	11,482,285,000
1.20.02	Ka. Daerah dan Waka. Daerah	1,296,185,000	0	1,289,972,560	0	1,296,147,000	0	1,296,147,000
1.20.03	Biro Umum	5,177,685,000	46,378,230,000	5,318,526,000	46,153,230,000	5,223,391,000	26,031,972,750	31,255,363,750
1.20.03	Biro Tata Pemerintahan	3,471,967,980	9,958,150,000	3,471,967,980	9,958,150,000	3,728,690,000	5,204,974,000	8,933,664,000
1.20.03	Biro Organisasi	1,600,000,000	4,040,675,000	1,600,000,000	4,040,675,000	1,672,459,000	2,947,000,000	4,619,459,000
1.20.03	Biro Kepegawaian	10,378,209,000	44,226,798,658	9,568,059,000	44,226,798,658	2,778,976,000	6,543,054,000	9,322,030,000
1.20.03	Biro Kerjasama	1,516,513,825	3,729,000,000	1,516,513,825	3,729,000,000	1,482,814,000	3,729,000,000	5,211,814,000
1.20.03	Biro Hukum	1,734,985,000	4,360,930,000	1,771,300,000	4,360,930,000	1,467,625,000	4,079,650,015	5,547,275,015
1.20.04	Sekretariat Dewan	4,371,770,215	28,937,698,460	4,371,770,215	28,937,698,465	4,066,874,000	22,232,159,988	26,299,033,988
1.20.05	BPKD	315,145,077,566	27,434,641,240	315,145,077,566	27,434,650,240	509,573,780,685	21,140,635,000	530,714,415,685
1.20.07	Bawasda	3,702,808,400	7,268,275,948	3,702,808,400	7,268,275,948	3,786,967,000	6,399,716,971	10,186,683,971
1.20.08	Kantor Perwakilan	1,159,762,000	4,216,058,812	1,159,762,000	4,216,058,812	1,185,440,500	3,480,356,325	4,665,796,825

KD Rek	S K P D	USULAN (FORUM SKPD)		PERBAIKAN USULAN		PAGU INDIKATIF		JUMLAH USULAN (Rp)
		BTL	BL	BTL	BL	BTL	BL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.21.01	Badan Diklat	2,898,001,000	4,366,559,870	2,898,001,000	4,366,559,870	2,898,001,000	4,140,626,790	7,038,627,790
1.24.01	Kantor Arsip	1,873,739,000	2,575,123,500	1,873,739,000	2,575,123,500	1,873,739,000	2,740,817,500	4,614,556,500
1.25.01	Badan Informasi Daerah	4,983,825,000	7,569,682,000	4,983,825,000	7,569,613,000	4,983,825,000	5,223,411,000	10,207,236,000
2.01.01	Dinas Pertanian	18,608,133,000	49,363,976,380	18,608,133,000	41,879,285,080			0
2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	13,244,124,000	29,949,268,030	13,244,124,000	31,627,765,226	13,244,124,000	16,685,000,000	29,929,124,000
2.04.01	Badan Pariwisata	3,238,327,000	12,679,260,000	3,238,327,000	12,679,260,000	3,238,327,000	5,084,500,000	8,322,827,000
2.05.01	Dinas Perikanan dan Kelautan	5,104,128,000	49,784,970,685	5,104,128,000	49,784,970,685	5,104,128,000	13,866,605,885	18,970,733,885
		578,269,170,986	1,168,046,131,338	550,798,152,774	740,137,199,764	671,237,147,185	395,149,711,724	1,066,386,858,909

BAB VIII

RINGKASAN PENDANAAN

Pelaksanaan RKPD Tahun 2009 didukung oleh dana yang berasal dari APBN dan APBD. Sumber dana APBN diluncurkan di daerah oleh Kementerian/ Departemen/ Lembaga dalam bentuk dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan yang dikoordinasikan lewat BAPPENAS dan Departemen Keuangan sesuai dengan prioritas program/kegiatan di dalam RKP.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber pendanaan daerah di dalam APBD terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri, pada Tahun Anggaran 2009 tetap mengandalkan penerimaan dari Pajak Daerah, kemudian disusul oleh Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dan terakhir dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Dengan mendasarkan perkembangan PAD yang meningkat setiap tahun, maka untuk APBD Tahun Anggaran 2009 target PAD juga mengalami kenaikan, akan tetapi kenaikan tersebut mempertimbangan prinsip tidak membebani masyarakat dan menciptakan keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dengan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2009 pendanaan Propinsi DIY direncanakan sebesar Rp.1.125.404.207.847,42 naik sebesar Rp 38.741.684.130,42 bila dibandingkan dengan target Pendapatan Tahun Anggaran 2008, atau naik sebesar 3,57%. Jumlah tersebut berasal dari PAD sebesar Rp 550.593.816.204,00. Dana Perimbangan sebesar Rp. 570.671.411.643,42 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 4.138.980.000,00. Secara rinci pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Target PAD pada tahun 2009 diperkirakan mengalami kenaikan, yaitu naik sebesar 10,50% dari target tahun 2008, atau naik sebesar Rp. 52.329.322.487,00 (dari Rp 498.264.493.717,00 menjadi Rp 550.593.816.204,00).

Dilihat dari sisi persentase kenaikannya, yang tertinggi adalah Retribusi Daerah (105,56%) kemudian diikuti Pajak Daerah (11,53%). Rincian target PAD tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Jenis penerimaan Pajak Daerah bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PABT-AP).

Pada Tahun Anggaran 2009 pajak daerah diperkirakan mengalami kenaikan, yaitu naik sebesar 11,53 % dari target Tahun Anggaran 2008 atau naik sebesar Rp 50.735.133.700 (dari Rp 440.061.334.700 menjadi Rp.490.796.468.400).

2. **Retribusi Daerah**

Jenis penerimaan Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pada Tahun Anggaran 2009 penerimaan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. 32.012.820.970 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 16.439.188.787 (105,56%) dari target Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 15.573.632.183.

3. **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ditargetkan naik 1,23% atau sebesar Rp.155.000.000 (dari Rp 12.613.526.834 menjadi Rp.12.768.526.834). Bagian penerimaan ini terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.

4. **Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan wadah dari semua penerimaan PAD yang tidak dapat masuk ke Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Jenis pendapatan ini terdiri dari Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah, Pendapatan Bunga dari Rekening Deposito. Lain-Lain PAD Yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 15.016.000.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 15.000.000.000 (-49,97 %) dari target Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.30.016.000.000,00 karena ada pergeseran rekening penerimaan bus patas ke rekening retribusi daerah.

B. DANA PERIMBANGAN

Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan.

DAU merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah, sedangkan DAK merupakan dana transfer yang bersifat sektoral, merupakan sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat.

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak OPDN dan PPh Pasal 21. Pada tahun 2009 Dana Perimbangan diperkirakan berkurang sebesar Rp.14.626.618.356,58 atau -2,50%, dari Rp.585.298.030.000,00 pada tahun 2008 menjadi Rp.570.671.411.643,42 pada tahun 2009.

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diperoleh dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri. Pada tahun 2009 Lain-lain Pendapatan

Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 4.138.980.000 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.038.980.000 (33,52%) dari target Tahun Anggaran 2008.

Penerimaan ini berasal dari Sumbangan dari Dealer Otomotif, Sumbangan dari Main Dealer, Sumbangan dari PT. Sari Husada dan Sumbangan dari PT. Jasa Raharja.

Secara rinci target pendapatan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut:

U R A I A N	Tahun 2008 (Rp)	Proyeksi Tahun 2009 (Rp)	Tambah (Kurang) (Rp)	Tambah (Kurang) (%)
PENDAPATAN DAERAH	1.086.662.523.717	1.125.404.207.847,42	38.741.684.130,42	3,57
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	498.264.493.717	550.593.816.204,00	52.329.322.487,00	10,50
Pajak Daerah	440.061.334.700	490.796.468.400,00	50.735.133.700,00	11,53
Retribusi Daerah	15.573.632.183	32.012.820.970,00	16.439.188.787,00	105,56
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	12.613.526.834	12.768.526.834,00	155.000.000,00	1,23
Lain-lain PAD yang Sah	30.016.000.000	15.016.000.000,00	(15.000.000.000,00)	(49,97)
Dana Perimbangan	585.298.030.000	570.671.411.643,42	(14.626.618.356,58)	(2,50)
Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	54.491.900.000	59.333.281.643,42	4.841.381.643,42	8,88
Dana Alokasi Umum	511.338.130.000	511.338.130.000,00	-	-
Dana Alokasi Khusus	19.468.000.000	-	(19.468.000.000,00)	
Lain2 Pendapatan Daerah Yang Sah	3.100.000.000	4.138.980.000,00	1.038.980.000,00	33,52
Hibah	3.100.000.000	4.138.980.000,00	1.038.980.000,00	33,52
Dana Darurat	-	-	-	
Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	

Peningkatan PAD dapat di tempuh dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan. Intensifikasi dikaitkan dengan usaha untuk melakukan pungutan yang intensif, yaitu secara ketat, giat dan teliti, sedangkan ekstensifikasi berhubungan dengan usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain :

1. Penelitian Potensi PAD;
2. Pembebasan BBN-KB II;
3. Pembebasan sanksi Administrasi berupa Denda dan Bunga;
4. Operasionalisasi Samsat Pembantu Bantul dan Sleman untuk mendekatkan pelayanan kepada Wajib Pajak;
5. Kegiatan Rasia Kendaraan Bermotor dalam rangka upaya penagihan terhadap tunggakan pajak.

6. Penagihan Pajak Daerah *door to door*.
7. Pelayanan Kesamsatan dengan mobil keliling.
8. Pelayanan kesamsatan pada even-even tertentu di kabupaten/kota seperti Pameran Pembangunan, Pasar Malam Sekaten, dan lain-lain.

BAB IX P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DIY Tahun 2009 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DIY Tahun 2009 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan ini, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi DIY Tahun 2009 agar mampu memberikan hasil pembangunan untuk dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan secara berkelanjutan antara semua pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001